

KILASAN KINERJA 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



#KE2JA
#NYATA

KILASAN KINERJA 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KILASAN KINERJA 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2016

KILASAN KINERJA 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelindung	Didik Suhardi didik.suhardi@kemdikbud.go.id
Penanggung Jawab	Ilza mayuni ilza.mayuni@kemdikbud.go.id
Pengarah Materi	Azis Purwanto azis.purwanto@kemdikbud.go.id Kurniawan kurniawan@kemdikbud.go.id Mochammad Abduh moch.abduh@kemdikbud.go.id Rusprita Putri Utami rusprita.utami@kemdikbud.go.id Ade Chandra ade.chandra01@kemdikbud.go.id
Penulis	Ade Chandra ade.chandra01@kemdikbud.go.id Alsha Kania alsha.kania07@kemdikbud.go.id Ashma Nur Afifah ashma.afifah01@kemdikbud.go.id Azhari Dasman Darnis azhari.dasman@kemdikbud.go.id Benazir Syahril Bena.syahril@gmail.com Dwi Yani Yuniawati dwi.yani@kemdikbud.go.id Farraas Muhdiar farraas.muhiar01@kemdikbud.go.id Fildzah Ikramina fib31.anas@gmail.com Indra Setiawan indra.buset@kemdikbud.go.id Moch Hasan mochhasan01@kemdikbud.go.id Pravita Kusumaningtyas pravita.kusumaningtyas01@kemdikbud.go.id Putri Pandora putri.pandora@kemdikbud.go.id Tsalitsa Haura tsalitsa.haura01@kemdikbud.go.id
Editor	Rachmat Cahyono rachmathc@gmail.com
Editor Foto	Azis Purwanto azis.purwanto@kemdikbud.go.id
Desain Sampul dan Tata Letak	Indro M.P. indromp@gmail.com Zaitun Y.A. Kherid eza_art@yahoo.com
Sekretariat	Ana Arham ana.arham07@kemdikbud.go.id Marista Sinaga marista.sinaga@kemdikbud.go.id
Keuangan	Rusprita Putri Utami rusprita.utami@kemdikbud.go.id Muhammad Sopian
Diterbitkan Oleh	Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270
	KILASAN KINERJA 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	ISBN 978-602-73386-2-3
Takrif	Sila hubungi surat elektronik untuk mendiskusikan isi buku ini lebih lanjut

Sebuah Kilasan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Buku yang ada di hadapan kita ini adalah sebuah kilasan atas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama periode November 2015 hingga Oktober 2016. Tentu, buku ini tidak bisa menjabarkan semua hal, namun hanya kilasan program-program prioritas kementerian ini. Keterlibatan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan keharusan untuk membangun pendidikan dan kebudayaan untuk memastikan terwujudnya **Generasi Indonesia Emas 2045**.

Semoga buku ini bermanfaat, dapat menghadirkan nuansa baru dalam penyediaan informasi, sekaligus menjadi bahan refleksi atas perjalanan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia tercinta. Banyak sudah yang dilaksanakan, tetapi lebih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Akhir kata, selamat membaca.

Wassalam,

Jakarta, Oktober 2016

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sebuah Kilasan **v**
Daftar Isi **vi**
Pendahuluan **2**

Daftar Isi

REVOLUSI MENTAL

Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Generasi Emas Beretika **6**



Revitalisasi Pendidikan Kejuruan **10**



Wajib Belajar 12 Tahun Persiapkan Generasi Masa Depan **15**



Implementasi Kurikulum 2013 **21**

Ujian Nasional: Kejuruan Akarnya, Kualita Buahnya **24**



Lewat INAP, Indonesia Kejar Standar Kualitas Pendidikan Internasional **27**

Guru Pembelajar, Guru Berprestasi **32**

Guru Mulia Karena Karya **35**

Sepuluh Hari Bersama Maestro **37**



Membangun Kebudayaan,
Menguatkan Karakter Bangsa **40**



Pengenalan Lingkungan Sekolah **45**

Semarak Gerakan
Hari Pertama Sekolah **47**



Gerakan Seniman Masuk Sekolah:
Gempita Siswa Mempelajari Seni **50**



Menggapai Mimpi
Bersama Mentor **53**

Gerakan Literasi Nasional
Menuju Masyarakat Sadar Literasi **57**

Pendidikan Keluarga
Sebagai Gerakan Bersama **62**

Mengukir Prestasi,
Membangun Karakter,
dan Merekatkan NKIR **65**

Reformasi Birokrasi Internal (RBI):
Menciptakan Birokrasi Efektif
dan Terpercaya **69**

Pengembangan Tata Kelola
Kemendikbud
Menjawab Tantangan Zaman **71**

Serunya Rembuk Pendidikan
dan Kebudayaan 2016 **75**



Penguatan PAUD: Titik Awal
Membangun Generasi Emas **79**

Tunas Integritas
sebagai Gerakan Revolusi Mental **82**

Transaksi Nontunai
dan Belanja Daring:
Transparan, Aman, dan Nyaman **85**

MEMBANGUN DARI PINGGIRAN

Percepatan Kemajuan Pendidikan di Papua dan Papua Barat **90**



Membangun Asa Lewat Sekolah Garis Depan **98**



Revitalisasi LPMP: Tangan Kanan Kemendikbud di Daerah **103**

Guru Garis Depan untuk Pendidikan di Daerah Khusus **106**



Merawat Hubungan Pusat dan Daerah melalui Dialog dan Kerja Nyata **109**

NEGARA HADIR

Neraca Pendidikan Daerah: Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah **114**

Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan: Potret Guru dan Tenaga Kependidikan Daerah **118**

Pengayaan Lema Bahasa Indonesia **120**

Memenuhi Amanat Konstitusi Lewat Program Indonesia Pintar **124**



Pembangunan Infrastruktur untuk Pendidikan yang Lebih Baik **127**

Golden Record: Dasar Penguatan Tata Kelola Rehab Infrastruktur Sekolah **131**

Inovasi Teknologi dalam Pendidikan **134**



Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Program Beasiswa **139**

Revitalisasi Museum: Edukatif, Rekreatif, dan Komunikatif **142**



Galeri Nasional Indonesia, “Rumah Besar” Perupa Indonesia **148**

Promosi dan Diplomasi Budaya dan Bahasa Indonesia **152**

Rumah Peradaban: Mengungkap, Memaknai, Mencintai **154**

Kemendikbud Dukung Perfilman Indonesia **157**

World Culture Forum 2016 sebagai Gerakan Kemanusiaan **160**

Merayakan Bulan Pendidikan dan Kebudayaan 2016 **166**



DAPODIK: Satu Nusa Satu Data **170**



Regulasi untuk Pendidikan yang Lebih Baik **174**

Unit Layanan Terpadu: Melayani Sepenuh Hati **178**



Daftar Akronim **182**

Kredit Foto **184**

Terima Kasih **186**

Di balik layar **188**



Pendahuluan



Seperti tahun sebelumnya, Kilasan Kinerja Kemendikbud periode November 2015–Oktober 2016 ini disajikan dalam format yang lebih cair, tetapi tetap berpegang pada akurasi.

Pada periode ini, tepatnya pada 27 Juli 2016, terjadi pergantian pucuk pimpinan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Anies Rasyid Baswedan, Ph.D kepada Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP. Pada saat serah terima, Mendikbud Muhadjir berkomitmen untuk meneruskan praktik baik yang sudah dimulai pada masa Mendikbud Anies Baswedan dan akan melakukan percepatan pelaksanaan program, terutama program-program prioritas kementerian.

Buku Kilasan Kinerja Tahun Kedua ini dibagi dalam tiga tema yang disarikan dari Nawacita, yaitu *Revolusi Mental*, *Membangun dari Pinggiran*, dan *Negara Hadir*. Semua tema bermuara pada penjabaran implementasi Nawacita. Revolusi Mental erat kaitannya dengan karakter, perubahan perilaku, dan sikap dari para pelaku pendidikan. Membangun dari Pinggiran direalisasikan ke dalam program-program aksi yang menarik pusat gravitasi pembangunan dari kota ke daerah-daerah garis depan. Negara Hadir merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan bagi masyarakat dan mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang padu.

Setidaknya ada empat program prioritas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti Mendikbud, yaitu penguatan pendidikan karakter, revitalisasi pendidikan kejuruan, Program Indonesia Pintar (PIP), dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah khusus 3T (terdepan, tertinggal, dan terpencil).

Penguatan pendidikan karakter (PPK) merupakan wujud dari program aksi revolusi mental yang terus digiatkan pada ekosistem pendidikan. PPK tidak hanya melibatkan guru dan kepala sekolah, tetapi juga menguatkan peran orang tua dan masyarakat dalam membantu sekolah menjadi rumah kedua dan tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.

Revitalisasi pendidikan kejuruan merupakan upaya untuk meningkatkan relevansi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia industri. Selain menysasar SMK, program ini juga menyentuh program kesetaraan kejuruan melalui Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Keduanya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan siap beradaptasi dengan dunia kerja.

PIP bertujuan untuk memastikan bahwa ketiadaan biaya tidak boleh lagi menjadi alasan anak putus sekolah. Selain menysasar anak-anak kurang beruntung yang berada di bangku sekolah, PIP juga diberikan kepada anak usia sekolah yang putus sekolah. Diharapkan, mereka bisa kembali bersekolah, baik pada satuan pendidikan formal maupun satuan pendidikan nonformal.

Sedangkan program pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T merupakan pengejawantahan dari program “Membangun dari Pinggiran” yang terdapat dalam Nawacita. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan Indonesia yang berkeadilan. ■

Revolusi Mental

Salah satu jalan mewujudkan revolusi mental adalah melalui penanaman nilai-nilai di lingkungan sekolah yang menyenangkan untuk para siswa





■ Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Generasi Emas Beretika



Penguatan karakter melalui kegiatan Pramuka

Tahun-tahun keemasan Indonesia sudah di depan mata. Indonesia semakin terpacu untuk berbenah dan menyiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21.

Salah satunya dengan mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk generasi mendatang. Generasi yang mampu berkompetisi sekaligus berkarakter. Generasi yang membangun negeri dengan berpegang teguh pada landasan moral dan etika. Hal inilah yang mendasari Kemendikbud untuk

segera mencanangkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Penguatan karakter bangsa merupakan salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan.

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan utama dunia pendidikan. Karakter yang terbentuk pada masyarakat akan mencerminkan pribadi bangsa Indonesia seutuhnya. Merujuk pada pandangan Ki Hajar Dewantara,

pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek: olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga. Berlandaskan keempat aspek pembentukan karakter tersebut, serta diintegrasikan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam GNRM, Kemendikbud fokus pada penguatan lima nilai utama dalam implementasi PPK, yaitu **religius, nasionalis, gotong royong, mandiri** dan **integritas**.

PPK sejatinya bukanlah kebijakan baru melainkan keberlanjutan dan revitalisasi dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang telah dimulai sejak tahun 2010. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga/satuan pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang akan menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, maupun praktik. Targetnya, pendidikan karakter dapat mengubah perilaku,

cara berpikir, dan cara bertindak seluruh komponen bangsa menjadi lebih baik.

PPK juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi berbagai persoalan yang mengancam keutuhan bangsa di masa mendatang. Persoalan-persoalan besar seperti maraknya kelompok radikalisme-terorisme yang mengancam kebhinnekaan dan keutuhan bangsa, gerakan separatis, sampai pada perilaku kekerasan dalam lingkungan pendidikan, kejahatan seksual, tawuran pelajar, pergaulan bebas, dan narkoba.

Selain persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa, Indonesia juga mendapatkan tantangan dalam menghadapi persaingan di pentas global. Rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia mengancam daya saing bangsa. Berbagai alasan ini menjadi dasar

kuat bagi Kemendikbud untuk kembali memperkuat jati diri dan identitas bangsa. Caranya, melalui gerakan nasional pendidikan dengan meluncurkan program nasional PPK yang akan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA/SMK.

Satuan pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem, infrastruktur, dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui sistem pendidikan, PPK diharapkan dapat terjadi secara masif, kontekstual, dan efektif.

Sudah banyak praktik baik pendidikan karakter yang dikembangkan sekolah. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter

Simulasi Model Implementasi PPK

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
Nilai Karakter**	Penguatan Nilai Utama: Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, Integritas						
Waktu Belajar*	<p>Kegiatan Pembiasaan: Memulai hari dengan Upacara Bendera (Senin), Apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, dan berdoa bersama. Membaca buku non-pelajaran tentang PBP, cerita rakyat, 15 menit sebelum memulai pembelajaran</p> <p>Kegiatan Intra-kurikuler: Kegiatan Belajar-Mengajar</p> <p>Kegiatan Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru/pelatih melibatkan orang tua dan masyarakat: Kegiatan Keagamaan, Pramuka, PMR, Paskibra, Kesenian, Bahasa dan Sastra, KIR, Jurnalistik, Olahraga, dsb.</p> <p>Kegiatan Pembiasaan: Sebelum menutup hari Siswa melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah dan berdoa bersama</p>						

Kegiatan PPK bersama orang tua:
Interaksi dengan orang tua dan lingkungan/ sesama

* Durasi waktu tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi sekolah

** Nilai-nilai karakter disesuaikan dengan GNRM, kreativitas sekolah, dan kearifan lokal

berjalan berkesinambungan. Pendidikan karakter membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah yang lebih konkret agar penyemaian dan pembudayaan nilai-nilai utama pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan komponen penerapan PPK adalah menghargai kearifan lokal dan memberdayakan keunggulan lokal. Keterlibatan budayawan dan tokoh masyarakat sangat diharapkan sebagai wujud keterlibatan dan partisipasi masyarakat. “Jiwa gotong royong di lingkungan sekolah harus lebih ditingkatkan, sehingga sekolah dapat tumbuh dengan keunggulan masing-masing,” kata Mendikbud.

Dalam proses belajar mengajar, lanjut Mendikbud, sekolah dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Melalui pemanfaatan dan pemberdayaan kembali sanggar dan taman budaya, sekolah dapat memberi warna budaya dalam proses pendidikan.

“Saya berharap sekolah yang berkarakter memiliki ciri budaya yang kuat. Kepala sekolah dan guru dapat mengambil peran dalam pelaksanaannya, serta komite sekolah dapat bergotong royong dalam membantu keberhasilan proses belajar mengajar,” ujar Mendikbud.

Persiapan matang

Dalam rangka mengkaji persiapan serta pelaksanaan PPK di sekolah, Mendikbud membentuk Tim PPK yang diketuai Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter Arie Budhiman.

Keanggotaan Tim PPK merupakan kolaborasi antara staf internal Kemendikbud dengan para pakar dan pegiat pendidikan. Sejauh ini, Tim PPK telah bekerja sama menyiapkan empat dokumen yang disusun sesederhana mungkin agar mudah dipahami sekolah, sehingga dapat menjadi panduan dalam menyelenggarakan program PPK. Dokumen tersebut berupa Naskah Konsep PPK, Panduan Penyelenggaraan PPK, Pedoman Monitoring dan Evaluasi, serta Modul Pelatihan Pengembangan SDM. Tim PPK juga berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan diskusi kelompok terpusat yang dilakukan secara berkala guna mendukung proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen PPK.

Kemendikbud mengharapkan pelibatan publik dalam proses penyusunan konsep akan membuat PPK menjadi program yang relevan dan dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat hal tersebut, Kemendikbud juga melakukan berbagai tahap kajian pengembangan konsep PPK. Antara lain, dengan menggelar pertemuan bersama dua puluh sekolah di wilayah Jabodetabek yang telah mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar. Setiap sekolah dapat berbagi pengalaman melalui praktik baik yang terjadi di sekolah masing-masing. Dokumentasi praktik baik tersebut kemudian menjadi masukan bagi Kemendikbud dalam menyempurnakan konsep PPK.

PPK diharapkan juga dapat mendorong terciptanya suasana belajar-mengajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Sekolah benar-benar menjadi rumah kedua bagi para siswa. Dengan sekolah sebagai rumah kedua, siswa diharapkan dapat mengisi waktunya

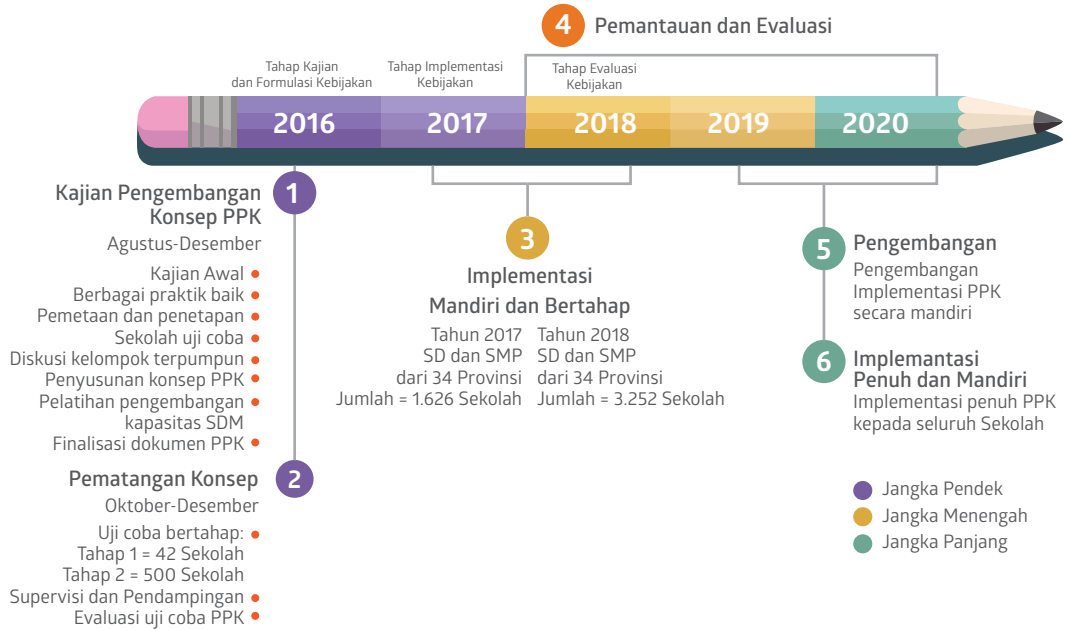
dengan berbagai kegiatan positif dalam bimbingan dan pengawasan sekolah.

Program PPK terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Jam pelajaran tambahan dalam rangka penguatan pendidikan karakter juga terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar sekolah selama kegiatan tersebut masih menjadi tanggung jawab sekolah, serta telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan kurikulum dengan berjalannya program PPK. Implementasi PPK justru diharapkan dapat lebih mengefektifkan kurikulum yang saat ini berlaku.

Dalam implementasi PPK, sarana dan prasarana yang digunakan berbasis pada apa yang dimiliki sekolah. Sekolah juga dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat, komunitas, maupun dunia usaha/industri setempat terkait kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Ketentuan jam mengajar pun akan disesuaikan, terutama yang berkaitan dengan ekuivalensi jam mengajar bagi guru yang aktif pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam penyelenggaraan PPK.

Kemendikbud telah merintis persiapan guru untuk dapat mengajar dengan muatan pendidikan karakter dan mengupayakan pelaksanaannya secara berkesinambungan. Kemendikbud berharap pengembangan guru melalui program PPK dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan improvisasi guru dalam mengajar. Seyogyanya guru mencintai

Peta Jalan Implementasi PPK



profesinya, sehingga ia dapat menjadi pengajar dan pendidik sekaligus yang memahami kebutuhan siswanya.

Implementasi Bertahap

Implementasi PPK dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas satuan pendidikan. Untuk tahun 2016, Kemendikbud memilih 542 sekolah sebagai sekolah uji coba pelaksanaan PPK. Pelaksanaan uji coba dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 21 SD dan 21 SMP pada Oktober 2016, serta 250 SD dan 250 SMP pada November 2016 untuk tahap kedua. Sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah uji coba menggambarkan keterwakilan dari sisi provinsi di Indonesia, daerah pedesaan dan perkotaan, serta sekolah negeri dan swasta.

Pada tahun 2017, ada 1.626 sekolah (SD dan SMP) yang ditunjuk Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Menyusul kemudian 3.252 sekolah (SD dan SMP) pada tahun 2018, sehingga menjelang tahun 2020 program PPK telah diterapkan secara penuh dan mandiri di seluruh Indonesia. Keberhasilan satuan pendidikan yang menjalankan PPK diharapkan dapat menjadi teladan/inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya.

Dalam rangka persiapan implementasi PPK tahap awal, pada 27-30 September 2016, Kemendikbud mengundang empat unsur pendidikan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan PPK. Keempat unsur tersebut adalah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Kegiatan ini dibuka Mendikbud serta dihadiri

Dinas Pendidikan dari kabupaten sekolah uji coba. Kemendikbud mengharapkan kegiatan ini juga dapat mendorong keempat unsur pendidikan bisa bekerja sama dalam mengimplementasikan PPK di sekolah.

Bangsa besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat. Karakter kuat hanya dapat tumbuh dan berkembang lewat proses pendidikan yang menyenangkan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang teguh memegang nilai-nilai dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak Indonesia harus memiliki karakter kokoh agar dapat menjawab berbagai tantangan abad ke-21 ini. Lewat kerja sama seluruh pihak, program PPK diharapkan dapat mewujudkan generasi emas beretika. ■

■ Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program revitalisasi pendidikan kejuruan dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas di tahun 2016.

Berbagai persiapan baik infrastruktur, kurikulum, maupun tenaga pengajar telah disiapkan oleh Kemendikbud pada tahun ini.

Revitalisasi pendidikan kejuruan sejalan dengan kebutuhan proyeksi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2030, kekuatan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan menempati peringkat ketujuh dunia setelah Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Ini merupakan lompatan yang sangat besar dari posisinya di peringkat 16 sekarang ini. Jumlah penduduk yang sekarang 257 juta diproyeksikan menjadi 296 juta pada tahun 2030. Jumlah warga kelas menengah ke atas tumbuh

tiga kali lipat dari 45 juta orang saat ini menjadi 135 juta orang.

Dalam jangka waktu 15 tahun ke depan, akan terjadi lonjakan kebutuhan tenaga kerja terampil dari 55 juta pada saat ini menjadi 113 juta pada tahun 2030. Berbeda dengan negara lain yang mayoritas penduduknya berusia lanjut (*aging society*), Indonesia saat ini hingga 2040 justru dihuni penduduk berusia produktif (15-64 tahun) yang jumlahnya mencapai 67% dari total jumlah penduduk. Momentum adanya jumlah penduduk usia muda yang besar ini merupakan potensi kekayaan (*asset*) sekaligus tantangan. Harus ada upaya



menyeluruh untuk menyiapkan kebutuhan 113 juta tenaga kerja terdidik yang kompetitif pada tahun 2030 agar benar-benar menjadi “bonus demografi”. Belum lagi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengharuskan warga negara Indonesia siap bersaing dengan warga negara lain.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo dengan Nawacita kelima (meningkatkan kualitas hidup



manusia Indonesia) dan keenam (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional), memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia siap menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja pada tahun 2030.

Perjuangan revitalisasi pendidikan kejuruan dimulai dari penyusunan naskah Instruksi Presiden (Inpres) tentang Revitalisasi SMK sejak tahun 2015.

Hasilnya terbit Inpres Nomor 9 Tahun 2016 yang telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Bulan September 2016. Inpres Nomor 9 tahun 2016 ini mengatur peran masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dalam menyiapkan revitalisasi pendidikan SMK.

Sejalan Inpres tersebut, Kemendikbud telah membuat beberapa terobosan di tahun 2016. Kemendikbud memberikan

bantuan infrastruktur dan pengembangan kelembagaan terhadap 142 SMK yang bergerak di bidang pertanian (agrobisnis dan agroteknologi), maritim/kelautan, dan pariwisata. Kemendikbud juga menargetkan mengirim 45 guru ke Jerman untuk mengikuti pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang ada di Jerman dan mendatangkan 30 tenaga ahli (*senior expert*) Jerman ke SMK. Agar sejalan konsep



link and match dengan DU/DI, Kemendikbud juga sedang menyiapkan restrukturisasi kompetensi keahlian di SMK.

Restrukturisasi ini erat kaitannya dengan kebutuhan pasar kerja (DU/DI) atau perubahan pendekatan dari *supply-driven* ke *demand-driven*. Hal ini diawali dengan keterlibatan aktif DU/DI dalam penyusunan kurikulum. Restrukturisasi ini menghasilkan 46 program keahlian dan 142 Kompetensi Keahlian (yang sebelumnya berjumlah 128 kompetensi). Pendekatan *Demand-driven* juga menghasilkan pengembangan SMK 4 tahun yang tentu saja memiliki nama kompetensi dan Standar Kompetensi Lulusan yang berbeda dengan SMK 3 tahun. Siswa yang belajar di SMK 4 tahun akan mendapat kesempatan yang lebih

Empat SMK prioritas Presiden Joko Widodo: kelautan, pertanian, pariwisata dan industri kreatif

lama dalam praktik kerja di sekolah dan industri serta meraih level kompetensi akan melebihi siswa yang belajar di SMK 3 tahun.

Proses membentuk lulusan SMK yang dibutuhkan di dunia kerja juga berdasarkan penguasaan atas suatu standar kompetensi kerja yang dikenal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Berdasarkan standar kompetensi tersebut, dirumuskan suatu sistem pengujian dan sertifikasi. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum semua program keahlian di SMK telah tersedia SKKNI-nya.

Sementara beberapa SKKNI yang sudah ada belum direfleksikan dalam kurikulum SMK. Pada tahun 2016 ini, Kemendikbud beniat menyelesaikan seluruh SKKNI yang berhubungan dengan jurusan di SMK dengan melibatkan Kementerian terkait, asosiasi profesi dan DU/DI dalam penyusunannya.

Dalam rangka membekali lulusan SMK dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia usaha/dunia industri, sejak tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Rencana Integrasi Pendidikan Kejuruan di Kemendikbud

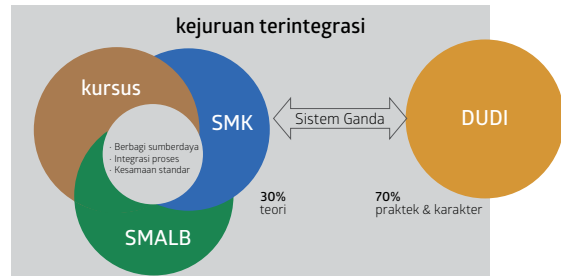
SEKARANG
supply-driven
sekolah sebagai penghela



- Pendidikan Kejuruan hanya merujuk pada SMK saja
- Penyelenggaraan SMK, Kursus, dan SMA-LB berjalan sendiri-sendiri
- Lemah *link and match* dengan pasar kerja (DUDI)



KE DEPAN
demand-driven
industri sebagai penghela



- Penyelenggaraan SMK, Kursus, dan SMA-LB secara terintegrasi
- Kuat *link and match* dengan DUDI (kurikulum, praktek, pengujian, sertifikasi) -> Sistem Ganda
- **Keuntungan DUDI:** mendapatkan tenaga kerja terbaik sesuai kebutuhan, lebih loyal, lebih efisien (tidak perlu *training* lagi)
- **Keuntungan Siswa:** mendapat kemahiran kerja mutakhir (*occupational proficiency*), pendidikan karakter (etos budaya kerja), sertifikat kompetensi
- **Keuntungan Sekolah:** efisiensi sumberdaya (guru/instruktur, alat/bahan, bengkel praktik)

(BSNP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP- P₁). Adapun lingkup kegiatan pengembangan SMK menjadi LSP-P₁ terdiri dari: (i) fasilitasi persiapan dan pelatihan asesor kompetensi; (ii) penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK); (iii) penyiapan materi uji kompetensi; serta (iv) pelatihan penyusunan dan penerapan dokumen mutu. Nantinya setiap calon lulusan SMK akan mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di LSP-P₁ di sekolah masing-masing atau pada LSP-P₁ SMK terdekat. Sampai dengan September 2016, sudah terbentuk 291 SMK yang sudah menjadi LSP-P₁.

Penyiapan lulusan siap kerja membutuhkan tenaga

pengajar berkualitas. Namun pada kenyataannya, hanya 30% guru produktif SMK yang mengajar sesuai kompetensinya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kemendikbud berencana mengalihfungsikan 15.000 guru SMK menjadi guru produktif. Alih fungsi ini akan berfokus pada empat program keahlian prioritas, yakni pertanian/ perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Lima belas ribu guru ini akan menjalani program pelatihan dan sertifikasi sehingga ditargetkan pada pertengahan 2017, guru-guru ini sudah bisa mengajar sesuai dengan program keahliannya.

Proses *Link and match* dengan Kementerian/Lembaga dan DUDI, juga semakin erat pada tahun 2016. Sudah ada enam kementerian/lembaga dan

DU/DI yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendikbud pada tahun ini. Salah satu DU/DI yang menandatangani MoU adalah PT. Trans Retail Indonesia. MoU ini berisikan komitmen keterlibatan PT. Trans Retail dalam mengembangkan SMK terkait dengan lingkup kerja sama untuk pengembangan kurikulum, penguatan proses pembelajaran, penyediaan tempat PKL, penyediaan instruktur, pengembangan peserta didik, dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja.

“MoU dengan PT. Trans Retail ini bisa menjadi awal keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Pendidikan. Semoga ke depannya makin banyak DU/DI yang peduli terhadap penyiapan tenaga kerja lewat pendidikan,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy.

Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan dapat menjadi “penggerak dan pelaku” bagi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian dan meraih kekuatan ekonomi dunia

SMK rujukan

Dalam rangka meningkatkan SMK berkualitas, Kemendikbud telah mengembangkan 350 SMK Rujukan pada tahun 2016. SMK Rujukan ini merupakan SMK unggulan di daerahnya dan memiliki siswa berjumlah lebih dari 1000 siswa. SMK Rujukan ini bertujuan sebagai model dan membina SMK Reguler (yang jumlah siswanya sebanyak 600-1000 siswa), SMK Aliansi (jumlah siswanya sebanyak 200-600 orang) dan SMK Konsorsium (jumlah siswanya kurang dari 200 siswa) yang berada di sekitarnya.

Pengembangan SMK bisa dilakukan dengan adanya pelatihan guru bersama, diskusi tentang model pengajaran dan juga *resource sharing* bersama. SMK Rujukan ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan Kemendikbud dalam memajukan SMK di daerah. Jumlah SMK Rujukan ini akan terus meningkat dan ditargetkan mencapai 1.650 SMK di akhir tahun 2019.

Selain pada Direktorat Pembinaan SMK, Program

Kejuruan juga terdapat di Direktorat Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Dengan demikian, revitalisasi Pendidikan Kejuruan tidak hanya berfokus pada SMK, tetapi juga pada lembaga kursus dan pelatihan serta Sekolah Luar Biasa (SLB). Direktorat LKP sendiri membina 19.699 lembaga kursus dan pelatihan. Sedangkan Direktorat PKLK membina 44 SLB yang memiliki program kemandirian bagi siswanya. Salah satu pekerjaan besar Direktorat LKP adalah akreditasi lembaga Kursus dan Pelatihan.

Selain itu, Direktorat LKP juga sedang mengupayakan beberapa program jurusan yang relevan bagi peserta didiknya. Tidak kalah dengan Direktorat LKP, Direktorat PKLK juga makin menyiapkan peserta didiknya untuk mandiri di tengah segala kekhususan yang mereka alami. Direktorat PKLK sendiri telah bekerja sama dengan PT Carrefour Indonesia dalam menerima anak magang dari SLB untuk beberapa pekerjaan tertentu.

Hasilnya tidak kalah dengan anak yang bersekolah di sekolah umum.

“Disabilitas bukanlah halangan bagi siswa SMALB untuk tetap berkarya. Hal ini membuktikan bahwa siswa SMALB juga mampu menjadi generasi emas. Kami juga sedang menyiapkan pengembangan program kemandirian lain agar siswa kami tidak kalah bersaing dengan siswa lainnya,” ujar Renani, Direktur Pembinaan PKLK.

Pada tahun 2016, Kemendikbud berencana mengintegrasikan ketiga satuan pendidikan ini dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan. Integrasi ini diharapkan bisa terjadi dalam hal *resource sharing* (berbagi sumber daya sarana-prasarana, guru, dan lainnya), proses, dan adanya kesamaan standar (pembelajaran dan kompetensi lulusan). Proses integrasi ini juga melibatkan DU/DI sebagai penghelela dengan komposisi teori berbanding praktek dan karakter sebanyak 30:70. Integrasi ini diharapkan bisa menyiapkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja.

Diharapkan proses revitalisasi pendidikan kejuruan mampu menyiapkan lulusan SMK, Kursus dan Pelatihan, serta SLB yang siap menghadapi persaingan dan menjawab kebutuhan dunia kerja. Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan dapat menjadi “penggerak dan pelaku” bagi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian dan meraih kekuatan ekonomi dunia. ■

■ Wajib Belajar 12 Tahun Persiapkan Generasi Masa Depan



Wajib Belajar 12 Tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi masa depan.

Mereka diharapkan mampu mengembangkan potensi individualnya, berkontribusi bagi masyarakat, sekaligus siap menghadapi persaingan global.

Wajib Belajar 12 Tahun berbeda dengan program Wajib Belajar Enam dan Sembilan Tahun yang fokus pada peningkatan akses pendidikan. Wajib Belajar 12 Tahun juga menasar peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah

sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam semesta pendidikan nasional.

Pendidikan dasar adalah pondasi bagi pendidikan lanjutan. Untuk itu, pada tahun 1984 Indonesia mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang mewajibkan seluruh anak Indonesia menyelesaikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). Sepuluh tahun setelah

pencanangan Program ini, partisipasi siswa SD/MI meningkat dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 111,7%. Pada tahun 1994, pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Pada tahun 2006, tekad tersebut diperkuat dengan

penerbitan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Pelaksanaan Program Wajardikdas Sembilan Tahun dinilai berhasil. Pada tahun 2014, APK SD/MI telah mencapai 109%, sedangkan SMP/MTs telah mencapai 100,5%. Keberhasilan Program Wajardikdas Sembilan tahun dapat dilihat dari hasil Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan APK SMP/MTs. APM SD/MI meningkat antara periode tahun 2004-2007, walaupun tidak terlalu signifikan. Sedangkan, APK SMP/MTs mengalami peningkatan signifikan pada periode tahun 2005-2007.

Sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, Pemerintah mendorong pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun sejak Juni 2015 untuk memastikan ketuntasan pendidikan dasar diikuti dengan ketuntasan pendidikan menengah.

Kondisi yang ingin dicapai

Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun akan berdampak pada meningkatnya partisipasi pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah menjaga keberlanjutan agar peserta didik dapat menyelesaikan Wajar sampai 12 tahun. Pelaksanaannya diharapkan juga merata sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan kriteria tersebut, diharapkan Wajar 12 tahun bisa meningkatkan APK Sekolah Dasar sebesar 114,09%, jenjang SMP mencapai 106,94%, dan jenjang sekolah menengah sampai dengan 91,63% (lihat grafik di bawah).

Pada 2019, jumlah siswa yang diperkirakan perlu mendapat layanan pendidikan untuk jenjang

Sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, Pemerintah mendorong pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun sejak Juni 2015 untuk memastikan ketuntasan pendidikan dasar diikuti dengan ketuntasan pendidikan menengah

SD/MI/Paket A sebanyak 32.333.561 siswa. Untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 14.543.727 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 12.276.740 siswa.

Komponen pendidikan lain juga harus dipenuhi dalam meningkatkan partisipasi anak ke sekolah. Komponen yang pertama adalah guru. Untuk bisa meraih APK pendidikan menengah sebesar 91,63% pada tahun 2019, diperkirakan membutuhkan guru sebanyak 3.748.153 orang dengan rincian per jenjang pendidikan seperti bagan di bawah.

Komponen kedua adalah sarana pembelajaran seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan sarana prasarana lainnya. Untuk melayani target jumlah siswa pada tahun 2019, dibutuhkan sebanyak 268.192 sekolah. Rinciannya, sebanyak 174.732 sekolah untuk jenjang SD/MI, 57.419 sekolah untuk jenjang SMP/MTS, dan 36.761 sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA.

Selain sekolah, kebutuhan ruang kelas juga menjadi penting untuk bisa menampung anak-anak. Pada 2019, kebutuhan ruang kelas sebanyak 1.978.041 ruang dengan detail 1.162.153 ruang kelas untuk jenjang SD/MI, 442.163 ruang kelas untuk jenjang SMP/MTS, dan 373.725 ruang kelas pada jenjang SMA/SMK/MA.

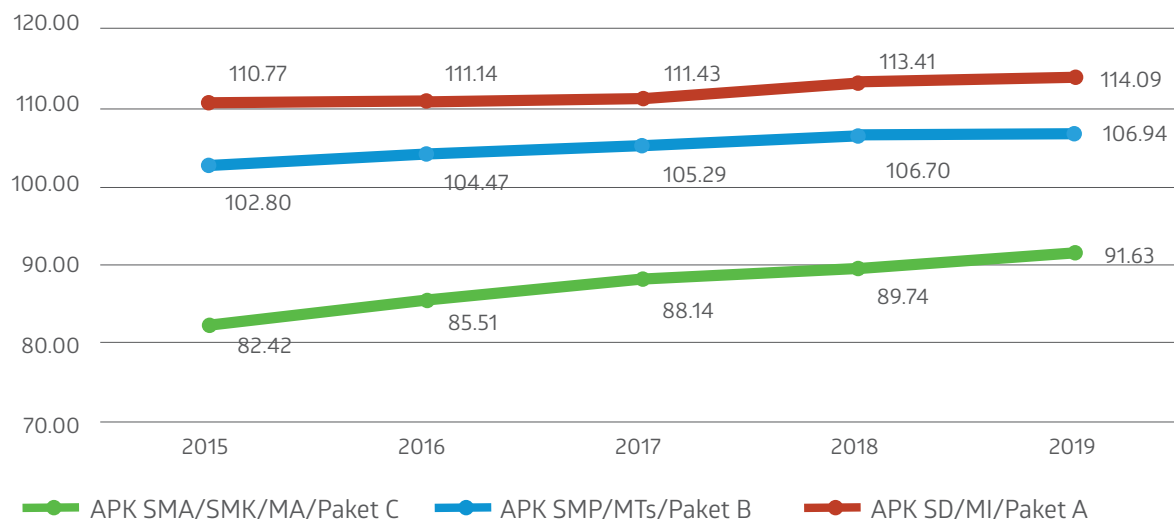
Untuk menyukseskan pelaksanaan Wajar 12 Tahun, Kemendikbud harus mempersiapkan program aksi berikut.

(1) Peningkatan Daya Tampung Sekolah

Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2014, terdapat 274 Kecamatan yang belum memiliki SMP. Provinsi dengan jumlah kecamatan yang belum memiliki SMP terbesar adalah Papua dengan 237 kecamatan atau 44,89% dari total kecamatan yang ada di Papua. Namun demikian, Pembangunan USB di provinsi Papua ini perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah peserta didik dan guru, serta ketersediaan sumber daya lainnya. Untuk itu, langkah yang dapat ditempuh adalah pembangunan SD-SMP Satu Atap.

Untuk jenjang Sekolah Menengah (SM), terdapat 815 Kecamatan yang belum memiliki SM. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013, prioritas pembangunan SM dilaksanakan pada kecamatan-kecamatan pada provinsi yang terbanyak belum memiliki SM di tingkat kecamatan. Seperti halnya SMP, Papua merupakan provinsi dengan jumlah kecamatan terbesar yang belum memiliki SM, yaitu sebanyak 388 kecamatan atau 73,48%. Selanjutnya Papua Barat dengan 103 kecamatan atau 58,86%

Proyeksi APK per Jenjang Pendidikan 2015-2019 (dalam %)



Proyeksi APK per Jenjang Pendidikan 2015-2019 (Sumber: PDSPK, 2015)

dari total kecamatan yang ada. Hanya tiga provinsi yang seluruh kecamatannya telah memiliki SM yaitu Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.

Berikutnya, penyediaan asrama guru dan siswa. Keberadaan asrama guru dan siswa diperlukan bagi sekolah menengah dengan guru atau siswa yang bertempat tinggal jauh dari sekolah. Khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau transportasi. Keberadaan asrama guru dan siswa ini mutlak ada karena baik guru maupun siswa tidak bisa pulang pergi ke sekolah setiap hari.

(2) Program Indonesia Pintar (PIP)

Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun. Mereka

harus mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan terhindar dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Balai Latihan Kerja (BLK), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(3) Sekolah Garis Depan

Sekolah Garis Depan (SGD) adalah salah satu program prioritas Kemendikbud yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) di Indonesia. Keberadaan SGD merupakan salah satu bentuk penjabaran Nawacita di bidang pendidikan, yaitu membangun dari

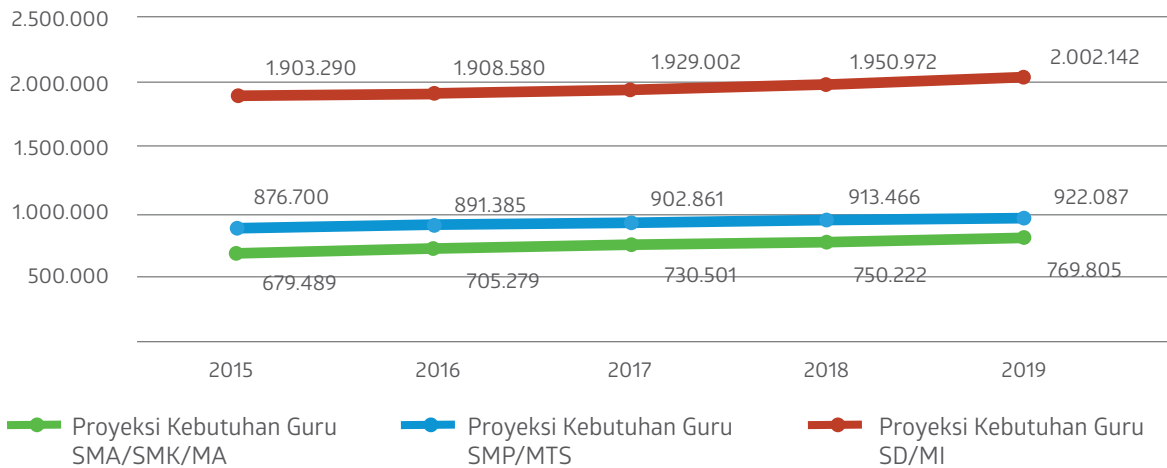
pinggiran dengan menyediakan layanan pendidikan. Pinggiran sendiri dimaknai sebagai wilayah yang kurang mendapatkan layanan pendidikan yang memadai sehingga menimbulkan ketimpangan dari aspek keadilan, pemerataan, dan mutu.

(4) Pendidikan Layanan Khusus

Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan keragaman budaya membuat pola penyediaan pendidikan menjadi berbeda, terutama untuk daerah yang mempunyai akses sulit atau masih terbelakang dari segi infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi. Untuk mengakomodasi kebutuhan ini, Kemendikbud mempunyai program-program unggulan yang berusaha menyediakan layanan pendidikan sesuai kondisi lingkungan dan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMA Terbuka). SMA

Proyeksi Kebutuhan Guru per Jenjang Pendidikan 2015-2019



Proyeksi Kebutuhan Guru per Jenjang Pendidikan 2015-2019 (Sumber: PDSPK, 2015)

Terbuka merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraannya menggunakan metode belajar mandiri (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus).

- Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) memberikan beasiswa kepada lulusan siswa SMP yang berasal dari Papua dan Papua Barat untuk melanjutkan sekolah menengah di luar Papua. Program ini memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan SMP sederajat tersebut memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sehingga bisa mempercepat pembangunan sumber daya manusia di kedua provinsi tersebut. Pada tahun 2015, Kemendikbud telah memberangkatkan 487 siswa penerima beasiswa ADEM ke

enam provinsi lain di Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 500 siswa pada 2016.

(5) Guru Garis Depan

Pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi tugas besar yang harus diwujudkan. Wilayah perbatasan dan daerah terpencil teridentifikasi sebagai lokasi yang tingkat pelayanan pendidikannya rendah. Untuk itu, Pemerintah melalui Kemendikbud berusaha mewujudkan kehadiran negara di wilayah tersebut dengan membuat program baru: Guru Garis Depan (GGD). Mereka adalah guru yang berkomitmen jangka panjang di daerah-daerah terdepan. Perbedaan penting GGD dan Sarjana Mengajar di Daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (SM3T) adalah masa kerja dan status. Jika SM3T hanya ditempatkan setahun dan tak diangkat menjadi PNS, GGD memang ditugaskan untuk menjadi guru permanen dan berstatus PNS di wilayah penempatan.

(6) Revitalisasi Paket Kesetaraan

Kemendikbud juga memperluas akses pendidikan kesetaraan sebagai upaya pemerataan dan keadilan pendidikan bagi warga yang terkendala tidak dapat masuk ke dalam pendidikan formal. Hak-hak mereka harus tetap dipenuhi dalam mendapatkan pendidikan dasar dan menengah melalui program pendidikan kesetaraan. Salah satu program unggulan pendidikan kesetaraan adalah program khusus memasuki dunia kerja. Sasarannya, pendidikan kesetaraan mampu mengaktualisasikan potensi terpendam peserta didik menjadi potensi aktual, untuk mengisi ruang publik secara produktif sebagai persiapan memasuki dunia kerja.

(7) Pelibatan Publik

Program Wajar 12 Tahun perlu dukungan dari semua pihak, terutama yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Dalam Wajar



Siswa Sekolah Menengah Atas sedang melakukan praktik di laboratorium. Wajib Belajar 12 Tahun mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan sekolah menengah.

Keterlibatan publik penting untuk memastikan Wajib Belajar 12 Tahun tidak melulu dibayangkan sebagai peran pemerintah pusat semata

12 Tahun, ekosistem pendidikan merupakan penjawantahan dari ruang interaksi dari seluruh pihak, baik orang tua, kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, media, pemerintah pusat dan daerah, industri, serta lingkungan yang lebih luas. Dalam ruang interaksi tersebut, pemerintah menjadi pendorong munculnya inovasi

serta dukungan dari ekosistem pendidikan.

Ketuntasan anak dalam menyelesaikan pendidikan, sedikit banyak dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara sekolah dengan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang proaktif akan mendorong ketuntasan pendidikan

siswa. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang terpisah dari entitas sekolah dan tidak proaktif cenderung membiarkan atau tidak memedulikan masalah penyelesaian pendidikan siswa di lingkungannya.

Oleh karena itu, Kemendikbud menginisiasi keterlibatan publik dengan sekolah melalui program Pendidikan Keluarga, Pengenalan Lingkungan Sekolah, dan Hari Pertama Sekolah. Program-program tersebut merupakan pintu masuk partisipasi masyarakat yang dimulai dari partisipasi keluarga. Keterlibatan publik penting untuk memastikan Wajib Belajar 12 Tahun tidak melulu dibayangkan sebagai peran pemerintah pusat semata. ■



■ Implementasi Kurikulum 2013



Sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, penerapan Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap, dengan target semua sekolah sudah melaksanakan Kurikulum 2013 pada Tahun Ajaran 2019/2020.

Mempertimbangkan permasalahan yang muncul pada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama pendidikan nasional, Kemendikbud menetapkan kebijakan pemberlakuan Kurikulum 2013 secara bertahap sampai Tahun Ajaran 2019/2020. Sebagai dasar kebijakan tersebut, Kemendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Kebijakan penundaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada semua *stakeholder* pendidikan untuk memastikan kesiapan implementasi Kurikulum 2013.

Sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, penerapan Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap, dengan target semua sekolah sudah melaksanakan Kurikulum 2013 pada Tahun Ajaran 2019/2020.

Implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap dilakukan sehingga dapat dijaga tingkat kesiapan sekolah. Selain itu, dengan implementasi dimulai pada kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10, kelancaran implementasi juga bisa terjaga. Kurikulum 2013 tidak serta-merta diterapkan untuk tengah dan/atau akhir kelas sehingga peserta didik tidak mengalami kebingungan. Jumlah sekolah pelaksana Kurikulum 2013 pada Tahun Ajaran 2016/2017 adalah 58.190 sekolah dan ditargetkan terlaksana pada 211.512 sekolah pada tahun pelajaran 2019/2020.

Kemendikbud juga menyadari bahwa kesiapan guru merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Kemendikbud melaksanakan program pelatihan Kurikulum 2013 sebagai prasyarat awal guru pelaksana Kurikulum 2013. Pelatihan ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan sekolah sasaran. Pelatihan kurikulum didesain untuk menghasilkan guru yang memiliki

tiga kualitas kunci: paradigma dan pemahaman atas substansi materi Kurikulum 2013, kemampuan fasilitasi, dan perilaku (*attitude*) yang berkualitas (utamanya: keterbukaan, pembelajar, dan tangguh).

Perlu digarisbawahi, Kemendikbud hanya melibatkan instruktur yang berkualitas dalam proses implementasi kurikulum ini. Para instruktur ini dipilih melalui proses seleksi pada setiap jenjang pelatihan. Pelatihan pada Tahun Ajaran 2016/2017 menyasar pada 298 ribu guru dan kepala sekolah, dengan melibatkan 70 ribu instruktur. Pada Tahun Ajaran 2017/2018, sasaran pelatihan ditargetkan sebesar 513 guru dan kepala sekolah.

Untuk memastikan implementasi berjalan baik, Kemendikbud juga melakukan pendampingan implementasi yang melibatkan unsur sekolah, guru, dan masyarakat. Kemendikbud juga merencanakan sosialisasi secara luas di kalangan orang tua murid atas pelaksanaan Kurikulum 2013, agar tak terulang lagi keresahan dan kebingungan seperti terjadi sebelumnya.

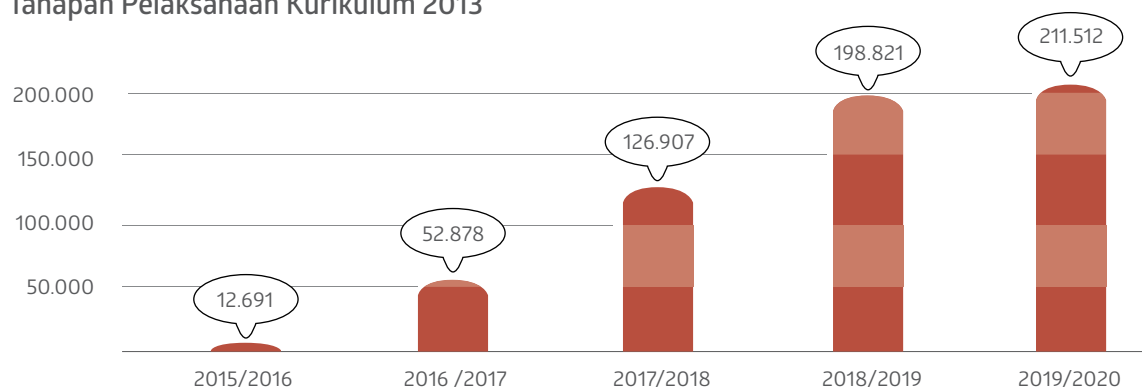
Terkait dengan penyediaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013, Direktur Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10/D/KR/2016. Surat edaran ini mengatur penyediaan buku teks Pelajaran bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 untuk Tahun Ajaran 2016/2017. Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 dapat memesan buku teks pelajaran secara daring dari penyedia yang telah lulus seleksi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan Kemendikbud. Untuk memastikan ketersediaan sumber pembelajaran, sekolah diperkenankan menggunakan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 revisi 2014 dan/atau sumber pembelajaran lain yang sesuai dengan Kompetensi Inti/ Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 yang berlaku.

Perbaikan kurikulum juga dilakukan pada level substansi materi agar semangat pengembangan Kurikulum 2013 dapat terwujud. Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penataan kembali kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi spiritual dan sikap secara eksplisit hanya diperuntukkan untuk mata pelajaran Agama & Budi Pekerti dan mata pelajaran Kewarganegaraan. Sedangkan pada mata pelajaran lain,

Tahapan Pelaksanaan Kurikulum 2013



kompetensi spiritual dan sikap terkandung sebagai *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi). Melalui penataan ini, tidak lagi terdapat kompetensi dasar untuk penjabaran kompetensi inti spiritual dan sikap.

- b. Kompetensi tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*) tidak hanya diperuntukan

kepada jenjang pendidikan menengah, tetapi juga jenjang pendidikan dasar. Perbedaan untuk setiap jenjang hanya terjadi pada tingkat kompleksitas objek, bukan tingkatan jenjang berpikir.

- c. Adanya ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum (pada silabus dan buku teks pelajaran). Pemberian ruang kreatif bagi

guru meliputi:

- i. Silabus yang disiapkan pemerintah merupakan salah satu model untuk memberi inspirasi. Guru dapat mengembangkannya sesuai dengan konteks yang relevan;
 - ii. dalam pembelajaran tematik (khusus jenjang SD), guru dapat mengembangkan tema dan subtema sesuai dengan konteks yang relevan;
 - iii. memberikan penguatan pada pembelajaran aktif, siswa perlu dilatih dan dirangsang untuk berpikir saintifik (5M);
 - iv. 5M bukanlah prosedur atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang bersifat kaku;
 - v. pendekatan saintifik bukanlah satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran.
- d. Penyelarasan Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar (KI/KD) dengan silabus & buku. Keselarasan KI/KD dengan silabus dan buku untuk memastikan bahwa revisi Kurikulum 2013 tidak hanya pada level dokumen, tetapi juga wahana pembelajaran yang secara langsung bersinggungan di ruang-ruang kelas sehingga nafas dari semangat revisi Kurikulum 2013 bisa benar-benar hadir di ruang kelas.

Akhirnya, setelah kerja panjang dan revisi secara serius, Kurikulum 2013 siap untuk diimplementasikan. Meskipun demikian, Kemendikbud tetap memberikan ruang untuk pengembangan lebih lanjut (diversifikasi kurikulum). Tujuannya agar Kurikulum 2013 memiliki relevansi dengan perkembangan dinamis dunia pendidikan di Indonesia. ■

Keselarasan KI/KD dengan silabus dan buku untuk memastikan bahwa revisi Kurikulum 2013 tidak hanya pada level dokumen, tetapi juga wahana pembelajaran yang secara langsung bersinggungan di ruang-ruang kelas



Siswa menjadi pusat kegiatan pembelajaran

■ Ujian Nasional: Kejujuran Akarnya, Kualitas Buahnya

Kemendikbud tidak menutup mata terhadap fakta munculnya beragam kontroversi dan polemik berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Selama sepuluh tahun pelaksanaan UN (2006-2015), berbagai persoalan baru bermunculan. Mulai dari kecurangan yang dapat digolongkan sistimatis dan melibatkan berbagai pihak, sampai kecenderungan proses pembelajaran dalam ruang-ruang sekolah yang mengalami perubahan secara sistematis.

Jarang lagi terdapat pembicaraan soal capaian ketuntasan belajar, utamanya untuk kelas akhir. Target capaian angka-angka hasil UN menjadi pengganti topik utama dalam ruang-ruang kelas, karena hal itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan proses belajar-mengajar. “Persiapan UN sudah dimulai dua tahun sebelumnya,” begitu ungkapan salah satu kepala sekolah negeri di Provinsi Yogyakarta, untuk menggambarkan besarnya tekanan yang dihadapi pihak-pihak yang

terkait dengan pelaksanaan UN.

Nama Kurikulum Pembelajaran pun perlahan diplesetkan menjadi “Kurikulum UN,” karena terlalu berfokus pada persiapan capaian target kelulusan. Baik siswa, guru, dan orang tua siswa menjadi sibuk dan tertekan atas target kelulusan UN. Alih-alih menjadi bagian solusi untuk peningkatan mutu pendidikan, UN dipandang menjadi beban dan momok tahunan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan.

Pada akhirnya, muncul pertanyaan dari berbagai kalangan, “Apa sebenarnya fungsi dasar pelaksanaan UN? Apakah UN sebagai indikator kelulusan seratus persen bagi siswa merupakan kebijakan yang tepat?” Oleh sebab itu, melalui pertimbangan matang dan masukan dari berbagai kalangan pemangku kepentingan, Kemendikbud



memutuskan mengakhiri polemik UN selama sepuluh tahun terakhir dengan menetapkan UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Penentuan kelulusan siswa dikembalikan kepada satuan pendidikan. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional, dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kelulusan dan Satuan Pendidikan.

Setidaknya terdapat dua tujuan strategis yang ingin dicapai lewat kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan. Pertama, menggeser paradigma pembelajaran dari *exam oriented* menjadi berorientasi pada ketuntasan kompetensi. Kedua, pengejawantahan perilaku kejujuran dalam dunia pendidikan.

Dengan UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan,



diharapkan para pengelola dan pemangku kepentingan pada satuan pendidikan tidak lagi hanya terpacu untuk mengejar nilai UN. Namun, lebih jauh lagi berusaha mencapai ketuntasan kompetensi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan amanat pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, bukan hanya manusia dengan fokus capaian pada lembaran-lembaran kertas nilai ujian. Lebih jauh, UN dikembalikan kepada *khittahnya* sebagai salah satu cara memetakan kualitas pembelajaran di suatu daerah, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk peningkatan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan merupakan salah satu upaya desakralisasi atas UN sehingga tidak lagi dilihat sebagai *high stake test*. Anggapan UN sebagai *high stake*

test, dianggap sebagai salah satu pemicu bagi sebagian pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk bersikap permisif terhadap kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN. Karena risikonya sangat tinggi, segala cara pun dilakukan agar lulus. Bukan hanya oleh siswa, tetapi juga guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pihak-pihak lain yang merasa akan dihakimi berdasarkan pencapaian nilai UN.

Tidak berhenti sampai di situ. Kemendikbud juga mendorong tingkat kejujuran di sekolah melalui kampanye positif pemberlakuan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) serta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

IIUN 2016: Integritas sebagai fondasi

Kombinasi kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan dan kampanye pentingnya kejujuran di sekolah, terbukti meletakkan dasar yang kuat untuk memperbaiki tingkat kejujuran selama pelaksanaan UN. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan IIUN 2016, baik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

UN 2016 untuk jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat diikuti 3,2 juta siswa. Rata-rata nilai IIUN untuk jenjang SMA adalah 64,05 atau meningkat sebesar 2,06 poin dari tahun sebelumnya (tahun 2015: 61,98). Peningkatan IIUN 2016 untuk SMA sederajat terlihat dari data meningkatnya jumlah sekolah yang meraih IIUN di atas 70 secara signifikan. Jumlah sekolah jenjang SMA yang memiliki IIUN di atas 70 pada tahun 2016 sebanyak 62% (tahun 2015: 35%).

UN 2016 untuk jenjang SMP/MTs diikuti 4,4 juta siswa dari 60

ribu satuan pendidikan. Sekitar 72% satuan pendidikan mengalami peningkatan IIUN, dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sekolah dengan nilai IIUN lebih dari 70 sebanyak 74% dari total sekolah pelaksana UN SMP 2016.

Peningkatan IIUN pada pelaksanaan UN 2016 patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan menguatnya kesadaran sikap untuk mengakhiri praktik kecurangan dalam UN. Untuk mendukung tren positif ini, Kemendikbud terus mendorong peningkatan integritas sekolah, dengan memberikan apresiasi atas komitmen sekolah menegakkan kejujuran.

Tren positif lain adalah peningkatan signifikan sekolah pelaksana UNBK yang berjumlah sekitar 4.400 satuan pendidikan pada UN 2016, sementara tahun 2015 hanya 500 satuan pendidikan. Pelaksanaan UNBK bermakna penting karena dua hal utama: komitmen atas integritas sekolah, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan UN. Rencananya, pelaksanaan UNBK akan diperluas untuk UN 2017. Saat ini sedang dilakukan proses pembahasan atas pelaksanaan UN 2017 pada internal Kemendikbud, bekerja sama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Koreksi nilai UN 2016

Terjadi koreksi atas rata-rata nilai UN 2016, baik untuk jenjang SMP dan SMA. Koreksi rata-rata nilai UN 2016 terjadi sebesar 1,5 sampai dengan 4,0 poin untuk jenjang SMP dan sederajat. Rata-rata nilai UN SMP 2016 adalah 58,87, turun dari 62,18 pada tahun 2015. Untuk MTs (setara SMP), turun menjadi 59,06 pada tahun 2016 dari 60,97 pada tahun 2015. Koreksi lebih besar terjadi pada jenjang SMA/MA dan sederajat,

yaitu 6,9 poin, dari 61,93 pada tahun 2015 menjadi 55,30 pada tahun 2016.

Koreksi atas nilai UN 2016 bersamaan dengan terjadinya peningkatan signifikan atas IIUN, merupakan indikasi: hasil UN 2016 semakin memberi gambaran atas realitas capaian mutu pendidikan nasional. Gambaran realitas mutu pendidikan menjadi penting agar bisa dijadikan dasar pijakan dalam perumusan kebijakan peningkatan mutu. Hal ini sejalan dengan fungsi dasar UN sebagai peta dan timbangan kompetensi lulusan. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam ruang-ruang kelas di pelosok negeri.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kemendikbud secara bertahap meningkatkan bobot soal UN. Pada UN 2016, proporsi soal adalah 40% pemahaman, 40% penerapan, dan 20% penalaran, dengan persentase soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skill*) mencapai sekita 10% (tahun 2015: ~10%). Selain itu, kisi-kisi soal UN 2016 juga diperlebar, tidak secara eksplisit menyebutkan indikator capaian. UN 2016 dirancang bukan untuk mendorong siswa menghafal jenis-jenis soal yang akan dikeluarkan, tetapi melatih kemampuan kognitif siswa untuk mengetahui suatu informasi, aplikasi, dan menalar. Berbeda dengan kisi-kisi UN 2015, tidak ada indikator soal yang spesifik. Hal ini akan mendorong siswa ke level menguasai materi bukan hanya hafalan. UN diharapkan juga bisa menjadi timbangan pendidikan siswa karena menunjukkan penguasaan dan pemahaman, serta kemudian memprosesnya menjadi sebuah informasi baru.

Setidaknya terdapat dua tujuan strategis yang ingin dicapai lewat kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan. Pertama, menggeser paradigma pembelajaran dari *exam oriented* menjadi berorientasi pada ketuntasan kompetensi. Kedua, pengejawantahan perilaku kejujuran dalam dunia pendidikan.

Kedua kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong para pemangku kepentingan di sekolah agar mendukung siswa untuk tidak hanya menjalani proses pembelajaran guna menghadapi ujian. Lebih dari itu, sekolah juga berorientasi pada ketuntasan kompetensi pembelajaran. UN secara bertahap juga diarahkan untuk merangsang pencapaian kecakapan abad ke-21. Pada akhirnya, pelaksanaan kebijakan ini secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional secara sistematis.

Penutup

Arah kebijakan terkait UN telah memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan efektivitas UN untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Setidaknya terdapat dua catatan penting:

a. Tren positif pelaksanaan UNBK secara tidak sadar telah mendorong sekolah untuk mengadopsi pelaksanaan UNBK ke dalam berbagai bentuk

penilaian pembelajaran di kelas. Padahal, berbagai model penilaian lain seperti dalam bentuk pertanyaan terbuka, diperlukan untuk merangsang kepekaan (*sense*) cipta dan keingintahuan (*curiosity*) peserta didik. Apabila dibiarkan, adopsi UNBK dalam berbagai bentuk penilaian kelas dikhawatirkan akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan awal. Yakni, untuk menghadirkan penilaian yang berorientasi pada ketuntasan kompetensi dan pencapaian kecakapan abad ke-21.

b. Peningkatan kualitas soal dalam UN perlu diseimbangkan dengan perbaikan mutu proses pembelajaran. Tanpa perbaikan mutu proses pembelajaran, dikhawatirkan capaian mutu pendidikan yang diharapkan akan sulit terwujud. Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas soal tanpa perbaikan mutu proses pembelajaran akan meningkatkan frustrasi pada peserta didik yang pada akhirnya akan kontraproduktif. ■



■ Lewat INAP, Indonesia Kejar Standar Kualitas Pendidikan Internasional

“Kerja belum selesai/ belum apa-apa/”

Kutipan lirik puisi Chairil Anwar ini ibarat metafora yang menggambarkan besarnya tantangan Kemendikbud dari waktu ke waktu.

Pembangunan dunia pendidikan di Indonesia menjelma menjadi “pekerjaan rumah” (PR) raksasa. Akan selalu ada masalah pendidikan yang menyita perhatian dan harus ditangani sungguh-sungguh.

Kemendikbud menyadari pencapaian prestasi pendidikan di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan. Harus diakui, dalam sistem tolok ukur (*benchmark*) penilaian standar internasional, peringkat Indonesia dari waktu ke waktu memang belum menggembirakan. Sebagai contoh, peringkat Indonesia berdasarkan penilaian TIMSS (*Trend in International Mathematics and Science Study*), kajian internasional tentang prestasi matematika dan sains siswa sekolah lanjutan tingkat pertama yang dikoordinasi IEA (*The International Association for the Evaluation of Education Achievement*). Terlihat bahwa posisi Indonesia cenderung tak jauh bergerak dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2015, peringkat Indonesia berada pada posisi 36. Tidak jauh berbeda dengan capaian Indonesia pada tahun 1999 yang berada pada urutan 34 dengan skor 403.

Sistem tolok ukur internasional yang lain juga mencatat hal yang kurang lebih sama. Misalnya, PISA (*Programme for International Assessment*) yang dilakukan Organisasi Kerja Sama untuk Pembangunan Ekonomi (OECD). Berdasarkan skor penilaian PISA-OECD 2000, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 41 negara. Sampai beberapa tahun kemudian, belum tergambar peningkatan signifikan. Bahkan sampai tahun 2015, mana kala Indonesia berada pada posisi ke-69 dari 76 negara.

Namun, Kemendikbud juga menyadari, keberanian untuk mengakui kelemahan justru bisa menjadi modal memperbaiki diri. Kita menerima kenyataan bahwa pencapaian hasil pendidikan nasional belum optimal, utamanya dalam bidang matematika, sains, dan bahasa. Itu artinya kita memerlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kompetensi siswa.

Akan tetapi, muncul pertanyaan mendasar: Apa dasar pengambilan kebijakan tersebut? Bagaimana peta kompetensi siswa? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kompetensi siswa tersebut?

INAP

Atas dasar pertanyaan tersebut, Kemendikbud menginisiasi *Indonesia National Assessment Program* (INAP) untuk menyediakan peta kompetensi siswa dan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan. INAP bisa menjadi dasar pijakan bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Secara ringkas, INAP merupakan salah satu sistem pemantau mutu pendidikan secara sistematis dan masa periodik. INAP tidak hanya menyediakan peta mutu pendidikan, tetapi juga beberapa *insight* (wawasan, pengetahuan, pandangan) yang nantinya berguna dalam pengambilan kebijakan. Pada dasarnya INAP merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemantauan atas capaian mutu pendidikan, dalam hal ini tingkat kompetensi siswa.

Pemantauan dilakukan secara periodik dan sistematis sehingga

mampu menyediakan peta bagi para pengambil kebijakan dalam peningkatan mutu. Sistem pemantauan ini juga diharapkan mampu melakukan diagnosis atas sehat tidaknya sistem pendidikan, baik pada level nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Lebih jauh, sistem pemantauan ini menjadi penting dilakukan secara terlembaga sehingga pemantauan bisa dilakukan secara periodik dan sistematis.

Tujuan pelaksanaan INAP secara khusus adalah melakukan pemantauan mutu pendidikan sehingga mampu:

- a. Membentuk sistem pemantauan mutu pendidikan yang terlembaga pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Meningkatkan kemampuan provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan survei dalam rangka memantau mutu pendidikan.
- c. Membandingkan tingkat keberhasilan program pendidikan (prestasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- d. Mengidentifikasi domain konten dan kognitif yang belum dikuasai/lemah.
- e. Mengidentifikasi variabel latar belakang peserta didik, guru, dan sekolah yang menentukan keberhasilan peserta didik.
- f. Memantau tingkat ketercapaian pembelajaran dari waktu ke waktu secara periodik dan sistematis.
- g. Menyusun laporan tingkat ketercapaian pembelajaran pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan INAP tidak hanya bermanfaat bagi pengambil kebijakan, tetapi juga semua pemangku kepentingan

(*stakeholder*) pendidikan, sebagaimana berikut:

- a. Orang tua dapat mengetahui ketercapaian prestasi anaknya selaku peserta didik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Guru bisa memanfaatkan informasi untuk perbaikan proses pembelajaran.
- c. Kepala sekolah dapat memanfaatkan informasi untuk merencanakan dan memperbaiki program manajemen sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran.
- d. Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), Kemendikbud (Dikdasmen, PMPTK, LPMP), Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Keuangan, dinas pendidikan kabupaten/kota, parlemen, perguruan tinggi, pengembang kurikulum, dan lain-lain akan dapat memanfaatkan informasi dari INAP yang tersedia secara berkala, sistematis, dan ilmiah.
- e. Masyarakat secara luas dapat memperoleh informasi secara berkala dan terbuka mengenai perkembangan mutu pendidikan baik di tingkat nasional maupun provinsi, atau kabupaten/kota,

terlebih lagi dalam hubungannya dengan kebijakan yang sudah diambil (transparansi dan akuntabilitas).

Objek yang menjadi target pengukuran adalah pengetahuan dan keterampilan yang terdapat dalam kurikulum (*curriculum focused*) dan materi yang bersifat lintas kurikulum (*cross-curricular element*), dengan penekanan pada pemahaman konsep dan kemampuan aplikasi dalam kasus kehidupan yang dinamis. Pengetahuan dan keterampilan yang menjadi objek pengukuran adalah sebagai berikut:

- a. Literasi membaca (*reading literacy*), meliputi: (i) kemampuan membaca (*performative*); (ii) kemampuan menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (*functional*); (iii) kemampuan mengakses pengetahuan dengan bahasanya (*informational*); dan (iv) kemampuan mentransformasi pengetahuan serta mengevaluasi (*epistemic*).
- b. Literasi matematika (*mathematical literacy*),

meliputi: (i) kemampuan mengetahui fakta dan prosedur matematika (*knowing*); (ii) kemampuan menggunakan konsep matematika untuk menjawab permasalahan matematis sederhana (*using*); dan (iii) kemampuan bernalar yang membutuhkan pemikiran matematis (*reasoning*).

- c. Literasi sains (*scientific literacy*), mencakup kemampuan: (i) menggunakan pengetahuan atau konsep-konsep sains secara bermakna; (ii) mengidentifikasi masalah; (iii) menganalisis dan mengevaluasi data atau peristiwa; (iv) merancang penyelidikan; (v) menggunakan dan memanipulasi alat, bahan, atau prosedur; dan (vi) memecahkan masalah dalam rangka memahami fakta-fakta tentang alam dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan.

Selain pengukuran pada *level* pengetahuan dan keterampilan, INAP juga dilengkapi dengan penelitian atas latar belakang dari siswa pelaksana program INAP, guru, dan sekolah. Penelitian atas kajian ini nanti yang selanjutnya digunakan sebagai *reasoning* atas hasil pengukuran, sehingga dapat ditarik benang merah atas praktik dan/atau keadaan yang secara ilmiah berpengaruh pada skor INAP.

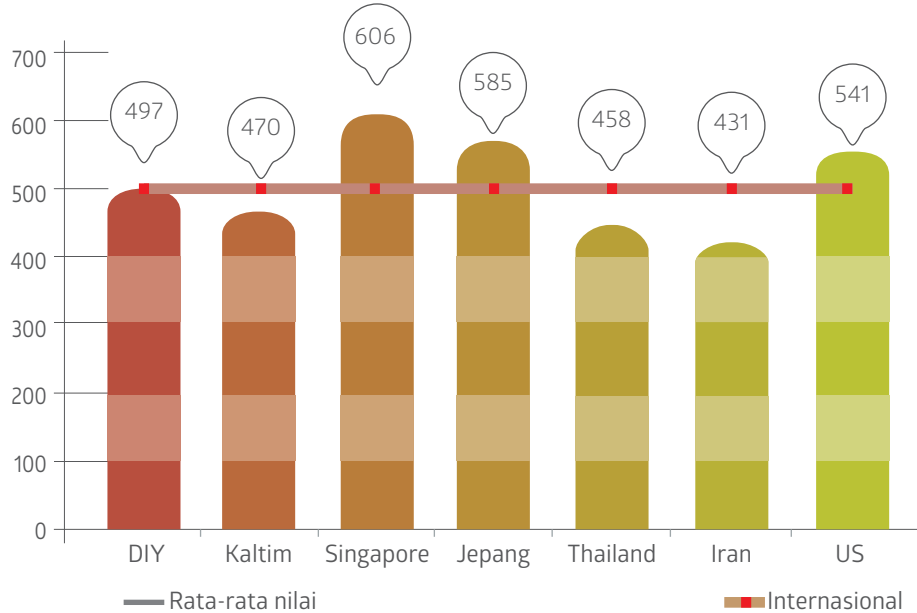
Hasil INAP 2012 dan pelaksanaan INAP 2016

Pelaksanaan INAP pada tahun 2012 dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, dengan menggunakan metode sampling *Stratified multistage sampling* dengan *Probability Proportional to Size* di setiap Strata. Hasil skor adalah sebagai berikut:

Kita menerima kenyataan bahwa pencapaian hasil pendidikan nasional belum optimal, utamanya dalam bidang matematika, sains, dan bahasa. Itu artinya kita memerlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kompetensi siswa.

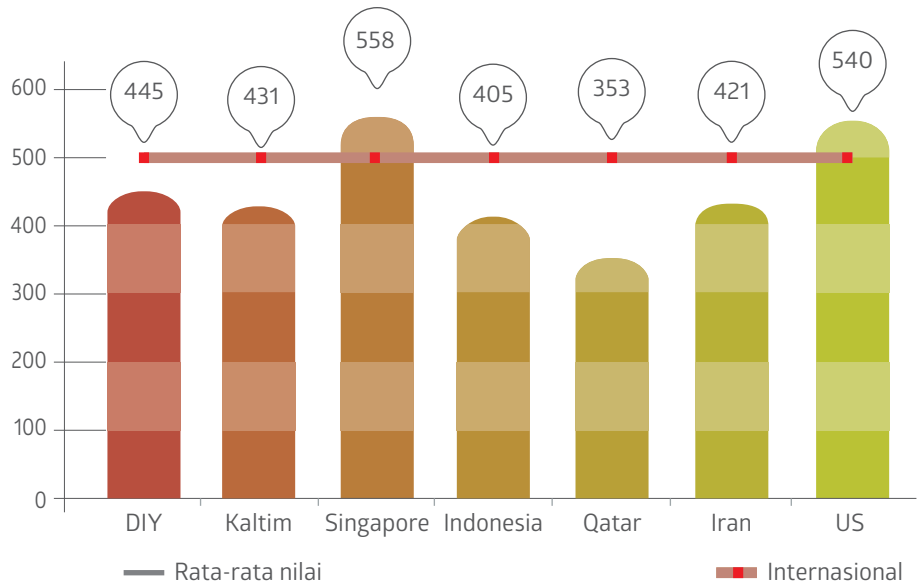
1. Skor Matematika (INAP 2012)

Skor kompetensi matematika memperlihatkan bahwa DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, masih berada di bawah rata-rata kemampuan internasional, hanya relatif lebih tinggi dari Thailand dan Republik Iran.



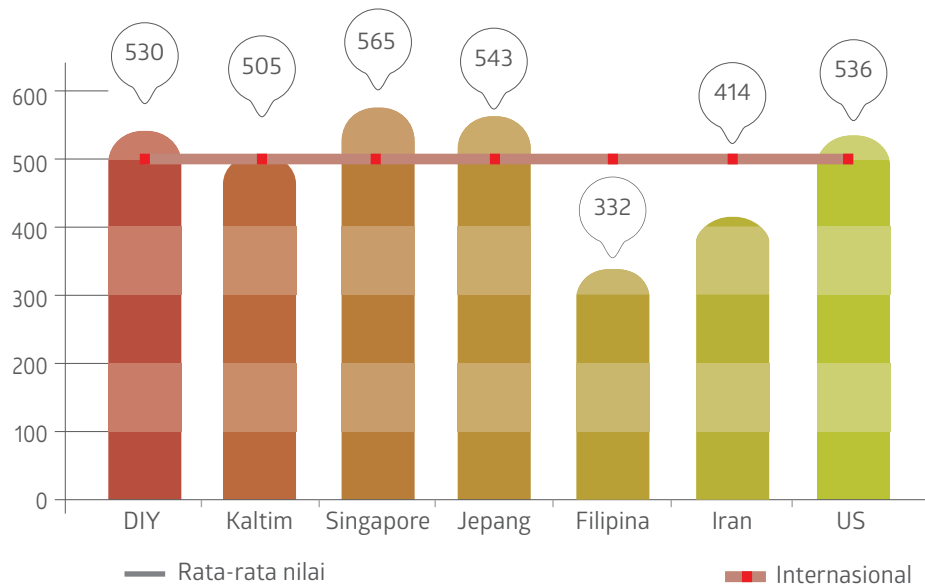
2. Skor Membaca (INAP 2012)

Skor kompetensi membaca memperlihatkan bahwa DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur lebih tinggi dari rata-rata nasional di Indonesia. Meskipun apabila dibandingkan dengan rata-rata internasional masih jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan memang pada level nasional Indonesia masih rendah tingkat literasi bahasanya.



3. Skor Sains (INAP 2012)

Skor sains menarik untuk disimak, terlihat bahwa DI Yogyakarta dan Kaltim cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata internasional. Selain pemahaman atas peta kondisi saat ini, INAP juga menyajikan data yang bisa dianalisis lebih jauh. Misalnya capaian kompetensi secara konsisten dipengaruhi tingkat pendidikan orang tua; kebahagiaan dalam keluarga dan suasana belajar di sekolah; kualitas guru yang terlihat dari keikutsertaan dalam pelatihan pengembangan profesi dan sertifikasi; dan kelengkapan buku. Kemendikbud melalui Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) pada tahun ini sedang melaksanakan INAP 2016. Sesuai rencana, hasil analisis akan bisa dilihat pada akhir 2016.



Penutup

INAP merupakan salah satu model penilaian yang diinisiasi Kemendikbud untuk melengkapi model penilaian yang sudah tersedia saat ini. INAP tidak ditujukan untuk mengganti sistem penilaian karena memiliki tujuan dan objek yang berbeda. Sistem penilaian pembelajaran (termasuk UN dan penilaian kelas) lebih mengukur ketuntasan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Pada sisi lain, INAP tidak tergantung pada jenis kurikulum, tetapi lebih pada tingkat kompetensi siswa. INAP lebih diarahkan untuk pemetaan dan diagnostik, sehingga bisa tertuju langsung pada masalah mutu pendidikan pada level kota/provinsi/nasional. Dengan begitu, diharapkan mutu pendidikan nasional dapat sejajar dengan tolok ukur (*benchmarking*) standar internasional. ■

■ Guru Pembelajar, Guru Berprestasi

Rendahnya kualitas guru selama ini menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat.

Penyebabnya:

ketidakhadiran guru di kelas, rendahnya kompetensi guru, sampai ketidakmampuan guru untuk mendidik dan menjadi teladan serta sumber inspirasi bagi murid-muridnya.

Kualitas guru yang rendah sering kali disinyalir sebagai penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Padahal, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan berjalan beriringan dengan kualitas guru. Kemendikbud berkewajiban mengelola dan meningkatkan kualitas guru. Hal ini sejalan dengan semangat Nawacita untuk

melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan.

Kemendikbud berkomitmen melakukan berbagai terobosan untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan peningkatan kualitas guru. Salah satunya melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG pada 2015 diikuti hampir 2,7 juta guru. Hasil UKG per provinsi/kabupaten/kota ini dimuat dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2015 yang disebarluaskan ke sekolah, para pemangku kepentingan, para pegiat dan pemerhati, serta dewan pendidikan. Tujuannya agar mereka dapat mengomunikasikan dan mendiskusikan secara terbuka hasil UKG dalam NPD di daerah masing-masing.

Selanjutnya, Kemendikbud menindaklanjuti hasil UKG dengan melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran besar tentang sebaran kualitas guru di Indonesia. Analisis hasil UKG ini akan digunakan untuk menentukan intervensi pemerintah yang akan diterima guru melalui program Guru Pembelajar.

Pada 2016, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbud





memulai program pelatihan guru yang diselenggarakan berdasarkan perolehan nilai pada UKG. Program ini bernama Program Guru Pembelajar. Selama satu tahun pelaksanaan, guru dengan nilai terendah dalam UKG akan mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tiga modul. Setiap modul terdiri dari 60 jam pelajaran (@45 menit). Pada akhir pelatihan, guru akan mengerjakan ujian

akhir berdasarkan modul yang dipelajari. Hasil ini nantinya akan menjadi perubahan nilai UKG guru untuk tahun 2016.

Dengan demikian, materi pelatihan tidak lagi seragam untuk semua guru, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan setiap guru sesuai mata pelajaran yang diampu. Perolehan skor UKG juga akan menjadi dasar pemilihan guru yang layak menjadi instruktur

atau mentor. Hal ini sesuai dengan semangat “Guru Mulia Karena Karya”: guru dihargai karena prestasi dan kemampuannya.

Kemendikbud juga mulai meluncurkan situs dan aplikasi Guru Pembelajar Dalam Jaringan (*on-line*) untuk meningkatkan partisipasi guru. Pelatihan guru tidak lagi diikuti guru yang itu-itu saja dengan moda tatap muka, melainkan semua guru yang

mau belajar dan meningkatkan kemampuannya. Guru yang hanya memperoleh tiga hingga lima modul UKG dengan nilai di bawah kriteria capaian minimal (skor 55) boleh mengikuti moda daring ini. Adapun guru dengan enam hingga tujuh modul di bawah Kriteria Capaian Minimal (KCM) dapat mengikuti moda kombinasi (daring dan tatap muka), dan guru dengan delapan hingga sepuluh modul di bawah KCM diarahkan untuk mengikuti pelatihan dengan moda tatap muka.

Untuk mendukung Program Guru Pembelajar, Kemendikbud menyediakan 2.000 jenis modul peningkatan kompetensi guru sesuai pelajaran yang diampu dan jenjang pendidikan peserta didik. Program Guru Pembelajar sebelumnya dikenal sebagai program “Peningkatan Keprofesional Berkelanjutan”. Perubahan nama program dilakukan dengan maksud mengajak guru meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Sesuai UU Guru dan Dosen No. 14/2005, pasal 20 ayat (2), guru wajib meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya secara berkelanjutan. Dengan demikian, menjadi guru pembelajar adalah kewajiban setiap guru. Guru diharapkan juga dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mengajarnya secara mandiri melalui berbagai sumber informasi.

Kemendikbud juga terus berupaya meningkatkan jumlah guru bersertifikat pendidik. Sesuai amanah UU Guru dan Dosen, guru merupakan tenaga profesional yang harus memiliki sertifikat guru sebagai bukti formal kecakapan sesuai standar. Guru harus mengikuti program sertifikasi untuk memastikan para siswa di Indonesia menerima pendidikan

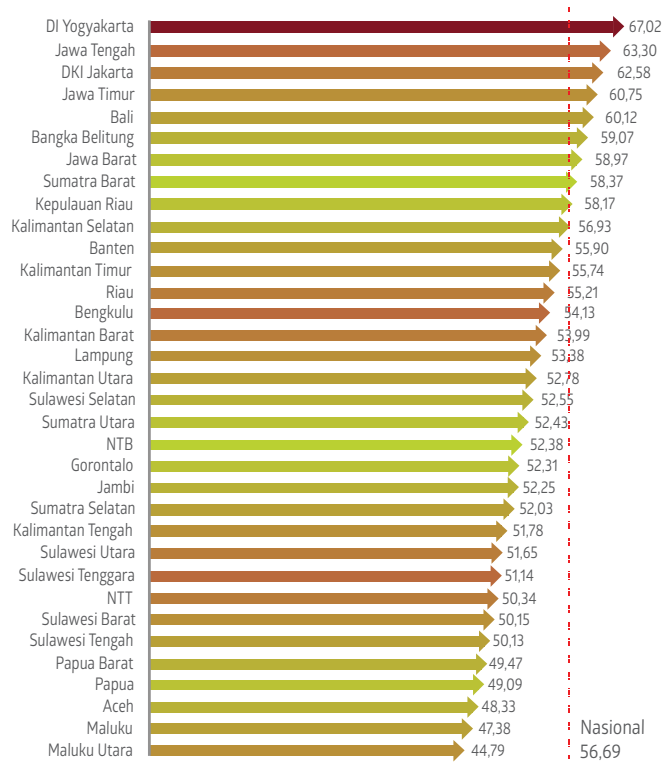
yang terstandar dengan baik. Untuk meningkatkan jumlah guru tersertifikasi, Kemendikbud menyediakan anggaran bagi 116.770 guru yang diangkat sebelum tahun 2015 dan belum tersertifikasi. Mereka akan mengikuti proses sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Guna meningkatkan kesejahteraan guru, Kemendikbud juga menyediakan anggaran untuk tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi disediakan bagi guru yang telah tersertifikasi dan menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Guru PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik

namun menunjukkan kinerja baik, juga dapat memperoleh tambahan penghasilan.

Kemendikbud sejak 2016 juga memberikan tunjangan bagi guru non-PNS, tetapi memiliki kinerja baik. Upaya meningkatkan kesejahteraan ini bertujuan membuat guru lebih fokus mengajar, sehingga siswa dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Nantinya, guru akan menerima remunerasi sesuai kompetensi dan kinerjanya. Lewat beberapa program ini, Kemendikbud optimis peningkatan kualitas pendidikan akan dapat diraih. ■

Rerata Uji Kompetensi Guru 2015 (profesional & pedagogik)



■ Guru Mulia Karena Karya



Menjadi seorang guru adalah tugas mulia mengingat peran guru selaku pelaku pendidikan. Tanpa guru berkualitas, sulit membayangkan mutu pendidikan nasional akan meningkat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tidak heran dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dan juga semangat untuk berkarya di bidangnya.

Menjadi guru yang baik tidaklah mudah. Tugas itu

membutuhkan kualifikasi akademik yang tepat dan panggilan jiwa sebagai pendidik calon penerus bangsa. Kemuliaan seorang guru salah satunya terletak pada karya yang dihasilkannya—karya yang dapat diartikan dalam banyak hal. Ada karya yang berwujud seperti karya tulis dan hasil-hasil penelitian. Namun juga perlu diperhatikan karya dalam bentuk lain yang memiliki tujuan tak kalah penting. Yakni, kiprah guru dalam ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kemendikbud menasbihkan “Guru Mulia karena Karya” sebagai

tema Hari Guru Nasional tahun 2015. Pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional, 24 November 2015, di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta para guru Indonesia untuk terus berkarya dan menghasilkan metode pembelajaran yang kreatif sehingga dapat mendorong peserta didik menjadi anak yang kreatif pula.

“Dirgahayu Guru Indonesia. Karya muliamu membuka jalan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata Presiden menyemangati.

Guru memiliki pengaruh kuat dalam membentuk karakter anak didiknya. Nilai-nilai seperti etos kerja keras, integritas, optimisme, disiplin, gotong-royong, bisa ditumbuhkan dan menjadi kebiasaan di ruang kelas. Pendidikan karakter harus terus dilakukan di sekolah sebagai arena pembelajaran anak-anak dalam pembentukan karakter.

“Saya mengajak semua pihak untuk menggunakan momentum Hari Guru Nasional untuk menyadari peran penting guru dalam pendidikan karakter bangsa. Guru adalah agen perubahan karakter bangsa,” lanjut Presiden Joko Widodo.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pasal 36, 37, dan 38, dijelaskan bahwa mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja merupakan hak seorang guru. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja para guru dan tenaga kependidikan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengadakan pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi dalam melaksanakan perannya.

Sebanyak 821 guru dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti acara penghargaan guru berprestasi dan berdedikasi yang digelar pada 12-18 Agustus 2016. Mendikbud Muhadjir Effendi menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap karya dan prestasi guru dan tenaga kependidikan. Apa lagi mereka telah memberikan prestasi dan dedikasinya terhadap dunia pendidikan.

Penyelenggaraan pemilihan GTK berprestasi ini dilaksanakan secara bertingkat mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional dengan 34 kategori. Direktur Jenderal GTK Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan ke-821 guru merupakan hasil seleksi dari tingkat provinsi sebelumnya. Para guru berprestasi dari berbagai daerah itu hadir mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK. Mereka mengikuti kegiatan penilaian selama beberapa hari lewat penilaian portofolio dan juga presentasi. Untuk selanjutnya, juri akan menetapkan sepuluh guru terbaik yang akan mendapatkan penghargaan.

Ada dua kategori yang termasuk dalam rangkaian pemilihan, yaitu kategori guru berprestasi dan guru berdedikasi. Guru berprestasi merupakan guru yang memiliki prestasi di bidang belajar mengajar, salah satunya

dalam membuat karya berupa metode pembelajaran yang inovatif. Kriteria guru berprestasi berikutnya adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan atau internasional; dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Sementara guru berdedikasi merupakan guru yang berjuang mengajar di daerah terpencil. Mereka direkomendasikan oleh provinsi masing-masing berdasarkan dedikasi yang telah dilakukan selama mengajar di daerah tersebut. Terdapat total 34 guru berdedikasi yang masing-masing mewakili satu provinsi.

Kemudian para guru terpilih akan dikirim untuk melakukan praktek kerja lapangan di beberapa negara seperti Jepang, Finlandia, dan Australia untuk mendapatkan pengalaman di sekolah terbaik di negara-negara tersebut. Diharapkan, ketika kembali bertugas, mereka dapat menerapkan praktik baik saat kembali ke tempat tugas mengajarnya.

Pemilihan guru berprestasi ini bersifat kompetitif mencari yang terbaik. Masing-masing guru yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pemilihan tersebut. Pemilihan guru berprestasi juga dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel yang mengacu pada proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan

pendidikan, baik secara akademik maupun administratif. Bentuk apresiasi terhadap karya guru seperti ini berdampak positif terhadap berbagai aspek tenaga pendidik, antara lain meningkatkan motivasi kerja guru dan mempengaruhi prestasi belajar mengajar.

Penghargaan yang diterima seyogyanya berlanjut dengan karya-karya guru yang semakin banyak dan berdampak besar dalam upaya memajukan pendidikan Indonesia. Guru diharapkan mau meningkatkan kompetensi diri serta profesional dalam bertugas. Peningkatan profesionalisme dapat juga dilakukan secara mandiri dengan membaca buku dan jurnal ilmiah. Guru juga dapat aktif dalam melakukan penelitian dan pengembangan metode belajar-mengajar di luar program-program yang bersumber dari pemerintah atau organisasi profesi guru, misalnya dengan mengikuti diklat, seminar, maupun lomba-lomba inovasi pelajaran.

Selain melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik, guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Negeri ini tentu butuh sosok guru yang profesional, berdedikasi, dan mampu menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuan para pendidikannya untuk mengubah karakter generasi penerus yang menjadi anak didiknya.

Lewat bentuk-bentuk apresiasi terhadap kinerja seorang guru, diharapkan para guru akan selalu memiliki semangat dan motivasi memberikan karya terbaiknya untuk memajukan pendidikan Indonesia. ■



Maestro Tari Bali sedang memeragakan tarian pada pembukaan BBM 2016

■ Sepuluh Hari Bersama Maestro

Bagaimana rasanya belajar seni langsung pada maestro yang telah puluhan tahun mengukuhkan dirinya pada salah satu bidang seni?

Kesempatan berharga itu sepertinya hanya bisa dirasakan oleh seniman yang telah berkarir bertahun-tahun. Namun, sejak tiga tahun lalu, Kemendikbud membuat terobosan program “Belajar Bersama Maestro (BBM)”.

Program ini memberikan kesempatan bagi pelajar berbakat yang mencintai kesenian dan kebudayaan Indonesia untuk belajar langsung dari para maestro. Tahun ini Kemendikbud kembali menyelenggarakan kegiatan BBM untuk ketiga kalinya. Kegiatan ini terbuka untuk pelajar SMA dan SMK kelas X dan kelas XI seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka sepanjang April hingga Juni 2016. Pelajar yang mendaftar cukup mengunggah video yang menampilkan hasil karya mereka. Mereka yang terpilih mengikuti seleksi diundang untuk mengikuti audisi layaknya ajang pencarian bakat di televisi. Kemendikbud telah memilih sepuluh maestro seni dari sepuluh daerah di Indonesia. Anak-anak yang lolos seleksi audisi pada 24 Mei-14 Juni 2016, mendapatkan kesempatan belajar langsung dari salah satu maestro selama sepuluh hari.

Maestro yang terlibat bisa dibilang legenda di bidangnya dan memiliki dedikasi luar biasa. Sepuluh maestro tersebut adalah Amaq Raya, Ni Ketut Arini, Temu Misti, Drs. Sirajul Huda HM, Tom Ibnur, Nano Riantiarno, Putu Sutawijaya, I Made Sidia, Sundari Sukotjo, dan Ismet Ruchimat. Amaq Raya adalah seniman asal Nusa Tenggara Barat yang memulai karirnya sejak 1933. Karyanya seperti tari Pidata, tari Pakon, Gending Semar Geger, hingga Gending Pembani Selaraprang pernah ditampilkan di depan Presiden Soekarno hingga para budayawan di Jepang.

Ni Ketut Arini adalah penari Legong Bali legendaris dan pendiri sanggar Warini. Temu Misti dikenal sebagai penari dan penyanyi gandrung yang albumnya telah dirilis di Amerika Serikat. Karena dedikasinya terhadap kesenian khas Banyuwangi, Temu Misti mendapat penghargaan Kartini Indo Women Award 2013. Sirajul Huda berkecimpung di dunia sendratari dan menulis berbagai naskah teater tradisional Kalimantan. Dedikasinya terhadap budaya Kalimantan membuatnya terpilih menjadi Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Banjarbaru. Tom Ibnur dikenal sebagai penata tari yang telah menghasilkan 300 karya dan dipentaskan di berbagai negara. Seniman asal Padang ini berpengalaman di pentas internasional seperti panggung tari Perancis hingga Amerika Serikat.

Tidak hanya para maestro tari. Kemendikbud juga mengajak sutradara dan penulis naskah teater kawakan Nano Riantiarno. N. Riantiarno adalah pendiri Teater Koma sekaligus banyak menulis naskah untuk pementasan teater tersebut. Karyanya yang populer antara lain “Rumah Kertas” dan

“Opera Kecoa”. N. Riantiarno juga pernah mendapat penghargaan Piala Citra untuk penulisan skenario film. Ada pula Ismet Ruchimat, musisi Sambasunda. Maestro musik ini kreatif menciptakan perpaduan musik tradisional Sunda dengan musik kontemporer dari berbagai negara di dunia.

Para pelajar terpilih juga dapat menimba ilmu dari pelukis asal Bali, Putu Sutawijaya, yang telah menggelar pameran di berbagai negara dan pernah terpilih sebagai salah satu dari sepuluh seniman terbaik program Phillip Morris Indonesia Art Awards. I Made Sidia dikenal sebagai seniman wayang kulit dan Kecak. Ia juga pernah melakukan tur dunia di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Australia untuk mementaskan karyanya. Sedangkan Sundari Sukotjo dikenal sebagai maestro penyanyi keroncong Indonesia. Namanya populer sebagai penyanyi keroncong sejak tahun 1977 dan hingga kini aktif mengajar seni musik, terutama keroncong.

Setiap maestro mengasuh 15 anak dari berbagai daerah dan latar belakang berbeda. Mereka mendapat kesempatan tinggal

Setiap maestro mengasuh 15 anak dari berbagai daerah dan latar belakang berbeda. Mereka mendapat kesempatan tinggal dan beraktivitas bersama di rumah serta sanggar para maestro

dan beraktivitas bersama di rumah serta sanggar para maestro. Kemendikbud menggunakan strategi ini untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa dengan pendekatan seni budaya.

Kesenian dan budaya tradisional sangatlah menarik dan menyenangkan untuk dipelajari lewat BBM. Salah satu peserta BBM, I Wayan Dwira Sadipradana asal Bali sudah menggeluti dunia teater sejak lama, namun ia baru pertama kali mempelajari teater tradisional Banjarmasin. Ia berada di bawah asuhan Sirajul Huda. “Ternyata beliau orangnya lucu, beliau adalah teman dan guru saya,” ungkap Wayan.

Tidak hanya belajar, kejadian-kejadian seru pun mewarnai kebersamaan maestro dan peserta. Maestro Temu Misti misalnya, nekat mengajak 15 pelajar peserta program ini untuk ikut ke acara undangan pernikahan. Acara tersebut menjadi bahan obrolan seru para peserta, utamanya karena mereka merasa menjadi tamu tidak diundang. . Lain lagi cerita para peserta di bawah asuhan I Made Sidia. Mereka disuruh menampilkan suara tawa masing-masing. Suasana menjadi penuh canda karena warna suara tawa yang berbeda-beda. Para peserta program BBM benar-benar menikmati suasana belajar bersama maestro yang seru, akrab, dan penuh semangat kekeluargaan.

Para peserta mayoritas memang bercita-cita menjadi seniman. Pada akhir kegiatan, mereka berkumpul di Yogyakarta untuk menampilkan kesenian yang mereka pelajari dari masing-masing maestro. Pementasan di Gedung Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri, UGM, ini memadukan berbagai seni tari tradisional, musik, hingga



Peserta BBM bersama pelukis Putu Sutawijaya di Yogyakarta



Peserta BBM bersama penari I Made Sidia

seni lukis. Temu Misti dengan lemah gemulai berada di baris depan mengawal penampilan peserta menari Gandrung. Begitu pula Sundari Soekotjo dan anak asuhannya menyanyikan berbagai variasi lagu daerah (*medley*) dengan irama keroncong bersama Gambang Semarang.

Para peserta BBM 2016 telah mendapatkan kesempatan

istimewa yang tidak diperoleh teman sebayanya. Namun, ini bukanlah puncak dari mimpi mereka. Sepuluh dari tempat sang guru maestro, mereka menyimpan semangat dan motivasi untuk berlatih lebih keras. Semoga kelak mereka dapat menjadi maestro selanjutnya di bidang seni yang mereka geluti. ■

■ Membangun Kebudayaan, Memperkuat Karakter Bangsa

Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan sangat terang terbaca dalam agenda prioritas Presiden-Wakil Presiden (Nawacita).

Secara berurutan, melalui pokok kedelapan dan kesembilan Nawacita, Presiden-Wakil Presiden berjanji untuk melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinnekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Upaya mengembalikan pertimbangan kultural sebagai metode atau hulu pembangunan merupakan hal yang menggembirakan dan perlu mendapatkan dukungan banyak pihak. Upaya ini juga untuk meluruskan dan menghindari penafsiran keliru bahwa masalah

budaya hanyalah masalah artefak-artefak tradisi dan buku-buku tentang peristiwa masa lampau.

Kebudayaan bukan hanya sekadar catatan masa lampau. Masyarakat harus mendapatkan pencerahan, bahwa kebudayaan juga bersifat progresif, partisipatif, dan kolaboratif. Pemahaman inilah yang menjadi pegangan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dalam mendesain dan mengimplementasikan berbagai kebijakan. Keinginan untuk menghadirkan pemahaman kebudayaan yang progresif,

partisipatif, dan kolaboratif, tercermin dalam sejumlah program Ditjen Kebudayaan berikut ini.

Penguatan Pendidikan Karakter dan Modal Sosial Bangsa

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (SMS) merupakan salah satu terobosan Ditjen Kebudayaan pada tahun 2016, guna memperkuat pendidikan karakter dan modal sosial bangsa. Gerakan ini mengintegrasikan pusat-pusat kesenian dan kebudayaan dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah.





Lewat gerakan ini, para seniman daerah terlibat dalam kegiatan pembelajaran seni untuk pelajar di sekolah (tingkat SD-SMP) yang dilakukan di luar jam pelajaran. Para pelajar dapat memilih untuk mengikuti pelatihan seni rupa (lukis), seni tari, seni teater, dan seni musik. Pada tahun ini, tercatat 1.400 pelajar telah difasilitasi kegiatan berkeseniannya melalui gerakan SMS.

Terobosan lain terkait penguatan pendidikan karakter melalui seni budaya adalah Belajar Bersama Maestro. Kegiatan ini

kembali dilaksanakan pada 2016 sebagai lanjutan kegiatan tahun sebelumnya. Belajar Bersama Maestro merupakan media pembelajaran untuk pelajar SMA/SMK yang difasilitasi para maestro seni tanah air. Para pelajar dapat mengenali makna budaya, nilai budaya, dan kearifan lokal lewat dialog dan belajar langsung dengan para maestro selama kurang lebih sepuluh hari. Diharapkan, pembelajaran kesenian secara langsung ini dapat memotivasi para pelajar untuk berprestasi di bidang kesenian.

Selain SMS dan Belajar Bersama Maestro, Kemendikbud juga menyelenggarakan lokakarya guru sejarah. Tanpa pemahaman sejarah, pendidikan karakter akan pincang. Namun, metode pembelajaran sejarah yang menarik dan menstimulasi proses berpikir kritis para pelajar, merupakan tantangan khas bagi para guru sejarah. Atas dasar pemikiran itu, rangkaian lokakarya untuk guru sejarah tingkat SMA/SMK di seluruh Indonesia terus dilakukan Ditjen Kebudayaan. Pada tahun ini, sebanyak 1.150 guru sejarah telah



Sebuah studio mini di SMKN 1 Manado

mengikuti lokakarya tersebut.

Perluasan Akses Masyarakat

Para pelajar di daerah yang kurang mampu secara ekonomi belum mendapatkan akses untuk menonton film-film Indonesia berkualitas. Negara hadir untuk memastikan film-film Indonesia yang sarat nilai budaya dan ilmu pengetahuan dapat menjangkau generasi muda di seluruh pelosok negeri. Melalui kegiatan Persemaian Nilai Budaya, Kemendikbud memfasilitasi para pelajar untuk menikmati film-film berkualitas dan diajak untuk berdiskusi langsung dengan para pekerja seni yang terlibat dalam produksi film tersebut.

Sejak tahun 2014, Ditjen Kebudayaan terus memastikan bahwa hak mengapresiasi seni dan berdialog tersebut dapat terpenuhi. Pada tahun 2016, sebanyak 17.000 pelajar telah mengikuti kegiatan Persemaian Nilai Budaya.

Tidak hanya sebagai penikmat, para pelajar juga didorong untuk belajar membuat film. Melalui program bantuan Laboratorium Seni Budaya dan Film, Kemendikbud berkolaborasi dengan pihak swasta dalam

pengadaan bangunan fisik dan sarana pendukung laboratorium seni budaya dan film pada jenjang SMA/SMK. Laboratorium ini dapat dimanfaatkan sebagai bioskop mini, tempat pertunjukan, serta studio untuk rekaman dan produksi musik dan film.

Sasaran program bantuan ini adalah SMA/SMK yang berprestasi atau memiliki potensi besar di bidang seni budaya dan film, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengakses sarannya. Bantuan diberikan pada sekolah yang sama sekali belum memiliki ruangan laboratorium seni budaya dan film. Bantuan juga diberikan pada sekolah yang sedang melakukan restorasi untuk mengalihfungsikan ruangan yang sudah ada menjadi laboratorium seni budaya dan film. Dengan program bantuan ini, penyampaian pesan pendidikan di sekolah melalui pembuatan dan pemutaran film yang berbasis nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa, dapat terwujud. Selama kurun waktu 2015-2016, sebanyak 21 SMA/SMK telah mendapatkan dan memanfaatkan bantuan tersebut.

Sasaran program bantuan ini adalah SMA/SMK yang berprestasi atau memiliki potensi besar di bidang seni budaya dan film, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengakses sarannya

Bantuan fasilitas sarana kesenian tradisional, baik berupa alat musik maupun pakaian tari, juga terus diberikan kepada sekolah-sekolah di tingkat SD hingga SMA/SMK. Dalam kurun waktu 2015-2016, Kemendikbud telah memfasilitasi tidak kurang dari 695 sekolah penerima bantuan. Selain bertujuan untuk melestarikan seni tradisional, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap kemajemukan seni budaya di Indonesia.

Penguatan Kebijakan yang Inklusif

Di desa-desa adat, masyarakat memelihara, mewariskan, dan mengembangkan tiga sistem yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Ketiga sistem ini adalah sistem pengetahuan arsitektur bangunan melalui bangunan adat, sistem kepercayaan dan upacara tradisional melalui nilai-nilai budaya, serta sistem ekonomi berbasis budaya dan lingkungan melalui nilai-nilai sosial.

Namun, saat ini banyak bangunan adat yang mengalami kerusakan—baik karena faktor iklim, bencana alam, kondisi bahan



Desa adat Ayapo di Sentani Timur, Jayapura

bangunan yang telah termakan usia, maupun karena perhatian yang luntur akan akar budaya karena tergerus arus modernisasi. Hal ini menyebabkan bangunan adat tidak dapat memenuhi fungsinya. Padahal, segala hal yang terjadi pada satu sistem dapat berdampak pada sistem lainnya. Maka, peran negara dalam upaya melestarikan eksistensi desa adat, terlebih dalam arus modernisasi, mutlak harus dilakukan. Hal ini disadari penuh oleh Kemendikbud yang terus bergerak cepat dalam merevitalisasi desa adat suku minoritas di Nusantara melalui dana bantuan Revitalisasi Desa Adat (RDA).

Tentu, program RDA tidak berhenti pada memperbaiki kerusakan fisik semata. Karena, “Revitalisasi bukan hanya soal fisik. Melainkan kesadaran. Karena masalah fisik adalah konsekuensi dari kesadaran.” Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid

Peran negara dalam upaya melestarikan eksistensi desa adat, terlebih dalam arus modernisasi, mutlak harus dilakukan

mengatakan hal ini saat membuka lokakarya RDA dan Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat, Juni 2016. RDA sarat akan partisipasi masyarakat desa adat, mulai dari identifikasi kebutuhan, desain bangunan, pengelolaan dana, pembelian bahan-bahan, hingga pembangunan kembali rumah adat. Tahun ini tercatat 139 desa adat yang direvitalisasi. Total yang direvitalisasi selama 2015-2016 berjumlah 271 desa adat.

Kemendikbud juga terus mengintensifkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas komunitas budaya yang mengalami

degradasi dan keterbatasan dalam memenuhi hak dasar eksistensi dan ekspresi budayanya. Upaya ini melalui program Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM). Komunitas budaya yang dimaksud merupakan kesatuan sosial yang masih memegang tradisi, memiliki kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma dan aturan, serta memiliki berbagai aktivitas budaya menurut pola tertentu. Sasaran dari FKBM adalah keraton, komunitas adat, lembaga adat, sanggar, organisasi penghayat kepercayaan, lembaga



Kemah Budaya Nasional diselenggarakan di Belitung. Anak-anak dari berbagai penjuru negeri berinteraksi bersama selama kegiatan, dan menunjukkan berbagai atraksi budaya.

keagamaan, serta forum warga dengan tujuan spesifik melestarikan tradisi. Terdapat 334 komunitas budaya telah mendapatkan bantuan dan pelatihan pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, kebijakan kebudayaan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup kaum minoritas dan disabilitas sesuai rencana akan diperkuat.

Peningkatkan Komunikasi Budaya Antardaerah

Kegiatan-kegiatan pertukaran budaya di tingkat nasional sebagai media komunikasi dan sarana perekat persatuan bangsa terus dikembangkan. Salah satunya

adalah Kemah Budaya Nasional. Kegiatan ini adalah lanjutan kegiatan yang sama pada tahun 2015. Kemah ini merupakan wadah pertemuan Pramuka Penggalang tingkat nasional untuk menanam dan menumbuhkembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya bangsa, membina persaudaraan, mempererat persatuan dan kesatuan, serta jiwa kemandirian. Pada tahun 2016, sebanyak 528 Pramuka Penggalang mengikuti Kemah Budaya Nasional.

Pembangunan Kebudayaan Tahun 2017

Ditjen Kebudayaan sangat menyadari upaya pengarusutamaan

kebudayaan dalam dialog pembangunan nasional merupakan tugas berat. Sehingga, ikhtiar untuk memperbaiki tatakelola kebudayaan terus dilakukan. Perumusan dan penguatan kebijakan terkait koordinasi sektor hulu-hilir pada ekonomi kreatif perlu terus diintensifkan. Pendekatan inovatif dan efektif dalam pengembangan diplomasi budaya harus makin digencarkan. Tidak ketinggalan, indeks pembangunan manusia perlu terus dikembangkan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di bidang kebudayaan. ■

■ Pengenalan Lingkungan Sekolah



Topi kertas berbentuk kerucut dan papan nama jumbo biasanya terlihat hilir mudik saat penerimaan siswa baru.

Kesibukan siswa baru ini sebelumnya dikenal dengan nama Masa Orientasi Siswa (MOS). Dalam pelaksanaan MOS, tidak terhindarkan munculnya perilaku berlebihan sang kakak kelas, bahkan menjerus pelanggaran dan perundungan (*bullying*). Apa lagi jika guru-guru di sekolah tidak ketat mengawasi pelaksanaan MOS.

Siswa baru sering kali diperlakukan tidak wajar oleh kakak

kelasnya, seperti diminta memakai atribut yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, diberi hukuman, dan dituntut untuk menghormati senior secara berlebihan di sekolah. Berbagai pelanggaran dan kekerasan rawan terjadi pada MOS.

Setelah mengkaji dengan seksama dan menerima berbagai masukan dan pengaduan masyarakat, Kemendikbud akhirnya

memutuskan meniadakan MOS dan menggantinya dengan ajang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). PLS adalah kegiatan awal siswa baru yang dirancang bersifat menyenangkan dan edukatif. Dasar pemberlakuannya adalah Permendikbud No. 18 Tahun 2016.

Untuk pertama kalinya, pelaksanaan PLS dari tingkat SD hingga SMA sebagian besar dilaksanakan pada 18 Juli 2016.

Kini, para siswa baru tidak perlu takut lagi menghadapi hari-hari pertama di sekolah baru. Kekerasan senior dan hukuman yang mempermalukan sudah ketinggalan zaman dan bahkan dihindari. Sudah waktunya siswa baru diperkenalkan pada asyiknya belajar di sekolah baru.

Sekolah lain yang berbeda tanggal permulaan tahun ajaran baru, dapat menyesuaikan tanggal penyelenggaraan PLS-nya.

Kemendikbud menetapkan sembilan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan PLS. Antara lain, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pengenalan atau orientasi sekolah hanya menjadi hak guru; dilarang melibatkan kakak kelas atau alumni sebagai penyelenggara; wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif; dilarang bersifat perpeloncoan; dan dilarang memberikan tugas berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran.

Jika siswa, orang tua murid, atau pihak lain menemukan pelanggaran, Kemendikbud telah menyiapkan portal <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id/> laporan untuk menampung berbagai pengaduan. Pihak mana pun dapat melakukan pengaduan tanpa perlu takut rahasianya terbongkar. Kemendikbud juga

melakukan verifikasi atas pelaporan yang masuk sehingga tindak lanjut dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Berbeda dengan MOS, PLS tegas menolak adanya praktik atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2016. Jika ada potensi pelanggaran, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Guru wajib melakukan perencanaan dan penyelenggaraan PLS. Tak ada lagi kakak kelas yang berbaris galak menyambut siswa baru dengan muka masam. Kegiatan ini juga harus dilakukan di lingkungan sekolah, kecuali jika fasilitas yang dibutuhkan berada di luar sekolah. Kegiatan yang dilakukan harus bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan.

Siswa juga harus memakai atribut resmi dari sekolah. Sekolah wajib memberikan informasi lengkap dan mendapat izin tertulis dari orang tua siswa dalam kegiatan pengenalan ekstrakurikuler. Kegiatan ini wajib diawasi minimal oleh dua orang guru. Pihak sekolah juga dilarang melibatkan siswa senior atau alumni sebagai

penyelenggara PLS ataupun pengenalan ekstrakurikuler.

Selain itu, hukuman fisik yang tidak mendidik dan tidak berhubungan dengan kegiatan di sekolah juga dilarang. Siswa baru dilarang menggunakan atribut atau mendapat penugasan yang tidak relevan dengan kegiatan belajar. Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk kegiatan PLS dalam bentuk apapun.

Segala tindak pelanggaran bisa dilaporkan ke portal "Sekolah Aman". Sanksi akan diberikan kepada siswa, guru, atau kepala sekolah yang terbukti lalai, melakukan, atau membiarkan terjadinya hal-hal yang dilarang dalam PLS. Sekolah bisa mendapat sanksi teguran tertulis. Sedangkan kepada siswa yang melanggar dikenakan tindakan edukatif. Kepala dinas pendidikan juga akan memberikan teguran tertulis kepada sekolah berupa penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, atau pemberhentian sementara kepada guru atau kepala sekolah yang melanggar peraturan. Kepala dinas juga dapat menghentikan bantuan pemerintah daerah atau melakukan penutupan sekolah.

Kini, para siswa baru tidak perlu takut lagi menghadapi hari-hari pertama di sekolah baru. Kekerasan senior dan hukuman yang mempermalukan sudah ketinggalan zaman dan bahkan dihindari. Sudah waktunya siswa baru diperkenalkan pada asyiknya belajar di sekolah baru. Para kakak kelas, jangan lupa tersenyum manis ya buat adik barunya di sekolah. ■



■ Semarak Gerakan
Hari Pertama Sekolah

Ada yang berbeda pada hari pertama masuk sekolah tahun ini yang sebagian besar berlangsung pada 18 Juli 2016.

Hari itu, 18 Juli 2016, gairah dan kegembiraan masyarakat dalam menyambut hari pertama sekolah terekam pada linimasa berbagai media sosial yang dipenuhi dengan tagar #HariPertamaSekolah.

Kemendikbud yang didukung segenap relawan pendidikan dan kebudayaan berhasil menggandeng beberapa media alternatif dan mencatat: pada 18 Juli 2016, tagar #HariPertamaSekolah berhasil menjadi topik paling populer (*trending topic*) di Indonesia.

Pada hari itu, muncul gerakan massif orang tua menyempatkan diri untuk mengantarkan anaknya ke sekolah dan berkenalan dengan para guru. Kenyataan itu sangat menggembirakan, mengingat Gerakan Hari Pertama Sekolah baru menginjak tahun kedua.

“Anak-anak kita menggunakan sebagian waktunya di sekolah. Mereka mengisi sepertiga harinya dengan berkegiatan di sekolah. Lima sampai enam hari dalam seminggu mereka belajar di sekolah, serta bertahun-tahun mereka berkegiatan di sekolah. Pada momen hari pertama itulah orang tua dapat melihat rumah kedua anak-anak. Ada wajah masa depan anak-anak kita di sekolah,” jelas Mendikbud yang kala itu masih menjabat Anies Baswedan, dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan yang biasa bertugas di Kemendikbud, Senin (11/7/2016).

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2016 mengimbau kepada para pimpinan daerah tingkat 1 dan 2 se-Indonesia untuk

mengajak dan menyampaikan pentingnya orang tua mengantarkan anaknya pada hari pertama sekolah. Surat edaran tersebut mengimbau agar hari pertama sekolah menjadi kesempatan untuk mendorong interaksi antara orang tua dengan guru untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak selama setahun ke depan. Kampanye ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian dan keterlibatan publik dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selanjutnya dalam surat edaran tersebut, Mendikbud mengajukan harapan kepada Kepala Daerah untuk memberi dukungan sebagai berikut.

- (1) Mendorong aparat sipil daerah untuk mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama dan memberikan dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah;
- (2) mendukung sekolah dalam menyambut siswa baru dan berinteraksi dengan orang tua;
- (3) menyampaikan pesan kepada instansi swasta di daerah agar memberi dispensasi bagi karyawan untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama; dan
- (4) menggunakan berbagai kanal komunikasi di daerah untuk menyebarkan pesan Hari Pertama Sekolah kepada publik luas.

Melalui gerakan ini, Kemendikbud ingin mengubah momen hari pertama sekolah menjadi momen yang menggembirakan dan menumbuhkan harapan. Momen hari pertama sekolah biasanya identik dengan kegelisahan para peserta didik yang takut membayangkan atmosfer kelas baru dan berjumpa dengan teman-teman dan guru baru yang belum dikenalnya. Rasa gelisah tidak hanya melanda para peserta didik, melainkan juga orang tua. Sejumlah pertanyaan muncul di kalangan orang tua, seperti: apakah mereka sudah cukup mengenal orang tua kedua (guru) bagi anak mereka di sekolah? Apakah mereka sudah mengetahui program yang dirancang untuk membentuk anak-anak mereka selama puluhan jam dalam seminggu? Apakah selama ini mereka mengabaikan kekhawatiran dan rasa takut anak-anak mereka dalam menghadapi hari pertama sekolahnya?

Lewat Gerakan Hari Pertama Sekolah, Kemendikbud berupaya memunculkan emosi positif tumbuh di seluruh penjuru sekolah dan dapat menjadi pondasi belajar peserta didik selama satu tahun ajaran ke depan. Momen ini sepatutnya menjadi pemantik semangat dan selebrasi perayaan kenaikan kelas. Peserta didik selayaknya bergembira karena akan berkenalan dengan teman-teman dan guru-guru baru.

Mendapatkan dukungan

Sejak awal, Kemendikbud optimis Gerakan Hari Pertama Sekolah akan mendapatkan dukungan banyak pihak. Optimisme itu terbukti di lapangan. Sebuah pemandangan langka yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan, Hari Pertama Sekolah tidak lagi dipandang sebagai sebuah

kegiatan dalam kalender akademik belaka, tidak pula diperlakukan sebagai program atau kebijakan kementerian, melainkan dibangun menjadi sebuah gerakan bersama. Hari Pertama Sekolah menjadi perayaan bersama seluruh lapisan dan unsur masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan yang mengalir dari berbagai unsur.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyambut baik dengan mengeluarkan surat bernomor B/2461/M. PANRBN/07/2016 tentang izin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari pertama masuk sekolah. Surat Menteri PAN-RB tertanggal 14 Juli 2016 menyatakan hari pertama sekolah adalah momentum penting bagi orang tua, siswa, dan sekolah guna membangun interaksi dalam ekosistem pendidikan. Hari pertama masuk sekolah juga dinilai penting dalam proses revolusi mental para pelaku pendidikan. Orang tua khususnya juga didorong untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan putera-puterinya.

Sejumlah kepala daerah pun setelah itu silih berganti menerbitkan surat dukungan serupa menyambut Surat Edaran Mendikbud tentang Hari Pertama Sekolah. Pada awalnya, imbauan ini sempat memunculkan pro-kontra. Gubernur DKI Jakarta termasuk yang awalnya tidak setuju. Namun, pada akhirnya semangat dan sambutan baik masyarakat membuatnya mengizinkan pegawai Pemda DKI untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah pada hari pertama.

Kalangan swasta pun seolah tak ingin ketinggalan momen kebersamaan ini. Sejumlah perusahaan swasta menyatakan diri mendukung serta mengizinkan karyawannya pergi mengantar



anaknyanya pada Hari Pertama Sekolah. Pengumuman dari perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya ada yang melalui email resmi dalam jaringan kantor, poster, dan media lainnya.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Bindikkel) Kemendikbud bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat telah membuat strategi sosialisasi sedemikian rupa dalam rangka Kampanye Hari Pertama Sekolah. Sosialisasi dimulai dari memasang spanduk di arus mudik jalan tol, *banner* dan poster di KRL *commuter line*, mengadakan kompetisi jurnalistik dengan tema Hari Pertama Sekolah, membuat iklan di radio, iklan video yang ditayangkan di berbagai televisi lokal se-Indonesia, hingga sosialisasi dalam jaringan melalui akun-akun dan portal Kemendikbud.

Tidak hanya itu, Direktorat Bindikkel juga menyusun dan menyediakan kit yang dibagikan kepada seluruh orang tua siswa pada 5.000 Satuan Pendidikan

binaan yang tersebar di Indonesia. Kit tersebut diantaranya berisi buku saku “Menjadi Orang Tua Hebat” untuk tiap jenjang pendidikan anak, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan pendidikan nonformal. Ada pula poster Jadwal Pelibatan Orang Tua di Sekolah, lembar refleksi untuk orang tua, dan stiker sahabat keluarga. Pembagian kit ini disambut baik di berbagai daerah karena selama ini belum pernah orang tua menerima buku yang dibuat khusus dari Kemendikbud untuk wali murid.

Lewat Gerakan Hari Pertama Sekolah, Kemendikbud berhasil menghimpun dukungan dan atensi masyarakat untuk aktif masuk ke dalam ekosistem pendidikan. Para orang tua sekali setahun mengantarkan anak-anak mereka tercinta pada Hari Pertama Sekolah. Sekali setahun, sebuah investasi kecil namun bermakna dan memiliki efek berkepanjangan bagi pemupukan kepercayaan diri putera-puteri bangsa dalam proses pendidikan mereka. ■



■ Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Gempita Siswa Mempelajari Seni

Ilmu pengetahuan membangun peradaban, seni budaya menyempurnakannya.

Sebagai kementerian yang membawahi bidang pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud menyadari pentingnya membangun lingkungan sekolah yang mampu mengakomodasi semua potensi anak didik. Sekolah bukan hanya tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aspek keterampilan dan intelektualitas. Sekolah, sebagaimana gagasan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar

Dewantara, selayaknya juga menjadi tempat bagi peserta didik untuk memperhalus budi pekerti dan membangun karakter.

Pendidikan kesenian di sekolah adalah wadah yang tepat untuk membangun karakter dan memperhalus budi pekerti. Dalam konteks yang lebih luas, kemajuan peradaban suatu bangsa bukan hanya dilihat dari pencapaiannya pada bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi



Siswi SD Sekota Bima menampilkan hasil pelatihan GGSM di Museum Asi Mbojo, Kota Bima, NTB

juga pada bidang seni budaya.

Pelajaran seni di sekolah bagaikan oase bagi para pelajar. Mereka mendapatkan kegembiraan dan kesempatan merayakan imajinasi seluas-luasnya lewat pelajaran seni rupa, seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni peran (teater). Namun, apakah hal ini sudah cukup untuk merangsang kecintaan pelajar pada dunia seni?

Kemendikbud lewat Direktorat

Kesenian Ditjen Kebudayaan pada tahun 2016 berupaya merancang terobosan kegiatan dalam pengajaran kesenian di sekolah. Kegiatan ini bernama Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). GSMS merupakan kegiatan implementasi peningkatan kompetensi siswa pada bidang seni media, seni pertunjukan, dan seni rupa tingkat dasar. Menariknya, kegiatan mengajar seni tidak hanya mengandalkan guru kesenian,

namun melibatkan seniman lokal di daerah tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada jenjang SD dan SMP.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan berbasis warisan budaya dan kearifan lokal. Hal ini juga merupakan salah satu strategi Direktorat Kesenian membuat generasi muda semakin menghargai kesenian lokal di daerah masing-masing. Harus ada ikhtiar memotivasi mereka untuk mencintai kesenian daerahnya sebagai bagian dari karakter yang mereka miliki.

GSMS pada awalnya dilakukan di tujuh provinsi: Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Tiap provinsi menunjuk lima sekolah sebagai tempat kegiatan. Kegiatan yang dikemas secara seru dan menyenangkan ini berhasil menyedot perhatian para pelajar. Total sekitar 200 pelajar pada setiap provinsi menjadi peserta. Sedangkan seniman lokal yang dilibatkan menjadi pengajar berjumlah lima orang pada tiap provinsi.

Tidak semua seniman lokal bisa berpartisipasi sebagai pengajar. Mereka harus melewati seleksi ketat. Seniman tersebut juga harus diakui keberadaannya oleh masyarakat, memiliki program kegiatan kesenian, dan memiliki karya. Mereka berasal dari bidang tari, musik, teater, seni rupa, dan media. Pengajar juga harus aktif berkesenian, lulus verifikasi, dan lolos seleksi tim narasumber dan Direktur Kesenian Kemendikbud. Ketatnya seleksi pengajar GSMS ini sangat beralasan. Kegiatan GSMS diharapkan tidak hanya mengajarkan praktik berkesenian, tetapi juga mengajarkan sejarah dan interpretasi kesenian di daerah

asal pelajar. Hal ini sesuai tujuan GSMS yang tidak hanya ingin mengenalkan seni, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap seni itu sendiri.

Banyak peserta mengaku senang bisa mengikuti acara ini. Alvin, peserta dari Bima yang kini duduk di bangku kelas VIII SMP, mengatakan, “Saya sangat senang dengan kegiatan ini. Saya bisa menyalurkan kreativitas di bidang kesenian dan bisa menunjukkan bakat serta keunggulan yang dimiliki anak-anak muda di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Bima.”

Salah satu kesenian yang dipelajari dan diajarkan GSMS di Kota Bima adalah *Tari Wura Bongi Monca* (Tarian Tabur Beras Kuning). Tarian ini adalah salah satu jenis tarian selamat datang atau penyambutan tamu dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Penari menari secara berkelompok dengan gerakan lemah lembut sambil menaburkan beras kuning sebagai simbol penghormatan dan harapan. *Tari Wura Bongi Monca* merupakan tarian tradisional yang masih populer dan sering dipentaskan pada berbagai acara di Bima.

Selain seni tari, peserta juga diajarkan salah satu lakon teater tradisional berjudul *La Hila*, yang berarti sang puteri menghilang. Lakon teater ini mengangkat cerita rakyat Bima. Dikisahkan, ada seorang puteri raja Bima terkenal karena kecantikan, kecerdasan, dan pengaruhnya yang besar. Sang puteri kemudian diperebutkan oleh para pangeran. Konflik tersebut membuatnya bersedih hati dan harus mengasingkan diri.

Khasanah kesenian lokal seperti inilah yang berusaha diangkat oleh GSMS. Para pelajar berlatih sungguh-sungguh karena mereka juga akan mendapatkan



Pementasan Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Bima, NTB

kesempatan untuk mementaskan kesenian yang mereka pelajari. Konsep pementasan dirancang seniman lokal yang menjadi pengajar para siswa. Para siswa bisa merasakan serunya pementasan seni yang mereka ikuti, bukan hanya sekali, tetapi tiga kali. Para pelajar di kota Bima misalnya, mementaskan kesenian yang mereka pelajari pada pada 20 Mei 2016 di Museum Kesultanan Bima. Pementasan gelombang kedua dan ketiga ditetapkan kemudian.

Direktorat Kesenian Kemendikbud berupaya agar GSMS dapat berkembang dan terlaksana di provinsi-provinsi lainnya di masa mendatang. Harapannya, semua pelajar dan seniman lokal memiliki

kesempatan untuk bertemu lewat gerakan ini, sebagai upaya mengenalkan kekayaan seni daerah masing-masing. Tentu pengalaman belajar seni langsung dari seniman lokal, bisa menjadi pengalaman yang mengesankan. Seperti Hamillah dari Bima yang mengaku bangga bisa belajar langsung dari seniman daerahnya.

“Saya bangga sekali dengan adanya kegiatan ini, karena menumbuhkembangkan minat dan bakat para pelajar. Mudah-mudahan acara ini berkelanjutan tidak hanya sampai di sini, tetapi untuk tahun ke depannya dapat ditingkatkan lagi,” ujarnya penuh harap. ■

■ Menggapai Mimpi Bersama Mentor

Suasana aula yang berada di lantai dua kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malam itu terasa hangat. Beberapa tokoh inspiratif berkumpul sambil sesekali tertawa mendengarkan cerita satu sama lain.

Tampak Tri Mumpuni, Djohan Pinarwan, Nila Tanzil, dan beberapa figur lain hadir di tengah-tengah tamu undangan, sebagian didampingi keluarganya. Mereka antusias menerima undangan Kemendikbud untuk berpartisipasi dalam kegiatan Belajar Bersama Mentor (BBM) 2016.

Di antara mereka, terlihat anak-anak muda usia belasan tahun, menyimak dengan penuh perhatian sambil sesekali bertanya. Mereka pun antusias karena akan mengikuti kegiatan yang diharapkan menginspirasi mereka untuk bersungguh-sungguh menggapai mimpi masing-masing. Mereka adalah partisipan dalam kegiatan Belajar Bersama Mentor

(BBM). Sedangkan para tokoh inspiratif dari berbagai bidang itu akan berperan menjadi mentor para pelajar SMA yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

BBM merupakan proyek percontohan (*pilot project*) yang lahir dari ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para siswa SMA/SMK untuk berani bermimpi melalui interaksi dan pengalaman belajar langsung dengan sejumlah figur yang sukses berkarya di bidang masing-masing. Untuk tahap awal, kegiatan ini diikuti 25 siswa-siswi asal Sumatera hingga Papua. Dengan konsep ‘tinggal sementara’ (*homestay*) bersama

mentor, para peserta diharapkan dapat merasakan langsung proses dan tahapan pembelajaran penuh selama mengikuti kegiatan BBM. Kegiatan ini juga merupakan program lanjutan dari kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional, yaitu Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) yang secara rutin diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah setiap tahun.

BBM memberikan kesempatan peserta yang berasal dari berbagai daerah untuk selama kurang lebih seminggu tinggal, berinteraksi, dan belajar secara langsung dengan para mentor di Jakarta. Pilihan peserta pelajar SMA/SMK karena pada jenjang inilah peserta dinilai sudah mulai berpikir tentang tanggung jawabnya kelak, termasuk jenis profesi yang akan mereka tekuni.

Melalui program ini, peserta diharapkan bisa mendapatkan inspirasi, pembelajaran, dan mengetahui proses secara langsung dari para mentor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Para peserta harus dapat memetik pelajaran, bahwa kesuksesan tidak diraih seketika. Kesuksesan lahir lewat



doa, kerja keras, serta keberanian untuk kembali bangkit setiap kali terjatuh karena hambatan.

Para mentor adalah tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang, termasuk yang berlatar belakang pimpinan perusahaan besar, pebisnis, tokoh di bidang industri kreatif, dan sebagainya. Mentor tidak sekadar ditunjuk, namun harus bersedia terlibat langsung untuk membimbing para siswa yang terpilih sebagai peserta. Tidak sedikit syarat dan ketentuan yang melekat dalam peran mentor tersebut. Antara lain, harus bersedia meluangkan

waktu untuk berinteraksi dengan peserta, bersedia rumahnya menjadi tempat tinggal bagi peserta selama program, bersedia untuk melibatkan dan mengajak peserta dalam kegiatan harian yang produktif dan membangun, berbagi cerita, ide, dan pengalaman, bersedia terlibat sepenuhnya dalam program sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta membantu membuka jejaring untuk peserta di masa mendatang.

Tak mudah melibatkan tokoh-tokoh di berbagai bidang untuk mau ambil bagian di tengah-tengah rutinitas kesibukan mereka.

Kegiatan BBM pada tahap awal ini melibatkan sebelas tokoh dari berbagai profesi, yaitu Billy Boen, Djohan Pinarwan, Edward Suhadi, Gustav Aulia, Ippho Santosa, Jamil Azzaini, Muhammad Assad, M Chozin Amirullah, Nila Tanzil, Tri Mumpuni, dan Yoris Sebastian.

Tiga nilai utama

Kegiatan BBM memiliki tiga nilai utama, yaitu **kegigihan, pendidikan, dan kepemimpinan**. Ketiga nilai ini disatukan dalam satu payung besar, yaitu **keteladanan**. Harapannya, para peserta dapat belajar ketiga nilai tersebut dengan cara



meneladaninya secara langsung dari para mentor. Kegiatan BBM 2016 diawali dengan pembekalan dari tim fasilitator tentang pengembangan diri, kepemimpinan, pemahaman lintas budaya dan interaksi antarpeserta. Setelah itu, selama tiga hari peserta akan mengikuti keseharian Mentor, tinggal bersamanya, dan belajar memaknai spirit hidup, kepemimpinan, kreativitas, integritas, dan ketekunan yang telah mengantarkan para tokoh menuju tangga kesuksesan.

Salah satu mentor inspiratif adalah Tri Mumpuni. Ia dikenal

sebagai salah seorang tokoh energi Indonesia yang berhasil mengembangkan kemandirian masyarakat di daerah terpencil melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Tri Mumpuni menceritakan sejak tahun 2005 ia dan keluarganya terbiasa menerima kunjungan siswa/mahasiswa asing yang ingin melihat langsung pengalamannya membantu masyarakat di daerah terpencil lewat program PLTMH.

Namun, menerima dan membimbing siswa SMA/SMK dari daerah berbeda, apa lagi dari daerah pedesaan di luar Jawa, merupakan pengalaman baru dan menarik bagi keluarganya. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, termasuk untuk soal sederhana seperti makan malam bersama khas keluarga perkotaan. Menggali latar belakang asal keluarga peserta pun tak kalah menarik, terutama mendengar cerita hidup dan keseharian mereka hingga berhasil terpilih mengikuti program ini.

“Saya hanya bisa berharap agar para peserta yang sudah dititipkan ke saya, bisa belajar mengatur waktu mereka dengan baik. Belajar bagaimana memanfaatkan waktu mereka yang singkat dengan produktif,” Ujar Tri Mumpuni.

Lain lagi cerita Ippho Santosa, salah seorang motivator sukses Indonesia yang juga terlibat sebagai mentor. Ia justru belajar dan menangkap pesan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat pembukaan kegiatan. Seperti cerita tentang peran HOS Cokroaminoto dalam mempengaruhi begitu banyak orang dalam hidupnya.

“Banyak hal yang terlihat singkat dan sederhana namun mempengaruhi banyak orang. Pertemuan kurang lebih 20 menit di kereta antara HOS Cokroaminoto

dan M.Natsir yang ketika itu masih belia telah mengubah pandangan dan menyemangati hidup M.Natsir. Sedangkan Bung Karno yang pernah tinggal di rumah HOS Cokroaminoto semasa hidupnya juga telah mengantarkannya menjadi proklamator Indonesia,” ujar Ippho mengulang kisah yang disampaikan Mendikbud.

“M. Natsir dan Soekarno tersengat oleh HOS Cokroaminoto. Sebaliknya, HOS Cokroaminoto menyengat dua pemuda yang telah mewarnai perjalanan negeri ini. Hidup itu perpaduan antara menyengat dan disengat. Begitulah kira-kira latar belakang program ini,” kata Ippho yang senang bisa terlibat dalam program BBM 2016.

Pada pembukaan kegiatan BBM, Mendikbud menyampaikan harapannya mengenai kegiatan ini. “Kita berharap Belajar Bersama Mentor dapat kita manfaatkan untuk benar-benar memunculkan inspirasi, sebab saya termasuk orang yang percaya bahwa inspirasi tidak datang dari isolasi, inspirasi hadir lewat interaksi. Dan BBM adalah wadah interaksi yang kita siapkan. Selamat berinteraksi dan saling belajar,” tegas Mendikbud yang langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorak-sorai para peserta kegiatan.

Audry Maura, salah seorang peserta asal Kalimantan Barat yang duduk di kelas XII SMA Taruna Bumi Khatulistiwa percaya, setiap anak di negeri ini memiliki berbagai impian. Maura sendiri memiliki impian besar untuk bertemu beberapa tokoh Indonesia, dan tanpa disangka-sangka mimpinya terwujud lewat kegiatan BBM 2016.

“Seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, anak daerah mengalami kesulitan untuk



Peserta BBM, Maura dan Moza saat mengikuti keseharian mentornya, Yoris Sebastian (kedua dari kiri)



Peserta Amrina Risda dan Ida Ayu, saat mendapat kesempatan bercerita dalam kegiatan pelatihan yang melibatkan mentor mereka (Jamil Azzaini) sebagai narasumber

memiliki banyak jaringan agar dapat bertemu dengan tokoh-tokoh sukses Indonesia. Atas dasar itulah kegiatan Belajar Bersama Mentor hadir untuk memutus gap antara kami yang ingin belajar langsung bersama para tokoh sukses,” kata Maura.

Lain Maura, lain pula Heru, siswa SMK Negeri 7 Samarinda, Kalimantan Timur yang mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Dia percaya bahwa BBM merupakan langkah awalnya untuk sukses. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan keluarga mentornya, Billy Boen. Ayah dari Billy Boen kemudian bercerita kepadanya bagaimana beliau dulu mendidik Billy Boen hingga sukses seperti saat ini.

“Pelajaran yang saya ambil selama mengikuti kegiatan bersama mentor adalah belajar untuk melakukan apa pun tanpa menunggu atau menunda-nunda terlalu lama. Jika kesempatan datang, maka ambillah kesempatan tersebut sebagai peluang emas, sebab kesempatan belum tentu datang dua kali. Billy Boen dan keluarganya juga mengajarkan saya tentang etika berperilaku yang ramah dan benar, beliau menginspirasi, sekaligus memotivasi saya agar dapat menjadi lebih hebat dari mentor-mentor saya nantinya,” cerita Heru penuh semangat.

Kegiatan BBM merupakan kesempatan besar bagi anak-anak dari berbagai penjuru negeri untuk mengenal keberagaman, dunia kerja, berjuang membangun jejaring, dan berusaha menggapai impiannya dengan sepenuh hati. Impian dan harapan anak-anak di seluruh negeri harus terus berlanjut, sebagaimana kegiatan BBM ini. Ya, mimpi memang harus diraih dan diperjuangkan. ■

■ Gerakan Literasi Nasional Menuju Masyarakat Sadar Literasi

Kondisi minat baca Indonesia terkait budaya literasi masih terbilang memprihatinkan. Peringkat Indonesia pada hasil tes dan survei berskala internasional terkait literasi juga tidak menggembirakan.



Sebagai contoh, berdasarkan studi “Most Littered Nation in The World” yang dilakukan *Central Connecticut State University* pada Maret 2016 lalu, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca (www.kompas.com, diunduh pada 4 Oktober 2016). Indonesia persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61).

Kenyataan ini menunjukkan usaha konkret ke arah penguatan budaya literasi perlu diperkuat dan dipercepat. Dalam laporan berjudul *Literacy for Life*, UNESCO menyatakan bahwa masyarakat literat bukan hanya masyarakat dengan tingkat melek huruf tinggi. Masyarakat literat adalah masyarakat yang mampu bertukar informasi secara bebas dan memanfaatkannya untuk

mengakses kesehatan, pendidikan, serta peluang ekonomi dan politik.

Melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kemendikbud memfasilitasi dan mendukung proses penumbuhkembangan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semua itu dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya

meningkatkan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, GLN berfokus pada lima pilar: peningkatan kapasitas pelaku/pegiat literasi, penyediaan bahan bacaan, penguatan kelembagaan, pelibatan publik, serta publikasi dan sosialisasi. GLN memayungi segala bentuk ikhtiar dan inovasi dari unit-unit Kemendikbud terkait literasi, yang menasar pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Gerakan literasi dalam keluarga

Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan keteladanan dan menanamkan kecintaan anak pada aspek literasi harus dioptimalkan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Dit. Bindikkel) Kemendikbud dalam buku saku pendidikan orang tua yang disusunnya dan laman Sahabat Keluarga, menyoroti pentingnya literasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengasuhan anak.

Pada buku saku berjudul “Menjadi Orangtua Hebat” untuk keluarga dengan anak usia dini, orang tua diajak untuk tidak hanya membacakan buku, tetapi juga mengobrol dengan anak tentang buku yang telah dibacakan. Terdapat pula panduan untuk orang tua dalam mendapatkan buku bacaan dan dalam meningkatkan penguasaan kosakata anak dengan cara-cara menyenangkan. Orangtua juga diimbau untuk tidak menuntut anak pada tahap usia dini untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung seperti halnya anak usia sekolah dasar (SD).

Untuk keluarga dengan anak usia SD, orang tua diajak untuk tidak hanya membacakan buku, tetapi juga mendorong anak untuk membaca sendiri dengan suara

nyaring. Manfaat aktivitas ini, antara lain, membuat anak belajar bagaimana mengekspresikan perasaan dan pikirannya, meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak, dan mendorong anak berpikir kritis.

Pada kegiatan Hari Pertama Sekolah, buku saku “Menjadi Orangtua Hebat” menjadi bagian dari *kit* yang dibagikan pada seluruh orang tua siswa di 5.000 sekolah rintisan (semua jenjang pendidikan) binaan Dit. Bindikkel. Buku saku tersebut beserta buku saku lainnya seperti “Mendidik Anak di Era Digital” dan “Pengasuhan Positif”, dapat diakses secara luas melalui laman Sahabat Keluarga (<http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id>). Laman ini juga menyediakan berbagai dongeng cerita rakyat untuk menambah referensi orang tua.

Gerakan literasi di sekolah

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS) juga gencar melakukan berbagai upaya terobosan. Salah satunya, memastikan keterlaksanaan kegiatan 15 menit membaca buku nonteks pelajaran sebelum jam pembelajaran dimulai setiap hari (Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti).

Sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan, Ditjen Dikdasmen telah menerbitkan desain induk, buku saku, dan panduan pelaksanaan untuk tiap jenjang pendidikan. Ditjen Dikdasmen juga telah menyosialisasikan informasi tersebut melalui serangkaian lokakarya bagi kepala sekolah. Lokakarya tersebut memberikan wawasan terkait pengadaan dan pengelolaan sudut baca, pojok literasi, dan lingkungan kaya literasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum jam pembelajaran.

Kemendikbud juga berupaya menyinergikan program literasi kementerian dengan berbagai program literasi yang sudah ada di daerah. Ditjen Dikdasmen selaku pelaksana telah menyelenggarakan serangkaian lokakarya sebanyak lima angkatan pada April-Mei 2016 untuk para Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) se-Indonesia.

“Gerakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” kata Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad.

Hasil pemantauan pelaksanaan GLS sepanjang tahun 2016 mencatat sebanyak 5.360

“Gerakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri”

[Dirjen Dikdasmen - Hamid Muhammad]

sekolah (lintas jenjang pendidikan) telah melakukan peningkatan kapasitas dan menjalankan kegiatan 15 menit membaca. Angka tersebut di luar sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program literasi sebelum GLS diluncurkan pada tahun 2016.

Pedoman penjenjangan buku nonteks pelajaran

Menyadari bahwa pendekatan minat baca anak tidak bisa “sekali pukul” (*one size fits all*) dan untuk memastikan kesesuaian bahan bacaan, Kemendikbud sedang menggodok pedoman penjenjangan buku nonteks pelajaran. Sepanjang tahun 2016, Ditjen Dikdasmen telah menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) tentang Pedoman Penjenjangan Buku I-III. Kegiatan ini berlanjut dengan Diskusi Kelompok Terpumpun tentang Pedoman Penjenjangan Buku IV pada akhir Agustus 2016 oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud. Hasil kegiatan berupa naskah pedoman

ditargetkan selesai pada akhir tahun 2016.

Penyusunan pedoman penjenjangan buku bertujuan untuk membuat perubahan dalam proses pembelajaran siswa dan dunia perbukuan. Kehadirannya sangat ditunggu sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Puskurbuk Kemendikbud, penerbit, dan sekolah.

“Sejak 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum punya sistem penjenjangan buku. Maka kegiatan penjenjangan buku adalah mahakarya untuk kepentingan bangsa,” ungkap Pangesti Wiedarti, Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah.

Penjenjangan buku merupakan hal yang signifikan karena berbagai manfaat yang dimilikinya. Antara lain, membuat anak menikmati bacaan, menjadikan anak pembaca mandiri, dan mempermudah guru dan orang tua dalam mengikuti perkembangan keterampilan membaca siswa/anak. Berbagai manfaat tersebut jelas tidak hanya

dapat dinikmati pada ranah pendidikan formal, namun juga nonformal.

Gerakan literasi dalam masyarakat

Tahukah Anda, banyak penduduk usia dewasa yang telah melek aksara menjadi tunaaksara kembali karena tidak adanya pembiasaan membaca atau tidak tersedianya program lanjutan bagi mereka. Untuk mencegah “kekambuhan keniraksaraan” pada penduduk dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara) Kemendikbud, melalui Gerakan Indonesia Membaca, mencanangkan Kampung Literasi di 20 kabupaten/kota kantong tuna aksara. Kampung Literasi menekankan pada peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber dayanya untuk berkembang secara sosial ekonomi.

Terkait dengan budaya baca ini, Dit. Bindiktara terus melakukan pengadaan buku



Festival Literasi 2016

KEGIATAN	KETERANGAN	PESERTA	LOKASI & TANGGAL
TBM DAN KAMPUNG LITERASI			
Pameran Karya/Produk TBM dan Kampung Literasi			
Lokakarya penulisan, mendongeng, keterampilan origami, kerajinan daur ulang			
Dialog/Sarasehan Literasi	Diskusi tentang Sastrawan Palu : Perkembangan Literasi di Sulawesi Tengah dari dulu hingga kini. Bersama Maman Suharman (ILC), Teguh Sudarisman, Dewi Lestari dan Riri Riza	Lebih dari 1.000 peserta	Palu, 18-20 Okt
Bedah Buku dan Peluncuran 100 buku Vokasi Menulis			
SD			
Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)	Mengusung tema "Bangsa yang Maju adalah bangsa yang menghargai budayanya." Meliputi lomba lukis, cipta puisi, dan membuat batik	102 siswa dari 34 provinsi	Jakarta, 4-7 Okt
Lomba Apresiasi Sastra Siswa	Lomba menulis cerita	165 naskah terpilih	Bogor & Jakarta, 8-11 Okt
SMP			
Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)	Mengusung tema "Bangsa yang Maju adalah bangsa yang menghargai budayanya." Meliputi lomba lukis, cipta puisi, dan membuat batik	136 siswa dari 34 provinsi	Jakarta, 5-7 Okt
SMA			
Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)	3 bidang yang dilombakan: (1) Sains dan Teknologi, (2) Matematika dan Rekayasa, dan (3) Ilmu Sosial dan Humaniora	190 siswa	Jakarta, 2-7 Okt
SMK			
Lomba Bahasa	Lomba debat bahasa Indonesia dan bahasa asing: Inggris, Jerman, Prancis, Korea, Jepang, dan Mandarin	372 Siswa	Pangkal Pinang, 10-15 Okt
KOMUNITAS LITERASI NON-TBM			
Lomba Membaca dan Meringkas Cerita Naratif untuk Anggota/murid komunitas literasi			Palu, 20 Okt
Lomba Meringkas dan Mengonversi Teks untuk Fasilitator/pegiat literasi			Palu, 21 Okt
Lomba Merefleksi Bahan Bacaan Literasi untuk Penumbuhan Budi Pekerti untuk Fasilitator & murid komunitas literasi			Palu, 22 Okt

bacaan untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sepanjang tahun 2016, sebanyak 50.976 eksemplar buku, telah disalurkan ke 310 TBM di 40 kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Gramedia, Dompot Dhuafa, *Asia Foundation*, dan 1001 Buku. Berbagai terobosan dalam penyaluran buku pun dilakukan.

Perhatian kepada komunitas literasi non-TBM juga terus diberikan. Sebanyak 68 fasilitator literasi dari 68 komunitas literasi non-TBM dari 34 provinsi telah mendapatkan peningkatan kapasitas selama tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbud. Sebagaimana pendidik di sekolah, fasilitator literasi adalah pejuang literasi di ranah nonformal. Mereka merupakan ujung tombak keberlanjutan sebuah komunitas literasi. Tentu kapasitas mereka perlu terus ditingkatkan.

Di sisi lain, untuk memperkaya khazanah cerita rakyat Indonesia, Badan Bahasa juga telah menghimpun 170 naskah cerita rakyat baru yang berasal dari para penulis di 34 provinsi. Sebanyak 170 naskah cerita rakyat saat ini tengah dalam proses penilaian di Pusurbuk.

Festival Literasi 2016

Bulan Oktober 2016 merupakan bulan literasi. Kemendikbud menyelenggarakan Festival Literasi melalui berbagai kegiatan di beberapa kota, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Selama Bulan Literasi, Lebih dari 2.000 orang dari 34 provinsi mengikuti kegiatan-kegiatan Festival Literasi. Peserta terdiri dari siswa/i sekolah formal, pegiat literasi, pengurus dan anggota TBM, serta fasilitator

Sebagai jembatan menuju masyarakat sadar literasi, GLN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anak bangsa melalui ruang-ruang keluarga, kelas, dan masyarakat yang kondusif dalam menumbuhkan budaya literasi

dan murid komunitas literasi non-TBM. Termasuk dalam rangkaian kegiatan Festival Literasi, Kemendikbud juga merayakan Hari Aksara Internasional di Palu, pada 20 Oktober 2016. Pada puncak peringatan tersebut, Kemendikbud juga meluncurkan aplikasi laman Donasi Buku (<http://donasibuku.kemdikbud.go.id>) yang memberikan layanan donasi *online* secara luas.

Neni Muhidin, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Palu, mengaku terkesan dengan keseluruhan Festival Literasi di Palu. Khususnya, pada sesi pertunjukan seni sastra tradisi kebudayaan Suku Kaili, Sulawesi Tengah, yakni “Vaino dan Dadendate.” Neni merupakan salah satu pegiat FTBM yang mengikuti seluruh sesi diskusi dan kelas lokakarya “*Make Your Own Book*” yang difasilitasi penulis Lala Bohang.

Neni mengharapkan gerakan literasi yang difasilitasi Kemendikbud ini dapat memicu sinergi yang lebih luas dengan kementerian/badan nasional lainnya, khususnya dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Sehingga dukungan pemerintah daerah dapat menjangkau lebih banyak kegiatan-kegiatan literasi di daerah.

Sementara itu Heni Wardatur Rohmah, Ketua FTBM DIY, mengungkapkan, “Setiap kegiatan yang saya ikuti memberi banyak manfaat. Pengembangan keilmuan, bekal dalam mengelola TBM serta jejaring baru adalah manfaat besar yang saya peroleh.”

Heni sebagai utusan FTBM DIY mengikuti pameran karya/produk TBM yang menginformasikan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh TBM di Yogyakarta. Heni juga menjadi salah satu narasumber dalam sesi berbagi tentang pemanfaatan media sosial untuk TBM.

“Saya berharap sinergi dari semua pihak bisa segera terwujud. Pendidikan formal dan nonformal, dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat akan makin membuat Gerakan Literasi Nasional menjadi kegiatan yang pada akhirnya membuat Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Heni penuh harap.

Jalan menuju masyarakat peduli literasi adalah jalan panjang dan berliku. Untuk meraihnya, perlu strategi yang tepat dan keterlibatan semua pihak. Sebagai jembatan menuju masyarakat sadar literasi, GLN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anak bangsa melalui ruang-ruang keluarga, kelas, dan masyarakat yang kondusif dalam menumbuhkan budaya literasi. ■

■ Pendidikan Keluarga Sebagai Gerakan Bersama



Menjalani kehidupan berkeluarga dan menjadi orang tua bukanlah perkara mudah.

Pola pengasuhan orang tua akan sangat menentukan pembentukan karakter anak. “Pengasuhan bukanlah urusan satu keluarga saja. Cara kita mengasuh anak kita kelak akan mempengaruhi masyarakat sekitar,” ujar Najeela Shihab, psikolog dan praktisi pendidikan.

Najeela menjadi narasumber pada salah satu sesi Pelatihan Calon Pelatih (TOT) “Penyelenggara Pendidikan Keluarga” di Tangerang, pertengahan Juni 2016. Kegiatan itu hanyalah salah satu program kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Dit. Bindikkel), Direktorat Jenderal Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD & Dikmas) Kemendikbud.

Keberadaannya di lingkungan Kemendikbud memang terbilang paling baru. Namun, sejak dibentuk pada akhir 2015, direktorat baru ini bekerja keras memunculkan berbagai program inovatif.

Program-program tersebut bertujuan mewujudkan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi penumbuhkembangan karakter dan budaya berprestasi anak. Sesuai tujuan pembentukannya, berbagai program tersebut berpusat pada penguatan kemitraan yang aktif dan positif antara tiga elemen: keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Melalui program pendidikan keluarga ini, kami mengajak para orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Dan kami juga mendorong pihak sekolah untuk aktif melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan di sekolah,” demikian ditegaskan Direktur Bindikkel Kemendikbud Sukiman.

Bukan perkara mudah untuk mewujudkan keberhasilan program pendidikan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahap awal program pendidikan keluarga diimplementasikan pada 5.000 satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan Pendidikan Nonformal) yang tersebar di 100 kabupaten/kota di 34 provinsi. Implementasi pada satuan pendidikan rintisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi satuan pendidikan lainnya.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan pelatihan pada bulan November 2015, dan kemudian berlanjut pada semester kedua 2016. Pelatihan sebagai penguatan kapasitas kembali diselenggarakan untuk satuan pendidikan rintisan. Penguatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembinaan pendidikan keluarga. Materi selama penguatan kapasitas

tersebut berdasarkan pada studi kebutuhan dan pengamatan Kemendikbud sebelumnya terhadap keterlaksanaan awal program pada satuan pendidikan rintisan.

Peserta penguatan kapasitas terdiri atas kepala sekolah, tutor, pengawas sekolah, dan wakil organisasi mitra. Mereka dilatih sekitar 300 fasilitator daerah tingkat provinsi. Para fasilitator daerah ini merupakan alumni Pelatihan Calon Pelatih yang berlangsung dalam kurun Mei-Juni 2016 di Yogya, Makassar, dan Tangerang dan berlangsung dalam tiga angkatan. Para fasilitator daerah ini kebanyakan berlatar belakang akademisi, praktisi, dan widyaiswara. Selama pelatihan, mereka dibekali dua materi utama: Pengasuhan Positif dan Mendidik Anak pada Era Digital,

Pada pelatihan yang didesain interaktif-partisipatif ini, pemahaman program dan kegiatan Dit. Bindikkel dimatangkan dan didiskusikan dalam sesi-sesi kelompok. Para fasilitator daerah ini mempunyai peran kunci dalam meningkatkan pemahaman, menginspirasi, dan menstimulasi kreativitas peserta penguatan kapasitas dalam mengelola pendidikan keluarga di satuan pendidikan masing-masing.

Orang tua sebagai pendidik

Selain para pendidik yang berada di sekolah, orang tua sebagai pendidik di dalam keluarga juga penting untuk ditingkatkan kapasitasnya. Kemendikbud menyadari adanya kesenjangan pada tingkat keterampilan orang tua dalam mendukung perkembangan sosial-emosional

dan kognitif anak. Masalah lainnya adalah masih rendahnya akses pada program keorangtuan dan praktik baik, serta terbatasnya pemahaman orang tua akan pentingnya kemitraan orang tua dengan sekolah. Hal inilah yang melandasi pentingnya penyusunan dan penerbitan beberapa judul buku saku, yaitu “Menjadi Orang Tua Hebat”, “Pengasuhan Positif”, dan “Mendidik Anak di Era Digital”.

Buku saku “Menjadi Orang Tua Hebat” dikemas dalam empat versi untuk keluarga anak berdasarkan rentang usia: usia dini, usia SD, usia SMP, dan usia SMA/SMK. Buku saku ini merupakan bagian dari *kit* yang dibagikan kepada semua orang tua siswa di 5.000 satuan pendidikan rintisan pada Hari Pertama Sekolah. Kolaborasi Kemendikbud dan komponen masyarakat, individual maupun lembaga, nyata terlihat dalam penyusunan buku-buku ini. Pada halaman akhir buku-buku ini terdapat daftar nama pakar dan lembaga (termasuk untuk anak berkebutuhan khusus), lengkap dengan informasi kontak yang dapat dihubungi jika orang tua atau sekolah membutuhkan konsultasi lebih lanjut.

Sedangkan “Pengasuhan Positif” dan “Mendidik Anak di Era Digital” merupakan dua topik yang mendesak untuk disebarluaskan berkaitan dengan semakin meningkatnya skala dan bentuk kekerasan yang terjadi, baik kekerasan verbal, fisik, maupun seksual. Topik-topik dalam buku tersebut menitikberatkan pada pendekatan preventif. Kemendikbud telah menghimpun materi substansi buku saku

“Mengimplementasikan program pendidikan keluarga adalah sebuah tantangan besar untuk mengubah wajah bangsa kita, 20 hingga 30 tahun ke depan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?”

[Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas - **Harris Iskandar**]

tersebut dan beragam artikel terkait pendidikan keluarga lainnya.

Masyarakat dapat mengaksesnya secara cepat dan mudah melalui laman Sahabat Keluarga (<http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id>). Laman Sahabat Keluarga ini juga memuat fitur “Forum” yang memberikan wadah platform diskusi dan berbagi praktik baik tentang pendidikan keluarga. Selain laman, Kemendikbud pun sedang menggodok video pembelajaran tentang pengasuhan yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang tua di Indonesia. Proses pembuatan video ini merupakan bentuk kolaborasi Kemendikbud dengan para penggiat pendidikan keluarga. Video pembelajaran ini direncanakan akan diluncurkan pada awal tahun 2017.

Sebagai bagian integral dalam program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Dit. Bindikkel telah menyusun modul pelatihan dan melatih perwakilan Komite Sekolah dari 42 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia pada Oktober 2016. Keseluruhan satuan pendidikan

yang diberi penguatan kapasitas tersebut telah dipilih oleh Kemendikbud sebagai sekolah percontohan dalam pelaksanaan PPK tahap pertama.

Berbagai upaya terus dilakukan, dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun terus digalang untuk mewujudkan pengarusutamaan pendidikan keluarga sebagai gerakan bersama. Pada 6-8 Maret 2016 di Jakarta, Kemendikbud menyelenggarakan Seminar Pendidikan Keluarga bertajuk “Maksimalkan Pelibatan Publik Melalui Pendidikan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam Menumbuhkan Budi Pekerti dan Budaya.” Seminar ini dihadiri sebanyak 652 utusan dari Dharma Wanita Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Seminar yang menggandeng Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK), Dharma Wanita Pengurus Pusat (DWPP), serta *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) ini, mengukuhkan peserta sebagai Duta Oase Cinta. Dalam sambutannya, Direktur Bindikkel Kemendikbud menyatakan

harapannya yang besar kepada para duta untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan menyebarkan praktik-praktik baik pendidikan keluarga melalui berbagai kegiatan.

Pada 20-22 Juli 2016, Dit. Bindikkel mengadakan lokakarya bertajuk “Strategi Implementasi Pendidikan Keluarga: *Sharing Praktik Baik*” yang menghadirkan para praktisi dan akademisi terkait pendidikan keluarga. Lokakarya tersebut membagi peserta ke dalam empat kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan strategi implementasi: (1) pendidikan keluarga berbasis keluarga; (2) pendidikan keluarga berbasis satuan pendidikan; (3) pendidikan keluarga berbasis masyarakat; dan (4) pendidikan keluarga pada kondisi khusus.

Selanjutnya pada 25 Juli 2016, Dit. Bindikkel kembali menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan Keluarga yang menghadirkan panelis dari dalam dan luar negeri untuk berbagi praktik baik tentang pendidikan keluarga. Berbagai kesepakatan hasil diskusi lokakarya dan seminar tersebut kemudian dianalisis dan digunakan dalam penajaman peta jalan program pendidikan keluarga.

“Mengimplementasikan program pendidikan keluarga adalah sebuah tantangan besar untuk mengubah wajah bangsa kita, 20 hingga 30 tahun ke depan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar. ■



Kemeriahan acara pembukaan O2SN 2016

■ Mengukir Prestasi, Membangun Karakter, dan Merekatkan NKRI

Upaya membentuk generasi muda berprestasi bisa dilakukan lewat ajang lomba sains, olah raga, dan seni.

Komitmen Kemendikbud untuk meningkatkan prestasi pelajar Indonesia ditunjukkan lewat penyelenggaraan lomba tingkat nasional setiap tahun untuk ketiga bidang ini. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud pada tahun 2016 kembali menyelenggarakan tiga kegiatan perlombaan siswa tingkat nasional di tiga kota berbeda.

Ribuan siswa SD, SMP, dan SMA dari 34 Provinsi berkompetisi

dengan gembira sambil bertemu sesama pelajar dari daerah lain. Bukan hanya sekadar lomba atau festival, OSN, O2SN, dan FLS2N bertujuan untuk membina karakter siswa yang penuh integritas, sportif, dan kreatif.

Para siswa yang berkompetisi pada ketiga kegiatan tersebut adalah mereka yang lolos seleksi di daerah masing-masing. Ajang lomba tingkat nasional ini bertujuan memunculkan juara-juara terbaik. Nantinya,

mereka akan mewakili Indonesia dalam berbagai ajang festival dan olimpiade pelajar tingkat internasional.

Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Sebanyak 1.579 siswa berkumpul di Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) XV pada 15-21 Mei 2016. Olimpiade pelajar ini mengusung tema “membangun integritas melalui prestasi sains.” Para pelajar yang mewakili 34 provinsi tersebut

Pelaksanaan 3 Perlombaan 2016

ACARA	LOKASI	TANGGAL	JUMLAH PESERTA
Olimpiade Sains Nasional (OSN)	Palembang, Sumatera Selatan	15-21 Mei 2016	1.579 siswa
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	DKI Jakarta	24-30 Juli 2016	4.126 siswa
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Manado, Sulawesi Utara	28 Agustus-3 September 2016	2.945 siswa

sangat antusias untuk berlomba menjadi yang terbaik di bidang sains.

Nuansa penuh semangat dari para siswa memenuhi Palembang Sport Convention Center (PSCC) saat acara pembukaan OSN 2016. Mendikbud dan Gubernur Sumatera Selatan turut hadir pada acara pembukaan tersebut untuk memberi dukungan langsung kepada ribuan siswa berprestasi ini.

Dengan tema tersebut, Kemendikbud berharap para peserta tidak hanya terfokus untuk berkompetisi dan meraih juara, namun juga bertekad memiliki integritas yang kokoh. Dalam sambutannya, Mendikbud menyampaikan, "Kebiasaan yang dapat ditumbuhkan lewat sains, dan mungkin adalah yang terpenting, yaitu kebiasaan menegakkan integritas. Kejujuran dalam sains sangat dijunjung tinggi."

Pada OSN 2016, ada 11 cabang lomba tersedia. Peserta dari tingkat SD berlomba di bidang matematika dan IPA. Jenis lomba di tingkat SMP meliputi matematika, IPA, dan IPS. Untuk tingkat SMA, terdapat 9 cabang lomba, yaitu matematika, fisika, kimia, informatika/komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumihan, dan geografi.

Penganugerahan medali OSN untuk masing-masing cabang lomba dilakukan saat penutupan acara yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi juara umum OSN dengan meraih 18 medali emas, 21 medali perak, dan 26 perunggu. Peringkat kedua ditempati Provinsi DKI Jakarta, dan peringkat ketiga ditempati Provinsi Jawa Barat.

Suksesnya penyelenggaraan OSN tahun ini berkat kontribusi besar dari tuan rumah, yaitu Pemprov Sumatera Selatan. Tahun depan, Pemprov Riau mendapat kesempatan untuk berkontribusi sebagai tuan rumah penyelenggaraan OSN 2017.

Maskot OSN 2016 adalah gajah, hewan pintar khas Sumatera. Gajah berbalutkan baju daerah Sumatera Selatan, yaitu kain tajung pinggang, dengan memakai tanjak di atas kepala. Tampil dengan kacamata sambil memegang satu gelas kimia, sang gajah mewakili cerminan seorang ilmuwan.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

"Kegiatan olahraga di sini bukan hanya untuk mencari pemenangnya, karena pemenang

dalam O2SN bukanlah yang juara, melainkan yang mau tetap berusaha dan bekerja keras untuk melampaui cita-citanya," ujar Mendikbud di hadapan lebih dari 4.000 siswa, saat acara pembukaan O2SN IX di JIExpo Kemayoran, Jakarta. O2SN berlangsung pada 24-30 Juli 2016.

Selaras dengan tema "Generasi Sportif, Bangsa Produktif", diharapkan O2SN tahun ini mengasah jiwa sportif dan persatuan dari para peserta yang berasal dari 34 provinsi tersebut.

Tahun ini, panitia O2SN melombakan 10 cabang yaitu catur, atletik, bulutangkis, tenis meja, karate, pencak silat, renang, bola voli, bocce, dan balap kursi roda. Komitmen menciptakan pendidikan inklusif juga terus dijalankan, dengan memfasilitasi siswa-siswi PKLK untuk turut mengasah sportivitas mereka dalam O2SN 2016. Sekitar 400 siswa-siswi PKLK dapat mengikuti 5 cabang olahraga, yaitu catur, atletik, bulutangkis, bocce, dan balap kursi roda.

Gaung sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi JIExpo saat pengumuman pemenang berlangsung sekaligus acara penutupan O2SN. Provinsi Jawa

Olimpiade Sains Nasional 2016

No.	CABANG LOMBA	SD	SMP	SMA
1	Matematika	●	●	●
2	IPA	●	●	
3	IPS		●	
4	Informatika/Komputer			●
5	Fisika			●
6	Kimia			●
7	Biologi			●
8	Kebumian			●
9	Geografi			●
10	Astronomi			●
11	Ekonomi			●

Barat meraih gelar juara umum dengan 26 medali emas, 15 medali perak, dan 14 perunggu. Gelar juara kedua diraih Provinsi Jawa Timur, disusul Provinsi Bali sebagai juara ketiga. Kerja keras para juara, disertai bimbingan pelatih dan dukungan pemda masing-masing, diharapkan memicu semangat peserta lain untuk pertandingan tahun depan yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara.

Jalak bali adalah spesies asli Indonesia yang, sesuai namanya, berasal dari Pulau Bali. Burung ini memiliki ciri tubuh berbulu putih, ujung ekor dan sayap berbulu hitam, dengan bagian pipi berwarna biru. Dengan memakai pakaian olahraga dan dikalungi medali emas, maskot yang diberi nama Si Jali ini mencirikan sosok juara bidang olahraga. Si Jali melambaikan sayapnya untuk menunjukkan keramahannya.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2016

No.	CABANG LOMBA	SD	SMP	SMA	SMK	PKLK
1	Catur	68	68	68	34	34
2	Atletik	136	136	204	68	102
3	Bulu tangkis	68	136	68	136	102
4	Tenis meja	68	68	68	136	
5	Karate	68	68	204	68	
6	Pencak silat	68	136	204	68	
7	Renang	68	68		34	
8	Bola voli	170	476		488	
9	Bocce					102
10	Balap kursi roda					68

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

Semarak Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu para siswa seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, pada 28 Agustus-3 September 2016. Mengusung tema, “berkreasi, berkarya, dan berprestasi”, antusiasme terlihat dari lonjakan jumlah peserta dari tahun ke tahun. Dari sembilan tahun penyelenggaraan, peserta FLS2N IX mencetak rekor terbanyak dengan jumlah 2.945 siswa. Ribuan siswa yang siap untuk berkreasi, berkarya, dan berprestasi, memenuhi Grand Kawanua, Manado untuk mengikuti pembukaan FLS2N oleh Mendikbud.

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 2016

No.	CABANG LOMBA	SD	SMP	SMA	SMK	PKLK
1	Menyanyi Solo	●	●	●	●	●
2	Vocal Group		●		●	
3	Musik Tradisional		●		●	
4	Gitar Solo		●	●	●	
5	Pianika	●				
6	Piano Klasik				●	
7	Tari Kreasi	●	●	●		
8	Tari Tradisional				●	
9	Pantomim	●				●
10	Cipta dan Baca Puisi	●	●	●	●	●
11	Pidato Bahasa Indonesia	●				
12	Debat Bahasa Indonesia		●			
13	Cipta dan Baca Cerpen		●		●	
14	Story Telling		●			
15	Baca Alqur'an	●	●			●
16	Monolog					
17	Gambar Bercerita	●				
18	Melukis					●
19	Desain Poster		●			
20	Desain Grafis					●
21	Seni Kriya		●			
22	Keterampilan Menganyam	●				
23	Teater				●	
24	Film Pendek			●	●	

Tahun ini, ada 24 jenis kesenian yang dilombakan. Banyaknya ragam kesenian tersebut diharapkan mampu mewadahi bakat siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan PKLK. Pelaksanaan lomba dibagi ke dalam beberapa titik di Manado. Para siswa yang dengan penuh percaya diri unjuk kebolehan mereka, membuat para pelatih, pendamping, dan para juri bangga melihat kreasi dan karya anak bangsa yang kreatif.

Pengumuman juara dilakukan secara unik karena nama juara tidak dibacakan seperti umumnya, melainkan melalui lukisan pasir yang digambarkan di tempat. Sang pelukis pasir melukis ikon Candi Borobudur, yang membuat peserta Jawa Tengah sontak berteriak dan bertepuk tangan riuh. Jawa Tengah kembali meraih gelar juara umum pada pergelaran FLS2N 2016. Menyusul, Jawa Barat dan DKI Jakarta yang berada pada urutan kedua dan ketiga.

FLS2N, yang merupakan festival dan lomba seni paling bergengsi di kalangan pelajar nasional, sangat dinantikan kembali tahun depan. Pelaksanaan FLS2N 2017 dipercayakan kepada Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah.

Tarsius, primata kecil ini sering disebut sebagai monyet terkecil di dunia, meskipun satwa ini sebenarnya bukan monyet. Terdapat tujuh jenis tarsius di Sulawesi, yang semuanya termasuk binatang langka dan dilindungi di Indonesia. Sebagai maskot FLS2N, tarsius digambarkan memakai baju adat khas Manado yang bertuliskan *I Love Manado*. Sambil memegang obor, tarsius siap berkarya dan berkreasi di FLS2N. ■

■ Reformasi Birokrasi Internal (RBI): Menciptakan Birokrasi Efektif dan Terpercaya

Mendengar kata “berurusan dengan birokrasi” selama ini identik dengan bayangan mengantri di kantor pemerintahan dan proses pengurusan administrasi yang bertele-tele.

Menyadari stigma tersebut, Kemendikbud terus berupaya melakukan Reformasi Birokrasi Internal (RBI).

Program ini adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi dilakukan untuk memenuhi pelayanan publik yang optimal dengan mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, sehingga birokrasi bisa menjadi transparan, efisien, dan cepat. Semua ini demi mencapai apa yang disebut dengan istilah *Good Governance*.

Dalam RBI, langkah awal dalam melakukan reformasi birokrasi yang dilakukan Kemendikbud adalah mengidentifikasi permasalahan internal yang dihadapi. Permasalahan umum yang ditemukan dalam internal Kemendikbud yaitu tumpang tindih tugas dan fungsi beberapa unit kerja, kurang optimalnya

pelaksanaan tugas dan fungsi karena beban kerja yang tidak berimbang antarunit, beban kerja pelaksana teknis yang bervariasi, dan adanya fungsi kebudayaan yang semula ditangani Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Melihat permasalahan tersebut, Kemendikbud merumuskan delapan area sebagai fokus RBI. Delapan area tersebut adalah:

- (1) manajemen perubahan, (2) penguatan pengawasan, (3) penguatan akuntabilitas kerja, (4) penguatan kelembagaan, (5) penguatan tata laksana, (6) penguatan sistem manajemen SDM aparatur, (7) penguatan undang-undang, dan (8) peningkatan kualitas layanan publik.

Pada setiap area tersebut, Kemendikbud telah melakukan upaya perbaikan reformasi yang konkret, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan manajemen perubahan berupa perencanaan arah kebijakan birokrasi dalam kepemimpinan,

pemetaan kebutuhan, dan penggerak. Kegiatan yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Manajemen Perubahan untuk merumuskan budaya kerja yang dibutuhkan dan kesenjangan internal.

Selain itu, tim ini juga menyusun strategi manajemen perubahan, strategi komunikasi, sosialisasi melalui poster ataupun infografis, penerapan budaya kerja, dan evaluasi.

Untuk penguatan pelaksanaan pengawasan, Kemendikbud telah membentuk Unit Pengawasan Gratifikasi. Tim ini membuat sistem ‘*whistle blower*’ dan berhasil mendukung Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut. RBI juga mendukung penguatan antikorupsi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan serta efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan status opini BPK, dan menurunnya



Kemendikbud mendorong interaksi antar aparatur yang dialogis dan terbuka

penyalahgunaan wewenang.

Dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas kerja, RBI juga mendorong SDM untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran kepada atasan. Penguatan kelembagaan dicapai dengan menyusun rincian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi unit kerja. Sedangkan dalam penguatan tata laksana, kriteria keberhasilannya dilihat dari peta bisnis di lingkungan Kemendikbud. Hal ini berkaitan pula dengan penguatan sistem manajemen aparatur Negara. Terobosan yang telah dilakukan oleh Kemendikbud yaitu melakukan rekrutmen CPNS secara terbuka, mengevaluasi jabatan, penilaian pejabat, posisi jabatan terbuka, dan menggunakan teknologi informasi dalam bimbingan teknis.

Yang terakhir namun sangat penting adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik melalui layanan

peserta didik, layanan satuan pendidikan, layanan substansi pendidikan, layanan guru dan tenaga kependidikan, layanan pendidikan orang tua dan keluarga, serta layanan budaya dan kebahasaan. Untuk itu Kemendikbud terus berupaya melakukan penguatan Unit Layanan Terpadu (ULT).

Terobosan RBI yang paling terasa di Kemendikbud adalah pengembangan “e-government” secara terintegrasi sebagai pedoman tata laksana. Teknologi dan sistem yang spesifik ini mendukung pendataan, penganggaran, kepegawaian, dan pelaporan. Misalnya dalam surat menyurat, tidak perlu lagi proses manual yang memakan waktu dan sulit dilacak. Kemendikbud telah menerapkan manajemen kearsipan melalui “e-office” di mana semua surat dan disposisi dapat diakses dan dilihat statusnya selama 24 jam.

Mengapa penerapan RBI di delapan area tersebut

menjadi sangat penting? Karena Kemendikbud mengelola anggaran sebesar Rp53 triliun dengan 16.890 pegawai. Dengan jumlah yang sangat besar itu, Kemendikbud memiliki tanggung jawab besar pula terhadap publik. Birokrasi tidak boleh lagi dijalankan secara apa adanya. Birokrasi justru harus menjadi dasar penunjang semua program pendidikan dan kebudayaan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

RBI dengan pendekatan penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu dan akses, dan pengembangan efektivitas birokrasi, menjadi jalan dalam memperbaiki tata kelola dan pelibatan publik. Kini masyarakat tidak perlu enggan berurusan dengan birokrasi di Kemendikbud, karena proses bertele-tele sudah menjadi cerita lama, dan telah digantikan dengan teknologi serta dedikasi. ■

■ Pengembangan Tata Kelola Kemendikbud Menjawab Tantangan Zaman

Kemendikbud berusaha maksimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Tujuannya agar tata kelola Kemendikbud menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan amanah pemerintahan. Dalam perkembangannya, tata kelola di lingkungan Kemendikbud saat ini tidak lagi bersifat manual dan telah memanfaatkan kemajuan TIK.

Sejak 2011 hingga saat ini, satu per satu sistem berbasis elektronik dibuat dan disempurnakan, untuk mempermudah tata kelola administrasi dan manajemen pegawai, persuratan, hingga keuangan. Upaya ini merupakan salah satu wujud Reformasi Birokrasi Internal (RBI), langkah awal dari cita-cita besar Presiden Joko Widodo untuk kebangkitan bangsa pada era digital. Presiden Jokowi pernah menegaskan untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, dibutuhkan perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan.

Kemendikbud berkomitmen penuh untuk mengembangkan sistem tata kelola elektronik. Buah nyata dari sistem elektronik adalah

penghematan anggaran, efisiensi waktu, serta transparansi data. Hingga kini, Kemendikbud berhasil membangun enam sistem tata kelola berbasis elektronik. Ada tiga sistem yang sudah berjalan, yaitu Simpeg, Simkeu, dan *e-office*. Tiga sistem lain masih dalam pengembangan, yaitu *e-planning*, Simproka, dan Simtrada.

1. Simpeg (Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian)

“Rekrutmen Hingga Asesmen Pegawai yang Objektif, Transparan, dan Akuntabel”

Kemendikbud meyakini bahwa SDM yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan aset penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian. Oleh karenanya, kualitas PNS harus terus dijaga dan ditingkatkan, bahkan sejak masa rekrutmen. Secara khusus, Biro Kepegawaian Kemendikbud dipercaya melaksanakan tugas terkait kepegawaian di lingkungan Kemendikbud.

Biro Kepegawaian telah memanfaatkan TIK dalam menciptakan Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), yang di dalamnya terdapat seluruh data kepegawaian. Simpeg dikembangkan untuk mengawal kualitas dan kinerja pegawai—sejak dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, pengelolaan mutasi, hingga asesmen pegawai secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Simkeu (Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan)

“Akses Data Keuangan Realtime yang Cepat dan Tepat”

Penganggaran dan realisasi daya serap secara *real-time* (seketika) menjadi perhatian khusus Kemendikbud. Apalagi upaya untuk mengintegrasikan data keuangan dari seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud, sungguh pekerjaan yang memakan banyak waktu dan tenaga. Oleh karenanya, Biro Keuangan Kemendikbud meluncurkan Simkeu (Sistem Informasi dan Manajemen

Kuangan) yang berisi data anggaran seluruh unit utama dan satker sampai dengan digit terakhir. Simkeu memungkinkan pimpinan memantau realisasi anggaran secara *online* dan *real-time*, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan terkait anggaran dengan cepat dan tepat.

Pengisian data ke Simkeu dilakukan oleh operator satker masing-masing melalui laman <http://simkeu.kemdikbud.go.id/>. Apabila operator menemui masalah saat menginput data ke sistem, Biro Keuangan membuka *helpdesk* Simkeu di nomor (021) 500005 ext. 4 untuk melayani segala pertanyaan terkait teknik pengisian Simkeu. Langkah ke depan, Kemendikbud terus berkomitmen mengembangkan dan memperkuat sistem aplikasi MoLK (Aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran), Laporan Keuangan, dan Kinerja Keuangan.

3. *E-office (Electronic Office)*

“Kirim, Baca, Disposisi Surat dalam 24 Jam”

Sejak akhir tahun 2011, Kemendikbud telah mulai menerapkan Aplikasi Persuratan Elektronik (*e-office/electronic office*). *E-office* merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan persuratan di lingkungan Kemendikbud. Konsepnya membuat proses persuratan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, kapan saja, dan di mana saja. Cukup mengakses laman <https://persuratan.kemdikbud.go.id> dan memasukkan nama dan kata sandi, seluruh pegawai Kemendikbud dapat mengetahui segala macam surat yang ditujukan untuk dirinya. Atasan yang mendisposisikan surat juga dapat memantau status surat tersebut.

Sebelum adanya *e-office*, sistem persuratan di Kemendikbud berlangsung manual dan melalui proses panjang yang memakan waktu lama dan memungkinkan kesalahan kirim. Namun sekarang, Biro Umum bekerja sama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom), telah menghadirkan *e-office* sebagai solusinya.

Dampak nyata yang dirasakan adalah tradisi baik mengurangi kebutuhan penggunaan kertas (*paperless*), media penyimpanan arsip fisik, dan kerepotan perangkat pengganda dokumen. Pengelolaan surat secara elektronik juga mengurangi resiko kehilangan surat, dan mempermudah pencarian surat. Agar tingkat kerahasiaan informasi juga lebih terjamin, aplikasi *e-office* mengatur hanya pihak yang berhak mengetahui informasi tersebutlah yang bisa mengaksesnya.

Pada akhir tahun 2016, ditargetkan *e-office* sudah diimplementasikan di seluruh satuan kerja Pusat, sedangkan implementasi di seluruh UPT Daerah ditargetkan akhir tahun 2017.

Permutakhiran *e-office* juga dilakukan secara periodik. Pada tahun 2017, *e-office* akan dibuat dalam versi Android dan iOS. Pada tahun depan juga, fitur tanda tangan elektronik akan mulai diujicobakan dengan didukung regulasi yang mengesahkan bentuk tanda tangan elektronik untuk surat-surat yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Biro Umum dan Pustekkom akan terus berinovasi dalam mengembangkan *e-office*, untuk menghadirkan layanan persuratan yang efektif dan efisien.

4. *E-planning (Electronic Planning)*

“Demi Perencanaan Kemendikbud yang Berkualitas dan Akuntabel”

Beberapa masalah yang dihadapi selama ini dalam proses perencanaan di Kemendikbud antara lain penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang reaktif dan pengendalian dalam proses penyusunan RKA. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) sedang mengembangkan sistem *e-planning*. Ini sebuah upaya untuk memastikan proses perencanaan Kemendikbud terintegrasi dengan kebijakan dan program prioritas, serta menghasilkan dokumen anggaran yang akuntabel.

Dengan *e-planning*, penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dilakukan via daring dan terintegrasi, dengan menggunakan pusat data (*database*) tunggal. Dengan demikian, seluruh siklus perencanaan dan penganggaran dapat terekam dan dianalisa dalam waktu yang singkat. Pengembangan *e-planning* bukan semata pengembangan “aplikasi berbasis TIK”, tetapi merupakan solusi peningkatan kualitas perencanaan yang menuntut komitmen, perubahan perilaku, dan pengembangan kapasitas SDM.

Pengembangan *e-planning* dimulai Biro PKLN sejak Juni 2016. Untuk saat ini, fase yang telah disiapkan adalah fase Penyusunan RKA sampai menjadi DIPA. Dalam pengembangannya, Biro PKLN bekerjasama dengan Inspektoral Jenderal dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat) Kemendikbud akan terus mengembangkan sistem *e-planning*, demi kualitas perencanaan Kemendikbud yang lebih baik.



Perkantoran Kemendikbud, Senayan

5. Simproka (Sistem Pemantauan dan Pengendalian Luaran Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

“Memantau Capaian Luaran Program Cukup dengan Simproka”

Kemendikbud terdiri dari 386 satuan kerja yang tersebar di pusat, daerah, dan bahkan luar negeri. Tentunya sulit melakukan pemantauan dan pengendalian luaran program dari sekian banyak satker. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar

Negeri (PKLN) mengembangkan Simproka. Simproka menyajikan informasi dalam bentuk numerik dan grafik data olahan capaian luaran program dan kegiatan pada laman <http://simproka.kemdikbud.go.id/>.

Simproka tidak hanya memantau dan mengendalikan kegiatan internal, namun juga bidang pendidikan dan kebudayaan, meskipun di luar Kemendikbud, seperti:

- a. Rencana Aksi Nasional (RAN), seperti RAN Janji Presiden dan Wakil Presiden; dan RAN Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
- b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti Goal 1: Tanpa Kemiskinan; Goal 2: Tanpa Kelaparan; Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Goal 4: Pendidikan Berkualitas; dan Goal 5: Kesetaraan Gender.

Pada saat ini, Simproka telah aktif untuk fungsi pemantauan per triwulan. Ke depannya, akan dilakukan sinkronisasi berdasarkan 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian; dan 2) Perpu No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta persandingan data SP2D yang bersumber dari SPAN Kemenkeu dengan data SPM yang bersumber dari SAS Satker Kemendikbud.

6. Simtrada (Sistem Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan)

Tahun 2013, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) memulai pengembangan Simtrada, sebuah aplikasi berbasis web yang memudahkan pemantauan kegiatan dan anggaran bidang pendidikan di daerah (DAK fisik dan DAK nonfisik). Saat mengakses laman

Telah menjadi komitmen Kemendikbud untuk terus berinovasi dengan sistem tata kelola elektronik, demi penyediaan data yang akurat, transparan, dan akuntabel

<http://simtrada.kemdikbud.go.id/>, akan muncul informasi berupa grafik dan angka yang berasal dari data realisasi pelaksanaan DAK di 34 dinas pendidikan provinsi dan 514 dinas pendidikan kabupaten/kota.

Operator dari masing-masing dinas memasukkan data realisasi yang terdiri terdiri: 1) BOP PAUD yang dikelola oleh Ditjen PAUD dan Dikmas; 2) BOS SD, SMP, SMA, dan SMK serta DAK SD yang dikelola oleh Ditjen Dikdasmen; dan 3) TPG dan Tamsil yang dikelola oleh Ditjen GTK. Selanjutnya melalui mekanisme integrasi layanan web, Simtrada mentabulasi dan mengagregasi data yang ditarik secara daring dari aplikasi-aplikasi pelaporan realisasi DAK bidang Pendidikan di lingkungan Kemendikbud.

Simtrada sepenuhnya siap melakukan integrasi data untuk memantau realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2016 sampai di tingkat kabupaten/kota. Tahun depan, akan terus dilakukan inovasi pengembangan Simtrada, yaitu dengan fasilitasi modul integrasi

data yang bekerjasama dengan Kemenkeu, serta fitur pengingat (*reminder*) pemutakhiran data secara otomatis untuk semua kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melalui mekanisme email dan SMS.

Keenam sistem di atas merupakan bentuk terobosan Kemendikbud dalam melakukan reformasi birokrasi pada era digital. Saat ini, aplikasi *e-planning*, Simproka, dan Simtrada yang baru dimulai 2016, masih dalam tahap pengembangan karena belum mencapai satu siklus pemanfaatan sistem. Ketiga sistem akan terus disempurnakan dengan target sampai akhir 2017. Keenam sistem akan sepenuhnya siap dimanfaatkan secara optimal mulai awal 2018.

Namun, tidak cukup dengan keenam aplikasi ini. Kemendikbud akan terus mengembangkan sistem elektronik untuk fungsi lainnya. Telah menjadi komitmen Kemendikbud untuk terus berinovasi dengan sistem tata kelola elektronik, demi penyediaan data yang akurat, transparan, dan akuntabel. ■

■ Uniknya Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan 2016



Unik dan berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya! Itulah kesan yang tampak dari ajang besar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang berlangsung 21-23 Februari 2016 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok.

Kesan berbeda itu terlihat bukan hanya dari tema yang diusung, tetapi juga model pelaksanaan hingga rangkaian acara yang lebih dekat dengan masyarakat peduli pendidikan.

Tema yang diusung adalah “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah”. Kemendikbud gencar menekankan pelibatan publik dalam berbagai programnya. Pendidikan dan kebudayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat di dalamnya.

RNPK adalah ajang rembuk dan diskusi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Tujuannya, menjalin komunikasi dan mencari masukan terhadap berbagai isu pendidikan dan kebudayaan. Karena itu, RNPK 2016 mengundang berbagai pihak, antara lain para kepala dinas dari sejumlah pemda, Komisi X DPR RI, kementerian lain yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, UPT Kebudayaan, LSF, dewan kesenian daerah, LPMP, PP & BP Paud Dikmas, IKJ, ISI, ISBI, BNSP, BAN, media massa, dan para pegiat serta afiliasi pendidikan.

Penyelenggaraan acara ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015 dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan 2016. Juga, menggali informasi untuk masukan penyusunan kebijakan 2017, menyepakati pembagian pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan 2017, peningkatkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah serta publik, terkait pendidikan dan kebudayaan. Ada tiga bagian utama dalam RNPK 2016, yaitu paparan narasumber, sidang pleno/sidang

komisi, dan pameran. Ketiganya menampilkan gebrakan dan warna baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.

Sidang pleno/sidang komisi menjadi ajang diskusi yang hangat. Seluruh peserta dibagi ke dalam tujuh komisi. Mereka dengan antusias mendiskusikan permasalahan dunia pendidikan dan kebudayaan sesuai topik setiap komisi. Tujuh topik yang dibahas adalah PAUD dan Dikmas dalam mencerdaskan masyarakat; Wajib Belajar 12 tahun; tatakelola guru serta tenaga kependidikan; kurikulum, penilaian pendidikan, dan akreditasi; bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional; membangun budaya dan budaya membangun; serta efektivitas birokrasi, pelibatan publik, dan hubungan pusat daerah.

Peserta antusias mengeluarkan aspirasi dan ide-ide mereka. Tidak jarang muncul perdebatan sengit yang seru antarpeserta. Mulai dari pejabat eselon satu hingga aktivis pendidikan duduk sejajar memberikan pendapatnya. Lewat diskusi, tukar pikiran, dan perdebatan bergaya rembuk itu, muncul berbagai konklusi menarik. Adapun hasil diskusi dari ketujuh topik tersebut dijadikan kesepakatan bagi para peserta dalam menjalankan tugasnya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan.

Hasil kesimpulan dari Komisi I adalah memprioritaskan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses, mutu, dan tatakelola serta pelibatan publik pada PAUD dan pendidikan masyarakat. Komisi II menghasilkan kesepakatan untuk memperluas akses, peningkatan mutu, serta tatakelola dalam program Wajib Belajar 12 tahun. Komisi III mengutamakan pengembangan

keprofesian berkelanjutan (PKB) guru pembelajar dan sertifikasi guru. Komisi IV menekankan percepatan implementasi Kurikulum 2013, peningkatan mutu pelaksanaan, kemanfaatan ujian nasional, peningkatan budaya mutu dan pemanfaatan akreditasi, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan.

Komisi V yang membahas tentang bahasa Indonesia menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Caranya, dengan tindakan penyebaran bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing), pengayaan kosakata bahasa Indonesia, serta penumbuhan budaya literasi. Komisi VI mengutamakan upaya membangun budaya dan budaya membangun untuk pengelolaan data kebudayaan dan inventarisasi warisan budaya benda (*tangible heritage*) dan warisan budaya takbenda (*intangible heritage*). Sedangkan diskusi Komisi VII menghasilkan efektivitas pelibatan publik dalam upaya penataan regulasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah.

Warna baru

RNPK 2016 juga menampilkan warna baru. Warna baru itu misalnya terlihat dalam paparan narasumber yang cair dan hidup. Kemendikbud menampilkan sejumlah tokoh muda sebagai narasumber. Ada Handry Chaniago (*CEO General Electric*) yang tampil memukau hadirin dengan topik gerakan revolusi mental di bidang pendidikan dan kebudayaan. Aktivis Ade Irawan (*Indonesia Corruption Watch, ICW*) mendapatkan



sambutan hangat saat menjelaskan strategi penyimpangan dalam pengelolaan program dan anggaran. Abdul Malik Gismar (*Knowledge & Resource Center*) juga menarik perhatian peserta saat membicarakan data dan strategi penguatan sinergitas pelaksanaan pendidikan di pusat dan daerah. Pemaparan ditutup dengan aksi kocak Rene Suhardono yang menyulap Pusklat Sawangan menjadi arena Star Wars. Rene berhasil mengocok perut peserta sekaligus memberikan materi tentang membangun daya imajinasi, kreativitas, dan kualitas sumber daya manusia lewat membaca.

Kemendikbud juga meluncurkan tiga produk unggulan pendidikan. Yaitu, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang

dapat diakses melalui daring dan buku cetakan, portal Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, dan portal Sekolah Kita. NPD merupakan terobosan dalam transparansi data pendidikan ke publik yang berisi data anggaran, penyelenggaraan pendidikan, dan informasi lainnya yang disajikan secara detail di tiap daerah. Layanan ini dapat diakses siapa saja karena disajikan secara digital. Portal pendidikan adalah wajah Kemendikbud yang ditampilkan secara digital. Portal ini berisi pelayanan informasi pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kebutuhan.

Sedangkan Sekolah Kita adalah aplikasi layanan tentang informasi dan data seluruh sekolah di Indonesia. Dengan tampilan yang ramah bagi penggunaanya,

aplikasi Sekolah Kita bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang sekolah dalam bentuk digital. Aplikasinya bisa diunduh dengan ponsel pintar.

Hal lain yang juga baru dan unik adalah penggunaan *graphic recording*. Di setiap komisi terdapat ilustrator-ilustrator yang setia mengikuti diskusi dan menuangkannya lewat ilustrasi spontan yang menarik. Jadi, di akhir diskusi, kesimpulan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga gambar-gambar yang lucu dan informatif.

Sepanjang rangkaian acara RNPk, Kemendikbud juga memberi kesempatan pegiat pendidikan untuk memamerkan program, kegiatan, dan produk yang mereka hasilkan. Pameran



Melalui ajang rembuk nasional ini, semua pelaku pendidikan dan kebudayaan kembali diingatkan untuk berkomitmen dalam melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatannya

ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para peserta tentang berbagai produk unggulan pendidikan dan kebudayaan, serta informasi dari pihak eksternal (di luar Kemendikbud) yang dapat bermanfaat dan meningkatkan pemahaman dan kerja sama dalam melaksanakan tugasnya.

Peserta pameran antara lain Ruang Guru, World Bank, Google, Microsoft, Ini Budi, SEAMEO Center, Taman Gagasan Anak, animator Adit Sopo Jarwo, ACDP,

Komunitas Keluarga Kita, dan Guru Belajar. Berbagai inovasi dunia pendidikan memukau para peserta RNPk 2016. Microsoft, misalnya, menampilkan teknologi kelas abad XXI yang terintegrasi lewat perangkat komputer. Alat sebesar mesin foto kopi tersebut berisi pilihan komputer tablet yang bisa digunakan setiap murid dalam satu kelas. Komputer ini akan digunakan guru sekaligus mengendalikan materi yang diajarkan lewat sistem.

Pelaksanaan RNPk 2016 terbukti memberi angin segar bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Melalui ajang rembuk nasional ini, semua pelaku pendidikan dan kebudayaan kembali diingatkan untuk berkomitmen dalam melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatannya. Hal penting lainnya adalah terbangunnya jaringan kerja yang semakin erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. ■



Pemberian Anugerah PAUD oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo

■ Penguatan PAUD: Titik Awal Membangun Generasi Emas

Mereka yang paham pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pasti senang jika berkunjung ke PAUD KM Nol di lingkungan Kemendikbud.

Di tempat ini, terdapat pembagian ruang secara tematik. Ada area bermain peran dilengkapi kostum-kostum berbagai profesi, ruang musik dengan berbagai alat musik tradisional dan modern, area balok dan gerak, hingga area untuk bermain air dan pasir.

Meskipun ditujukan secara khusus bagi anak karyawan Kemendikbud, masyarakat juga dapat mendaftarkan anaknya ke PAUD KM Nol dengan biaya terjangkau. Peresmian PAUD percontohan ini pada 20 Juni 2016 menarik perhatian publik karena fasilitas yang lengkap dan tampilan ruangnya yang penuh warna. Nama PAUD KM Nol dipilih karena pada dasarnya pendidikan dimulai

sejak anak berusia 0 tahun. PAUD ini juga berada di lingkungan Kemendikbud yang merupakan titik 0 pendidikan di Indonesia.

PAUD ini diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. PAUD KM Nol mencontohkan desain PAUD yang baik bukan berarti harus berisi peralatan canggih dan mahal. Lebih penting buat PAUD menyediakan perangkat dan permainan warna-warni yang mengedepankan aspek kreativitas.

Peresmian PAUD KM Nol sejalan dengan lima misi utama pembangunan PAUD yang dicanangkan Kemendikbud: meningkatkan ketersediaan layanan PAUD, memperluas keterjangkauan layanan PAUD, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan PAUD, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan PAUD, serta menjamin kepastian memperoleh layanan PAUD. Lima hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan, mengingat anak usia dini mengalami perkembangan otak yang sangat pesat.

Anak membutuhkan banyak stimulasi agar perkembangannya menjadi lebih optimal. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan korelasi keterlibatan anak di PAUD dengan prestasi belajar pada jenjang sekolah berikutnya, hingga penghasilan yang diperoleh ketika dewasa. Investasi pada PAUD menjadi sangat penting karena beberapa studi menunjukkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas PAUD juga dilakukan Kemendikbud dengan menjalin hubungan baik dengan komunitas yang mendirikan PAUD,



Ruang musik di PAUD KM Nol

Anak membutuhkan banyak stimulasi agar perkembangannya menjadi lebih optimal. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan korelasi keterlibatan anak di PAUD dengan prestasi belajar pada jenjang sekolah berikutnya, hingga penghasilan yang diperoleh ketika dewasa.

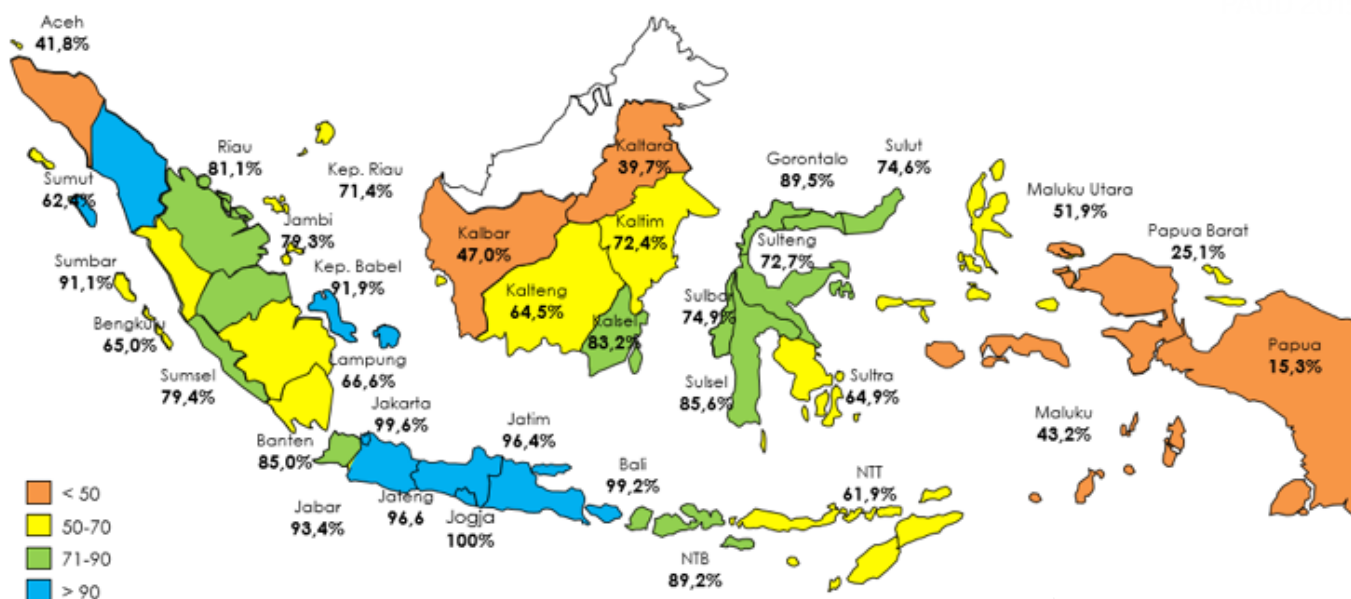
termasuk dengan Bunda PAUD yang merupakan perkumpulan istri-istri para kepala daerah di Indonesia. Pada tanggal 29 September 2016, Kemendikbud memberikan penghargaan bagi 15 Bunda PAUD provinsi, 31 Bunda PAUD kabupaten/kota, 10 Bunda PAUD kecamatan, serta 10 Bunda PAUD desa, atas kerja nyata dan kepeduliannya dalam mewujudkan PAUD berkualitas. Pada acara ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah anak usia dini yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya pada penghafal Quran, atlet sepatu roda, pelukis, serta penari cilik.

Untuk meningkatkan kreativitas pengajaran PAUD, tahun 2016 Kemendikbud juga mengadakan Lomba Cipta Karya PAUD, yang terdiri atas lomba pembuatan cerita rakyat, lagu anak, permainan edukatif, serta buku

cerita elektronik. Penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada para pegiat PAUD ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas. Hal ini sesuai pula dengan data PAUD di Indonesia, yang sebagian besar berdiri berdasarkan inisiatif masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu PAUD di Indonesia, Kemendikbud menyediakan anggaran biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD sebesar Rp600 ribu untuk setiap peserta didik per tahun. Kemendikbud juga berupaya mewujudkan PAUD bermutu dengan kriteria sebagai berikut: PAUD yang dapat menstimulasi anak sesuai dengan tahapan perkembangannya; terintegrasi dengan layanan dasar kesehatan pengasuhan dan perlindungan anak; serta mampu memanfaatkan

Angka Partisipasi Kasar



Sumber : Pendataan Online Ditjen PAUD-Dikmas per Juli 2015

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama.

Upaya peningkatan kualitas pendidik PAUD juga dilakukan dengan meresmikan laman Anggun PAUD, yang berisi lagu anak, cerita rakyat, video pengajaran, serta materi-materi lain yang dapat menjadi referensi pendidik PAUD untuk mengadakan pembelajaran bagi anak usia dini. Pelatihan bagi guru PAUD serta sosialisasi mengenai pengajaran PAUD yang tepat juga giat dilakukan Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidik PAUD.

Sejak tahun 2010 Kemendikbud juga telah melakukan gerakan Satu Desa Satu PAUD untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini di Indonesia. Hingga akhir tahun 2015, sebanyak 72,29% desa di Indonesia telah memiliki lembaga PAUD. Data pada akhir tahun 2015

menunjukkan peningkatan APK anak usia 4-6 tahun di Indonesia menjadi 70,06%. Meskipun demikian, disparitas APK pada provinsi-provinsi di Indonesia masih terlihat.

Penghargaan UNESCO

Perhatian yang diberikan Kemendikbud terhadap peningkatan akses dan kualitas PAUD diapresiasi oleh UNESCO melalui penghargaan *UNESCO Prize for Girl's and Woman's Education* 2016 yang diberikan di Beijing pada 6 Juni 2016. Penghargaan ini diberikan karena Kemendikbud sejak tahun 2013 menjalankan program, "Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Perempuan melalui PAUD Berbasis Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Sejak Dini".

Program tersebut di antaranya dengan menyiapkan

buku saku mengenai gender dan mengalokasikan anggaran berbasis gender. Program tersebut juga menekankan pemahaman mengenai gender pada usia dini penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan ke dalam materi ajar. Hal ini berguna dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak perempuan dalam jangka panjang. Data pada tahun 2015 menunjukkan jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di taman kanak-kanak dan kelompok bermain di Indonesia tidak mengalami ketimpangan besar.

Keberhasilan program pendidikan di PAUD akan menjadi bekal dalam proses pendidikan berikutnya. Peningkatan mutu PAUD diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada khususnya dan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya. ■

■ Tunas Integritas sebagai Gerakan Revolusi Mental

Kasus-kasus KKN di negeri kita masih sangat memprihatinkan. Korupsi, khususnya, juga sampai dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penanganannya membutuhkan orang-orang luar biasa (*extraordinary people*).

Orang-orang luar biasa tersebut harus tersebar di berbagai lingkungan, bagaikan tunas-tunas yang menumbuhkan nilai integritas di lingkungan masing-masing.

Kemendikbud memiliki komitmen dalam menanamkan nilai antikorupsi sebagai bagian dari nilai integritas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GRNM). Komitmen tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Mendikbud dan Ketua KPK. Salah satu bentuk kerja samanya adalah Program Tunas Integritas.

Kemendikbud membutuhkan insan-insan berkomitmen tinggi untuk menegakkan integritas di lingkungan kerja kementerian. Di sinilah Tunas Integritas berperan. Pembentukan Tunas Integritas memerlukan proses internalisasi nilai yang sistematis, yaitu melalui

penyelenggaraan lokakarya (*workshop*) Tunas Integritas yang diprakarsai Divisi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Lokakarya tersebut diharapkan dapat menghasilkan para tunas integritas yang berperan sebagai tokoh panutan (*role model*) dan agen perubahan (*agent of change*).

Para tunas integritas yang merupakan aparatur pemerintah dari berbagai unit di lingkungan Kemendikbud, telah mewarnai lingkungannya dengan etos kerja yang tinggi dan menularkan semangat kepada sesama mitra kerjanya. Dengan menunjukkan kinerja dan kualitas tinggi di atas rata-rata, para Tunas Integritas diharapkan mampu membuat unit kerjanya termotivasi untuk terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Metode efektif untuk menginspirasi koleganya

adalah para Tunas Integritas lebih banyak bekerja tanpa banyak bicara ataupun menggurui.

Tunas-tunas Integritas Kemendikbud dipercaya untuk menjadi motor penggerak perubahan pada unit kerjanya. Perubahan dari segi peningkatan mutu layanan publik, perbaikan metode kerja, dan budaya kerja yang semakin berintegritas. Dalam rangka mewujudkan Kemendikbud yang berintegritas sebagai agenda reformasi birokrasi, para Tunas Integritas-lah yang menjadi garda terdepan dalam internalisasi budaya kerja Kemendikbud.

Bermitra dengan KPK, Inspektorat Jenderal Kemendikbud telah menyelenggarakan lokakarya Tunas Integritas sebanyak 17 angkatan. Tahun 2016 ini, Kemendikbud menyelenggarakan empat lokakarya Tunas Integritas. KPK menetapkan Prosedur

Jumlah Tunas Integritas Kemendikbud per Unit Utama

NO.	UNIT UTAMA	ES I	ES II	ES III	ES IV	AUDITOR	WI	CPNS	JUMLAH
1	Ditjen Dikdasmen	1	7	10	58			64	140
2	Inspektorat Jenderal		5	4	14	22		27	72
3	Sekretariat Jenderal	1	5	12	2		5	20	45
4	Ditjen PAUD dan PM	1	7	9	2			16	35
5	Balitbang		5	7				12	24
6	Badan PP Bahasa		4	5	3			11	23
7	Ditjen Kebudayaan		6	4				12	22
8	Ditjen Guru dan TK	1	2	5				8	16
	Total	4	41	56	79	22	5	170	377

Operasional Standar (POS) lokakarya dengan sangat ketat demi pencapaian hasil optimal. Jumlah peserta lokakarya diatur maksimal terdiri dari 30 orang. Formasi duduk peserta membentuk huruf U dengan tujuan pelatihan berjalan fokus, intensif, dan memaksimalkan kesempatan interaksi fasilitator dengan peserta.

Materi-materi yang didiskusikan dalam lokakarya Tunas Integritas meliputi materi pokok dan materi penunjang. Materi pokok berupa potensi dan makna integritas, visi dan tata nilai Kemendikbud, dan program pengendalian gratifikasi. Materi penunjang meliputi sistem pengendalian internal pemerintah, manajemen risiko, penanganan konflik kepentingan, dan laporan harta kekayaan penyelenggara

negara. Materi tersebut menjadi bekal bagi para Tunas Integritas untuk melakukan reformasi pada lingkungan kerjanya masing-masing.

Terbanyak

Di antara Kementerian/Lembaga yang telah bekerja sama dengan KPK dalam mewujudkan Tunas-tunas Integritas melalui penyelenggaraan lokakarya, Kemendikbud adalah kementerian yang memiliki Tunas Integritas terbanyak. Jumlahnya 377 orang (2%) dari 16.328 pegawai Kemendikbud. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

Selain itu, sebagian besar pejabat eselon I Kemendikbud adalah Tunas Integritas. Dengan

memiliki pejabat eselon I yang berintegritas, Kemendikbud optimis para eselon I tersebut dapat menginspirasi para kolega, pejabat, maupun staf di bawahnya untuk memiliki integritas. Namun, tak cukup sampai di situ. Untuk lebih menginternalisasikan Tata Nilai Kemendikbud, telah terbit Keputusan Mendikbud Nomor 82/P/2016 tentang Model Panutan Pengembangan Budaya Kerja Kemendikbud yang mengamanahkan kepada para pejabat Eselon I untuk menjadi contoh teladan pada unit utama masing-masing.

Nilai-nilai di atas merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas, sesuai dengan Rencana Strategis Kemendikbud 2015-

Model Panutan Pengembangan Budaya Kerja Kemendikbud

NO	PEJABAT ESELON I	MODEL PANUTAN TATA NILAI
1	Inspektur Jenderal	Integritas
2	Direktur Jenderal Kebudayaan	Kreatif
3	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Inovatif
4	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Inisiatif
5	Sekretaris Jenderal	Meritokrasi
6	Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Aktif
7	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Pembelajar
8	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Tanpa Pamrih

2019. Tata nilai tersebut telah disesuaikan untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Kemendikbud.

Pada 6 Oktober 2015, Mendikbud mencanangkan Kemendikbud sebagai Zona Integritas. Acara pencanangan ini disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Ketua KPK, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pada momen tersebut, Mendikbud juga mencanangkan tiga unit utama sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen PAUD dan Dikmas. Hal ini merupakan implementasi dari konsep pulau-pulau integritas (*Island of Integrity*). Konsep ini

Dengan bertambahnya Tunas-tunas Integritas di lingkungan Kemendikbud, optimisme terwujudnya kementerian berintegritas semakin kuat.

mengibaratkan Kemendikbud sebagai samudera Zona Integritas yang memiliki unit-unit kerja sebagai pulau WBK. Selanjutnya, akan terus dilakukan pembentukan Tunas-tunas Integritas yang akan mengisi pulau WBK tersebut.

Dengan bertambahnya Tunas-tunas Integritas di lingkungan Kemendikbud, optimisme terwujudnya kementerian berintegritas semakin kuat. Pada

tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kemendikbud menginisiasi pembentukan Komite Integritas. Komite ini diharapkan dapat berperan serta mengawal posisi-posisi kunci Kemendikbud—posisi yang akan diisi orang-orang terbaik di bidangnya serta berintegritas tinggi. Sebagai pihak penyelenggara pendidikan, Kemendikbud akan terus menjalankan komitmen untuk melahirkan Tunas-tunas Integritas baru setiap tahunnya. ■

■ Transaksi Nontunai dan Belanja Daring: Transparan, Aman, dan Nyaman

Persoalan tata kelola keuangan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah.

Keadaan ini tidak terlepas dari fakta bahwa sekitar 64% dari total anggaran pendidikan dikelola daerah. Pada tahun 2016, persentase nilai 64% itu mencakup anggaran pendidikan sebesar Rp 268 triliun yang merupakan dana transfer daerah.

Melihat fakta ini, seharusnya tata kelola keuangan pendidikan daerah menjadi kunci perbaikan tata kelola keuangan pendidikan. Akan tetapi, harapan masih jauh dari kenyataan. Harapan ini berbenturan dengan fakta ditemukannya pelaksanaan tata kelola keuangan pendidikan yang tidak optimal di berbagai daerah. Sempat muncul wacana untuk kembali kepada sistem sentralisasi. Namun, perlu diingat bahwa pengambilan keputusan atas kebijakan desentralisasi merupakan keputusan bersama.

Belajar dari pengalaman tersebut, strategi perbaikan tata kelola keuangan pendidikan harus dilakukan dalam kerangka berpikir pengelolaan otonomi keuangan pendidikan. Otonomi daerah merupakan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sesuai dengan amanah reformasi 1998. Komitmen

atas penguatan pemerintah daerah didasari keyakinan bahwa daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam atas keadaannya sendiri. Juga, keyakinan atas asas desentralisasi, sehingga pengelolaan kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat.

Sejalan dengan komitmen tersebut, kebijakan pendidikan juga memberikan ruang lebih besar untuk kiprah daerah. Pada titik inilah, penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi penting sehingga semangat pengelolaan kebijakan daerah untuk kemanfaatan bagi masyarakat, benar-benar bisa diwujudkan. Penguatan kapasitas pemerintah daerah setidaknya mencakup dua bentuk kebijakan: peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, dan penyediaan *platform* sehingga mempermudah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut akan dibahas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kaitannya untuk menyediakan *platform*, sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah.

Basis data tunggal pendidikan

Basis data merupakan salah satu pilar infrastruktur yang krusial dalam penguatan tata kelola keuangan. Terlebih jika pelaksanaan transaksi keuangan tersebar di berbagai daerah dengan berbagai penanggungjawab/pelaksana transaksi. Pembangunan basis data tunggal menjadi penting agar dapat membangun sistem pengendalian yang efektif atas berbagai bentuk transaksi yang berupa dana pendidikan yang ditransfer ke daerah. Memahami pentingnya basis data, Kemendikbud pada tahun 2015 menyelesaikan basis data tunggal untuk urusan pendidikan dalam satu sistem pendataan. Tercatat sampai dengan tahun 2015, telah tervalidasi 65 juta data entri siswa, guru, dan sekolah. Penetapan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai basis data tunggal dilakukan berdasarkan penerbitan Permendikbud Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait transaksi nontunai dan belanja daring, Kemendikbud menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar pelaksanaannya. Arah kebijakan ini

sejalan dengan inisiatif penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui transaksi nontunai dan belanja daring. Terutama, diperuntukkan bagi dana transfer daerah untuk keperluan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus.

Dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Satu lagi, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa. Gabungan antara kesiapan infrastruktur berbasis data dan dasar hukum pelaksanaan transaksi nontunai dan belanja daring diharapkan menjadi modal

untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini.

Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

Langkah penting menyangkut implementasi kebijakan ini adalah peluncuran program penyediaan buku teks berbasis Kurikulum 2013 dengan mekanisme transaksi nontunai dan belanja daring. Untuk memperkuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya, Kemendikbud menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemendikbud memfasilitasi pelaksanaan acara penandatanganan kontrak kerja sama antara Kepala LKPP dan sepuluh pelaksana yang terkait penyediaan buku teks Kurikulum 2013 edisi revisi 2016.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan penandatanganan kontrak kerja antara Bapak Kepala LKPP dengan para pemimpin penyedia buku secara online,” kata Sekjen Kemendikbud

Didik Suhardi pada acara penandatanganan kontrak kerja sama di Gedung LKPP.

Sekjen Kemendikbud optimis, dengan model daring ini, semua transaksi dapat dilakukan dengan transparan sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, Kemendikbud dapat memperoleh data akurat atas status pelaksanaan belanja, mulai dari jumlah pemesanan, buku yang sudah diterima, dan pembayaran.

Pembelian buku Kurikulum 2013 edisi 2016 dilakukan dengan menggunakan dana BOS dan dilakukan secara daring melalui *Single-ID* Dapodik. Dengan cara ini, sekolah dapat melakukan belanja daring secara langsung tanpa pihak perantara. Sekolah sebagai pihak pembeli dapat memesan buku sesuai dengan kebutuhan kepada salah satu dari sepuluh penyedia yang terdaftar di e-katalog LKPP dan dapat melihat status pemesanan secara



sistem, sehingga tahu kapan buku Kurikulum 2013 sampai. Proses pembayarannya juga sangat mudah dan transparan melalui sistem transfer ke rekening yang sudah tersedia.

Kesepuluh penyedia yang menandatangani kerjasama dengan LKPP adalah CV. Cakrawala Harapan Jaya, PT. Jepe Press Media Utama, PT. Gramedia, PT. Intan Pariwara, PT. Masmmedia Buana Pustaka, PT. Mulia Kencana Semesta, PT. Pesona Edukasi, PT. Sarana Pancakarya Nusa, PT. Temprina Media Grafika, dan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Satu hal yang menarik pada pelaksanaan penyediaan Buku Kurikulum 2013 adalah penetapan Zonasi Harga Eceran Tertinggi (“HET”) untuk buku Kurikulum 2013. Penetapan zonasi didasarkan pertimbangan terdapat perbedaan biaya penyediaan buku untuk berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, harga buku di Jakarta tentu lebih murah daripada di Sulawesi. Tidak kalah penting,

Sekjen Kemendikbud optimis, dengan model daring ini, semua transaksi dapat dilakukan dengan transparan sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel

keamanan pembelian dan kemudahan belanja. Keamanan belanja penting untuk memastikan tidak terjadi kasus pihak sekolah berurusan dengan pihak berwajib karena masalah pembelian buku. Kemudahan belanja yang lebih efektif dan efisien oleh sekolah juga menjadi salah satu pertimbangan sehingga belanja sekolah menjadi lebih efektif dan efisien.

“Saya, secara personal, merasa bahwa belanja buku Kurikulum 2013 melalui e-katalog itu nyaman dan aman. Kami pihak sekolah tidak takut dan merasa was-was untuk belanja buku Kurikulum 2013,” ujar salah satu bendahara sekolah menengah di Yogyakarta.

Seorang kepala sekolah SMP Negeri dari Jakarta juga merasa model pelaksanaan pengadaan buku seperti ini lebih bagus dan efisien. Tidak hanya dari sisi sekolah sebagai pihak pembeli, penyedia buku juga merasakan manfaat atas pelaksanaan belanja daring, utamanya terkait dengan transparansi belanja, kejelasan pemesanan, dan ketersediaan data pembayaran.

Sekolah yang menjadi target penjualan untuk buku Kurikulum 2013 adalah semua sekolah pelaksana Kurikulum 2013 yang diperkirakan berjumlah 25% dari total sekolah di Indonesia. Judul buku yang sudah ditayangkan adalah buku Kurikulum 2013 revisi 2016 untuk kelas satu, empat, tujuh, dan sepuluh, sebanyak 110 judul buku. Sampai dengan 10 Oktober 2016, tercatat transaksi pembelian sebesar Rp380 miliar dengan jumlah buku sebesar 24,3 juta eksemplar. Jumlah sekolah yang sudah melakukan pembelian sebanyak 26 ribu sekolah.

Perluasan transaksi nontunai dan belanja daring

Hasil positif pelaksanaan inisiatif transaksi nontunai dan belanja daring buku Kurikulum 2013 edisi 2016 ini tentu menggembirakan. Dalam kerangka penguatan tatakelola keuangan pendidikan, Kemendikbud berencana memperluas pelaksanaan transaksi nontunai dan belanja daring. Hal ini dapat direalisasikan untuk penguatan tatakelola dana transfer daerah, termasuk untuk keperluan BOS, BOP-PAUD, dan Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2017, Kemendikbud sedang mempersiapkan uji coba penerapan transaksi nontunai BOS dan BOP-PAUD di beberapa kota yang sudah memiliki kesiapan infrastruktur jaringan pembayaran perbankan dan lapak belanja. Persiapan lainnya, menambah katalog pendidikan, termasuk peralatan sekolah.

Inisiatif untuk transaksi nontunai dan belanja daring diharapkan dapat terus berkembang. Sasarannya adalah menciptakan tatakelola keuangan pendidikan yang lebih baik. Kemendikbud berharap inisiatif transaksi nontunai dan belanja daring, tidak hanya berhenti sampai program BOS dan DAK. Inisiatif ini diharapkan dapat menyentuh kepentingan pengadaan lainnya yang dilakukan sekolah dan pelaksanaannya menggunakan anggaran daerah.

“Insya Allah ini akan kami lakukan secara bertahap, dengan begitu penggunaan dana pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien,” tegas Sekjen Kemendikbud optimis. ■

Membangun dari Pinggiran

SMP Negeri Bime Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk melayani mereka yang berada di pelosok negeri







■ Percepatan Kemajuan Pendidikan di Papua dan Papua Barat

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan paradigma pendidikan nasional.

Dengan kondisi geografis menantang serta ragam bahasa dan budaya yang kaya, Papua dan Papua Barat memunculkan tantangan spesifik dan berbeda. Keduanya memiliki derajat kompleksitas lebih dibandingkan daerah-daerah lain.

Pemerintah pusat saat ini berupaya keras mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satu kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Konsep pembangunan

menyeluruh menekankan kepada pembangunan keunggulan kompetitif, pembangunan berbasis sumber daya alam tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Angka Partisipasi Kasar

Provinsi Papua dan Papua Barat
Tingkat SD, SMP, SM Sederajat
Tahun 2015/2016

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar		
	SD	SMP	SM
Papua	86.6	64.27	48.43
Papua Barat	111.37	98.2	80.59
Nasional	108.00	100.72	76.45

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan 2016

Papua dan Papua Barat mendapat perhatian khusus dari Kemendikbud dalam beberapa aspek: peningkatan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan

Dalam konteks pendidikan nasional, arah pembangunan jangka menengah diterjemahkan ke dalam enam paradigma: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, dan pendidikan yang membangun kebudayaan.

Kembali ke Papua dan Papua Barat, berbagai indikator pendidikan menunjukkan masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat kemajuan pendidikan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Papua dan Papua Barat mendapat perhatian khusus dari Kemendikbud dalam beberapa aspek: peningkatan akses, mutu dan relevansi, serta tatakelola pendidikan. Arah kebijakan yang diambil adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan, peningkatan mutu guru, sarana prasarana, relevansi

pendidikan secara berkelanjutan dan memastikan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Tantangan Akses dan Mutu

1) Akses

Kondisi alam yang sulit dan terbatasnya infrastruktur ditengarai menjadi salah satu penyebab masih rendahnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Papua. Penduduk yang tinggal di pemukiman terisolir merupakan kelompok masyarakat yang paling sulit mengakses pelayanan pendidikan. Jika dilihat dari indikator APK di Papua dan Papua Barat, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara Papua dan Papua Barat. Capaian APK di Papua Barat lebih baik dibandingkan Papua. Pada tingkat SD dan SMP, APK Papua Barat bahkan lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Sedangkan capaian APK Papua masih jauh berada di bawah rata-rata nasional.

2) Mutu

Jika berbicara tentang mutu, fondasi utamanya adalah kualitas guru atau pengajar. Selain distribusi guru yang terbatas dan tidak merata, kualitas guru yang ada pun masih jauh dari cukup. Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) Papua dan Papua Barat masih jauh berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2015, rata-rata nilai UKG Papua dan Papua Barat, masing-masing 49.47 dan 49.09. Sebanyak 44% guru SD belum bersertifikasi dan berijazah S1. Papua dan Papua Barat juga masih terkendala tingginya tingkat ketidakhadiran guru di kelas (sekitar 10,9%). Hal ini dipengaruhi berbagai macam faktor, seperti rendahnya pengawasan kinerja guru oleh kepala sekolah dan pengawas, serta ketiadaan fasilitas transportasi yang memungkinkan perpindahan orang dalam waktu singkat.

Percepatan Kemajuan Pendidikan di Papua dan Papua Barat



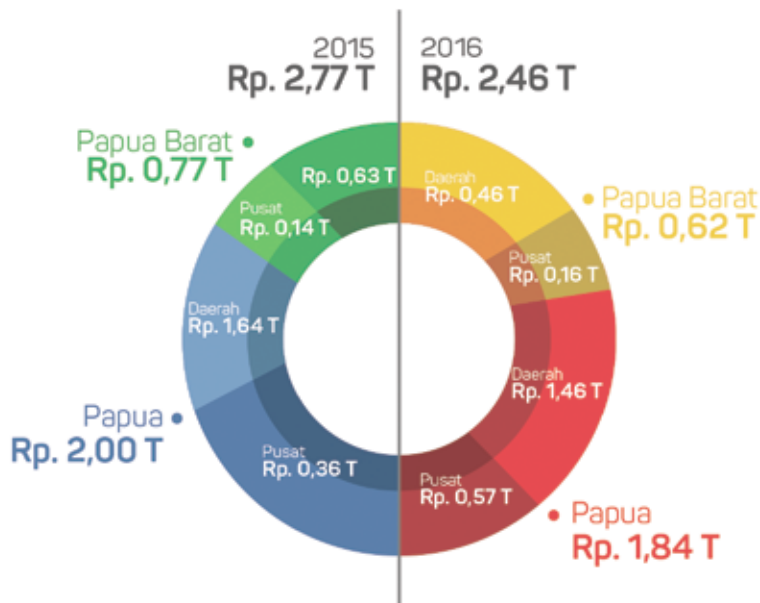
Tantangan: Akses, Mutu

Masalah dan Tantangan	Arah Kebijakan	Langkah Konkret Kemendikbud
<p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sebaran penduduk di area terisolir dengan tantangan geografis · Disparitas geografis, sosial, budaya, dan ekonomi · Daya tampung terbatas 	<p>Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Program Indonesia Pintar · Pembangunan sekolah baru berpola asrama · Renovasi sekolah (rusak berat) · Sekolah Garis Depan · Rehabilitasi ruang kelas · Afirmasi Pendidikan Menengah · Pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar
<p>Mutu dan Relevansi</p> <ul style="list-style-type: none"> · Guru: mutu dan distribusi · Sarana dan prasarana: kelayakan 	<p>Meningkatkan mutu guru, mutu sarana prasarana, dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Guru Garis Depan · Sarjana Mengajar di Daerah 3T · Guru Pembelajar · Pendidikan vokasi (peningkatan kompetensi kerja dan keselarasan dengan dunia kerja) · Program peningkatan karier · Program pertukaran kepala sekolah · Program kualifikasi S1 dan S2 · Penyediaan sarana pendidikan
<p>Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> · Penggunaan sumber daya belum efektif · Kurang fokus pada Tupoksi · Kurang transparan · Kurang akuntabel 	<p>Memastikan sumber daya dikelola dengan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Neraca Pendidikan Daerah · Membentuk Desk Papua dan Papua Barat di Kemendikbud · Integrasi program antara dana Kemendikbud dan dana otonomi khusus · Melakukan konsolidasi atas seluruh kegiatan CSR di Papua dan Papua Barat dari 52 instansi swasta · Memberikan asistensi teknis dalam pengembangan pendidikan

Solusi

Akses	Mutu
<ul style="list-style-type: none"> Program Indonesia Pintar; Pembangunan unit sekolah baru dan revitalisasi sekolah; Rehabilitasi ruang kelas; Sekolah Garis Depan (25 unit); Pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar. Penyediaan alat pendidikan; ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) untuk 500 siswa di 171 sekolah penerima; Pembangunan Sekolah Berasrama sebanyak 9 SMP di 7 Kabupaten dan 1 SMP di Kabupaten Sorong (Target: 52 unit). 	<p>Ketersediaan guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru Garis Depan [GGD]: mengirimkan 292 guru ke lima kabupaten di Papua Barat dan 14 kabupaten di Papua; Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T). <p>Mutu guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru Pembelajar (alokasi dana Rp 66,6 miliar); Program bantuan peningkatan karier [alokasi dana Rp 8,6 miliar]; Program pertukaran kepala sekolah [telah diikuti 141 kepala sekolah]; Peningkatan kualifikasi S1 dan S2 [telah diikuti 224 guru di Papua dan 112 guru di Papua Barat]. <p>Absensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan khusus dan intensif non-PNS [alokasi dana Rp 385 miliar]; Tunjangan profesi guru PNS dan non-PNS [alokasi dana Rp 773 miliar].

Alokasi Bantuan KEMENDIKBUD



Intervensi

Akses :

- BOS SM
- BOP PAUD
- USB
- RKB

Mutu :

- Peningkatan Sarpras Pendidikan
- Afirmasi Pendidikan
- Peningkatan Kualifikasi
- Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru

Kebudayaan dan Bahasa :

- Revitalisasi Desa Adat
- Pelestarian nilai budaya
- Pembangunan Rumah Budaya
- Fasilitasi Komunitas Adat
- Pelindungan dan Pelestarian Bahasa Lokal

Rencana Alokasi Program Bantuan untuk Papua dan Papua Barat

Papua

Satuan Kerja	BOS (siswa)	PIP (siswa)	USB (unit)	RKB (unit)	Rehab (unit)	Perpustakaan (unit)	Peralatan Pendidikan (paket)
Dit. Pembinaan SD	429,594	279,805	1	79	207	77	179
Dit. Pembinaan SMP	105,314	74,975	3	82	-	28	-
Dit. Pembinaan SMA	53,287	21,370	-	692	356	59	-
Dit. Pembinaan SMK	25,933	24,766	17	20	-	-	10
Dit. Pembinaan PKLK	-	-	-	-	1	-	-

Papua Barat

Satuan Kerja	BOS (siswa)	PIP (siswa)	USB (unit)	RKB (unit)	Rehab (unit)	Perpustakaan (unit)	Peralatan Pendidikan (paket)
Dit. Pembinaan SD	146,053	77,923	-	40	123	24	102
Dit. Pembinaan SMP	41,558	30,888	2	33	-	12	-
Dit. Pembinaan SMA	24,074	9,156	-	33	11	26	-
Dit. Pembinaan SMK	11,885	10,907	4	14	-	-	7
Dit. Pembinaan PKLK	-	-	1	1	-	1	-

Total

Satuan Kerja	BOS (siswa)	PIP (siswa)	USB (unit)	RKB (unit)	Rehab (unit)	Perpustakaan (unit)	Peralatan Pendidikan (paket)
Dit. Pembinaan SD	575,647	357,728	1	119	330	101	281
Dit. Pembinaan SMP	146,872	105,863	5	115	-	40	-
Dit. Pembinaan SMA	77,361	30,526	-	725	367	85	-
Dit. Pembinaan SMK	37,818	35,673	21	34	-	-	17
Dit. Pembinaan PKLK	-	-	1	1	1	1	-

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)

Salah satu program afirmasi yang dikembangkan Kemendikbud adalah Program ADEM atau Afirmasi Pendidikan Menengah. Program ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan SMP atau sederajat dari putera-puteri asli Papua dan Papua Barat yang memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah di luar provinsinya. Arah besar dari program ini dalam jangka panjang adalah untuk mempercepat pembangunan

sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sasaran berikutnya adalah mewujudkan akulturasi keragaman budaya melalui program implementasi pendidikan layanan khusus afirmasi pendidikan menengah.

Pada tahun 2016, Kemendikbud menargetkan sebanyak 500 peserta didik peserta ADEM akan dikirimkan ke enam provinsi di Jawa dan Bali. Jumlah total sekolah yang berpartisipasi sebanyak 186 sekolah.

Arah besar dari program ini dalam jangka panjang adalah untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat

Jumlah Sekolah dan Siswa Program Afirmasi Pendidikan Menengah Tahun 2016

No	Provinsi	Peserta Didik					Target 2016
		Jumlah Sekolah	Kls.X (2015)	Kls. XI (2014)	Kls.XII (2013)	Jumlah	
1	Jawa Timur	61	144	168	135	447	162
2	DIY	12	36	35	49	120	40
3	Jawa Barat	30	96	76	82	254	84
4	Jawa Tengah	42	70	75	113	258	84
5	Banten	20	66	67	33	166	70
6	Bali	21	75	46	27	148	60
Jumlah		186	487	467	439	1.393	500

Usulan Siswa Program ADEM Kabupaten/Kota Tahun 2016

1. Pemberangkatan Jayapura

No.	Kab/Kota	Jumlah Kuota	No.	Kab/Kota	Jumlah Kuota
1	Kerom	12	10	Sarmi	13
2	Puncak	12	11	Mimika	13
3	Jaya Wijaya	12	12	Memberamo Tengah	11
4	Dogiyagi	11	13	Memberamo Raya	11
5	Deiyai	11	14	Puncak Jaya	12
6	Yalimo	12	15	Kota Jayapura	12
7	Lanny Jaya	12	16	Yahokimo	12
8	Nduga	12	17	Kab. Jayapura	12
9	Tolikara	12			

Total Jayapura : 202 Orang

2. Pemberangkatan Merauke

No.	Kab/Kota	Jumlah Kuota
1	Merauke	12
2	Mappi	12
3	Boven Digoel	12
4	Pegunungan Bintang	12*
5	Asmat	12

Total Merauke : 60 Orang

3. Pemberangkatan Biak

No.	Kab/Kota	Jumlah Kuota
1	Biak Numfor	12
2	Supiori	13
3	Yapen	13
4	Nabire	12
5	Paniai	13
6	Intan Jaya	13
7	Waropen	12

Total Biak : 88 Orang

* Keberangkatan quota Pegunungan Bintang dialokasikan ke Jayapura

4. Pemberangkatan Manokwari

No.	Kab/Kota	Jumlah Kuota
1	Manokwari	10
2	Teluk Wondama	10
3	Teluk Bintuni	10
4	Pegunungan Arfak	10
5	Manokwari Selatan	10
6	Kaimana	10
7	Fakfak	10

Total Manokwari : 70 Orang

5. Pemberangkatan Sorong

No.	Kab/Kota	Jumlah Kuota
1	Kota Sorong	13
2	Kab. Sorong	13
3	Sorong Selatan	13
4	Raja Ampat	15
5	Maybrat	13
6	Tambrau	13

Total Sorong : 80 Orang



Pekerjaan rumah untuk peningkatan dan percepatan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat memang masih banyak. Hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Akses pendidikan erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur serta aktivitas

ekonomi. Oleh karena itu, perlu peningkatan koordinasi pada level nasional antarsemua kementerian dan lembaga negara terkait, agar dapat secara holistik menemukan jalan keluar terhadap persoalan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Yang terpenting, masyarakat Papua dan Papua Barat tetap

menjadi subjek pembangunan. Suara mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan pendekatan pembangunan pendidikan yang mengakar dan didukung semua pihak. ■

■ Membangun Asa Lewat Sekolah Garis Depan

Upaya mengejar pendidikan layak di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan tertinggal) sering kali bak berhadapan dengan tembok tebal.

Di banyak daerah, sukarnya akses jalan dan buruknya kondisi sekolah masih menjadi masalah sehari-hari. Siswa terpaksa harus berjalan jauh hanya untuk pergi ke sekolah. Sering terdengar siswa belajar di sekolah berlantaikan tanah, atapnya rusak sehingga selalu bocor saat hujan. Belum lagi langkanya buku dan alat pendidikan yang memadai.

Saat siswa tiba di sekolah, para guru belum tentu hadir di dalam kelas. Pengawasan yang kurang dan buruknya kondisi infrastruktur ikut mempengaruhi kondisi langka guru seperti ini. Akibatnya siswa di daerah tertinggal merasakan ketimpangan kualitas pendidikan yang pada akhirnya berpengaruh pada performa siswa.

Selain infrastruktur, keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya juga mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan melalui satuan pendidikan yang ada selama ini dianggap belum memberikan kesempatan untuk mengangkat konteks sosial yang beragam. Satuan pendidikan yang ada cenderung dicirikan oleh penyeragaman karakteristik sekolah. Kecenderungan tersebut menjadikan layanan pendidikan yang ada kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang dilayani dan lingkungan tempat satuan pendidikan tersebut berada.

Nawacita ketiga, “membangun Indonesia dari pinggiran”, menumbuhkan harapan baru menyangkut pelayanan pendidikan di daerah 3T. Kondisi geografis tak boleh menjadi halangan bagi anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan

berkualitas. Berlandaskan Nawacita ini, pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan pembangunan Sekolah Garis Depan (SGD) yang merupakan sekolah rintisan. SGD berupaya mewujudkan keragaman penyediaan satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi keragaman konteks sosial yang berbeda. Dalam pembangunannya, SGD tidak hanya akan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana. SGD juga mencoba menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan konteks sosial dan lingkungan tempat sekolah tersebut berada.

Pengertian “pinggiran” dalam Nawacita ketiga adalah pinggiran secara geografis dan pinggiran secara sosio-ekonomis. Maka, lokasi SGD dipilih berdasarkan kriteria



berikut:

1. Daerah 3T atau,
2. tempat bersejarah dalam meraih kemerdekaan Indonesia atau,
3. daerah perkotaan yang merupakan gambaran 'terpinggir' dari segi sosial ekonomi.

Berdasarkan kriteria di atas, tim melakukan verifikasi ke lapangan agar benar-benar tepat sasaran dalam pemberian bantuan. Dari proses tersebut, untuk tahun 2016 terpilih 113 sekolah yang akan dikembangkan menjadi SGD yang tersebar di 42 Kabupaten di Indonesia. Sekolah Garis Depan

ini terdiri dari sekolah yang sudah ada kemudian direvitalisasi, dan pembangunan unit sekolah baru.

SGD direncanakan untuk benar-benar mengakomodasi keberagaman kondisi sosial demografi Indonesia. Mulai dari aspek sarana dan prasarana, guru dan model pembelajaran, didesain untuk menjawab kebutuhan anak usia sekolah di tempat tersebut.

Diskusi terpumpun

Dalam persiapannya, sejumlah pegiat pendidikan memenuhi undangan dalam diskusi terpumpun terkait dengan proses belajar di daerah yang akan

dibangun SGD. Diskusi ini diadakan oleh Paska, ACDP dan Puslitjak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diskusi terpumpun berlangsung pada 9 Juni 2016 dengan mengundang David C. Harding, Senior Advisor ACDP, Direktur Eksekutif Indonesia Mengajar Evi Trisna, ketua tim peneliti studi tentang *reality check+* Dee Jupp, Kepala Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok Nurrohm, Anindita, perwakilan dari Yayasan Sokola Rimba, dan John Rahail, pendiri Sekolah Kampung yang berbasis di Papua.

Dalam acara tersebut, keenam

Sebaran SGD 2016



pegiat pendidikan ini membagikan pengalamannya dalam mendirikan sekolah dan menjalankan proses belajar-mengajar di daerah 3T maupun daerah yang terpinggirkan secara sosial ekonomi. Mereka bersama tim SGD Kemendikbud terlibat aktif membahas prinsip-prinsip yang akan diterapkan dalam pembangunan SGD.

Hasil dari Diskusi Terpumpun menghasilkan sejumlah prinsip berikut:

1. Mengadaptasikan kontekstualitas lokal;
2. mengaplikasikan Pembelajaran Abad 21 dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD);
3. mengaplikasikan manajemen yang transparan dan akuntabel;
4. mewujudkan guru yang

Siswa akan lebih cepat menyerap ilmu jika pembelajaran diadaptasikan dalam konteks yang familiar untuk anak

- andal dalam mengajar dan menyesuaikan dengan konteks lokal;
5. sekolah yang aman dan ramah anak;
6. sekolah adalah Organisasi Pembelajar;
7. kepala sekolah harus mempunyai kemampuan manajemen sekolah dan kepemimpinan yang bermutu;
8. sarana dan prasarana yang sesuai dengan konteks lokal.

Hasil Diskusi terpumpun di atas menekankan pentingnya konteks daerah tempat SGD tersebut berada dalam meningkatkan efektivitas belajar siswa. Siswa akan lebih cepat menyerap ilmu jika pembelajaran diadaptasikan dalam konteks yang familiar untuk anak. Walau begitu, proses belajar-mengajar juga harus mengedepankan pengembangan kualitas Abad ke-21 agar siswa di daerah SGD dapat bersaing dengan



Salah satu desain SGD yang masuk final sayembara

Walau berada di daerah pinggiran, SGD harus berpeluang mengaplikasikan model Pembelajaran Abad XXI

siswa yang berada di kota. Kualitas guru dan kepala sekolah juga menjadi elemen penting di Sekolah Garis Depan. Guru harus mampu mendayagunakan bahan lokal sebagai bagan mengajar di sekolah. Kepala Sekolah juga harus mampu mengatur sekolah sehingga menjadi aman dan nyaman bagi anak.

Dari segi sarana dan prasarana, Kemendikbud melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam penyelenggaraan Sayembara Desain Arsitektur untuk satu SGD di Sorong Selatan, Papua Barat. Pada lokasi tersebut nantinya akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SLB dan SMA sesuai kebutuhan daerah setempat. Sayembara Desain SGD dipilih sebagai contoh keterlibatan publik dalam pendidikan. Desain sekolah yang dibuat peserta haruslah bisa merepresentasikan kekhasan kondisi di Sorong Selatan. Pembangunan SGD di lokasi lain pun disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan pembangunan. Namun, pelaksanaannya tetap tidak boleh melupakan standar pelayanan minimal (SPM) yang terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, agar kualitas dapat terus terjaga. Selain Sayembara, untuk Direktorat Pembinaan SD melibatkan desain

yang dibuat siswa SMK. Hal ini juga untuk membuktikan partisipasi siswa SMK Indonesia tidak kalah dengan arsitek lulusan universitas.

Sesuai dengan prinsip di atas, model pembelajaran SGD juga menjadi aspek penting dalam pembangunan sekolah. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. Hasil diskusi terpumpun yang dilakukan Paska, ACDP dan Puslitjak, menemukan bahwa konteks daerah sangat penting dalam membantu kelancaran proses belajar-mengajar. Berdasarkan hasil diskusi ini, Kurikulum 2013 diterapkan secara fleksibel sesuai keberagaman konteks daerah. Guru bisa menyesuaikan kompetensi yang ingin dicapai dengan kondisi wilayah sekolah. Sebagai contoh, dalam mengajarkan materi rantai makanan, siswa yang sekolahnya dekat pantai dapat melihat langsung contoh rantai makanan biota laut.

Walau berada di daerah pinggiran, SGD harus berpeluang mengaplikasikan model Pembelajaran Abad XXI. Kemendikbud memberikan dukungan sarana dan prasarana melalui penyediaan komputer di sekolah. Kemendikbud juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan mengusulkan

agar 113 SGD ini menjadi penerima bantuan akses internet di sekolah.

SGD juga tidak boleh melupakan faktor kompetensi guru. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengadakan pelatihan pembelajaran berbasis TIK bagi 1.800 guru yang berasal dari SGD. Nantinya, mereka dapat memanfaatkan sarana internet di sekolah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Dengan peningkatan ketiga aspek di atas, SGD diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak pendidikan di lingkungan sekitarnya. Sekolah-sekolah di sekitar bisa mencontoh pembelajaran yang dilakukan di SGD. Guru-guru SGD diharapkan juga bisa menjadi contoh (*role model*) dan berperan dalam meningkatkan kompetensi guru sekolah lain. Harapannya, mereka mau terlibat aktif dalam forum diskusi dengan guru-guru lain, baik melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kehadiran SGD diharapkan mampu memperkecil ketimpangan pendidikan yang masih terdapat di berbagai daerah. Kehadiran SGD diharapkan juga mampu mewujudkan peningkatan kualitas SDM Indonesia. ■

■ Revitalisasi LPMP: Tangan Kanan Kemendikbud di Daerah

Untuk negara seluas Indonesia, tidak mudah menjamin pemerataan kualitas pendidikan di setiap daerah.

Apa lagi dengan berlakunya UU yang mengatur otonomi daerah. Untuk memastikan terjaminnya kualitas pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Itulah sebabnya, untuk mewadahi kepentingan program pusat di daerah, Kemendikbud harus merevitalisasi peran Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai unit teknis Kemendikbud di tingkat Provinsi. Setelah direvitalisasi, LPMP secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugasnya melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi-provinsi Indonesia berdasarkan kebijakan nasional. LPMP harus bisa memastikan implementasi kebijakan Kemendikbud di lapangan.

Dalam Pembukaan Rakor Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 2016, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan bahwa selain masalah akses pendidikan, mutu pendidikan juga harus menjadi perhatian.

“Di era 1950-an, Korea Selatan berada dalam posisi yang sama dengan Indonesia mengenai kualitas pendidikan. Namun sampai 2016, kita masih meributkan masalah akses pendidikan,” katanya prihatin. Sementara, dibandingkan Korea Selatan, peningkatan kualitas pendidikan kita tertinggal.

Karena itu, Dirjen Dikdasmen berkeinginan mengefektifkan betul LPMP. Revitalisasi LPMP sangat diperlukan mengingat fungsi strategisnya di lapangan, ujar Hamid Muhammad dalam wawancaranya dengan Tim Sekolah Dasar.

Menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015, LPMP menyelenggarakan enam fungsi yaitu (1) pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (2) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (3) supervisi satuan

pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (4) fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; (5) pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan (6) pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Di Indonesia terdapat 33 LPMP yang tersebar di 33 Provinsi, kecuali Kalimantan Utara yang belum mempunyai LPMP. Sebaran LPMP bisa dilihat dalam peta di bawah ini.

Program unggulan

Berkaitan dengan revitalisasi LPMP, ada beberapa program unggulan yang dilakukan LPMP guna memastikan peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah. Salah satunya adalah *Training of Trainer (ToT)* Instruktur Kabupaten/Kota (IK) Kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pelatihan ini bertujuan agar Instruktur Kabupaten bisa mendampingi sekolah dalam melaksanakan kurikulum 2013 secara benar. Pada tahun 2016, ada

Sebaran LPMP



58.000 sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013, dan sekolah-sekolah ini yang akan menjadi target bagi Instruktur Kabupaten.

Berikut gambaran penyebaran Instruktur Kabupaten di beberapa provinsi: Di Provinsi Aceh terdapat 1.272 Instruktur Kabupaten yang diterjunkan ke sekolah. Selain Instruktur Kabupaten, LPMP juga mengadakan pelatihan bagi guru-guru di sekolah yang akan menerapkan Kurikulum 2013. Sebanyak 5.103 guru dilatih oleh LPMP terkait implementasi Kurikulum 2013 di sekolah. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 861 Instruktur Kabupaten yang diterjunkan langsung ke sekolah, dan pelatihan bagi 4.240 guru sasaran dari target sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 di provinsi tersebut. Di Provinsi Bengkulu terdapat 522 Instruktur Kabupaten dari berbagai jenjang pendidikan yang

mendapat pelatihan. Sebanyak 3.968 gabungan guru dan kepala sekolah juga mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh LPMP Bengkulu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya untuk menggerakkan seluruh elemen yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Ada beberapa lokakarya yang diselenggarakan LPMP berkaitan pengembangan sistem penjaminan

mutu. Sistem penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Untuk memudahkan pemantauan penjaminan mutu, terdapat aplikasi pendataan yang dapat digunakan sekolah, yaitu Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Adanya Aplikasi PMP diharapkan dapat memberikan fasilitasi satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu. Tujuannya, memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan



Suasana *Training of Trainer* Tim Pengembang Kurikulum 2013

LPMP berada di barisan pertama dalam memantau implementasi kebijakan pusat di daerah

nyata di lapangan. LPMP bertugas dalam pendampingan penggunaan aplikasi ini di lapangan. Kedua hal ini dilakukan agar Kemendikbud bisa memetakan mutu satuan pendidikan sehingga bisa memutuskan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan.

Dalam penjaminan pencapaian standar nasional pendidikan, LPMP juga memfasilitasi lokakarya untuk sekolah dalam meraih Standar Nasional Pendidikan. Sebagai contoh, di Aceh terdapat 196 sekolah yang dibina dan difasilitasi dalam memetakan

mutu pendidikan pada tahun 2016. Lokakarya diselenggarakan dengan tujuan memberikan praktek pelaksanaan pencapaian Standar Nasional Pendidikan agar tercipta kualitas pendidikan yang menjanjikan. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 3.831 sekolah yang dipetakan mutunya dengan menerjunkan 382 pengawas yang akan membina kurang lebih sepuluh sekolah setiap orang. LPMP Bengkulu sudah mulai melakukan pemetaan mutu dengan cara melatih guru dan pengawas dalam menyusun dokumen tentang

lesson study yang bisa dipetik dari pelaksanaan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP).

Selain meningkatkan akses pendidikan, mutu pendidikan juga harus terjamin agar pendidikan Indonesia bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif. Karena itulah peran LPMP sebagai tangan kanan Kemendikbud di daerah menjadi penting. LPMP berada di barisan pertama dalam memantau implementasi kebijakan pusat di daerah. Untuk menjamin bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran, LPMP juga harus bisa memetakan mutu satuan pendidikan di daerahnya dengan benar. Semoga revitalisasi LPMP yang strategis ini dapat membantu kita mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. ■

■ Guru Garis Depan Mengabdikan untuk Pendidikan di Daerah Khusus



Guru Garis Depan semangat mengajar terlepas dari keterbatasan kondisi di dalam kelas

Negara harus hadir dalam mengatasi masalah-masalah besar bangsa ini.

Sejak tahun 2015, Kemendikbud berusaha mewujudkan kehadiran negara dalam bidang pendidikan di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Upaya ini bukan hanya dalam bentuk pemberian bantuan kebutuhan sekolah dan perbaikan infrastruktur. Lewat program Guru Garis Depan (GGD), negara juga berusaha menyediakan dan meningkatkan kualitas pengajar di daerah 3T.

Sesuai semangat Nawacita, program GGD adalah program

prioritas pemerintah dan program afirmasi Kemendikbud dalam rangka “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia lewat upaya memberikan layanan pendidikan, mengatasi kekurangan guru, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penempatannya nanti, para guru yang mengikuti program GGD

diharapkan dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Pada tahun 2015, Kemendikbud mengirimkan angkatan pertama GGD yang berjumlah 779 orang. Mereka merupakan hasil seleksi dan berasal dari kalangan alumni Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T). Mereka telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi GGD ini disahkan dengan penerbitan Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2014 tentang

Formasi Khusus ASN Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Menteri PAN-RB No. 762 Tahun 2014 tentang formasi PNS untuk SM-3T. Sejumlah 779 GGD ini ditempatkan di 28 Kabupaten yang tersebar di empat provinsi: Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Aceh.

“Saudara-saudara semuanya adalah pejuang karena yang dituju adalah tempat-tempat yang sulit, terpencil, dan lokasi terluar,” ujar Presiden Joko Widodo saat menerima GGD angkatan pertama pada 25 Mei 2015 di Istana Merdeka.

Untuk menghargai kerja keras para ‘pejuang’ ini, pada perayaan Penutupan Bulan Pendidikan dan Kebudayaan, 29 Mei 2016, sebanyak 56 GGD terbaik diminta untuk hadir dan membagikan pengalamannya di depan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Banyak pengalaman unik yang diceritakan para GGD ini. Salah satunya adalah Andi Halifah yang mengajar di SMAN 2 Serui. Dengan keterbatasan yang ada, Guru Fisika asal Makassar ini sangat kreatif membuat bahan ajar dari lingkungan sekitar.

“Di sini sangat alami, kami harus membuat bahan ajar sesuai dengan daerahnya”, ujarnya.

“Saudara-saudara semuanya adalah pejuang karena yang dituju adalah tempat-tempat yang sulit, terpencil, dan lokasi terluar”

[Presiden **Joko Widodo**]

Walhasil, Andi sering menerima keluhan dari murid kelas lain yang tidak diajarnya karena iri. “Kemarin baru saja saya membuat materi tentang alat optik, murid kelas lain langsung pada bertanya kenapa mereka tidak diajar juga, “ ujar Andi.

Lokasi yang berada di daerah 3T tidak membuat Andi patah semangat dalam mencari ilmu dan informasi baru. Andi sering mencari informasi di internet, mendengarkan radio dan menggunakan *Instagram* untuk memperbarui informasi. Tidak hanya sekedar mengajar, Andi juga terus berkontribusi mengembangkan daerah penempatannya. Sepulang sekolah, Andi bersama rekan-rekan GGD di desa tersebut juga membuka bimbingan belajar untuk membuka kesempatan bagi anak-anak lain yang mengalami kesulitan belajar di sekolah.

Hal yang sama juga dialami oleh Irfan Dani yang ditempatkan di SMA 1 Labuan Haji, Aceh Selatan. Pria asal Padang, Sumatera Barat yang akrab disapa Pandani ini mengajar pelajaran Biologi. Tapi yang membuatnya menjadi guru favorit di SMA 1 Labuan Haji adalah keaktifannya dalam program

ekstrakurikuler sekolah. Pandani aktif menjadi pembina Pramuka, PMR, dan komputer.

Program ekstra kurikuler komputer adalah program yang dibentuk atas inisiatifnya sendiri. Pandani membuka ekstrakurikuler komputer yang tidak hanya diikuti oleh siswa tetapi juga kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya.

“Guru-guru justru banyak yang gagap teknologi, makanya mereka senang sekali,” ujarnya. Tidak hanya itu, Pandani aktif membuat blog dan membagikan bahan ajarnya secara daring. Ia terinspirasi dari keluhan rekan-rekan guru yang kesulitan membuat soal dan bahan ajar. “Karena saya sering buat bahan ajar sendiri, daripada hanya terpakai oleh saya maka saya bagikan juga dalam blog saya,” cerita Pandani.

Semangat para GGD ini berlanjut pada tahun 2016 dengan membuka kembali kesempatan bagi pemuda-pemuda terbaik Indonesia. Mereka dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan menjadi guru yang berkomitmen ditempatkan di daerah 3T. Pada tahun 2016, Kemendikbud kembali mengirimkan 7.000 GGD ke daerah 3T. Calon peserta GGD juga lebih beragam yaitu selain berasal dari SM-3T yang telah mengikuti program PPG, calon peserta juga berasal dari:

1. PPG S1 PGSD Berasrama yaitu program S1 PGSD yang terintegrasi dengan program PPG yang pesertanya merupakan lulusan SMA atau D2 dari daerah 3T;
2. SMK Kolaboratif merupakan penyiapan guru SMK mata pelajaran produktif yang tidak dihasilkan oleh LPTK,

Peningkatan jumlah GGD yang hampir sepuluh kali lipat ini merupakan komitmen kuat negara untuk hadir di setiap daerah di Indonesia

input PPG kolaboratif lulusan S-1/D-IV kejuruan/keteknikan yang berasal dari Non-LPTK yang pelaksanaan PPG nya berkolaborasi antara perguruan tinggi non-LPTK dengan LPTK yang ditunjuk;

3. *S-1 Basic Science* Berasrama yaitu penyiapan guru sains profesional yang inputnya adalah lulusan SMA dari daerah 3T yang kuliah S-1 Sains pada Perguruan Tinggi nonkependidikan yang setelah lulus mengikuti program PPG pada LPTK yang ditunjuk;

Sebanyak 7.000 formasi tersedia ini berasal dari 93 Kabupaten yang tersebar di 29 Provinsi di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan komitmen Kemendikbud untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan di daerah 3T. Kenaikan formasi juga disambut baik oleh Pemerintah Daerah yang memiliki antusiasme tinggi dalam pemenuhan kebutuhan guru di daerah mereka. Keberagaman sumber daya GGD ini juga merupakan respon Kemendikbud terhadap niat putra-putri Indonesia untuk berbakti kepada negara.



Guru GGD dengan kreatif menggunakan sumber daya di sekitar sekolah dalam mengajar

Tidak semua peserta yang mendaftar bisa diterima menjadi GGD. Hanya orang-orang terpilih yang lolos seleksi yang bisa ditetapkan menjadi GGD. Pada tahun 2016, seleksi GGD dilaksanakan pada tanggal 15-18 September. Tes dilaksanakan secara komputersasi dan serentak di 107 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia. Selain agar pelaksanaannya bisa cepat, mekanisme ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya bagi calon peserta agar tidak melakukan kecurangan sehingga benar-benar guru terbaiklah yang akan dipilih. Setelah lolos seleksi, para GGD ini akan melalui proses pembekalan. Para GGD ini akan diberikan informasi secara mendalam tentang daerah penempatan mereka, sehingga diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka akan mengajar.

Peningkatan jumlah GGD yang hampir sepuluh kali lipat ini merupakan komitmen kuat negara untuk hadir di setiap daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah GGD diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T. Selain itu diharapkan kehadiran GGD ini bisa menjadi inspirasi bagi para siswa meraih sukses dalam bidang pendidikan. Para GGD juga diharapkan menjadi motor untuk terus bertukar-pikiran meningkatkan kualitas pembelajaran di antara rekan guru di sekolah maupun di daerah penempatan GGD. Sebagai salah satu sarana pemersatu Bangsa Indonesia, penempatan GGD membuktikan bahwa putra-putri Indonesia yang berkualitas memang siap ditempatkan di mana pun dan siap menjadi roda penggerak pembangunan di daerah. ■



Mendikbud Muhadjir Effendy dalam pembukaan Lokakarya Gugus Tugas Tingkat Tinggi Sumba dengan Pemerintah Pusat

■ Merawat Hubungan Pusat dan Daerah melalui Dialog dan Kerja Nyata

Ada yang berbeda dari Ruang Graha 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis, 28 September 2016. Sekelompok orang berbaju tenun khas Sumba terlihat serius berdiskusi.

Mereka merupakan perwakilan dari Pemda Provinsi NTT dan 4 Kabupaten yang ada di Pulau Sumba yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Sumba Tengah. Mereka diundang hadir dalam acara lokakarya yang digagas oleh *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) dan bertujuan untuk mendiskusikan hasil temuan dan

tindak lanjut hasil penelitian ACDP yang berjudul, "Strategi untuk Peningkatan Pendidikan Dasar di Sekolah/Madrasah di Sumba, NTT".

Lokakarya ini diinisiasi oleh ACDP dan didukung empat wakil bupati dari Kepulauan Sumba. Para bupati menyadari bahwa solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Sumba, tidak hanya bergantung pada usaha daerah, namun juga koordinasi dengan

pusat, dalam hal ini Kemendikbud. Jaringan Kemendikbud menerima dengan terbuka delegasi Pemda Sumba. Selama lokakarya ini berlangsung, kedua belah pihak terlibat dalam diskusi hangat memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendidikan di Sumba.

Lokakarya ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemda dan Kemendikbud dalam mewujudkan pendidikan di daerah yang lebih baik. Dengan penguatan hubungan pusat-daerah, diharapkan kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemendikbud juga bisa memberdayakan daerah karena beberapa kewenangan pendidikan ada pada daerah.

“Menurut undang-undang, pemda juga mempunyai peran yang krusial dalam memajukan pendidikan. Kemendikbud menyambut baik adanya kolaborasi ini ke depannya,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy, saat membuka lokakarya ini.

Hasil penelitian ACDP menghasilkan banyak temuan tentang kondisi pendidikan dasar di Sumba. Yang pertama, selisih (*gap*) yang besar antara gaji guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Sumba. Gaji guru honorer di Sumba hanya Rp150,000- Rp350,000 per bulan dan hal ini sangat tidak sebanding dengan gaji guru PNS yang berjumlah Rp 3,000,000- Rp6,000,000.

“Bagaimana kami bisa menuntut guru-guru kami untuk mengajar dengan baik, jika dari segi gaji saja mereka tidak tercukupi,” ujar Bapak Len, perwakilan dari Dinas Pendidikan Sumba Barat Daya.

Persoalan ini membuat pemda mengusulkan alokasi lebih bagi pengangkatan guru PNS di Sumba. “Apalagi sekarang ada Guru Garis Depan (GGD). GGD yang dikirim ke Sumba di tahun 2015 tidak ada yang berasal dari putra daerah. Mereka mengalami kesulitan saat mengajar karena banyak siswa di jenjang pendidikan dasar di Sumba yang hanya menggunakan bahasa Ibu,” tambah Umbu Lili, wakil Bupati Sumba Timur.

“Jika bisa GGD ini diangkat dari putra daerah saja sehingga kendala bahasa bisa diatasi,” lanjutnya dalam sesi diskusi yang membahas tentang performa guru di Sumba. Diskusi ini juga dihadiri Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata dan jajaran pejabat eselon dua. Dirjen GTK menjawab permasalahan ketersediaan guru di Sumba. Menurutnya,

pengangkatan PNS dikembalikan kepada kemampuan fiskal daerah. Pranata menjelaskan, menurut data GTK, sebenarnya empat Kabupaten Sumba sudah kelebihan guru di banyak sekolah.

“Yang sekarang harus dilakukan bukannya menambah (guru PNS) tetapi redistribusi guru yang sudah ada. Namun seringnya, guru-guru ini tidak mau dipindahkan dari sekolahnya sekarang karena sudah nyaman,” ungkap Sumarna.

Dirjen GTK menyambut baik ide pengangkatan GGD dari Putra Daerah. “Sebenarnya kita sudah mulai mengangkat guru GGD dari daerah lewat jalur PGSD *basic science* dan kolaborasi,” ujarnya. Dia mengusulkan jika pemda memang ingin mengangkat putera daerah, pemda bisa berkoordinasi langsung dengan universitas/LPTK dalam menyiapkan lulusan yang akan masuk dalam SM₃T. Dari sini, peserta SM₃T bisa masuk ke GGD. “Namun, pemda masih harus tetap menyediakan potret kebutuhan data guru di tiap Kabupaten,” ujarnya.

Selain guru, kepala sekolah juga menjadi bahasan dalam diskusi kali ini. Diskusi ini membahas tentang kemampuan manajerial kepala sekolah. Menurut pejabat Pemda Kabupaten Sumba, banyak kepala sekolah yang tidak memiliki kemampuan manajerial sekolah yang baik. Mereka tidak melalui proses pembekalan dan perekrutan yang semestinya tercantum dalam peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk jenjang SD, kepala sekolah sibuk mengisi waktunya untuk mengurus administrasi dana BOS.

“Untuk menambah kompetensi kepala sekolah, kita bisa menggunakan LPMP sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengadakan pelatihan, seperti yang terjadi di Kurikulum 2013,” ujar Supriano, Direktur Pembinaan

SMP. Ide tersebut bergulir sehingga menghasilkan usulan kerja sama pemda dengan LPMP dan LPKKS dalam menyiapkan kepala sekolah.

Selain guru dan kepala sekolah, pendidikan PAUD juga menjadi perhatian. Menjamurnya pendidikan PAUD di Sumba tidak dilengkapi dengan program transisi siswa yang baik sehingga masih banyak siswa yang kewalahan saat masuk SD. Difasilitasi oleh ACDP, aparat Pemda Sumba ini bertemu dengan *Save The Children* dalam membahas peningkatan literasi pada siswa pendidikan dasar. *Save the Children* berjanji akan membuat modul kurikulum transisi PAUD ke-SD dan pelatihan guru untuk bisa menggunakan bahasa daerah saat mengajar di kelas awal SD. Penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan ini juga diperbolehkan undang-undang, namun hanya untuk kelas awal. Tujuannya agar siswa bisa cepat beradaptasi dan membantu siswa menanamkan pemahaman tentang literasi dan numerasi.

Contoh-contoh di atas merupakan tema yang dibahas dalam Lokakarya Pemda empat kabupaten di Kepulauan Sumba bersama dengan Kemendikbud. Selain Kemendikbud, acara ini juga mengundang kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Diskusi seru terjadi selama lokakarya ini. Pemda dan kementerian bisa saling bertukar pikiran dan memikirkan usulan yang paling mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemda bisa mengutarakan keinginannya dan berdiskusi dengan Kemendikbud untuk mengelaborasi ide yang lebih solutif.

“Kami senang Kemendikbud

mau menerima kami dan menyediakan waktunya untuk mendengar dan bersama menyelesaikan permasalahan pendidikan di Sumba,” ujar Yohanis dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Sumba Tengah. Pada hari terakhir, pemda empat kabupaten berusaha merumuskan solusi dan tindak lanjut. Hasilnya akan masuk dalam proposal tiap kabupaten yang akan diajukan kepada Kemendikbud.

Keempat pemda kabupaten ini juga sepakat mengadakan pertemuan rutin membahas rencana dan target yang telah dibuat dalam Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS). Lebih jauh semoga kolaborasi ini juga bisa menjadi praktik baik bagi Pemda lain.

“Harapannya semoga kolaborasi ini bisa berlanjut, bukan hanya fokus menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi, tetapi juga mengembangkan ide-ide pengembangan pendidikan, kebudayaan dan karakter di setiap siswa,” ujar Staf Ahli Mendikbud untuk Hubungan Pusat-Daerah James Moodouw dalam penutupan lokakarya ini.

Menjaga harmoni dan memperkuat partisipasi daerah

Tidak hanya lokakarya dengan Pemda Sumba, Kemendikbud juga melakukan upaya lain dalam peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lokakarya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang sudah dilakukan PASKA di sepuluh provinsi dengan mengundang jajaran pemda kabupaten masing-masing provinsi, merupakan contoh lain dari penguatan hubungan pusat dan daerah. Lewat *Lokakarya NPD*, jajaran pemda menjadi sadar jika alokasi dana APBD untuk pendidikan masih rendah dengan hasil yang tidak signifikan. Pada lokakarya ini, pemda bersama-

sama memikirkan solusi untuk permasalahan di daerahnya.

Desk Papua juga merupakan bagian dari penguatan hubungan pusat dan daerah yang berada di bawah Kemendikbud. *Desk Papua* bertujuan untuk meningkatkan konektivitas aktivis-aktivis pendidikan Tanah Papua melalui pelibatan publik. *Desk Papua* membuka ruang untuk bekerja berdampingan dengan *Papuan Education Community* (komunitas aktivis pendidikan informal yang bergerak di Papua), di bawah koordinasi dan pengawasan Staf Ahli Mendikbud untuk Hubungan Pusat-Daerah James Moodouw.

Guru Pembelajar merupakan program unggulan Ditjen GTK yang juga melibatkan daerah. Guru Pembelajar merupakan program pelatihan agar para guru bisa mencapai kompetensi profesi sesuai harapan. Metode pelatihannya sendiri ada yang memakai metode daring secara keseluruhan, setengah daring, setengah tatap muka, serta tatap muka secara keseluruhan. Karena pengembangan kompetensi guru juga merupakan tanggung jawab pemda, bagi pelatihan yang menggunakan metode tatap muka, Kemendikbud meminta pemda membiayai langsung pelatihan bagi guru mereka.

PASKA sejak awal tahun 2016 sedang menyusun konsep sinkronisasi pusat-daerah sebagai upaya Kemendikbud menyelaraskan program dan menjalin sinergi yang efektif untuk mewujudkan peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan. Kemendikbud menyadari bahwa tiap daerah mempunyai potensi yang berbeda dalam mengembangkan daerahnya dan merupakan aktor utama dalam mengembangkan daerahnya. Karena itu, PASKA membuat konsep pembinaan daerah berupa

pengimbasan “kota saudara” (*sister city*): satu daerah dengan penilaian tertinggi akan memulai program terlebih dahulu, kemudian menjadi pendamping bagi daerah dengan penilaian terendah. Diharapkan model ‘daerah rintisan’ ini menjadi model kerja sama yang efektif antara pusat dan daerah. Kemendikbud berencana merintis program ini pada 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2019 dengan mengutamakan daerah 3T.

Pada Oktober 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya juga mengatur perpindahan kewenangan pendidikan pada pemda. Beberapa perubahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UU tersebut. Seperti kewenangan pendidikan menengah dipindahkan kepada pemerintah provinsi, dan perpindahan kewenangan pendidikan nonformal kepada pemerintah kabupaten/kota, selambat-lambatnya berlaku pada tahun 2017.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemendikbud dapat mengomunikasikan perubahan kebijakan yang akan terjadi sesuai dengan perubahan kewenangan. Misalnya, menyangkut tatakelola pemberian bantuan infrastruktur di sekolah menengah, perubahan tatakelola lembaga bagi sekolah yang mempunyai siswa kurang dari seratus, alih status guru dan tenaga kependidikan PNS di sekolah menengah, dan lain-lain. Pemda juga dapat mengomunikasikan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi dalam perpindahan kewenangan pendidikan ini kepada pihak Kemendikbud. Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti beberapa isu terkait perpindahan ini. ■



A photograph of children in a classroom setting, with a teal overlay on the right side. The children are sitting at a wooden desk, looking at books and papers. One child in the foreground is wearing a green shirt and has a blue and white braided bracelet on their wrist. Another child in the background is wearing a red and blue shirt. The classroom has a thatched roof structure visible in the upper left.

Negara Hadir

Anak-anak Suku Wana yang termasuk suku terasing sedang mendapatkan layanan pendidikan khusus di Sekolah Lipu, Sumbol, Morowali Utara



■ Neraca Pendidikan Daerah: Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah

Kemendikbud menyadari peningkatan mutu pendidikan baik di pusat maupun daerah memerlukan dukungan semua pihak terkait.

Pihak-pihak terkait ini diharapkan bersama-sama berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan. Tujuannya demi mewujudkan pendidikan bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah akan berjalan efektif dan maksimal apabila memiliki korelasi dengan jenis dan derajat permasalahan

pendidikan di daerah terkait. Berdasarkan pemikiran tersebut, Kemendikbud berinisiatif untuk menerbitkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). NPD dirancang sebagai sajian data dan informasi tentang kondisi dan pencapaian pendidikan di suatu daerah. Pencapaian pendidikan sebagaimana tercantum pada NPD, diharapkan dapat menjadi cermin untuk melihat kondisi pendidikan di daerah masing-masing.

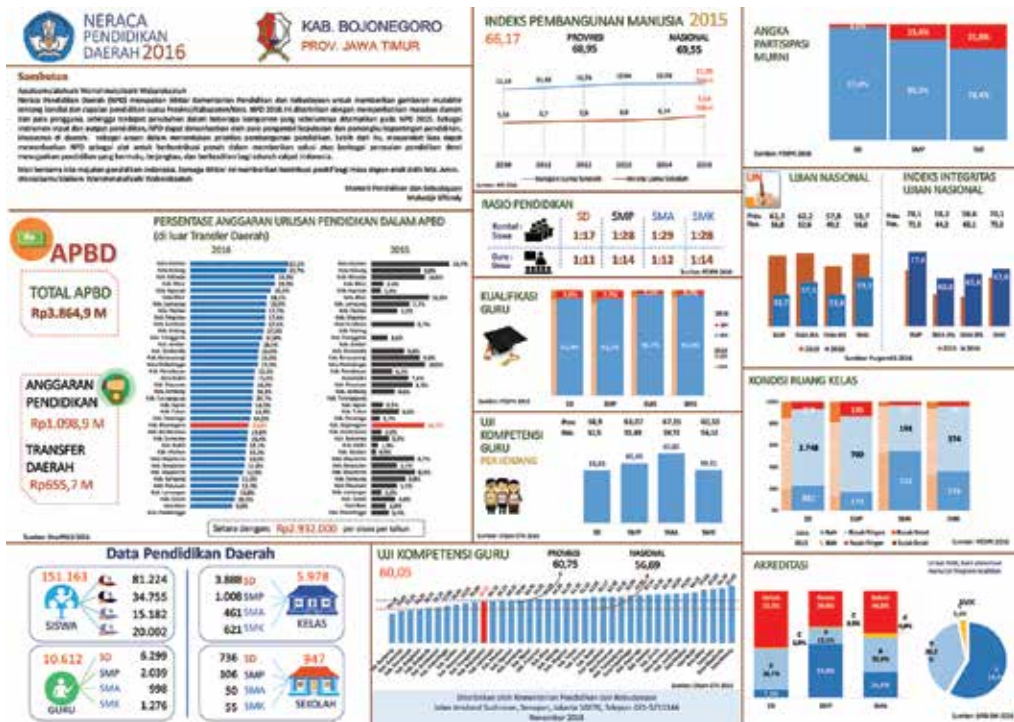
Seperti neraca-neraca pada umumnya, NPD dapat menunjukkan posisi keseimbangan antara input dan output yang dicapai di bidang pendidikan. NPD dibuat dengan perspektif menyajikan cara pandang yang lebih transparan dan akuntabel terhadap profil dan kondisi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota. Semua informasi yang dicantumkan dalam NPD didesain sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran utuh bagi pembaca tentang kondisi pendidikan di suatu daerah dalam satu halaman.

Terdapat empat komponen besar pada NPD yaitu komponen:

1. Input, yang meliputi jumlah siswa, jumlah guru, jumlah sekolah;
2. Intervensi, yang meliputi APBD, anggaran pendidikan, dana transfer daerah;
3. Output, yang meliputi rerata hasil Ujian Nasional (UN), Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), Uji Kompetensi Guru (UKG), kualifikasi dan sertifikasi guru, akreditasi sekolah, kondisi ruang kelas dan ruang penunjang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka tuna aksara. Data-data yang dicantumkan dalam NPD bersumber dari



4. Informasi penunjang lainnya yang meliputi peta dan data administrasi wilayah, isu-isu strategis pendidikan, nama, alamat dan nomor kontak instansi terkait penyelenggaraan di daerah dimaksud, dan kalender tahunan.
- Informasi pendidikan yang ditampilkan dalam NPD antara lain informasi:
1. Anggaran pendidikan daerah yang meliputi total APBD, jumlah dan persentase alokasi anggaran pendidikan (menurut urusan) dalam APBD, Dana Daerah, Transfer Daerah dari APBN (ke Provinsi dalam bentuk BOS dan ke Kab/Kota dalam bentuk DAU gaji, DAK, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan);
 2. Guru yang meliputi jumlah guru, persentase guru yang sudah dan belum kualifikasi D₄/S₁, persentase guru yang sudah menerima sertifikasi profesi, rerata hasil UKG per jenjang pendidikan, dan perbandingan rerata hasil UKG antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
 3. Siswa yang meliputi jumlah siswa, persentase anak bersekolah menurut Angka Partisipasi Murni (APM), rerata hasil UN per jenjang pendidikan, perbandingan rerata hasil UN per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, dan perbandingan rerata IIUN di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
 4. Satuan pendidikan yang meliputi jumlah satuan



pendidikan, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang penunjang per jenjang pendidikan, dan persentase sekolah yang berakreditasi A, B, C dan belum terakreditasi;

5. Ketunaaksaraan yang meliputi jumlah dan persentase penduduk tuna aksara, dan perbandingan persentase penduduk tuna aksara antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; dan
6. IPM yang meliputi rerata Angka Harapan Lama Sekolah, angka Rerata Angka Lama Sekolah, serta perbandingan dan ranking skor IPM antar- Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

NPD diluncurkan untuk pertama kalinya dan diperkenalkan secara resmi oleh Mendikbud pada saat penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, 21 Februari 2016,

dalam versi cetak dan online. Menindaklanjuti peluncuran dimaksud, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, menyebarkan NPD ini dengan mengirimkannya ke sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, media massa, tokoh/ pegiat/pemerhati pendidikan di daerah masing-masing. Dalam versi daring, NPD juga dapat diperoleh dengan mengakses laman web <http://npd.data.kemdikbud.go.id> untuk semua Provinsi/Kabupaten/ Kota (sesuai data terakhir dari Kemendagri sejumlah 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota).

Data dan informasi yang tercantum dalam NPD akan memiliki nilai manfaat tinggi bila ditindaklanjuti dengan komunikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Karena itulah,

PASKA menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT 'Forum Group Discussion') untuk semua provinsi. DKT dengan tema "Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah" ini dimaksudkan sebagai media diskusi pendidikan antara Kemendikbud dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota beserta para pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Banyak pihak terlibat dalam diskusi, seperti Komisi yang membidangi pendidikan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, LPMP, perguruan tinggi negeri/swasta, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.



NPD dan DKT ini merupakan salah satu terobosan Kemendikbud yang, harapannya, akan berujung pada terselenggaranya peningkatan mutu dan akses pendidikan secara nasional

Selain dimaksudkan sebagai media diskusi untuk mencari permasalahan dan alternatif solusinya, DKT juga diniatkan untuk membagi dan menyebarkan praktik baik pendidikan yang sudah dilakukan oleh suatu daerah tertentu. Dengan terbitnya NPD dan terselenggaranya DKT, diharapkan masyarakat dapat terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam proses peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing.

Sampai saat ini, penyelenggaraan DKT sudah dilaksanakan di 10 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Banten, Aceh, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua Barat, Sumatera Barat, Riau, dan Kalimantan Barat. Selama penyelenggaraan DKT tersebut, topik tentang anggaran dan ketunaaksaraan hampir selalu menjadi topik yang

memancing antusiasme tinggi untuk dibahas dan didiskusikan. Berbagai topik hasil diskusi menjadi masukan yang sangat berharga bagi Kemendikbud untuk penyusunan NPD tahun berikutnya. Sebagai bagian dari akuntabilitas, laporan penyelenggaraan DKT ini disampaikan kepada Anggota Komisi X DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan, Gubernur/Bupati/Walikota, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan NPD dan penyelenggaraan DKT ini, Kemendikbud akan melakukan penyusunan dan penerbitan Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan, Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016 dan Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer/ToT) untuk penyelenggaraan DKT di Kabupaten/ Kota.

Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Maka NPD dan DKT ini merupakan salah satu terobosan Kemendikbud yang, harapannya, akan berujung pada terselenggaranya peningkatan mutu dan akses pendidikan secara nasional.

Kaitannya dengan NPD, Mendikbud mengatakan, “NPD diharapkan bisa menjadi acuan prioritas pembangunan pendidikan bagi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di daerah masing-masing. Kolaborasi pengembangan pembangunan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota akan berujung pada terselenggaranya peningkatan mutu dan akses pendidikan secara nasional.” ■

■ Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan: Potret Guru dan Tenaga Kependidikan Daerah

Neraca Guru menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang sudah baik, apa yang perlu dibenahi dan perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan.

Itulah sebabnya, Kemendikbud tengah merintis penyusunan Neraca guru dan tenaga kependidikan (NGTK).

Pembuatan neraca ini mempertimbangkan saran dan tanggapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan terhadap penyusunan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2015. NGTK tidak terpisahkan dari NPD 2015. Namun, sesuai namanya, NGTK akan lebih menyoroti, mendalami, serta menjelaskan lebih rinci dan komprehensif kondisi dan peningkatan mutu guru di provinsi, kabupaten, atau kotamadya.

Pentingnya penyusunan NGTK juga berdasarkan pemikiran peran penting guru dan tenaga kependidikan. Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Kehadirannya bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga mendidik, menginspirasi, dan menggerakkan. Peran guru juga sangat penting dalam pendidikan karakter bangsa.

Presiden Joko Widodo mengakui hal ini saat menghadiri

acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2015 pada 24 November 2015 di Istora Senayan, Jakarta. Di hadapan sekitar 12.500 guru dari berbagai wilayah Indonesia, presiden mengatakan, “Saya mengajak semua pihak untuk menggunakan momentum Hari Guru Nasional untuk menyadari peran penting guru dalam pendidikan karakter bangsa. Guru adalah agen perubahan karakter bangsa.”

Jokowi menambahkan, “Pendidikan karakter, dilakukan di sekolah sebagai arena pembelajaran anak-anak dalam pembentukan karakter. Guru memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter anak didiknya. Nilai-nilai seperti etos kerja, kerja keras, integritas, kejujuran, optimisme, disiplin, gotong-royong, bisa ditumbuhkan dan menjadi kebiasaan di ruang kelas.”

Prinsip

Neraca GTK didesain dengan memperhatikan beberapa prinsip:

- 1) *Stimulative*, neraca ini harus mampu menampilkan informasi terkait guru dan tenaga kependidikan yang bisa merangsang diskusi konstruktif di antara para pemangku kepentingan pendidikan;
- 2) *Trade in balance*, neraca ini harus memperlihatkan sisi input, intervensi, dan output yang berimbang;
- 3) *Self explanatory*, neraca ini harus mampu dipahami dengan mudah oleh siapa pun yang membaca dan mencermatinnya;
- 4) *Informative*, informasi yang ditampilkan dalam neraca ini harus kaya, penting dan berguna yang dibutuhkan dalam analisa permasalahan dan solusi pemecahannya;
- 5) Sederhana, semua informasi yang ditampilkan harus digambarkan dalam tabel dan grafik yang sederhana dan mudah dipahami;
- 6) Menarik, desain neraca ini harus menarik dan memberikan kesan kuat sebagai produk yang dihasilkan oleh Kemendikbud;
- 7) *Valid dan update*, semua data dan

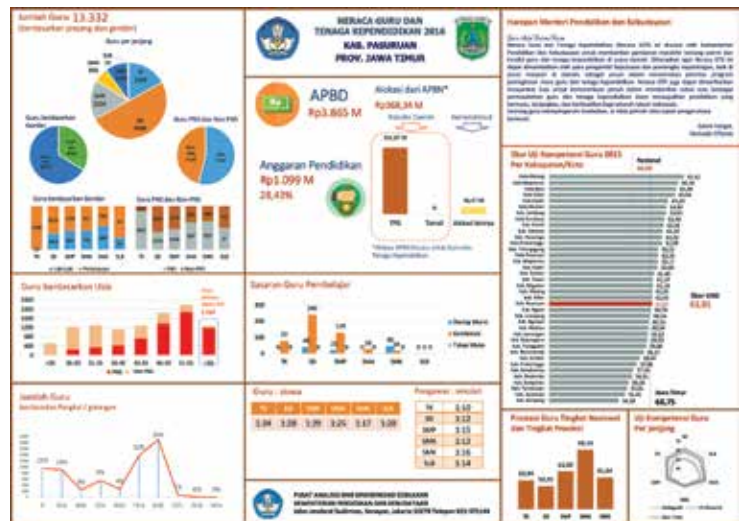
informasi yang disajikan harus menggunakan data terbaru dan terjamin validitasnya.

Penyusunan Neraca GTK bertujuan untuk memberikan gambaran terkini tentang potret, kondisi, dan pencapaian kinerja guru dan tenaga kependidikan di daerah. Informasi di dalamnya harus dapat digunakan sebagai acuan analisis kebutuhan dan peta pengembangan guru ke depan. Para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan di pusat dan daerah dapat memanfaatkannya sebagai referensi dalam menentukan prioritas program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

Neraca GTK ini akan menampilkan gambaran jumlah guru dan tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin, status pegawai, kelompok usia, dan juga golongan. Dari penggambaran jumlah guru berdasarkan kelompok usia nantinya dapat dilihat berapa jumlah guru yang akan pensiun dalam lima tahun ke depan, sebagai masukan untuk perencanaan kebutuhan guru di daerah.

Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Guru menjadi garda terdepan pembentukan kualitas generasi penerus bangsa. Karenanya, guru harus terus memiliki kompetensi dan performa yang tinggi. Guru sebagai penentu, pencetak, sekaligus pembentuk generasi masa depan yang andal, harus didukung dengan program yang dapat memfasilitasi guru meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.

Sebagaimana tema Hari Guru Nasional 2015 yaitu “Guru Mulia Karena Karya”, maka Neraca GTK juga akan menampilkan data dan informasi terkait capaian kinerja dan prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan. Antara lain, Hasil Uji Kompetensi Guru, Sasaran Guru



Pembelajar, Jumlah guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4/S1, jumlah guru dan kepala sekolah berprestasi tingkat Nasional, dan Instruktur Nasional.

Pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI 20 Desember 2015 di Banyuwangi, Mendikbud berpesan agar para guru dapat menjadi guru yang menginspirasi dan terus melahirkan karya-karya bermutu.

“Saya berharap kita bisa mendorong dan meningkatkan kesejahteraan, kualifikasi, dan kompetensi guru. Pastikan kita dapat belajar terus-menerus. Tahun ini Kemendikbud menggunakan tema “Guru Mulia Karena Karya”. Tunjukkan karya-karya kita dan dorong itu. Insya Allah lingkungan kita akan berubah. Perbuatan nyata guru dapat mengubah Indonesia,” kata Mendikbud.

Sumber data Neraca GTK ini terdiri dari berbagai unit, antara lain Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan unit lain apabila dipandang perlu untuk ditambahkan.

Kemendikbud senantiasa mendorong terjadinya peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi lebih baik melalui jalan pendidikan. Sebagaimana sebuah produk terobosan, Neraca GTK ini bukan alat untuk memperlihatkan siapa yang salah, siapa yang benar dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Neraca ini akan menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang sudah baik, apa yang perlu dibenahi dan perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan. Kemendikbud menyadari bahwa peran serta semua pihak sangat penting, sehingga perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun Guru dan Tenaga Kependidikan.

Ya, Seorang guru mempengaruhi keabadian. Ia tidak pernah tahu kapan pengaruhnya berhenti. ■

■ Pengayaan Lema Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia dirujuk tidak saja oleh penutur Bahasa Indonesia, tetapi juga oleh para pemelajar bahasa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang bahasa nasional kita.

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbud, Bahasa Indonesia kini dipelajari di 45 negara, dan dituturkan oleh sekitar 250 juta orang di Indonesia dan di luar Indonesia. Bahkan di beberapa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua.

Melihat kenyataan itu, Badan Bahasa telah beberapa kali merevisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agar semakin kaya dan memiliki daya ungkap kuat. Di antara parameter untuk mengukur kekayaan dan kekuatan daya ungkap sebuah bahasa adalah kekayaan leksikonnya (baca: kosakata). Bahasa yang kaya dan memiliki daya ungkap yang kuat memiliki kemampuan yang tinggi

dalam mengungkapkan konsep apa pun dalam kehidupan. Mulai dari konsep yang paling sederhana sehari-hari sampai kepada konsep teknis yang rumit, seperti konsep ilmu pengetahuan. Kekayaan dan kekuatan bahasa tergambar dari kosakata yang terinventarisir dalam kamus. Semakin kaya dan kuat daya ungkap sebuah bahasa, semakin kaya kosakata yang dimiliki bahasa tersebut.

Kita ambil contoh bahasa Inggris yang memiliki satu juta kosakata, jelas memiliki kekuatan dalam mengungkapkan hampir semua konsep kehidupan. Coba kita bandingkan dengan kosakata bahasa daerah tertentu yang dituturkan dalam ranah terbatas. Kamus bahasa adalah cara paling mudah untuk mencermati kekayaan kosakata bahasa tertentu.

Untuk Bahasa Indonesia, KBBI merupakan kamus yang merekam semua fakta kebahasaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam segala ranah bahasa Indonesia. Hingga kini, KBBI sudah terbit sampai edisi keempat (2008) yang memuat sebanyak 90.049 kosakata. KBBI edisi pertama terbit pada tahun 1988 dengan 62.000 kosakata. Edisi kedua terbit tahun 1991 dengan menambah sepuluh ribu kosakata menjadi 72.000. Empat belas tahun kemudian edisi ketiga terbit, hanya bertambah 6.000 kosakata menjadi 78.000 kosakata.

Pertumbuhan kosakata dalam KBBI yang lambat bertolak belakang dengan derasnya konsep-konsep baru yang masuk ke dalam Bahasa Indonesia serta kekayaan bahasa dan budaya Indonesia.





Sebagaimana kita ketahui, istilah-istilah asing dari berbagai ranah seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat kaya dengan berbagai konsep dan istilah baru yang selalu bermunculan.

Kemunculan istilah-istilah baru ini harus ditangkap dengan cepat dan dicari padanannya ke dalam Bahasa Indonesia. Terdapat tiga cara pemadanan sebuah istilah asing ke Bahasa Indonesia, yaitu penerjemahan, penyerapan, dan gabungan keduanya. Salah satu contoh penerjemahan yang dapat dilakukan secara langsung adalah “pencakar langit” yang diterjemahkan dari *skyscraper*. Penerjemahan dengan perekaan seperti “jasa boga” atau “pasar swalayan” dari *catering* dan *supermarket*. Sedangkan contoh

penyerapan adalah “desain, nasal, dan internet,” dari *design*, *nasal*, dan *internet*. Contoh untuk gabungan penerjemahan dan penyerapan adalah “koloid lempung” dari *clay colloid*.

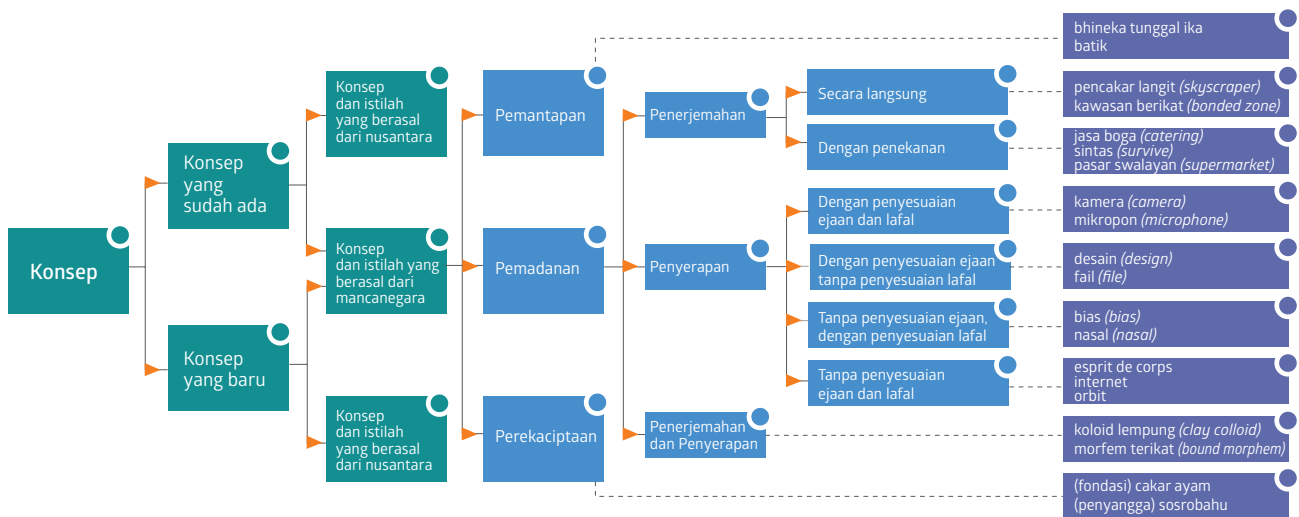
Badan Bahasa sudah mengidentifikasi 614 bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Setiap bahasa daerah mewakili sekurang-kurangnya satu kelompok etnis yang ada di Indonesia. Bahasa daerah kaya dengan konsep-konsep budaya yang bersifat unik, khas, dan belum ada dalam Bahasa Indonesia. Konsep yang diwakili oleh istilah dapat diangkat menjadi kosakata Bahasa Indonesia, contohnya “bakar batu”, yaitu cara memasak makanan dari daerah Papua yang dilakukan dengan membakar batu kemudian

memasukkan atau meletakkan makanan di atas atau di sela-sela batu yang panas.

Selain itu, bahasa daerah kaya dengan konsep yang dapat menjadi padanan konsep lain, terutama konsep yang berasal dari bahasa asing. Contohnya, “mengunggah” yang diterjemahkan dengan perekaan dari *upload* yang sama-sama memiliki unsur makna menaikkan sesuatu.

Potensi pengayaan kosakata

Istilah asing baru dan konsep unik dan khas dalam bahasa daerah menjadi potensi besar dalam pengayaan Bahasa Indonesia atau pengembangan lema Bahasa Indonesia di dalam KBBI. Lema KBBI yang saat ini lebih dari 90.000, terbuka untuk ditambah



dan dikembangkan. Ditambah maksudnya dimasukkan kata atau istilah baru sama sekali, atau dikembangkan maknanya dari makna yang sudah ada. Penambahan dan pengembangan kosakata Bahasa Indonesia memerlukan keterlibatan semua penutur Bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Keterlibatan para penutur dalam mengembangkan kamus yang dikenal dengan istilah *crowd sourcing* (urun daya) juga dilakukan kamus bahasa lain. *Webster English Dictionary*, salah satu kamus lima besar Bahasa Inggris, mengumpulkan data dari masyarakat selama bertahun-tahun. Lebih dari separuh datanya berasal dari masukan langsung masyarakat.

Untuk pengayaan KBBI, masyarakat dapat melakukan dua hal. Pertama, mengusulkan kata baru atau perbaikan kata yang sudah ada. Kedua, mengusulkan makna baru atau perbaikan makna yang sudah ada. Usulan kata baru dari masyarakat harus merupakan konsep yang unik dan khas yang belum ada dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah

Badan Bahasa merencanakan KBBI edisi revisi berikutnya akan memiliki 200.000 kosakata pada tahun 2019. Pada tahun ini, akan terbit KBBI edisi V yang akan memuat 110.000 kosakata.

bahasa Indonesia, berkonotasi baik, serta memiliki bentuk yang enak didengar (*eufonis*). Kata tersebut dapat berasal dari kosakata bahasa daerah, kosakata atau makna yang hidup di tengah masyarakat, kosakata budaya, kosakata kuliner, dan sebagainya.

Kosakata baru yang berasal dari masyarakat yang memenuhi kriteria diseleksi dalam beberapa tahap sebelum menjadi “warga resmi” KBBI. Seleksi tersebut dimulai dari pengumpulan dan penyeleksian data, dilanjutkan dengan pendefinisian, kemudian verifikasi, selanjutnya penyuntingan. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara manual berbasis kertas dan berbasis kantor. Pelaksana kegiatan mulai dari pengumpulan data sampai penyuntingan dilakukan oleh pekamus (demikian *lexicographer*

disebut dalam Bahasa Indonesia) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Lingkup pencarian yang kurang luas dan yang melakukan pencarian hanya beberapa orang karena keterbatasan sumber daya manusia, tentu memiliki keterbatasan. Konsekuensi hasilnya sudah pasti berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan.

Guna mengantisipasi keterbatasan sumber daya, area pencarian data, waktu, dan tempat, tampaknya sangat perlu untuk melibatkan masyarakat penutur secara luas. Untuk itu, Badan Bahasa membangun sebuah program berbasis internet yang akan memudahkan masyarakat melakukan pengusulan kata atau definisi. Program tersebut bernama “Program Pengayaan Kosakata



Peluncuran Program Pengayaan Kosakata Bahasa Indonesia oleh Kemendikbud pada 5 Mei 2016



Bahasa Indonesia”. Program tersebut dibuat juga berbasis aplikasi Android dan IOS.

Program ini sudah diluncurkan secara resmi pada 5 Mei 2016. Program tersebut sudah mulai “menyuplai” kosakata usulan masyarakat untuk dimasukkan ke dalam KBBI. Sampai saat ini, sudah tersaring sebanyak 509 kosakata yang diusulkan 1.281 orang.

Badan Bahasa merencanakan KBBI edisi revisi berikutnya akan memiliki 200.000 kosakata pada tahun 2019. Pada tahun ini, akan terbit KBBI edisi V yang akan memuat 110.000 kosakata. Terdapat selisih 90.000 kosakata yang harus “dikejar” selama tiga tahun, atau rata-rata sebanyak 30.000 kosakata setahun. Sebuah angka yang ambisius kalau dilihat

dari perkembangan KBBI edisi I sampai IV yang hanya mencapai 90.000 kosakata.

Namun, sasaran yang besar tersebut tidak mustahil dilakukan karena kita memiliki lebih dari 617 bahasa daerah yang menjadi taman sari Bahasa Indonesia. Taman sari yang dapat menyumbangkan bunga yang paling unik dan khas ke dalam taman besar bernama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang diperlukan adalah sistem penjangkauan yang murah, mudah, dan dapat diakses dari mana saja, serta melibatkan masyarakat secara luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan optimis target tersebut dapat dicapai dengan sosialisasi yang baik dan menjangkau seluruh lapisan ekosistem pendidikan. ■



■ Memenuhi Amanat Konstitusi Lewat Program Indonesia Pintar

“Kita tidak ingin lagi mendengar anak putus sekolah karena alasan biaya. Kita pastikan bahwa alasan tersebut tidak lagi relevan.”

Kalimat ini seolah dapat menggambarkan besarnya semangat jajaran Kemendikbud untuk menyukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Namun, salah satu tantangan terbesar program Wajib Belajar 12 Tahun adalah anak putus sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengahnya karena masalah biaya. Tahun 2016,

diperkirakan jumlah anak putus sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA/K masing-masing 0.98%, 0.98% dan 1.22%.

Masalah ini kerap menjadi alasan fundamental, walaupun dalam beberapa kasus, budaya serta tekanan sosial juga merupakan penyebab anak putus atau tidak sekolah. Itulah sebabnya Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai

program unggulan. PIP ingin memastikan bahwa semua anak Indonesia, terutama anak dari keluarga prasejahtera, tetap bisa mengakses pendidikan sampai ke tingkat pendidikan menengah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Presiden Joko Widodo menetapkan enam tugas bagi Kemendikbud terkait Program Indonesia Pintar. Tugas tersebut sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, TNP2K, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam penetapan sasaran PIP;
2. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima PIP untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK;
3. membayar manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima PIP yang berada di sekolah yang dikelola Kemendikbud;
4. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima PIP;
5. menjadi pengguna anggaran dalam pelaksanaan PIP di lingkup Kemendikbud;
6. melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menko PMK.

PIP merupakan perbaikan atas program sebelumnya seperti program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Berlangsung antara tahun 2008-2014, BSM memberikan bantuan biaya personal pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu. BSM fokus memberikan bantuan kepada anak-anak yang berada pada satuan pendidikan formal. Sedangkan PIP memiliki cakupan penerima manfaat yang lebih luas. Selain menjangkau sistem pendidikan dalam rentang usia 6-21 tahun, PIP juga menjangkau anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal.

Secara umum, PIP memiliki empat tujuan:

1. meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan;
3. menurunkan kesenjangan

partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan antardaerah.

4. meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pemerintah menyediakan anggaran lebih dari Rp 11 Triliun di tahun 2016 untuk keperluan PIP, dengan sasaran penerima berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K). Kemendikbud telah mendistribusikan KIP kepada lebih dari 17 juta anak usia 6-21 tahun di seluruh Indonesia.

Kriteria Anak Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP):

1. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016.
2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemendikbud dan Kemenag.
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di panti asuhan/ sosial.
5. Anak/santri (6-21 tahun) dari pondok pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan pondok pesantren (sejenis FUM/ Formulir Usulan Madrasah).

6. Siswa usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/ bencana alam.

Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/ rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS). Atau, anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

KIP diberikan sebagai penanda/ identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan PIP apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah). Atau, lembaga pendidikan nonformal (pondok pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, lembaga pelatihan/kursus dan lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama).

Untuk mendapatkan Dana PIP melalui KIP, penerima KIP harus mendaftarkan KIP-nya kepada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, ke dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Selanjutnya, berdasarkan sistem Dapodik yang tersinkronisasi dengan direktorat teknis kementerian, maka Kemendikbud akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencairan yang diteruskan ke bank penyalur, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan terkait. Satuan Pendidikan selanjutnya akan menginformasikan kepada siswa penerima KIP agar segera

Sasaran dan Anggaran PIP 2016

No	Jenjang	Sasaran	Anggaran (Rp 000.000)			Jumlah
			Dana diterima Siswa	Pencetakan dan Pengiriman Kartu	Biaya Penyaluran	
1	SD	10.360.614	4.401.142	108.496	51.803	4.561.441
2	SMP	4.369.968	3.324.583	20.854	21.850	3.367.287
3	SMA	1.367.559	1.380.201	14.321	6.838	1.401.360
4	SMK	1.829.167	1.839.813	20.220	9.146	1.869.179
Jumlah		17.927.308	10.945.739	163.891	89.637	11.199.267

mencairkan manfaat PIP di bank-bank penyalur yang telah ditunjuk.

KIP Plus

Sejak 2016, Kemendikbud menetapkan Tujuh Tujuan Strategis Tata Kelola Keuangan Pendidikan, sebagai berikut.

1. Transparansi belanja pendidikan, baik belanja APBN dan APBD;
2. monitoring atas penggunaan anggaran pendidikan;
3. meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan pendidikan;
4. perbaikan perencanaan anggaran pendidikan;
5. meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran;
6. bantuan lebih fleksibel dan terarah;
7. mengenalkan sistem perbankan (*banking literacy*) sejak dini.

Sebagai upaya perbaikan tatakelola keuangan pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel, Kemendikbud juga melakukan inovasi atau pengembangan atas model KIP yang tengah berjalan. Pengembangan tersebut diwujudkan dalam bentuk mengubah pola bantuan PIP dari tunai menjadi nontunai (*cashless*).

Dalam proses ini, Kemendikbud mengundang Bank Indonesia untuk bersama-sama menyusun kerangka sistem *cashless* untuk PIP.

KIP Plus adalah kartu identitas bagi penerima yang terhubung secara langsung dengan nomor rekening penerima. Dengan demikian kartu tersebut dapat berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran nontunai yang sumber dananya berasal dari dana PIP.

Di dalam kartu tersebut, terdapat dua kantong dompet yang aktif bersamaan: kantong dana PIP dan kantong tabungan personal. Dalam kantong dana PIP, sumbernya berasal dari dana PIP yang disalurkan oleh pemerintah melalui bank penyalur ke rekening penerima. Dalam kantong ini, semua transaksi dikunci menjadi transaksi nontunai atau hanya bisa digunakan untuk belanja barang-barang pendidikan (atau yang diatur secara khusus di dalam Petunjuk Teknis). Sedangkan pada kantong kedua atau kantong tabungan personal, penggunaannya dibebaskan kepada penerima dan sumber dananya merupakan sumber dana personal penerima.

Sebagai proses pengembangan, **KIP Plus** diujicobakan secara terbatas di Yogyakarta dengan melibatkan bank penyalur (BNI dan BRI) dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK di kota tersebut. Uji coba tersebut berlaku mulai 1 Oktober-31 Desember 2016. Uji coba **KIP Plus** dianggap sukses jika mampu memenuhi empat indikator, yakni:

1. Kesiapan lapak belanja siswa;
2. Kerjasama Kemendikbud dan Pemda (Provinsi dan Kota);
3. Kesiapan Struktur Tim Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dalam pengawasan pelaksanaan uji coba **KIP Plus**;
4. Keterlibatan aktif BI, bank penyalur, dan Sekolah dalam edukasi dan pengawasan atas pelaksanaan uji coba.

Hasil uji coba ini, jika berhasil, akan menjadi dasar dan tolok ukur penerapan model KIP nontunai secara bertahap dan meluas. Semoga berbagai inovasi yang dilakukan dapat menyukseskan PIP dan pada akhirnya membuat pemerintah mampu memenuhi amanah konstitusi untuk bidang pendidikan. ■

■ Pembangunan Infrastruktur untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Bencana banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada Selasa malam (20/9-2016), ikut meluluhlantakkan sejumlah fasilitas pendidikan.



Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad meninjau kondisi siswa dari beberapa sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/09/2016).

Kemendikbud menunjukkan sikap tanggapnya terhadap masalah yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar di Garut. Hanya satu hari setelah bencana tersebut, Kemendikbud bersama-sama dengan Dinas Pendidikan setempat segera terjun ke lokasi untuk melakukan pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas pendidikan. Dalam kesempatan

itu, Kemendikbud secara langsung menyerahkan bantuan paket belajar kepada 200 siswa yang terkena dampak bencana tersebut.

Tindakan tanggap darurat itu merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Selain program-program pembangunan infrastruktur yang memang sudah direncanakan setiap tahun,

Kemendikbud juga aktif membantu pemulihan fasilitas pendidikan di daerah-daerah yang tertimpa bencana alam.

Kemendikbud menyadari, infrastruktur pendidikan menjadi bagian integral pembangunan pendidikan. Penyiapan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran juga harus didukung infrastruktur dasar yang memadai. Kemendikbud berkomitmen



Fasilitas komputer untuk menunjang pembelajaran

membantu pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur pendidikan adalah ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah. Daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal kuat serta komitmen pendanaan pendidikan yang besar cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, walaupun memiliki komitmen baik, daerah yang memiliki ruang fiskal sempit tetap kewalahan dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

Dalam beberapa kasus seperti di Indonesia Timur, rumitnya kondisi geografis serta akses pendukung yang amat terbatas,

memberikan tekanan yang lebih besar terhadap penyediaan infrastruktur dasar di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan fasilitas jalan raya dan transportasi yang tidak bisa diandalkan, menyebabkan fasilitas pendidikan yang memadai sekalipun tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan akses.

Sepanjang tahun 2016, Kemendikbud mengalokasikan dana yang sangat besar untuk penyediaan infrastruktur pendidikan di daerah. Sebanyak 572 unit sekolah baru didirikan di daerah-daerah yang masih kekurangan. Pembangunan unit sekolah baru ini menghabiskan dana sebanyak Rp. 1.257 miliar dengan besaran nilai per unit bervariasi, tergantung jenjang pendidikan. Kemendikbud juga menambah 13.570 ruang kelas baru

untuk menambah kapasitas peserta didik yang dapat ditampung dalam tiap-tiap satuan pendidikan. Sekitar Rp 3,111 miliar dikucurkan untuk pembangunan ruang kelas baru tersebut.

Pada tahun ini, Kemendikbud juga membantu pengadaan 18.530 perangkat peralatan pendidikan untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Program ini menghabiskan dana sekitar Rp 1,5 triliun dan diserahkan kepada unit-unit satuan pendidikan yang membutuhkan. Untuk peningkatan kegiatan praktik siswa, Kemendikbud juga menyediakan 1.975 ruang laboratorium atau ruang praktik siswa dan terutama ditujukan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Untuk menumbuhkan semangat literasi dan belajar luar kelas siswa, Kemendikbud membantu

Sasaran Pembangunan Infrastruktur

Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016

No	Program	Sasaran	Anggaran (rupiah)
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru	572 unit	1.257,6 miliar
	SD	20 unit	41,1 miliar
	SMP	110 unit	78,7 miliar
	SMA	204 unit	484,7 miliar
	SMK	221 unit	613,4 miliar
	PKLK	17 unit	39,5 miliar
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	16.255 ruang	3.111,3 miliar
	SD	2.020 ruang	339,7 miliar
	SMP	3.786 ruang	653,6 miliar
	SMA	4.187 ruang	818,3 miliar
	SMK	5.962 ruang	1.263,2 miliar
	PKLK	300 ruang	36,3 miliar
3	Bantuan Peralatan Pendidikan	18.530 paket	1.527 miliar
4	Laboratorium dan Ruang Praktik Siswa	1.975 ruang	437 miliar
5	Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar	1.622 ruang	402 miliar
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	13.608 ruang	1.522,1 miliar
	SD	8.190 ruang	742,9 miliar
	SMP	1.518 ruang	576,7 miliar
	SMA	1.600 ruang	83,8 miliar
	SMK	2.000 ruang	102,8 miliar
	PKLK	300 ruang	15,8 miliar

Sumber: Dikdasmen 2016

pengadaan 1.622 perpustakaan atau pusat sumber belajar di berbagai daerah.

Komitmen Kemendikbud membantu pemerintah daerah bukan hanya menyangkut infrastruktur pendidikan seperti membangun sekolah dan ruang kelas baru. Kemendikbud juga membantu merehabilitasi fasilitas pendidikan yang mengalami

kerusakan, baik kerusakan ringan maupun berat. Sepanjang 2016 saja, Kemendikbud melakukan rehabilitasi 13.608 ruang belajar dengan anggaran sebesar Rp. 1.522,1 milyar.

Besarnya jumlah bantuan infrastruktur di atas juga memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di lapangan. Diperkirakan lebih dari

150 ribu orang terlibat menjadi pekerja dalam pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut.

Kemendikbud juga telah mengembangkan sistem informasi daring yang mampu menyajikan informasi infrastruktur pendidikan untuk tiap sekolah di Indonesia. Informasi yang diolah di dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) ini bersumber



Pembangunan Unit Sekolah Baru di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Dikdasmen 2016.

langsung dari informasi yang disampaikan petugas sekolah yang disertai dengan dokumentasi fotografi. Tiap-tiap satuan pendidikan kemudian dapat mengisi status tiap-tiap sarana prasarana yang mereka miliki, termasuk di dalamnya soal ketersediaan listrik dan jaringan internet.

Pendataan dan Pelibatan

Pendataan infrastruktur ini penting dalam bagian perencanaan kementerian. Sesuai dengan komitmen yang digariskan dalam arah kerja Kemendikbud, data menjadi sumber informasi pengambilan keputusan dan juga digunakan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.

Dalam penyediaan infrastruktur, Kemendikbud mendorong keterlibatan pemda agar lebih dominan. Hal ini sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang diemban pemda dalam kerangka pembangunan di era otonomi daerah. Selain mendorong Pemda, Kemendikbud juga mendorong keterlibatan kementerian dan lembaga lain untuk bersama-sama menyiapkan

Dalam penyediaan infrastruktur, Kemendikbud mendorong keterlibatan pemda agar lebih dominan. Hal ini sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang diemban pemda dalam kerangka pembangunan di era otonomi daerah

infrastruktur yang integral dan terkait.

Pengalaman menunjukkan bahwa untuk mencapai sekolah, dibutuhkan sarana jalan raya yang mudah diakses, atau jembatan untuk menyeberang sungai. Kualitas pembelajaran yang modern, selain membutuhkan perangkat informatika, juga memerlukan akses internet dan jaringan listrik yang stabil. Hal-hal tersebut tentu harus disiapkan kementerian dan lembaga terkait. Karena itulah, sinergitas lintas kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya pemerintah pusat dan daerah, harus mampu diwujudkan.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas juga menjadi perhatian Kemendikbud. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan ini mengatur persyaratan teknis untuk memberikan fasilitas dan aksesibilitas bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Peraturan ini meliputi persyaratan teknis ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ramp, tangga, lift, toilet, dan lainnya.

Penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas ini penting dan telah dimulai dari sekolah-sekolah inklusi yang ditunjuk pemerintah. Harapan ke depan, penyediaan akses yang inklusif dapat menjadi norma dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.

■ *Golden Record:* Dasar Penguatan Tata Kelola Rehab Infrastruktur Sekolah

Persoalan mendasar dalam infrastruktur pendidikan adalah masalah tata kelola.

Pemerintah sejak tahun 2003 sudah mencanangkan adanya perbaikan kualitas pendidikan nasional melalui perbaikan infrastruktur sekolah. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tahun 2009, pemerintah sudah menaikkan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari total APBN. Tahun 2016, anggaran pendidikan mencapai Rp420 triliun, dan dana yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai Rp49 triliun. Dengan anggaran ini, pemerintah pernah menargetkan rehabilitasi atas seluruh gedung Sekolah Dasar selesai pada tahun 2014. Namun hal ini belum tercapai.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, jumlah ruang kelas yang rusak pada tahun

2015 mencapai 149.552 ruang kelas. Dari angka itu, sejumlah 117.087 ruang kelas rusak dialami banyak SD, dan sebanyak 49.074 ruang kelas kondisinya rusak berat. Keadaan ini memperlihatkan belum teratasinya persoalan infrastruktur sekolah terutama di tingkat SD.

Kemendikbud harus mencari formulasi baru agar peningkatan sasaran rehabilitasi sekolah bisa dilakukan. Persoalan ketidaktepatan sasaran ini mencakup dua hal, yaitu penentuan sekolah sasaran yang tidak tepat, dan penentuan besaran bantuan yang tidak sesuai dengan tingkat kerusakan sekolah.

Kesimpulannya, ada ketidakakuratan pelaksanaan perencanaan dan pengalokasian anggaran hingga penetapan sekolah penerima. Pemerintah, baik pusat ataupun daerah, kurang memiliki data akurat atas target sekolah

penerima, ditambah kurangnya kapasitas sekolah yang mengalami kerusakan untuk mengajukan anggaran perbaikan.

Dari catatan di lapangan, penguncian besaran alokasi anggaran rehabilitasi sekolah tidaklah cukup. Penguatan tata kelola pelaksanaan perbaikan infrastruktur sekolah menjadi hal yang sangat penting untuk memperbaiki kesalahan data ini. Tata kelola harus dilakukan dengan merinci data dan kondisi infrastruktur seluruh sekolah di setiap daerah.

Golden Record

Karena itulah Pemerintah lalu membuat sebuah pusat data yang disebut *Golden Record*. Pusat data ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk mendapatkan data akurat dari infrastruktur sekolah. *Golden record* memuat profil seluruh SD yang berjumlah 148.000 lebih.

Data sekolah-sekolah ini dimuat secara lengkap dan detail, meliputi data teknis bangunan/ gedung, gambar bangunan, foto sekolah dari berbagai sisi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), hingga data sekolah rawan bencana.

Selain data terkait bangunan/ gedung ruang kelas, *golden record* juga memuat data infrastruktur sekolah secara keseluruhan, termasuk perpustakaan sekolah, sanitasi, penataan lingkungan, hingga sarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Oleh sebab itu, *golden record* tidak hanya bisa digunakan untuk proses rehab ruang sekolah. *Golden record* juga bisa untuk pengembangan sekolah, seperti penambahan perpustakaan, sanitasi, penataan lingkungan, UKS, dan lain-lain.

Melalui *golden record*, data fisik sekolah yang dilaporkan benar-benar akurat, transparan, efisien, dan akuntabel. Terlebih, data tersebut akan terus diperbarui dalam periode tertentu. “Kami akan lebih mudah dalam menyusun anggaran yang diperlukan. Misalnya, setelah laporan nanti masuk akan ketahuan, berapa besar dana yang diperlukan untuk merehab semuanya dan dalam waktu berapa tahun. Kalau tidak jujur akan ketahuan,” ungkap Direktur Pembinaan Sekolah Dasar ketika disinggung pemanfaatan *golden record*.

Informasi terkait RAB yang sudah disesuaikan dengan IKK di daerah tempat sekolah berada, diharapkan mampu meningkatkan tingkat transparansi pelaksanaan rehab dan mempersempit ruang manipulasi. Keadaan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mana kala pengusulan rehabilitasi sekolah dilakukan melalui proposal.



Sebuah SMP di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Data infrastruktur yang akurat membantu proses perencanaan yang lebih baik.

Pengendalian akan lebih banyak mengandalkan keakuratan proposal rehabilitasi dari sekolah.

Padahal, tingkat keakuratan proposal dari sekolah masih perlu divalidasi dan diverifikasi lebih lanjut. Misalnya, sekolah dengan tingkat kerusakan ringan, bisa saja dilaporkan rusak sedang atau rusak berat sehingga dapat dilakukan pengajuan dana lebih besar.

“Parahnya lagi, kami juga belum tentu melakukan verifikasi lantaran banyaknya proposal yang masuk. Dengan Inovasi tata kelola ini, ketidakjujuran seperti itu bisa

dihindari,” ujar Direktur Pembinaan Sekolah Dasar lebih lanjut. Pada sisi lain, sekolah yang rusak berat bisa saja tidak mengajukan proposal sehingga tidak bisa dilakukan rehab.

Tidak hanya itu, *golden record* dikembangkan menjadi peta infrastruktur sekolah dari tingkat nasional sampai dengan tingkat satuan pendidikan, sehingga mekanisme penentuan sasaran rehab diubah. Tidak lagi terdapat proposal pengajuan, tetapi sasaran sekolah rehab mengacu pada *golden record*.



“Jadi sekarang kita balik. Kalau dulu kita minta laporan dari daerah supaya mereka menyampaikan kondisi fisik sekolahnya. Sekarang kami yang memberikan data kepada pemerintah daerah,” ungkap Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

Untuk menyusun *golden record*, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar bersinergi dengan Direktorat Pembinaan SMK dengan melibatkan 611 SMK Jurusan Teknik Bangunan di seluruh Indonesia. Hampir 50.000 siswa SMK dan 6.000 guru SMK terlibat. Lebih lanjut, terobosan

sinergi SMK ini juga secara tidak langsung mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dukungan ini tertuang dalam perjanjian kerjasama (MoU) yang ditandatangani Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PURR dan Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud, bernomor 21/SPIA/KH/2016 garis nomor 2894/D5/DM/2016 tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Konstruksi di SMK. Dengan demikian, siswa SMK yang kebetulan mendapat tugas pekerjaan (*job order*) akan dilatih, didampingi, dan disertifikasi oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

“Bukan tidak mungkin ketika terjun di lapangan nanti, anak-anak dan guru SMK akan diragukan oleh sekolah yang bersangkutan. Apa betul anak-anak SMK dan gurunya ini mampu. Nah, adanya sertifikasi dari Kementerian PUPR bisa menjawab keraguan tersebut,” ungkap Direktur Pembinaan SMK.

Keterlibatan SMK tidak hanya berperan untuk pembentukan *golden record*, tetapi juga terlibat sebagai tim teknis dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan rehab. Lebih jauh, SMK nantinya akan terlibat dalam program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), hingga sanitasi sekolah.

Penutup

Setelah Kemendikbud berhasil dalam membentuk master data infrastruktur sekolah melalui *golden record*, maka tindakan lanjutannya adalah mengembangkan Aplikasi Sarana Prasarana. Aplikasi ini dimaksudkan untuk pematakhiran master data pada *golden record* dan pengendalian pelaksanaan rehab. Melalui aplikasi ini, proses

pelaksanaan rehab diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, mulai dari penetapan sasaran dan anggaran, proses rehab bangunan, dan pertanggungjawaban. Melalui sistem monitoring pada Aplikasi Sarana Prasarana, progres pelaksanaan rehab atau konstruksi bisa dimonitor langsung secara visual. Hal ini dimungkinkan dengan foto yang konsisten dari sudut yang sama, dengan pengecekan koordinat pada *metadata image*.

“Selama ini, dari sekolah yang akan dilakukan rehab, mungkin paling banyak hanya 10% yang diverifikasi. Dengan inovasi tata kelola ini, 100% sekolah yang akan direhab pelaksanaan, pasti terdata semua secara lengkap,” tegas Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

Sasaran pengguna Aplikasi Sarana Prasarana nantinya bukan hanya Kemendikbud dan pemerintah daerah. Lebih jauh, Aplikasi Sarana Prasarana juga bisa digunakan masyarakat, lembaga donor, dan pihak swasta sehingga bisa menjadi platform untuk partisipasi publik serta memperkuat tata kelola dalam perbaikan infrastruktur sekolah. Melalui perbaikan tata kelola, penanganan infrastruktur sekolah bisa lebih komprehensif dan juga aman untuk semua pihak terlibat.

“Saya tidak mau dengar lagi ada sekolah roboh, juga tidak ada lagi kepala sekolah yang berurusan dengan masalah hukum. Kami tidak ikhlas kepala sekolah itu dipenjara karena masalah ini. Pada umumnya, mereka ini jujur. Tetapi, akibat intervensi dari pihak lain, akhirnya tidak berdaya,” tegas Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

Inovasi Teknologi dalam Pendidikan

Perkembangan teknologi membawa dampak besar terhadap proses pembelajaran. Akses internet yang merambah dunia serta diiringi dengan adopsi komputer serta perangkat digital lainnya, telah mengubah cara manusia memperoleh informasi.

Kini, jarak tidak lagi menjadi kendala selama perangkat dan layanan internet tersedia. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengembangkan layanan digital untuk mempermudah akses pembelajaran bagi sebanyak mungkin masyarakat. Inovasi-inovasi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk adaptasi pemerintah agar selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Rumah Belajar

Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan berbagai bahan belajar serta fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Rumah Belajar dikembangkan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan antara lain: 1) tersedianya fasilitas e-pembelajaran untuk persekolahan, 2) tersedianya berbagai bahan belajar berbasis kanal (*web*) yang sesuai dengan kebutuhan komunitas pendidikan; 3) tersedianya fasilitas e-pembelajaran untuk pelatihan dan pengembangan profesi

berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 4) terjadinya komunikasi dan kolaborasi antar komunitas pendidikan; dan 5) terbentuknya budaya belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Manfaat portal Rumah Belajar dapat dilihat dari tiga hal yaitu sebagai sumber belajar, sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi baik antara individu pendidik dan peserta didik maupun antarsekolah, serta sebagai wahana pengembangan profesionalisme guru. Rumah Belajar memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:





• Sumber Belajar

Menu-menu yang tersedia di fitur Sumber Belajar terdiri atas bahan belajar interaktif untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK. Bahan belajar interaktif berisi bahan belajar untuk mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tiap topik dari materi disajikan secara menarik dan interaktif, yang dilengkapi dengan animasi, simulasi, latihan dan tes berdasarkan kurikulum untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Bahan belajar interaktif ini dimanfaatkan baik secara klasikal maupun individual.

Guru dapat meminta siswa untuk mempelajari bahan belajar interaktif sesuai dengan pelajaran yang sedang dipelajari di sekolah atau digunakan secara individu oleh siswa untuk memantapkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan di sekolah.

Bahan belajar interaktif juga ada yang dikembangkan dengan bentuk *chunking* materi, yaitu materi yang pendek-pendek dengan penggalan tapi mendalam, dan juga

memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum masuk ke dalam materi ajar. Menu Kuis ditampilkan untuk melihat kemampuan awal siswa, sebelum siswa mempelajari uraian materi dan berlatih memantapkan pemahaman pada tiap kegiatan belajar. Setelah mempelajari tiap kegiatan belajar, siswa dapat mengerjakan tes akhir untuk mengukur pemahamannya terhadap isi materi. Hasil tes akhir dimunculkan untuk menginformasikan pada siswa sampai di mana pemahamannya terhadap isi bahan ajar modul online.

- **Buku Sekolah Elektronik**
Buku Sekolah Elektronik (BSE) adalah portal yang menyediakan buku sekolah dari mulai jenjang SD, SMP, SMA & SMK yang dapat dibaca secara daring maupun diunduh sebagai bahan ajar atau belajar secara luring dengan gratis. Buku yang disediakan merupakan buku yang sudah berstandar nasional.
- **Bank Soal**
Uji kemampuan dari berbagai soal yang dapat diakses via

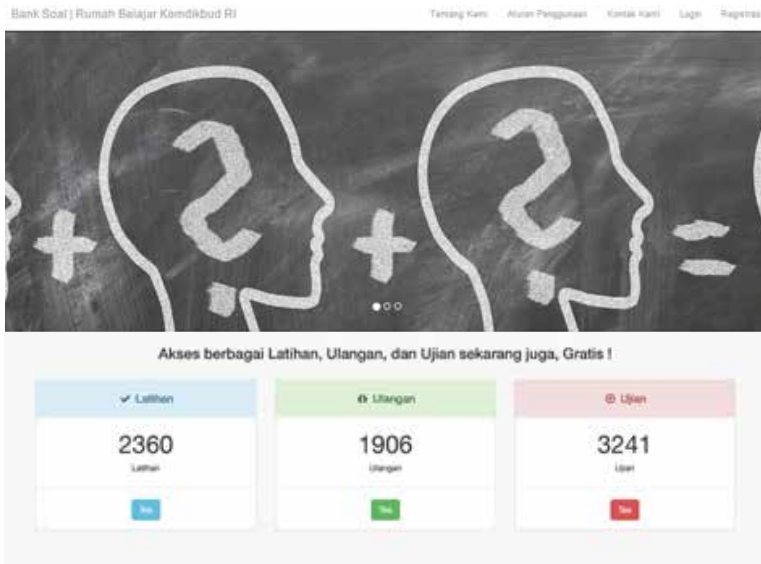
internet, berisi soal-soal yang dapat digunakan untuk berbagai latihan, ulangan dan ujian.

Saat ini Pusat Teknologi dan Komunikasi (Pustekkom) memiliki kumpulan soal yang dapat diakses melalui fitur Bank Soal di Rumah Belajar. Soal yang tersedia dapat digunakan dan dapat dipilih berdasarkan Kelas, bidang studi atau mata pelajaran.

Siswa dapat menguji kemampuan dirinya dengan diberi kebebasan untuk memilih latihan atau uji kompetensi (ulangan dan ujian). Fasilitas ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan latihan terlebih dahulu sebelum melakukan uji kompetensi di portal ataupun sebagai latihan, baik untuk mata pelajaran yang sudah atau akan dipelajari. Dengan menggunakan Bank Soal, siswa dapat melakukan latihan dan uji kompetensi (ulangan dan ujian) berdasarkan kelas, semester, mata pelajaran tertentu. Siswa juga dapat menguji kemampuannya berdasarkan masing-masing topik materi pelajaran yang diinginkan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan banyaknya soal pada saat Ujian Nasional (UN).

• Laboratorium Maya

Laboratorium Maya atau *virtual labs* adalah serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak (*software*) komputer berbasis multimedia interaktif, yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada laboratorium sebenarnya. Laboratorium maya diperlukan untuk memperkuat pemahaman konsep dalam proses pembelajaran. Laboratorium



maya bukanlah pengganti tetapi bagian dari laboratorium riil yang digunakan untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Di samping itu dimungkinkan pula bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium secara fisik menerapkan laboratorium maya.

Setiap konten di laboratorium Maya dilengkapi dengan deskripsi singkat terkait dengan materi yang akan dipelajari. Pengguna (siswa dan guru) dapat memberikan umpan balik dengan mengisi rating (jumlah bintang) dan berbagi melalui salah satu jejaring sosial yang disediakan. Pengguna dapat melakukan percobaan mandiri secara berulang-ulang atau pun dipandu oleh guru yang bersangkutan dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang disediakan atau LKS yang dikembangkan sendiri oleh guru tersebut. Setiap pengguna dapat merekomendasikan bahan referensi yang terkait dengan materi percobaan tersebut dan dapat menguduh bahan teori,

bahan LKS dan konten lab maya itu sendiri sehingga dapat dimanfaatkan secara luring tanpa terhubung internet.

Di laboratorium maya ini, setiap pengguna yang sudah login diberi kesempatan untuk



memberikan komentar terhadap isi laboratorium Maya tersebut. Setiap konten laboratorium Maya juga dilengkapi dengan teori

singkat dan petunjuk percobaan yang akan dilakukan pada menu bantuan.

- **Peta Budaya:** Peta Budaya Nusantara merupakan salah satu menu layanan yang tersedia di Rumah Belajar. Fitur Peta Budaya Nusantara ini terdiri dari informasi mengenai keragaman budaya yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Selain itu juga terdapat informasi mengenai tokoh-tokoh sejarah Indonesia.
- **Wahana Jelajah Angkasa** Salah satu fitur yang menyediakan pengetahuan mengenai benda-benda angkasa secara 3D (3Dimensi). Portal ini bekerjasama dengan Microsoft World Wide Telescope (WWT). Dengan menggunakan fitur ini siswa dapat melihat segala macam benda langit secara virtual.
- **Kelas Maya** Implementasi pembelajaran

kolaborasi dapat pula dilakukan dalam portal Rumah Belajar dengan menggunakan salah satu fitur Kelas Maya. Di dalam fitur kelas maya telah tersedia forum

Titik Beku Larutan (SMA)

1/6/2016 2:27:33 PM / @ululnash-SuperAdmin



Suatu zat cair dikatakan mendidih jika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer (tekanan udara luar) di atas permukaan cairan. Adapun suatu zat dikatakan membeku jika partikel-partikel zat itu berada dalam kisi-kisi kesetimbangan sehingga tidak terjadi gerakan partikel, selain getaran di tempatnya.



Bagikan ke Facebook Twitter Google Plus

Lakukan percobaan sekarang

Komentar Bahan Referensi Bahan Teori Bahan LKS Download Lab Maya

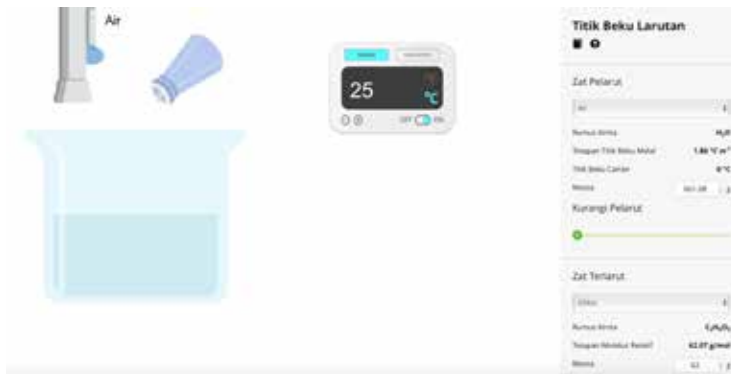
Belum ada komentar

Silahkan **Masuk** untuk mengirimkan komentar

diskusi yang dapat digunakan untuk melakukan kolaborasi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, maupun antara peserta didik dengan guru. Forum diskusi dapat dilakukan secara sinkronus maupun

melakukannya secara asinkronus.

- **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan salah satu fasilitas yang tersedia pada Portal Rumah Belajar. Digunakan



asinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus, peserta didik dapat langsung berinteraksi dan berdiskusi melalui kolom pesan instan yang tersedia. Mereka juga dapat langsung mengunggah hasil diskusi atau tugas melalui papan presentasi yang telah tersedia di dalam aplikasi Kelas Maya. Bagi peserta didik yang tidak memiliki kesempatan untuk kolaborasi secara langsung, maka dapat

sebagai sarana pendidikan dan pelatihan yang dilakukan jarak jauh bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik di lingkungan pendidikan maupun non-pendidikan, untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan kebudayaan dan tenaga profesi lainnya.

Seluruh aktivitas belajar, mencakup membaca ataupun

mengunduh bahan belajar, mengikuti forum diskusi, tutorial, chatting, mengerjakan tugas, latihan, ujian online, dan lain-lain dapat dilakukan melalui komputer yang terhubung ke internet. Pembelajaran dikelola dalam sebuah sistem aplikasi LMS, yang dapat mencatat dan mengolah seluruh aktivitas peserta dalam mengikuti Diklat.

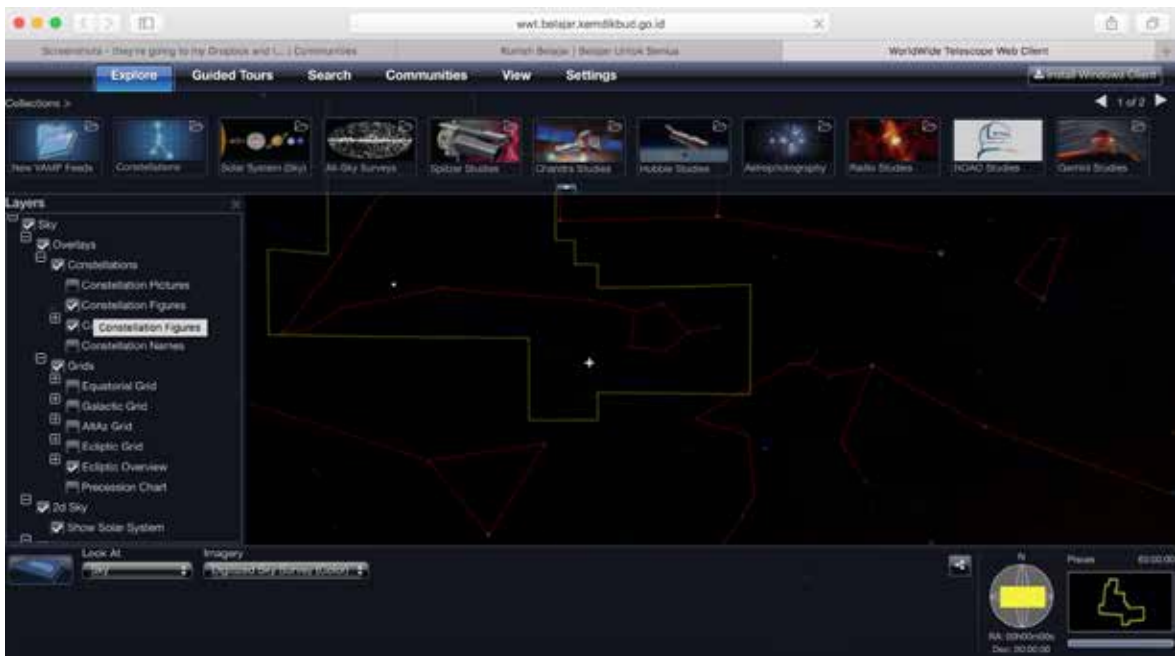
Fitur-fitur pendukung Rumah Belajar:

- **Karya Komunitas:** Fitur yang dapat digunakan sebagai sarana komunitas/masyarakat yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk dapat mengunggah karya pendidikannya.
- **Karya Guru:** Fitur yang dapat digunakan sebagai sarana bagi guru yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk dapat mengunggah karya pendidikannya.
- **Karya Bahasa dan Sastra:** Fitur yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam menyajikan karya bahasa dan sastra Indonesia.

TV Edukasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Televisi Edukasi yang diresmikan tahun 2004. Televisi Edukasi diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh siaran pendidikan secara lebih mudah, guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya yang heterogen, diperlukan media yang tepat dan mudah dalam menyediakan sumber belajar bagi guru dan siswa.

Salah satu media tersebut adalah melalui siaran televisi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jam siaran Televisi



Belajar astronomi secara daring dapat dilakukan dengan mudah. Laman belajar.kemdikbud.go.id menyediakannya.

Edukasi: pukul 05.00 s.d 21.00 WIB dan di tayangkan ulang oleh beberapa televisi lokal dan televisi berlangganan dan dapat di-saksikan secara daring melalui <http://tve.kemdikbud.go.id>

Video On Demand (VOD) TV Edukasi

Tayangan program TV Edukasi dapat diunduh melalui website <http://video.kemdikbud.go.id>. Program-program tersebut dikategorikan dalam setiap jenjang dan mata pelajaran, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam mencari program yang dibutuhkan. Adapun program yang dapat diunduh tidak hanya mata pelajaran, namun juga program pendidikan karakter dan berita.

Kihajar 2016

Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar) adalah kompetisi bagi

siswa SD, SMP, SMA/ sederajat di seluruh tanah air untuk mengukur kemampuan TIK para siswa melalui siaran Televisi Edukasi dan pemanfaatan Portal Rumah Belajar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pemanfaatan siaran Televisi Edukasi dan Radio Suara Edukasi. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa untuk pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, meningkatkan kompetensi siswa melalui pemanfaatan TIK dan memfasilitasi siswa untuk unjuk prestasi. Selain kuis, Anugerah Kihajar juga diberikan kepada kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan, melalui proses seleksi dan penilaian.

Berbagai macam inovasi Kemendikbud tersebut terus dikembangkan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Harapannya adalah kemajuan teknologi tidak melulu berimbas pada masyarakat perkotaan yang memiliki akses infrastruktur baik, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang jauh dari sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam setiap inovasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud selalu disediakan fitur luring yang memastikan bahwa isi dari portal pembelajaran tersebut tetap bisa diakses tanpa layanan internet. Ini merupakan wujud komitmen Kemendikbud terhadap pemerataan pendidikan yang berkualitas. ■



■ Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Program Beasiswa

Pelataran Gedung A Kemendikbud pada tanggal 31 Mei 2016 diramaikan kehadiran 400 mahasiswa asing dari berbagai negara yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia.

Mereka adalah peserta Darmasiswa tahun akademik 2015/2016 yang hadir untuk mengikuti upacara penutupan program Darmasiswa tahun ini. Acara ini dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan lembaga perguruan tinggi, dan Perwakilan Kedutaan negara peserta Darmasiswa.

Menariknya, acara tersebut diisi dengan berbagai atraksi kesenian daerah Indonesia yang dibawakan peserta Darmasiswa. Ada yang menari, bermain alat musik, pencak silat, paduan suara, dan menyampaikan testimoni dalam bahasa Indonesia.

Program Darmasiswa adalah salah satu program Beasiswa

yang ditawarkan Kemendikbud untuk mahasiswa asing yang tertarik mempelajari bahasa, seni, dan budaya Indonesia selama satu tahun. Pada tahun akademik 2016/2017, peserta Darmasiswa RI terdiri dari 580 mahasiswa dari 78 negara. Mereka mendapat kesempatan belajar pada 51 lembaga perguruan tinggi

pengelola Program Darmasiswa RI. Tahun ini, perubahan signifikan yang dilakukan Kemendikbud terhadap penyelenggaraan program Darmasiswa ditunjukkan dari peningkatan nilai beasiswa yang diterima peserta. Biaya hidup yang diterima mulai tahun ini disesuaikan dengan standar hidup untuk setiap daerah.

Perubahan lain yang dilakukan pada program Darmasiswa adalah memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih lembaga perguruan tinggi sendiri sesuai minat masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Misalnya, ketidaksukaan pada lembaga perguruan tinggi tempat mereka belajar yang membuat mereka pulang ke negaranya sebelum menyelesaikan program belajarnya.

Program Beasiswa Unggulan

Selain program Darmasiswa, Kemendikbud juga menyediakan beasiswa melalui program Beasiswa Unggulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat *nawacita*, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta melakukan revolusi karakter bangsa.

Program ini dikembangkan dalam upaya memberikan kesempatan kepada putra-puteri terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dengan prioritas kepada para calon mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik pada

Pemberian beasiswa, baik pada mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing, diharapkan dapat menjadi investasi yang berharga bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampak lainnya adalah memperkuat jalinan hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain

kemampuan akademik maupun nonakademik, serta memberikan perhatian kepada mahasiswa berprestasi yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Beasiswa Unggulan juga ditujukan untuk mempercepat capaian target-target rencana strategis Kemendikbud, khususnya dalam peningkatan SDM Kementerian, peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan dan pelaku kebudayaan, serta implementasi kerja sama internasional yang memberi perhatian kepada mahasiswa dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar di wilayah Indonesia.

Beasiswa Unggulan diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi S1, S2, dan S3 di Indonesia maupun di luar negeri. Beasiswa ini ditujukan untuk peraih medali olimpiade internasional; pemenang lomba bidang sains, teknologi, seni budaya, dan olah raga di tingkat nasional, regional, dan internasional; guru yang berprestasi; pegawai atau karyawan yang berprestasi; serta pegiat sosial. Penerima Beasiswa berhak memilih sendiri bidang studi dan universitas yang dituju. Namun, bidang studi yang diprioritaskan adalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kebudayaan, seperti Manajemen Pendidikan,

Kurikulum dan Pedagogi, Perfilman, Kebudayaan, dan Kebijakan Publik.

Selain itu, diutamakan pula bidang studi yang sesuai dengan program prioritas nasional, yaitu bidang pertanian, kemaritiman, pariwisata, dan industri kreatif. Program Beasiswa Unggulan juga tersedia bagi karyawan Kemendikbud yang menunjukkan prestasi kerja yang baik, untuk meningkatkan kualitas SDM bagi karyawan di lingkungan Kemendikbud. Tidak hanya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal, Beasiswa Unggulan juga memberikan bantuan riset, lokakarya, pelatihan, dan pagelaran bagi para peneliti dan pegiat pendidikan dan kebudayaan.

Selain diberikan kepada mahasiswa Indonesia, beasiswa unggulan juga diberikan kepada mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3 di Indonesia. Beasiswa ini ditujukan untuk memperkuat hubungan dan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat, serta mempromosikan pendidikan, bahasa, dan seni budaya Indonesia di kancah internasional. Pada tahun 2016, telah dilakukan dua kali proses penerimaan Beasiswa Unggulan yang menghasilkan 1.369 penerima

Jumlah Penerima Beasiswa Unggulan 2013 - 2015

Tahun	Penerima Beasiswa Unggulan			Jumlah
	S1	S2	S3	
2013	756	955	81	1.792
2014	419	766	52	1.237
2015	713	833	68	1.614

Sumber: Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri

Laman Beasiswa Unggulan



beasiswa. Jumlah penerima Beasiswa Unggulan pada tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel.

Mulai tahun ini, sistem penerimaan Beasiswa Unggulan yang semula mengedepankan aspek perguruan tinggi sebagai basis data, diubah menjadi pengelolaan tersentral melalui program pendataan berbasis IT (sistem daring) dengan mengoptimalkan laman www.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id dalam proses sosialisasi, seleksi, evaluasi, dan

pusat data penerimaan beasiswa. Dengan menggunakan sistem daring yang tersentralisasi, diharapkan Beasiswa Unggulan semakin dapat menjangkau putera-puteri terbaik bangsa. Akses terhadap program Beasiswa Unggulan diharapkan menjadi lebih mudah, sehingga calon penerima memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam mengikuti program Beasiswa Unggulan. Teknologi Informasi ini juga diharapkan memudahkan dalam pencatatan, pendataan, dan pencarian terhadap calon serta akan

lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pemberian beasiswa, baik pada mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing, diharapkan dapat menjadi investasi yang berharga bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampak lainnya adalah memperkuat jalinan hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain, sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. ■



■ Revitalisasi Museum:
Edukatif, Rekreatif,
dan Komunikatif

Banyak orang masih menilai museum dengan cara pandang lama. Museum sumber ilmu pengetahuan?



Sebagian besar orang akan mengangguk setuju. Museum sumber hiburan? Kemungkinan besar respon yang muncul akan jauh berbeda. Bahkan mungkin banyak orang akan menggelengkan kepala.

Sungguh disayangkan jika ilmu pengetahuan yang seharusnya menginspirasi dan mendorong dialog publik tersebut hanya tinggal dalam kotak-kotak kaca yang tersembunyi rapat dalam tembok-tembok bangunan

museum. Padahal, di banyak kota besar dunia, keberadaan museum menjadi penanda penting bagi identitas dan tingkat peradaban kota tersebut. Tanpa Museum Louvre misalnya, Paris bukanlah Paris.

Kemendikbud menyadari peran penting museum dalam mengabadikan tonggak-tonggak sejarah dan kebudayaan suatu kota atau daerah. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud terus berupaya memfasilitasi revitalisasi museum di Nusantara. Revitalisasi museum ini mencakup enam aspek: eksterior dan interior, manajemen SDM, jejaring komunitas, pencitraan, program publik, dan kebijakan. Tentu saja, setiap revitalisasi telah melalui tahap kajian, desain tata pameran, dan perencanaan revitalisasi museum. Kemudian, sesuai kebutuhan, museum bersangkutan akan menjalani proses revitalisasi museum yang meliputi penataan interior, penataan eksterior, rehabilitasi fisik, fasilitas penunjang, perluasan bangunan



Kompleks Museum Sangiran

museum, dan pengadaan koleksi.

Pada tahun 2016 terdapat tiga museum yang baru selesai dan sedang direvitalisasi langsung oleh Kemendikbud. Ketiga museum tersebut adalah Museum Situs Manusia Purba Sangiran, Museum Taman Tino Sidin, dan Museum Etnografi Universitas Airlangga. Kemendikbud telah merampungkan proses revitalisasi Museum Situs Manusia Purba Sangiran. Sedangkan Museum Taman Tino Sidin dan Museum Etnografi Universitas Airlangga masih menjalani proses revitalisasi.

Museum Situs Manusia Purba Sangiran yang berlokasi di daerah Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah ini menawarkan pengalaman bertualang ke masa prasejarah yang edukatif dan mengasyikan. Sebagai pusat kajian manusia purba

terbesar di Asia dan dunia, museum ini memiliki koleksi yang luar biasa mencakup fosil manusia purba, berbagai senjata dan peralatan hidup manusia purba, dan beragam fosil binatang purba.

Revitalisasi Museum Situs Manusia Purba Sangiran ini menyentuh bangunan seluas 750 m² di atas lahan seluas 16.675 m². Ruang pameran, ruang audio visual, perpustakaan, dan laboratorium merupakan fitur-fitur yang dapat dijumpai pada museum bergaya arsitektur Joglo ini. Melalui menara pandang yang disediakan museum dan lorong-lorong jalan menuju museum, pengunjung dapat menikmati kondisi alam di sekitar museum dengan teleskop yang dapat disewa pengunjung. Museum ini juga menyediakan tempat penginapan bagi para peneliti.

Beranjak ke Yogyakarta, Kemendikbud juga sedang merevitalisasi Museum Taman Tino Sidin. Museum ini merupakan wujud penghargaan terhadap pendidik dan seniman Tino Sidin. Figur ini dulu begitu melekat dengan acara Gemar Menggambar yang ditayangkan TVRI Yogyakarta dari tahun 1976, dan kemudian berlanjut tayang pada TVRI Pusat hingga era '80-an. Museum ini terletak di Jalan Tino Sidin no 297 Kadipiro, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Museum yang berkonsep rumah taman tersebut menampilkan kembali lukisan, sketsa, komik maupun buku panduan menggambar karya Tino Sidin. Museum ini diharapkan dapat menginspirasi anak-anak untuk gigih dan pantang menyerah dalam mencapai cita-cita



Museum Tino Sidin diharapkan dapat menginspirasi anak-anak untuk gigih dan pantang menyerah dalam mencapai cita-cita sebagaimana proses menggambar yang membutuhkan ketekunan

sebagaimana proses menggambar yang membutuhkan ketekunan.

Taman yang berupa rumah dan galeri yang resmi dibuka untuk umum sejak 4 Oktober 2014 diharapkan mampu menjadi fasilitator lahirnya Tino Sidin yang baru dari kalangan generasi muda. Di sini Anda dapat menemukan barang, dokumen dan arsip terutama gambar sketsa.

Koleksi karya seniman yang berpenampilan khas dengan topi baret dan kacamata itu sangat luar biasa. Namun kondisi museum

yang berupa rumah tersebut tidak memadai untuk menampung seluruh koleksi yang ada. Melalui program revitalisasi museum, Kemendikbud mengembangkan bangunan museum Tino Sidin. Konsep "taman" di mana anak-anak dapat dengan nyaman belajar menggambar adalah pedoman dalam merenovasi bangunan museum. Sehingga banyak ruang terbuka seperti teras yang dapat ditemui di museum



Salah satu sudut Museum Tino Sidin

Museum merupakan objek budaya yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sebuah bangsa

[Direktur Jenderal Kebudayaan - **Hilmar Farid**]

ini. Penambahan ruang pameran juga akan ditemui pada lantai dua museum. Selain pengembangan bangunan fisik, revitalisasi juga mencakup penyusunan buku profil Museum Taman Tino Sidin, pembuatan film, dan pengadaan fasilitas audio visual.

Kemendikbud juga sedang mengembangkan museum berbasis kampus yakni Museum Etnografi Universitas Airlangga. Keunikan



museum ini terletak pada ratusan koleksi barang bersejarah yang berkaitan dengan prosesi kematian di berbagai daerah di Indonesia. “Kematian” menjadi tema utama yang disepakati sebagai ikon sekaligus menjadi pameran tetap. Jalan cerita museum tersebut akan ditata sedemikian rupa sehingga pengunjung tidak terfokus pada kesan mengerikan dari tema kematian tersebut, melainkan pada

misi edukasi akan unsur budaya, tradisi, dan filosofi dari masyarakat yang menjalankan prosesi tersebut.

Museum Etnografi ini mengemban tanggung jawab yang besar tidak hanya dalam melestarikan koleksi-koleksinya, tetapi juga dalam mengomunikasikan hasil penelitian dan penemuan para antropolog Unair lewat dialog-dialog publik. Lewat dialog tersebut, publik

mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kekayaan etnografi Indonesia yang menjadi koleksi museum.

Bersamaan dengan proses revitalisasi ketiga museum di atas, terdapat 21 museum yang mendapatkan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan revitalisasi dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejumlah 21 museum tersebut berada dalam tahapan revitalisasi yang berbeda-beda.

Seiring dengan perkembangan zaman, museum-museum di Indonesia harus segera memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Dengan demikian, museum-museum edukatif, rekreatif, dan komunikatif yang menawarkan pengalaman aktif dalam proses memperoleh pengetahuan bisa bermunculan lebih banyak. Pentingnya perubahan pola pikir dan berinovasi dengan teknologi ini menjadi salah satu pokok diskusi pada Pertemuan Nasional Museum yang diselenggarakan Ditjen Kebudayaan pada 30 Mei-2 Juni 2016 di Bali. Pertemuan ini dihadiri sekitar 250 pemangku kepentingan museum Indonesia.

Dalam pidato penutupan forum tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menegaskan museum merupakan objek budaya yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sebuah bangsa. “Oleh karena itu, kita harus sama-sama mengawal proses tersebut agar tujuan untuk menstrategiskan peran museum terwujud,” katanya mengimbau.

Diorama proses penelitian arkeologi di Museum Sangiran



■ Galeri Nasional Indonesia, “Rumah Besar” Perupa Indonesia

Galeri Nasional Indonesia (GNI) semakin mengokohkan posisinya sebagai “Rumah Besar” Perupa Indonesia.

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan terus mengembangkan eksistensi GNI. Selain sebagai ruang pameran prestisius yang menjadi dambaan para perupa Indonesia, GNI juga mengemban fungsi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan karya seni rupa untuk layanan edukasi.

Melalui pengembangan GNI, Kemendikbud memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengapresiasi seni dan berkesenian. Pengembangan kapasitas ini semakin mengukuhkan GNI sebagai tolok ukur perkembangan senirupa Indonesia yang konsisten dalam pemanfaatan karya seni rupa sebagai bagian dari agenda revolusi karakter bangsa.

Upaya mendekatkan kiprah GNI dengan masyarakat luas juga terlihat dari program-program unggulan Kemendikbud di GNI selama tahun 2016. Program-program unggulan ini terbukti mampu menyedot perhatian

masyarakat. Salah satunya pameran “17/71: Goresan Juang Kemerdekaan” sepanjang Agustus 2016. Pameran ini menampilkan 28 lukisan hasil karya 21 pelukis dan sekitar 100 koleksi foto-foto kepresidenan. Koleksi bersejarah itu selama ini hanya menjadi koleksi istana kepresidenan di beberapa kota.

Sejumlah lukisan legendaris yang dipamerkan antara lain karya maestro lukis Raden Saleh, Affandi, S. Sudjojono, Basoeki Abdullah, Dullah, dan karya Presiden Sukarno sendiri yang dilukisnya pada 1958. Lukisan-lukisan itu bukan hanya tonggak kesenian, namun juga tonggak sejarah Republik Indonesia.

“Saya ingin lukisan-lukisan ini akan tetap abadi dan terus-menerus bisa disajikan di hadapan publik seluruh dunia,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka pameran bersejarah ini pada 1 Agustus 2016. Jokowi menilai pameran itu sangat penting karena terkait langsung dengan penguatan karakter dan

jati diri bangsa. Bisa ditebak, animo masyarakat begitu luar biasa untuk menikmati pameran yang baru pertama kalinya diselenggarakan. Apa lagi barang seni yang dipamerkan adalah koleksi istana kepresidenan. GNI mencatat





Presiden Joko Widodo, Ibu Megawati Soekarnoputri beserta Undangan pada pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Negara 17 | 71 di Galeri Nasional

selama sebulan digelar, pameran ini mampu memancing sekitar 35.000 pengunjung dari berbagai kalangan, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

“Pameran ini menjadi bukti bahwa seni rupa itu hidup dan ada penggemarnya, terbukti dari antusiasme pengunjung yang datang ke Galeri Nasional

Indonesia,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.

Kemendikbud juga menggelar sejumlah acara penting lain di GNI sepanjang tahun 2016. Pada peringatan Hari Pendidikan



Nasional tahun ini, Kemendikbud memberikan kesempatan kepada para guru seni budaya se-Indonesia di tingkat SMP, SMA/SMK atau sederajat untuk unjuk gigi dalam pameran seni rupa. Pameran itu berlangsung pada 25 April–6 Mei 2016. Menurut tim Kurator, Suwarno Wisetrotomo dan Citra Smara Dewi, pameran yang mengusung tema “Alur” ini bercerita tentang jalur atau jalan profesi dalam konteks pendidikan yang dibangun dengan terstruktur, sadar, dan perlu diperjuangkan untuk meraih keberhasilan.

Pameran ini tidak hanya bertujuan untuk memotivasi para pengajar seni budaya untuk menciptakan karya berkualitas. Lebih jauh lagi, pameran ini diharapkan dapat menginspirasi para siswa dan memunculkan kebanggaan pada gurunya yang berprestasi. Baik siswa maupun guru sama-sama terinspirasi untuk berkarya.

Harapan yang sama datang dari Tubagus ‘Andre’ Sukmana, Kepala GNI. “Kepada para pemangku

kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta masyarakat luas yang berkesempatan mengapresiasi pameran ini, diharapkan mampu memberi penilaian positif serta menyerap nilai-nilai estetik dan edukatif yang disuguhkan, sehingga pagelaran ini menjadi media bagi kita semua untuk menjadi apresiator seni yang hebat,” ujarnya.

Sebanyak 65 karya yang dipamerkan merupakan hasil olah cipta 65 guru seni budaya dari 60 sekolah di 17 provinsi. Karya yang dipamerkan telah melalui proses seleksi oleh tim kurator GNI dari 333 karya peserta yang berasal dari 213 sekolah di 25 provinsi. Karya-karya berjenis lukisan, patung, instalasi, objek, komik, keramik, grafis, *drawing*, batik, dan media pembelajaran tersebut sarat kritik sosial. Karya-karya tersebut juga kuat dipengaruhi keberagaman latar belakang budaya, kondisi sosial, dan geografis para guru.

Dalam menerjemahkan kritik sosial, ada guru yang dengan piawai menggunakan simbolisasi tokoh-

tokoh pewayangan. Ada pula yang memilih pendekatan teknik lukis super realis. Kualitas lainnya juga terlihat pada upaya eksplorasi dalam pendekatan media dan pada keterampilan menggambar dengan menggunakan bolpoin atau tinta cina.

Upaya Kemendikbud dalam mengukuhkan reputasi GNI sebagai tolok ukur perkembangan seni rupa Indonesia juga terus dilakukan melalui Pameran Besar Seni Rupa Indonesia, “Manifesto”. Pameran “Manifesto” diselenggarakan pertama kali pada tahun 2008 dan berlanjut menjadi *biennale*-sebutan untuk sebuah tradisi pameran dua tahunan. Karya seni rupa yang dipamerkan dalam “Manifesto” tidak hanya untuk dilihat secara estetis, namun merupakan sebuah pernyataan sikap dan pandangan. Pameran “Manifesto” terus dijaga ciri khas dan keunikannya sebagai pencerminan perkembangan seni rupa Indonesia yang sebenarnya.

Pameran “Manifesto” merupakan perayaan akan



Pameran karya guru seni di Plaza Insan Berprestasi

Kesempatan, tolok ukur, dan karakter merupakan kata-kata kunci yang akan terus menjadi pedoman Kemendikbud dalam mengembangkan GNI

kompleksitas perkembangan seni rupa Indonesia, baik perkembangan dalam alur pertumbuhan seni rupa di kota-kota besar, maupun di seluruh pelosok nusantara.

“Kami menyadari tidak semua kawasan perkembangan seni rupa di Indonesia memiliki infrastruktur seni rupa yang lengkap serta mampu menopong pertumbuhan seni rupa secara pesat. Namun tidak bisa disangkal bahwa beberapa pusat perkembangan seni rupa di Indonesia telah menjadi lokomotif kemajuan Indonesia di arena perkembangan seni rupa Internasional,” ujar Tubagus ‘Andre’ Sukmana.

Dengan tema “Arus”, pameran Manifesto V diselenggarakan pada 4-30 Mei 2016. Tema “Arus” terinspirasi kiprah para seniman

dan seniwati pada era ‘80-an, ‘90-an, serta sebagian kecil generasi 2000-an. Menurut kurator pameran, Rizki A. Zaelani dan Asikin Hasan, terdapat benang merah yang dapat ditarik dari ekspresi karya-karya seni para perupa di era tersebut. Yakni, keyakinan dan semangat pada seni yang membawa pesan moral, sosial dan kebaikan bagi masyarakat, serta kemudian dianggap mampu untuk mendorong perubahan baik secara personal, sosial, maupun kultural.

Pada saat pembukaan pameran Manifesto V, Mendikbud yang kala itu dijabat Anies Baswedan menyatakan, “Ini adalah salah satu cara bagi para seniman untuk membagi pesan moral untuk kebaikan masyarakat melalui media seni rupa”.

Sikap dan pendirian tersebut diwujudkan dalam karya lukisan, patung, objek, fotografi, seni rupa instalasi, seni rupa video, serta mural hasil olah artistik 35 perupa. Para perupa yang sebagian besar tumbuh pada era ‘80-‘90-an tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Sukoharjo, Surabaya, Batu, Bali, dan Tulungagung. Sebanyak 35 perupa yang meramaikan pameran ini adalah Agus Suwage, Anusapati, Arahmaiani, Asmudjo J. Irianto, Diyanto, Eddie Hara, Entang Wiharso, F. Sigit Santoso, Gigih Wiyono, Hafiz Rancajale, Hanafi, Haris Purnomo, Heri Dono, Isa Perkasa, Ivan Hariyanto, Ivan Sagita, Jatiwangi Art Factory (JAF), Jong Merdeka, Koeboe Sarawan, Krisna Murti, Made Djirna, Made Wianta, Mella Jaarsma, Moelyono, Nasirun, Nindityo Adipurnomo, Nyoman Erawan, Oscar Motuloh, Putu Sutawijaya, Ronald Manulang, Teguh Ostenrik, Tisna Sanjaya, Titarubi, Ugo Untoro, dan Yani Maryani Sastranegara. Sebanyak 15.675 apresiator dari berbagai kalangan masyarakat menikmati karya-karya tersebut yang dipajang di dalam ruang pamer Gedung A dan B, serta area luar GNI.

Kesempatan, tolok ukur, dan karakter merupakan kata-kata kunci yang akan terus menjadi pedoman Kemendikbud dalam mengembangkan GNI. Kemendikbud terus melakukan hal penting lainnya, yaitu menggalang kerja sama dengan daerah dalam riset untuk mengenali potensi daerah, dan mengusung pameran nasional yang mengutamakan ekspresi daerah. Kemendikbud juga mengupayakan kerja sama strategis dengan berbagai pihak sebagai upaya memunculkan seni rupa Indonesia di kancah dunia. ■

■ Promosi dan Diplomasi Budaya dan Bahasa Indonesia

Setelah menjadi ‘tamu kehormatan’ (*guest of honor*) pada pelaksanaan Frankfurt Book Fair 2015, Jerman, nama Indonesia kembali mencuri perhatian dalam kancah internasional.

Pada pelaksanaan salah satu festival film paling terkemuka di dunia, *Cannes Film Festival* (Perancis) 2016, Indonesia memenangkan penghargaan terbaik kategori film pendek. Kemenangan itu diraih “Prenjak”, film pendek besutan sutradara muda Wregas Bhanuteja, 23 tahun. Kemendikbud ikut berbangga hati dengan keberhasilan tersebut. Kemendikbud ikut mensponsori “Prenjak” agar bisa ikut berkompetisi dalam *Cannes Film Festival* yang bergengsi dan tergolong salah satu festival film tertua di dunia.

Upaya Kemendikbud mempromosikan budaya Indonesia tentu tidak hanya menyangkut soal film dan buku. Kemendikbud menaruh perhatian besar terhadap kegiatan diplomasi bahasa dan budaya yang diselenggarakan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan. Hingga Oktober 2016, Kemendikbud telah mengadakan 73 kegiatan kebudayaan internasional pada 31 negara dengan melibatkan 305 pelaku budaya. Ajang tersebut termasuk di antaranya pertunjukan pada festival-festival kebudayaan

tingkat dunia, festival film internasional, pengiriman pelatih budaya, serta dukungan untuk pembicara pada seminar tingkat dunia.

Selain sineas di belakang “Prenjak”, sejumlah film Indonesia yang lolos seleksi mengikuti festival film internasional lainnya, juga mendapatkan dukungan serupa. Antara lain, untuk film Indonesia yang lolos seleksi mengikuti *Festival Film Rotterdam*, *Festival Film Berlin*, *DC Independent Film Festival*, *Asian Film Awards*, *Salaya Documentary International Film Festival*, *Cinemadamare Film Festival*, *Locarno International Film Festival*, dan *Venice International Film Festival*.

Bahasa bisa menjadi jembatan agar kebudayaan Indonesia semakin dikenal bangsa lain. Salah satu program diplomasi bahasa dan budaya yang diselenggarakan Kemendikbud adalah pembangunan Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-Timor Leste. Program yang dijalankan di Pusat Budaya Indonesia ini antara lain kursus

Bahasa Indonesia, pameran budaya, perlombaan di bidang kebudayaan, permainan anak, serta informasi tentang kebudayaan Indonesia.

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya juga telah mengajukan dua berkas nominasi Warisan Dunia (World Heritage) yang berkaitan dengan budaya kepada UNESCO: Warisan Tambang Batubara Ombilin, Sawah Lunto, dan Kota Tua Jakarta. Usulan ini diharapkan bisa menambah daftar Warisan Budaya Indonesia pada Warisan Dunia UNESCO. Sebelumnya, empat Warisan Budaya Benda Indonesia telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia, yaitu Kompleks Percandian Borobudur, Kompleks Percandian Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Lansekap Budaya Provinsi Bali yang berkaitan dengan Sistem Subak. Pada tahun 2016, genap 25 tahun Indonesia mengelola dengan baik Warisan Budaya Dunia Kompleks Percandian Borobudur dan Kompleks Percandian Prambanan. Dalam rangka perayaan tersebut, dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersama menjaga warisan budaya

dunia sebagai kekayaan (*asset*) bangsa.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2015, tiga genre tari tradisional Bali diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada kategori *Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Tiga genre tersebut adalah Tarian Sakral (Tari Rejang, Sanghyang Dedari dan Ritual Baris); Tarian Semi-Sakral (termasuk Topeng Sidakarya, Gambuh ballet, dan Wayang Wong ballet); dan Tarian Pertunjukan (termasuk Legong Keraton, Jaged Bumbung, dan Barong).

Masih berkenaan dengan UNESCO, sebagai satu-satunya negara yang memiliki sejarah evolusi manusia terkaya di Asia Tenggara, Indonesia mengusulkan berdirinya Pusat Evolusi Manusia. Melalui lembaga *Category II Center UNESCO*, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya saat ini sedang dalam proses pengusulan pembentukan *Center for Human Evolution, Adaptations and Dispersals in South East Asia* (CHEADSEA). Sebagai langkah pengusulan, pada November 2016, Tim evaluator dari UNESCO akan melakukan studi kelayakan. Diharapkan usulan ini dapat disetujui, sehingga kita akan memiliki lembaga strategis yang menempatkan Indonesia sebagai *leading sector* dalam pengembangan berbagai bidang studi berkaitan evolusi manusia. Diharapkan persetujuan akan diumumkan pada *General Conference UNESCO* pada tahun 2017.

Langkah diplomasi budaya tidak hanya dilakukan di meja perundingan. Kemendikbud juga menggelar kegiatan “Sahabat Budaya Indonesia” dengan melibatkan pemuda-pemuda mancanegara untuk lebih

mengenal budaya Indonesia. Mereka diundang dan diajak mengalami sendiri keragaman budaya Indonesia. Caranya dengan menciptakan sebuah jaringan bagi para Sahabat Budaya Indonesia dan memberikan informasi serta pelibatan dalam kegiatan kebudayaan di Indonesia. Program khusus lain yang telah dimulai pada tahun 2016 adalah *Explore Indonesia*. Program ini melibatkan penulis-penulis asing dan pelajar berprestasi dari negara-negara anggota ASEAN. Mereka diajak untuk melihat lebih dekat dan ‘mengalami’ budaya Indonesia. Para penulis dan pelajar diberikan fasilitas ‘*homestay*’ untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Diharapkan pengalaman ini akan selalu ada pada pikiran mereka sehingga secara tidak langsung mereka akan ikut mempromosikan (*influencer*) dan menyuarakan tentang Indonesia di tingkat internasional.

Kemendikbud juga mendukung kegiatan “*Indonesian Weekend*” di London, Inggris. Acara ini mendapatkan apresiasi luar biasa. Pengunjungnya tidak hanya berasal dari London, namun juga dari berbagai negara. Tidak kurang dari 200 artikel ditulis mengenai ajang yang dikunjungi lebih dari 30.000 wisatawan ini di berbagai media internasional. Dalam ajang ini, berbagai produk kebudayaan Indonesia ditampilkan, termasuk Pencak Silat, permainan tradisional, fesyen, alat musik tradisional, serta berbagai jenis kuliner.

Diplomasi Budaya juga dilakukan lewat koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam acara-acara budaya internasional yang dilaksanakan di Tunisia, Uzbekistan, Italia, Spanyol, Rusia (dalam Festival Budaya Asean dan Rusia), serta acara budaya

internasional di Forde, Norwegia.

Dukungan untuk kegiatan budaya tulis (sastra) juga diberikan pada *Frankfurt Book Fair* di Jerman, *Indonesia International Book Fair (IIBF)* di Jakarta, dan *Makassar International Writers Festival (MIWF)* di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan MIWF ini merupakan inisiatif Komunitas Rumah Budaya Rumata. Dalam acara ini, Kemendikbud tampil sebagai tuan rumah bagi para penulis Internasional. MIWF juga menjadi penyeimbang agar kegiatan internasional tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa.

Selain itu, Kemendikbud melalui Badan Bahasa juga memiliki program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang bertugas menyusun mutu penggunaan, pembelajaran, dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Program ini mengurus berbagai lembaga yang memberikan pelatihan BIPA serta buku saku bagi para penutur asing. Lembaga BIPA berjumlah 251 lembaga yang tersebar di 22 negara. Jumlah yang besar dan menunjukkan antusiasme masyarakat internasional mempelajari Bahasa Indonesia.

Upaya yang dilakukan Kemendikbud menunjukkan betapa berharganya kekayaan kebudayaan Indonesia. Kebanggaan ini dapat diwujudkan lewat berbagai ajang yang menarik perhatian masyarakat internasional. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya dan justru harus menjadi motivasi untuk semakin mencintai budaya dan bahasa Indonesia. Seperti diingatkan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, masyarakat harus terlibat dalam memelihara, mengawasi, merencanakan, dan mewarisi kebudayaan. ■

■ Rumah Peradaban: Mengungkap, Memaknai, Mencintai

Rumah Peradaban merupakan program Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) di bawah naungan Kemendikbud, dan terhubung dengan sepuluh Balai Arkeologi di seluruh Indonesia.

Kontribusi besar Rumah Peradaban adalah memasyarakatkan hasil penelitian yang dilakukan Puslit Arkenas ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan menyenangkan bagi masyarakat.

Rumah Peradaban mempunyai semboyan **“mengungkap, memaknai, dan mencintai”**. Semboyan tersebut diterjemahkan ke dalam beragam kegiatan pada tahun 2016, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Nawacita, yaitu kebhinnekaan, kemaritiman, dan mengangkat daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Selama tahun 2016, promosi Rumah Peradaban sangat gencar, demi mendekatkan dunia arkeologi dengan masyarakat. Dengan semangat mewujudkan visi mencerdaskan bangsa dan mengembangkan budaya nasional, Rumah Peradaban secara aktif

melakukan kegiatan di berbagai tempat dalam berbagai skala. Mulai kunjungan ke sekolah untuk menginspirasi siswa, hingga berkontribusi di ajang internasional untuk membuka mata dunia akan kekayaan arkeologi Indonesia.

Rumah Peradaban lahir sebagai solusi atas rendahnya perhatian dan ketertarikan masyarakat terhadap dunia arkeologi. Arkeologi masih sering diasosiasikan sekadar penemuan artefak atau benda peninggalan masa lampau, padahal sebenarnya lebih daripada itu. Dengan mempelajari arkeologi, masyarakat memperoleh pemahaman dan pembelajaran tentang nilai-nilai peradaban masa lampau yang merupakan akar budaya bangsa kita saat ini. Karena itulah, Rumah Peradaban lahir sebagai media interaksi, sarana edukasi, dan memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi.

Sesuai semboyan yang dimilikinya, Rumah Peradaban berusaha **mengungkap** nilai-nilai budaya bangsa Indonesia melalui hasil penelitian arkeologi. Sebagai contoh, pada saat penyelenggaraan simposium internasional *“Austronesia Diaspora”* pada bulan Juli 2016, beberapa hasil penelitian dari peneliti Indonesia tentang sejarah Austronesia di Indonesia turut dibahas. Salah satunya penemuan Gua Harimau yang berlokasi di Desa Padang Bindu, Sumatera Selatan. Gua ini ditemukan pada tahun 2008 dan Puslit Arkenas mulai melakukan penelitian pada tahun 2009.

Setelah beberapa tahun penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Gua Harimau menjadi lokasi pertama kedatangan manusia Austronesia di Sumatera. Tidak berhenti sampai di situ, tindak lanjut dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan



Permuseuman Kemendikbud melalui pembangunan museum di kawasan tersebut. Melalui hasil penelitian tersebut, saat ini Gua Harimau tidak hanya menjadi Rumah Peradaban bagi bangsa Indonesia, namun juga “rumah peradaban” bagi masyarakat dunia.

Semboyan **memaknai** nilai budaya adiluhung dimaksudkan sebagai alat untuk membentuk karakter dasar bangsa Indonesia. Kita memaknai semboyan ini lewat contoh berikut: pada bulan Mei 2016, Puslit Arkenas melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang antusias melakukan **pemaknaan** akar budaya Ciamis melalui Rumah Peradaban. Sebagai permulaan, Rumah Peradaban di Ciamis mengadakan lokakarya yang melibatkan pmda setempat dan masyarakat.

Contoh lainnya, penyelenggaraan berbagai kegiatan di Rumah Peradaban di wilayah Indonesia Timur. Pada bulan September 2016, di situs Tugu McArthur Jayapura yang telah ditetapkan sebagai Rumah Peradaban, ratusan pelajar SMP, SMA, dan SMK se-kabupaten Jayapura sangat kagum ketika mendengar penjelasan tentang betapa kayanya nilai sejarah di lokasi tersebut. Kegiatan ini sengaja diadakan di lokasi bersejarah tersebut sehingga diharapkan para siswa mendapat pengalaman langsung. Dengan demikian, siswa mampu **memaknai** penemuan nilai budaya dan kearifan lokal tersebut.

Setelah memaknai, masyarakat akan diarahkan untuk mampu menghubungkan hal tersebut

Masyarakat diharapkan sadar bahwa budaya yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari perjalanan masa lampau, yang patut dihargai dan dicintai.

dengan keadaannya sekarang. Masyarakat diharapkan sadar bahwa budaya yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari perjalanan masa lampau, yang patut dihargai dan dicintai.

Penerbitan buku “Warisan Bahari Indonesia”, buku pengayaan untuk anak sekolah berjudul “Ke Gua Harimau, Siapa Takut?” dan “Mari ke Sangiran” di tahun ini, merupakan upaya menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan budaya Indonesia. Selain itu, upaya menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan budaya Indonesia juga dilakukan melalui pembuatan alat peraga sebagai media pembelajaran di sekolah-sekolah.

Perkembangan arkeologi masa kini juga tidak terlepas dari dunia digital. Puslit Arkenas membuat terobosan untuk memanfaatkan perkembangan digital dalam memasyarakatkan arkeologi, melalui aplikasi ponsel pintar bernama “Arkeomap” pada bulan Oktober 2016. Dengan “Arkeomap”, maka Rumah Peradaban ada pada setiap genggam tangan masyarakat. Aplikasi ini dibuat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam bidang budaya, khususnya arkeologi. Melalui aplikasi ini, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dengan melaporkan informasi yang berkaitan dengan

tinggalan arkeologi, vandalisme, kehilangan/pencurian, hingga pelestarian cagar budaya. Selain melapor, masyarakat juga dapat mengapresiasi cagar budaya yang mereka temui.

Berbagai cara bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan budaya Indonesia, termasuk di antaranya dalam hal penataan perkotaan. Banyak yang sebatas memahami bahwa penataan kota-kota besar di Indonesia untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan pemukiman yang berkualitas saja. Padahal lebih dari itu, penataan kota harus memperhatikan cagar budaya. Pembangunan dan penataan perkotaan sebaiknya diserahkan kepada arsitek yang berkompeten terhadap hal tersebut.

“Mari kita mengindahkan semua pertimbangan mulai dari segi antropologisnya, arkeologis, dan menimbang sejarahnya. Kita harus paham konsekuensinya,” jelas Ahmad Djauhari, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, pada Diskusi Sehari Arkeologi yang membahas tentang Peran Organisasi Profesi dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Perkotaan, tanggal 26 April 2016 di Museum Nasional Indonesia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia, Idham Bachtiar Setiadi menjelaskan terkait pembangunan perkotaan yang ramah terhadap cagar budaya. “Peran organisasi profesi di sini adalah sebagai komunikator pengetahuan, menghimpun dan mendistribusikan ilmu, serta membantu dan mengawal konseptualisasi pengetahuan untuk aplikasi dalam perencanaan,” ujar Idham. Sedangkan peran yang bisa dimainkan dari perspektif kesejarahan adalah mendorong aktivitas masyarakat untuk melakukan peningkatan kemampuan dan minat terhadap sejarah perkotaan.

Pada awalnya masyarakat harus diajak untuk peduli terlebih dahulu. “Hal ini dimulai dari kecil yakni mendorong guru sejarah di daerah untuk mengenalkan berbagai situs bersejarah di kotanya masing-masing melalui proses pembelajaran media luar ruang,” ungkap Restu Gunawan, Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia.

Pada tahun 2017, Puslit Arkenas menargetkan akan bekerja sama dengan lebih banyak pemerintah daerah yang memiliki situs-situs cagar budaya, untuk menambah Rumah-Rumah Peradaban di Indonesia. Harapannya, Rumah Peradaban semakin dekat dengan masyarakat. Pada tahun depan juga, aplikasi “Arkeomap” akan disempurnakan dengan beragam fitur pendukung. Tujuannya, untuk mendorong masyarakat agar dapat mengungkap, memaknai, dan mencintai budaya bangsanya sendiri di tengah arus globalisasi dan modernisasi. ■

■ Kemendikbud Dukung Perfilman Indonesia

Sebagai kementerian yang membawahi masalah pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud juga menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan film Indonesia.

Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud menyadari pentingnya pertumbuhan film nasional. Pertumbuhan ini bukan hanya dilihat dari segi potensi ekonomi kreatif, tetapi juga pengaruh film yang besar sebagai produk budaya.

Itulah sebabnya, selain menyokong pelaksanaan ajang legendaris perfilman nasional seperti Festival Film Indonesia (FFI), Kemendikbud juga menginisiasi pelaksanaan ajang tahunan lainnya untuk insan perfilman, yaitu Apresiasi Film Indonesia (AFI). Gagasan mengulirkan AFI bersumber dari keinginan Kemendikbud untuk memberikan penghargaan kepada insan film Indonesia.

Kriteria penerima penghargaan adalah mereka yang memiliki komitmen dalam berkarya dengan memproduksi film-film berbasis nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

Harapannya, para sineas Indonesia semakin terpacu membuat karya film berkualitas sehingga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Film Indonesia sebagai produk budaya saat ini dirasakan efektif untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan nilai budaya dan pembangunan karakter bangsa. Tidak berhenti di situ, Kemendikbud juga ingin mendorong masyarakat untuk mau menonton film Indonesia berkualitas dan menjadikannya tuan rumah di negeri sendiri.

Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu, 8 Oktober 2016, menjadi tuan rumah ajang AFI 2016. Siang hari sebelumnya, Manado dimeriahkan acara pawai artis yang menghadirkan sejumlah artis ibu kota. Selain pawai, para artis itu melakukan kegiatan mengunjungi SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Manado. Mereka juga menggelar acara jumpa penggemar di *Manado Town Square*, yang menjadi pusat

kegiatan luar ruang AFI 2016.

Pada malam harinya, bertempat di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Manado, digelar Malam Anugerah AFI 2016. Acara ini terselenggara berkat kerja sama Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud dan Badan Perfilman Indonesia [BPI], dengan dukungan Pemda Provinsi Sulawesi Utara.

AFI 2016 merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengenali, menilai, dan menghargai bobot kesenian yang berbasis nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa. Hal-hal tersebut tercermin pada sejumlah produk film yang dibuat, diedarkan, dan melibatkan pemain serta tim produksi dari Indonesia.

Saat memberikan sambutan, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, pemberian penghargaan kepada insan perfilman sesuai dengan ciri khas

Penerima Anugerah AFI 2016

KATEGORI PENGHARGAAN UTAMA

Apresiasi Film Panjang Bioskop "Salawaku"	Apresiasi Film Dokumenter Umum "Pantjasila: Cita-cita & Realita"
Apresiasi Film Panjang Non Bioskop "Istirahatlah Kata-kata"	Apresiasi Film Dokumenter Mahasiswa & Pelajar "Kami Hanya Menjalankan Perintah, Jenderal!"
Apresiasi Film Pendek Umum "Pangreh"	Apresiasi Animasi Umum "Timun Mas"
Apresiasi Film Pendek Pelajar "Ijinkan Saya Menikahinya"	Apresiasi Animasi Mahasiswa & Pelajar "Lakuna"
Apresiasi Film Pendek Mahasiswa "Emak"	Apresiasi Film Anak "Amarta"

KATEGORI PENGHARGAAN KHUSUS

Apresiasi Asosiasi "Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI)"	Apresiasi Program Film "Layar Perak [Metro TV]"
Apresiasi Lembaga Pendidikan "Universitas Multimedia Nusantara, Serpong"	Apresiasi Trailer Film "Ach... Aku Jatuh Cinta"
Apresiasi Komunitas "Sumbawa Cinema Society"	Apresiasi Poster Film "Ada Apa Dengan Cinta 2"
Apresiasi Festival Film "Jogja-Netpac Asian Film Festival"	Apresiasi Pemerintah Daerah "Daerah Istimewa Yogyakarta"
Apresiasi Kritik Film "Hikmat Darmawan"	

KATEGORI PENGHARGAAN INSPIRATIF

Adi Karya "Si Mamad" Editor: B Kunto Wibisono	Adi Insani "Hartanto"
---	--------------------------

FFI bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan industri film dalam negeri dan melekatkan hubungan kebudayaan dengan masyarakat

dari AFI itu sendiri. Penilaiannya menitikberatkan kepada karya-karya film yang sarat akan nilai budaya, kearifan lokal, serta pembangunan karakter bangsa.

Kemendikbud memberikan apresiasi berupa Piala Dewantara dan uang tunai bagi penerima anugerah AFI 2016. Nama Piala Dewantara sendiri terinspirasi dari nama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara.

Banyak film yang berkualitas masuk dalam nominasi AFI 2016, namun setelah melewati proses penyaringan dari Tim Seleksi maupun dari Dewan Juri yang merupakan keterwakilan unsur dari Perfilman, Pendidikan, Kebudayaan, Animasi, Media massa/sastra, Komunitas film dan Organisasi film, pada akhirnya terpilih pemenang penerima Piala Dewantara AFI 2016.

Festival Film Indonesia (FFI)

Kualitas penyelenggaraan festival film di tingkat lokal dan nasional saat ini semakin meningkat. Festival Film Indonesia (FFI) memiliki catatan panjang yang penuh gejolak dan bahkan dalam beberapa kali penyelenggaraannya sempat mendapatkan ketidakpercayaan dari insan perfilman. Namun secara umum tujuan diselenggarakannya FFI adalah menumbuhkan apresiasi terhadap film Indonesia serta menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi produksi film dalam negeri selama setahun.

Tahun ini Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud berusaha

melanjutkan apa yang telah dicapai pada FFI tahun lalu sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya dan pembangunan karakter bangsa melalui film. FFI bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan industri film dalam negeri dan melekatkan hubungan kebudayaan dengan masyarakat.

FFI berfungsi sebagai tolok ukur prestasi, apresiasi, dan promosi bagi film Indonesia. Kemendikbud terkait dengan Festival Film Indonesia dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah berusaha untuk:

- a. Mempromosikan film Indonesia sebagai produk budaya yang penting bagi pendidikan publik sekaligus merangsang apresiasi masyarakat untuk menonton film Indonesia
- b. Meningkatkan produksi film nasional baik kualitas maupun kuantitas; dan
- a. Menyatukan visi antara pekerja film dengan kalangan non-film untuk memajukan film nasional.

Rangkaian kegiatan FFI 2016 ini dilaksanakan selama 5 bulan dari Juni sampai dengan November 2016. Antara lain dimulai dengan publikasi, sosialisasi melalui *website*, sosial media dan *talkshow* di TV nasional, *launching* FFI 2016 pada bulan Juni di Metropole XXI, pembuatan piala dan piagam, seleksi film oleh panitia dan tim ahli, penilaian dan penjurian film yang akan diapresiasi, pengumuman malam nominasi, pawai artis, Malam Penganugerahan FFI pada bulan November 2016

yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dan ditutup evaluasi dan pelaporan.

Penganugerahan Piala Citra diberikan kepada penerima apresiasi/penghargaan dalam FFI, untuk kategori Piala Citra Utama (Film Terbaik), Sutradara Terbaik, Penulis Skenario Terbaik, Penulis Skenario Adaptasi terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik, Pengarah Artistik Terbaik, Penata Suara Terbaik, Penata Musik Terbaik, Penata Efek Visual Terbaik, Lagu Tema Film Terbaik, Penata Busana Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Utama Wanita Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Pemeran Pendukung Wanita Terbaik, Pemeran Anak Terbaik, Film Pendek Terbaik, Film Animasi Terbaik, Film Dokumenter Panjang Terbaik, dan Film Dokumenter Pendek Terbaik. Acara pengumuman nominasi dilaksanakan di Lamoda, Plaza Indonesia, Jakarta.

Menurut ketua bidang Penjurian Olga Lydia, ada satu tambahan kategori baru yang ditambahkan pada FFI 2016, yaitu kategori lagu tema terbaik. "Lagu ini merupakan lagu orisinal yang diciptakan untuk film ini. Jadi ini maksudnya supaya para produser lebih semangat untuk membuat lagu khusus untuk film yang mereka buat, jadi *engga* pakai lagu *recycle*," jelasnya dalam jumpa pers FFI di Plaza Indonesia. ■



■ *World Culture Forum 2016* sebagai Gerakan Kemanusiaan

Pembangunan di banyak tempat di dunia masih menghadapi berbagai krisis yang berkepanjangan dan tak kunjung mendapatkan solusinya.

Pada potret-potret pembangunan yang mengalami krisis tersebut kerap ditemukan hubungan yang tidak harmonis antara budaya dan metode-metode pembangunan yang diambil.

Ketidakharmonisan yang nyata tersebut masih dipandang sebelah mata dan dibiarkan berlarut-larut sehingga melahirkan krisis multidimensi lintas generasi,

daerah, dan negara. Forum Budaya Dunia (*World Culture Forum*) yang diselenggarakan di Bali, 10-14 Oktober 2016, membuka ruang untuk mengingatkan kembali pentingnya kebudayaan.

“*World Culture Forum* merupakan usaha Indonesia untuk memberi peran yang lebih penting bagi kebudayaan dalam era ini,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid pada pembukaan resmi *World Culture Forum* (WCF) 2016.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai usulan hasil pemikiran dari berbagai tempat di dunia terus menggarisbawahi pentingnya kebudayaan menjadi bagian metode pembangunan yang efektif. WCF, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2013, merupakan upaya berkesinambungan untuk mempromosikan budaya sebagai penyokong dan pendorong pembangunan berkelanjutan.

Tema sentral WCF 2016 adalah “*Culture for an Inclusive Sustainable Planet*” (budaya bagi dunia yang inklusif berkelanjutan). Mendikbud Muhadjir Effendy dalam pidatonya pada pembukaan resmi WCF 2016 berharap, “Pada *World Culture Forum* 2016 ini, kita hendaknya berupaya untuk menghasilkan komitmen yang lebih mendalam. Kita perlu lebih sungguh-sungguh memperhatikan keragaman budaya, agar pusat-pusat pembangunan menjadi lebih inklusif.”

Lewat pesan videonya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mengapresiasi Indonesia yang telah berinisiatif menyelenggarakan WCF 2016.

WCF kali ini menghadirkan para menteri, pejabat negara,

seniman, organisasi nonpemerintah lokal dan internasional, praktisi pembangunan dan budaya, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pemuda. Selama empat hari penyelenggaraan, sebanyak 1.307 peserta dari 63 negara telah belajar dan bertukar ilmu tentang bentuk-bentuk implementasi berbagai pendekatan dan metode pembangunan yang sarat budaya. Hal itu diperoleh melalui kunjungan budaya Subak Jatiluwih, kunjungan budaya Rumah Topeng dan Wayang Setia Darma, simposium, dan pertemuan meja bundar organisasi nonpemerintah lokal dan internasional. Selain itu, 153 pemuda dari 35 negara mengikuti Forum Pemuda Internasional (*International Youth Forum* ‘IYF’) untuk berdiskusi intensif dengan mengusung tema “Budaya Pemuda untuk Transformasi Sosial dan Kesetaraan”.

Pada enam simposium pembuka yang dilaksanakan pada 11-12 Oktober 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), sebanyak 19 pembicara dan enam pembahas tidak hanya menyuguhkan informasi dan menawarkan ide-ide yang inspiratif, tetapi juga mengajak peserta berdiskusi. Para peserta yang merupakan individu-individu kritis ini pun antusias menyambut sesi-sesi diskusi tersebut.

Simposium membahas enam subtema budaya: kebudayaan dan pembangunan desa; air bagi kehidupan; kebudayaan dan dinamika perkotaan; kebudayaan dan dunia digital; perbedaan budaya lintas komunitas dan kelas; serta kaitan kebudayaan dan pembangunan yang bertanggung jawab. Tiga Simposium awal dilaksanakan serentak pada 11 Oktober, dan tiga simposium

berikutnya dilaksanakan pada hari berikutnya.

Simposium pertama berjudul “Membangkitkan Kembali Kebudayaan untuk Keberlanjutan Pedesaan”, mendiskusikan beberapa argumentasi sebagai berikut. Konsep masyarakat dan negara modern telah menempatkan masyarakat pedesaan pada posisi yang rentan dengan memperkenalkan teknologi yang membahayakan kelestarian sumber daya masyarakat pedesaan. Namun modernitas sendiri tidak selalu bergerak melawan tradisi karena teknologi untuk pertanian misalnya, dapat memberikan manfaat yang besar selama pakem-pakem budaya tetap ditegakkan. Simposium juga menyoroti peran perempuan dalam kebangkitan budaya untuk keberlanjutan pedesaan, dan peran pemerintah dalam menangani relasi kekuasaan yang mempengaruhi reproduksi kebudayaan dengan penekanan khusus pada hak-hak masyarakat yang terpinggirkan.

Simposium pertama tidak memberikan kesimpulan atau rekomendasi secara eksplisit. Namun ada pernyataan menarik dari Aleta Baun, Kepala Desa Mollo, Nusa Tenggara Timur. “Kita tidak boleh menjual apa yang kita tidak dapat buat, seperti tanah, air, hutan, dan batu,” tegas Aleta. Para peserta sepakat, pernyataan itu menjadi pesan kunci yang menginspirasi pemahaman yang lebih luas: masyarakat pedesaan tidak sepatutnya dipaksa masuk dalam modernitas sebelum mereka mampu menciptakan modernitas mereka sendiri.

Simposium kedua bertema “Air bagi kehidupan: Merekonsiliasi Pertumbuhan Sosio-Ekonomi dan Etika Lingkungan.” Peserta belajar dari banyak studi kasus dan studi

Daftar Pembicara Simposium

11 Oktober	Simposium-1	Simposium-2	Simposium-3
Pembicara	<p>Aleta Baun Kepala Desa Mollo, Nusa Tenggara Timur</p> <p>Lanying Zhang Direktur Pusat Rekonstruksi Pedesaan Liang Shuming, RRC</p> <p>Soon-Tak Lee Profesor di Universitas Yeungnam, Korea Selatan</p>	<p>Wayan Windia Ahli Subak dan Profesor di Universitas Udayana, Bali</p> <p>Hendro Sangkoyo Aktivitis Lingkungan</p> <p>Satoko Kishimoto Aktivis pada proyek Keadilan Air, Transnational Institute (TNI)</p>	<p>Arief Azis Direktur Change.org Indonesia</p> <p>Nyoman Nuarta Perupa di Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia dan Ahli Seni Rupa</p> <p>Ridwan Kamil Walikota Bandung dan Arsitek</p>
Pembahas	<p>Diyah Lestari Ahli Tari dan Profesor di Universitas Minnesota, US</p>	<p>Semsar Yazdi Direktur Pusat Internasional mengenai Qanat dan Struktur Hidrolik Bersejarah, Iran</p>	<p>Shahbaz Khan Direktur Kantor UNESCO di Jakarta</p>
Moderator	<p>Sandra Moniaga Ahli Hukum Adat</p>	<p>Shinsuke Ota Wakil Presiden Komisi Internasional mengenai Irigasi dan Drainase, Jepang</p>	<p>Eka Budianta Penulis</p>
12 Oktober	Simposium-4	Simposium-5	Simposium-6
Pembicara	<p>Luisella Mazza Kepala Operasional Institut Kebudayaan Google</p> <p>Jill Cousins Direktur Eksekutif Europeana</p> <p>Ahn Kwang Han Presiden MBC, Korea Selatan</p> <p>Belva Devara CEO Ruangguru.com</p>	<p>Celio Turino Culture Points, Brazil</p> <p>Chen Kuan-Hsing Penulis Asia as Method</p> <p>Nani Zulminarni Pendiri PEKKA dan Ahli Kajian Gender</p>	<p>Din Syamsuddin Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Presiden Komite Eksekutif Konferensi Keagamaan dan Perdamaian se-Asia</p> <p>Ahmad Fedyani Saifuddin Profesor Antropologi Universitas Indonesia</p> <p>Mocef Ben Abdeljelil Dekan Fakultas Sastra dan Humaniora, Universitas Sousse, Tunisia</p>
Pembahas	<p>Yanuar Nugroho Deputi II Kepala Staf Kepresidenan</p>	<p>Shadia Marhaban Mediator Internasional, Konsultan Perempuan untuk PBB, Harvard Fellow, Ahli Kajian Gender, Direktur Liga Inong Aceh</p>	<p>AKP Mochtan Wakil Sekretaris-Jenderal ASEAN untuk Urusan Masyarakat dan Perusahaan</p>
Moderator	<p>Desi Anwar Penyiar Berita Senior dan Direktur CNN Indonesia</p>	<p>Melani Budianta Profesor Studi Gender dan Pascakolonialisme, Universitas Indonesia</p>	<p>Heddy Shri Ahimsa Putra Profesor Antropologi, Universitas Gadjah Mada</p>

...budaya penting untuk dilihat bukan sebagai produk, melainkan sebagai suatu proses yang menghubungkan dan menyatukan nilai-nilai dan perspektif-perspektif yang ada

perbandingan yang dibawakan tiga pembicara. Pertama, paparan tentang Subak oleh Wayan Windia, ahli Subak dan Guru Besar Universitas Udayana, Bali. Subak adalah sistem pengelolaan air di Bali yang telah diakui sebagai Warisan Budaya (*World Heritage*) UNESCO. Kemudian Semsar Yazdi, Direktur Pusat Internasional mengenai Qanat dan Struktur Hidrolik Bersejarah, Iran. Qanat merupakan sebutan untuk saluran air bawah tanah dalam sistem suplai air tradisional dan berkelanjutan di Iran. Terakhir, Shinsuke Ota, Wakil Presiden Komisi Internasional mengenai Irigasi dan Drainase menjelaskan tentang sistem pengelolaan air untuk irigasi di Jepang.

Dua pembicara lainnya, yakni Hendro Sangkoyo, aktivis Lingkungan dan Satoko Kishimoto, aktivis pada proyek Keadilan Air, *Transnational Institute* (TNI). Keduanya memaparkan secara kritis studi kasus yang menunjukkan krisis sosial-ekologi di berbagai tempat di Indonesia dan di dunia. Keduanya menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam menghentikan eksploitasi dan privatisasi air yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia. Keseluruhan Simposium kedua menekankan pada kebutuhan untuk membingkai ulang praktik budaya dalam rangka mengurangi kesenjangan antara laju pembangunan ekonomi dan kapasitas sosial, serta ekologi dalam

mengimbangi laju tersebut.

“Menjalin Sejarah, Ruang Kota, dan Gerakan Kebudayaan,” menjadi tema simposium ketiga. Simposium ini mengajukan beberapa rekomendasi yang terinspirasi dari paparan para pembicara dan sesi diskusi dengan peserta. Rekomendasi tersebut antara lain mengakui kebutuhan akan rancangan kolektif taraf global untuk memastikan transfer nilai-nilai budaya dari generasi sekarang untuk generasi berikutnya. Simposium ketiga juga melihat kebutuhan untuk merumuskan strategi kebudayaan untuk memberantas ketidakadilan dan diskriminasi dalam kehidupan perkotaan. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan juga harus mendorong partisipasi masyarakat kota melalui advokasi atau kampanye digital dan pemberdayaan organisasi masyarakat.

Tidak ketinggalan, kebutuhan untuk menyebarluaskan nilai-nilai saling menghormati perbedaan dan keragaman demi menciptakan keharmonisan dalam masyarakat perkotaan yang heterogen. Walikota Bandung Ridwal Kamil, salah satu pembicara, menegaskan, “Kita tidak menciptakan perkotaan untuk membuat diri kita sengsara. Oleh karena itu kita harus siap untuk menerima keberagaman dan menunjukkan toleransi untuk kehidupan perkotaan yang damai dan harmonis.”

Antusiasme tinggi juga terasa pada pada hari kedua. Simposium keempat membahas topik hangat tentang “Kebudayaan dalam Dunia Digital Baru”. Simposium yang dimoderatori Desi Anwar, Direktur dan penyiar berita senior CNN Indonesia tersebut mengajukan beberapa kesimpulan dan saran. Forum sepakat bahwa teknologi digital berperan strategis dalam memperkuat demokrasi yang partisipatif dan pemerintahan yang inklusif, serta memastikan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dalam pembangunan. Namun, kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan adalah mutlak untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur digital maupun kapasitas masyarakat dalam mengolah dan menggunakan informasi.

“Merekonsiliasi Negara Masyarakat dan Kebudayaan yang Terpecah” menjadi tema simposium kelima. Simposium ini menyoroti praktik-praktik baik dalam mengharmoniskan perbedaan budaya dari berbagai konteks. Forum ini menggarisbawahi kebutuhan untuk menyatukan daripada mempertinggi perbedaan budaya. Dalam mencapai target tersebut, budaya penting untuk dilihat bukan sebagai produk, melainkan sebagai suatu proses yang menghubungkan dan menyatukan nilai-nilai dan perspektif-perspektif yang ada.

Simposium keenam, “Keragaman Budaya untuk Pembangunan yang Bertanggungjawab”, mengajak peserta untuk menyoroti pentingnya mengatasi tantangan-tantangan yang muncul terhadap upaya pengarusutamaan budaya dalam pembangunan yang sering kali muncul dari segi ekonomi dan politik. Simposium

Deklarasi Bali

1. Mendukung pelaksanaan penuh Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan bekerja menuju integrasi yang lebih nyata dan efektif, dan pengarusutamaan budaya dalam strategi di semua tingkatan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan
2. Mempromosikan budaya perdamaian dalam masyarakat yang dapat mendorong masyarakat adil dan inklusif, yang menjunjung dan menghargai keragaman budaya dan warisan budaya beserta perlindungan terhadap budaya tersebut
3. Menggarisbawahi hasil dari enam simposium dalam Forum Budaya Dunia, di mana tindakan-tindakan berikut direkomendasikan untuk dilakukan:
 - a. Memperkuat peran budaya dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dan menegaskan kembali bahwa budaya adalah penyokong dan pendorong untuk pelaksanaan Agenda 2030 dan menekankan peran masyarakat dan budaya lokal untuk memperbaiki hubungan yang tidak seimbang antara kontribusi ekosistem dengan tuntutan manusia
 - b. Memperkuat keterkaitan antar para pemangku kepentingan yang bersangkutan untuk menciptakan praktik-praktik terbaik yang lazim digunakan untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif
 - c. Mengembangkan jalur-jalur kolektif untuk memastikan transmisi budaya ke generasi-generasi berikutnya untuk kelangsungan budaya
 - d. Menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial yang sensitif terhadap budaya untuk mengatasi tantangan-tantangan kehidupan urban kontemporer
 - e. Menghormati dan mengakomodasi pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang mempromosikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas
 - f. Menempatkan manusia dan alam di tengah-tengah proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dengan pendekatan dari bawah ke atas
 - g. Menyediakan akses universal ke teknologi digital dan penggunaan etis teknologi digital untuk memberdayakan masyarakat sipil dan memungkinkan aktivisme digital
 - h. Memungkinkan berkembangnya dinamika masyarakat perkotaan dan pengembangan kekayaan warisan budaya urban ke arah pemajuan hak untuk menjadi kota yang damai, adil, inklusif dan berkelanjutan
 - i. Memperluas dan memperkuat budaya perdamaian dan pemahaman berdasarkan dialog dan nilai-nilai hak asasi manusia
 - j. Mendorong dialog dan membangun penghubung untuk menggandengkan perbedaan budaya dan memperkuat pemahaman bersama antara masyarakat
 - k. Memperkuat promosi akan nilai-nilai multikulturalisme, hidup berdampingan secara rukun dan damai
 - l. Menggabungkan nilai-nilai budaya, etika penggunaan air, dan pengetahuan tradisional ke dalam pengelolaan sumber daya air terpadu mulai dari sumbernya hingga semua penggunaannya untuk menyelesaikan tantangan sosial-politik pengelolaan air di seluruh dunia
4. Memperkuat peran pemuda dalam aktivitas ekonomi, budaya dan sosial-politik serta lingkungan dalam rangka mempromosikan pemahaman bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk, namun tidak terbatas, pada promosi ekonomi kreatif
5. Mengenali peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan pengetahuan tentang kegiatan yang memberdayakan konstituen dalam memajukan budaya progresif untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif
6. Mengembangkan strategi yang berinvestasi pada manusia dan memberdayakan peran masyarakat setempat termasuk dengan merumuskan rencana aksi untuk menjaga relasi antara setiap rapat Forum Budaya Dunia yang membangun proses dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengoptimalkan budaya sebagai kekuatan dalam menyelesaikan masalah dunia
7. Bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan semua rencana pembangunan berkelanjutan di bawah Agenda 2030 benar-benar responsif terhadap konteks budaya untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, berkelanjutan, dan adil untuk planet yang inklusif
8. Mendukung UNESCO dalam setiap upayanya untuk memperkuat perlindungan warisan budaya, termasuk, dari perang dan konflik
9. Memperkuat sarana implementasi dan menekankan kebutuhan untuk mengarusutamakan peran kebudayaan ke dalam indikator-indikator dan mekanisme pelaporan di setiap level Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
10. Bekerja untuk mengembangkan sebuah Kerangka Kerja Aksi yang akan disajikan untuk diadopsi dan diluncurkan bersamaan pada pertemuan yang diselenggarakan pada sesi ke-39 Konferensi Umum UNESCO pada Oktober 2017 dengan maksud untuk memperkuat mekanisme tindak lanjut dan peninjauan di bawah Agenda 2030



juga menekankan pentingnya keragaman budaya sebagai salah satu rujukan dalam merencanakan dan mendesain metode pengukuran untuk mengevaluasi agenda pembangunan.

Selain menjalani forum-forum diskusi dari pagi hingga siang hari, peserta WCF 2016 juga menikmati karnaval budaya, pertunjukan tari kolaborasi, dan pertunjukan musik orkestra yang menampilkan pianis Ananda Sukarlan.

Pada tanggal 11 Oktober 2016, Karnaval Budaya di lapangan Puputan Badung menampilkan parade tarian tradisional dari 14 negara. Dalam sambutannya, Dirjen Kebudayaan menegaskan, “Tarian bukanlah sekadar dekorasi, namun merupakan ekspresi artistik“. Kemudian pada malam 12 Oktober, peserta kembali dibuat terpujau oleh kolaborasi yang apik para penari dari 14 negara yang menyuguhkan tarian-tarian

tradisional dalam satu panggung megah di Aula Nusa Dua. Keesokan harinya peserta juga berkesempatan untuk menikmati langsung karya-karya luar biasa dari Ananda Sukarlan. Ananda Sukarlan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang masuk daftar pada buku “2.000 Outstanding Musicians of the 20th Century” dan “The International Who’s Who in Music” yang diterbitkan Cambridge.

Di penghujung WCF 2016, Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing yang menjadi Ketua Panitia Pengarah WCF 2016, Ananto Kusuma Seta, membacakan Deklarasi Bali. Deklarasi Bali tersebut terdiri dari 10 butir yang keseluruhannya mencerminkan komitmen seluruh peserta WCF 2016 untuk memperkuat upaya-upaya pengarusutamaan kebudayaan sebagai penyokong dan penggerak pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Deklarasi

Bali juga berkomitmen untuk menjadikan WCF sebagai platform permanen dalam mempromosikan peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Deklarasi tersebut akan disempurnakan dari aspek kebahasaannya. Kemendikbud akan mengirimkannya kepada UNESCO untuk menjadi dokumen resmi, dan kemudian diteruskan agar menjadi dokumen resmi PBB.

Menutup WCF 2016, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menegaskan Kemendikbud akan menindaklanjuti kesepakatan dan agenda-agenda tersebut agar menjadi lebih konkret, pada pertemuan lanjutan yang direncanakan pada Januari 2017. Komitmen para peserta WCF 2016 tidak akan berhenti pada deklarasi. Kemendikbud akan mengupayakan agar komitmen tersebut dapat diimplementasikan sebagai bentuk gerakan kemanusiaan. ■

■ Merayakan Bulan Pendidikan dan Kebudayaan 2016



Pendidikan harus bisa membawa perubahan, menghapus kegelapan menuju terangnya dunia yang penuh harapan. Ki Hadjar Dewantara mengungkapkannya lewat kata-kata bertuah, “Pendidikan yang memerdekakan.”

Bulan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang baru pertama kalinya digelar tahun ini memunculkan tema “Nyalakan Pelita, Terangkan Cita-cita”. Kata-kata itu sejalan dengan pilihan dan tujuan kita bernegara dan berbangsa: mewujudkan insan yang merdeka, berperni kemanusiaan, dan peri keadilan. Gagasan Bulan Dikbud tentu masih terkait dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei setiap tahun. Tanggal itu sekaligus menandai peringatan hari kelahiran Ki Hadjar, Bapak Pendidikan Nasional. Namun,

mulai tahun ini perayaan diperluas lewat ajang Bulan Dikbud.

Bulan Dikbud bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga gerakan yang mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan. Kemendikbud tidak hendak mendominasi menjadi pemeran utama dalam perayaan ini, namun cukup berperan sebagai fasilitator antara publik, komunitas, dan masyarakat yang ingin turut berpartisipasi.

Selain tema besar “Nyalakan Pelita, Terangkan Cita-cita”, panitia

Bulan Dikbud juga menetapkan tema mingguan: *kembali ke sekolah, ekspresi merdeka, anak adalah bintang, dan semua murid semua guru*. Bulan Dikbud secara resmi dicanangkan pada upacara Hardiknas pada 2 Mei 2016 di halaman kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Acara puncak dilaksanakan di Yogyakarta pada 19 Mei 2016 bersama Yayasan Taman Siswa. Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan Ki Hadjar pada masa kolonial Belanda. Sedangkan acara penutupan kembali dilaksanakan di Jakarta pada 29 Mei 2016.



Suasana meriah pembukaan Bulan Dikbud diwarnai para peserta upacara yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Mendikbud menyatakan bahwa kita tak hanya merayakan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga merayakan keindonesiaan dengan menghadirkan kebhinnekaan. Para peserta terlihat antusias mengenakan beragam baju daerah. Ada yang mengenakan pakaian adat Jawa, Madura, Minang, hingga Minahasa. Sesungguhnya, sejak Pebruari 2016, setiap Selasa, dua kali dalam sebulan, para pegawai Kemendikbud telah terbiasa mengenakan pakaian adat. Kemendikbud ingin menyampaikan pesan bahwa pakaian adat tak hanya dikenakan pada upacara-upacara adat. Namun, bisa juga dikenakan sebagai pakaian yang nyaman dalam kegiatan sehari-hari.

Pelibatan publik pada perayaan ini sangat kuat terasa. Kementerian

membuka diri terhadap ide dan gagasan dari luar. Lebih dari seratus komunitas terlibat sejak persiapannya. Ratusan relawan pun mendaftarkan diri untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang meramaikan Bulan Dikbud. Sayembara logo Bulan DIKBUD berhasil memancing masuknya ratusan karya. Interaksi dengan publik juga dilakukan setiap Minggu pagi, sepanjang bulan Mei, pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pada kesempatan itu diperkenalkan berbagai produk dan layanan yang ada di kementerian.

Lewat subtema “kembali ke sekolah”, Kemendikbud mengajak berbagai kalangan untuk kembali ke sekolah untuk bernostalgia dan berbagi pengalaman tentang profesi yang mereka jalani sekarang. Gerakan kembali ke sekolah ini sudah dijalankan sebelumnya untuk

memberikan inspirasi kepada para siswa. Kalangan masyarakat dari beragam profesi bisa berbagi cerita, bagaimana pendidikan menjadi hal penting dalam perjalanan hidup mereka. Masyarakat juga diajak kembali ke sekolah untuk memuliakan guru dan membantu sekolah. Lewat aplikasi *Sekolah Kita* yang secara transparan memperlihatkan data sekolah-sekolah di Indonesia, lulusan yang sudah berhasil diajak berkontribusi ke sekolah tempat mereka belajar dulu.

Minggu kedua Bulan Dikbud mengusung subtema “ekspresi merdeka”. Publik diajak untuk mengekspresikan jiwa nasionalisme mereka yang merupakan buah hasil pendidikan. Berbagai acara yang memperkenalkan para pahlawan pendidikan dan budayawan digelar bukan hanya di Kemendikbud, tetapi juga di beberapa kota di Indonesia. Komunitas film



Para pegiat pendidikan dari berbagai komunitas turut merayakan Bulan Pendidikan Nasional 2016

Indonesia, misalnya, menggelar acara di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud. Mereka melibatkan ratusan siswa SMA dan SMK untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam bidang seni peran dan film.

Minggu ketiga mengusung subtema “anak adalah bintang”. Lomba penulisan esai “Pancasila, Orientasi Perilaku Sehari-hari”, lomba karikatur Ki Hadjar Dewantara, dan lomba desain grafis Ki Hadjar Dewantara, ikut memeriahkan minggu ketiga Bulan Dikbud. Minggu ini bertepatan pula dengan puncak perayaan Bulan Dikbud bersama Yayasan Taman Siswa, Yogyakarta. Acara ini berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 1.000 peserta. Antara lain, turut hadir para kepala daerah, kepala dinas pendidikan kota dan

kabupaten, para kepala sekolah teladan, para siswa berprestasi, organisasi guru, LSM pendidikan dan kebudayaan, para budayawan, serta media cetak dan elektronik.

Subtema terakhir, “semua murid semua guru” mengirim pesan bahwa setiap orang yang terdidik memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik. Karena itu, kementerian mendorong masyarakat merayakan pendidikan sebagai hal yang bisa dilakukan siapa saja, dan di mana saja. Komunitas Rumah Inspirasi dan Klub Oase menyelenggarakan “bincang seru *homeschooling*” untuk mendukung masyarakat mengenai pendidikan alternatif. Rumah Inspirasi dan Klub Oase adalah komunitas praktisi pendidikan yang menjadi fasilitator kegiatan edukasi berbasis keluarga.

Tidak hanya di Jakarta, kota lain juga menyelenggarakan perayaan pendidikan serupa. Salah satunya, Bandung, mengadakan Festival Anak Bertanya dengan tema “membuka cakrawala, mematri cita-cita”.

Kemendikbud juga membuka kantor kementerian dan menyediakan berbagai fasilitas selama satu bulan penuh untuk semua pihak yang ingin mengadakan acara bernafas pendidikan dan kebudayaan. Syarat yang harus dipenuhi untuk ikut berpartisipasi, antara lain, kegiatan yang diselenggarakan berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan serta tidak memungut bayaran. Beberapa pihak yang ikut berpartisipasi antara lain Galeri Nasional yang mengadakan pameran kesenian bertemakan



Publik diajak untuk terlibat dalam menyampaikan pesan pendidikan di acara hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta



Pertunjukan kesenian silat yang disaksikan oleh masyarakat sebagai bagian dari perayaan Bulan Pendidikan Nasional.

pendidikan, Bank Jawa Barat yang menyosialisasikan Tabungan Cinta Guru, Gerkatin yang mengadakan seminar pendidikan anak tuna rungu, Komunitas Guru, KORPRI, Kelas Inspirasi, dan Forum Indonesia Muda.

Keseruan Bulan Dikbud juga berasal dari kontribusi para relawan. Para relawan yang sebagian besar mahasiswa ini tidak

hanya berasal dari di Jakarta, tetapi juga dari kota-kota lain. Berkat kerja sama relawan dan komunitas-komunitas pendidikan, kemeriahan Bulan Dikbud terasa hingga tagar #Hardiknas berhasil menjadi topik terpopuler di berbagai sosial media.

Hal ini sesuai dengan rencana strategis Kemendikbud yang ingin melibatkan publik dalam menyebarkan semangat pendidikan

Pemerintah ingin bergerak bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa agenda besar seperti pendidikan karakter dan penanaman literasi dasar, jelas membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.

dan kebudayaan. Pemerintah ingin bergerak bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa agenda besar seperti pendidikan karakter dan penanaman literasi dasar, jelas membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.

Perayaan Bulan Dikbud ditutup secara meriah bekerja sama dengan komunitas serta pegiat pendidikan yang tergabung dalam Pesta Pendidikan (PeKan). Acara ini diselenggarakan pada 29 Mei 2016 di kawasan Senayan, Jakarta. Selain dimeriahkan kehadiran 108 komunitas pendidikan, acara ini juga dihadiri Guru Garis Depan (GGD) yang didatangkan dari daerah-daerah 3T di Indonesia. Berbagai aktivitas seperti Bus Sekolah dengan fasilitas pembelajaran masa depan, berbagai karya pelajar SMK, program “Jalur Rempah”, serta dialog tentang literasi dan pendidikan dini, menjadi pilihan publik yang memadati acara penutupan Bulan Dikbud. Semoga antusiasme dan keterlibatan publik juga berlaku pada setiap upaya menyukseskan beragam kegiatan pendidikan dan kebudayaan di masa-masa mendatang. ■



■ DAPODIK: Satu Nusa Satu Data

Data merupakan komponen terpenting dalam sebuah perencanaan.

Data yang akurat, terpercaya, dan terkini akan menguatkan perencanaan yang disusun. Kemendikbud mencoba membuat Program Data Pokok Pendidikan (Dapodik)—sebuah sistem pendataan pendidikan skala nasional yang terpadu, akurat, terpercaya, dan terkini.

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan menyebutkan, “Perencanaan Pembangunan

didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”. Dapodik Kemendikbud memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan. Data tersebut bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbarui secara daring.

Dapodik berawal pada tahun 2011, berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011

tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Rintisan aplikasi penjangkaran data pendidikan dengan mengusung wadah satu data ini pada tahun 2012 mulai diluncurkan dan disosialisasikan. Sampai saat ini, pembaruan data terus dilakukan.

Sebelum tahun 2012, Dapodik dikoordinasikan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro PKLN). Setelah serah terima secara resmi dan penetapan penutupan

Tim Dapodik Biro PKLN pada 1 Januari 2012, pengelolaan Dapodik dilakukan masing-masing Direktorat Jenderal. Dengan pemindahan pengelolaan tersebut, aplikasi Dapodik dibuat kembali dari awal menjadi versi baru oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas). Dapodik yang dikelola Ditjen Dikdas saat itu kemudian dikenal dengan nama Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas).

Aplikasi Dapodikdas berbasis servis jaringan, dengan hosting lokal (localhost) pada komputer yang digunakan satuan pendidikan. Proses memasukkan (input) data dan pengiriman data tidak dilakukan secara seketika (real time), melainkan dengan sistem sinkronisasi. Pengiriman data berupa paket basis data dengan kode registrasi yang berbeda-beda untuk masing-masing satuan pendidikan, sehingga dalam pengisian data pendidikan dari Satuan Pendidikan pun dapat dilakukan secara luring (offline).

Serupa dengan pendataan yang dilakukan Ditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen) mengelola pendataan Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen). Karena Ditjen Dikmen baru dibentuk saat itu, Dapodikmen baru dapat digunakan sebagai alat pendataan pada tahun 2013. Sistem pendataan sama dengan yang dilakukan Dapodikdas. Perbedaan hanya entitas yang mengisi Dapodikdas maupun Dapodikmen.

Pengembangan sistem terus dilakukan untuk memberikan kemudahan operator satuan pendidikan melakukan pengisian data pendidikan. Pada tahun 2015, Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen digabung menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah. Pendataan yang dilakukan Dapodikdas dan Dapodikmen pun digabung menjadi satu aplikasi, yaitu Dapodik. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 menegaskan bahwa untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, Kemendikbud melaksanakan kegiatan pendataan melalui Dapodik. Ini juga menjadi satu-satunya sumber data pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata.

Permendikbud tersebut bertujuan untuk mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan representatif untuk memenuhi kebutuhan Kemendikbud dan pemangku kepentingan lain. Tujuan lain adalah mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data pokok yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan untuk digunakan oleh Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan.

Permendikbud Nomor 79 tahun 2015 juga mengatur tugas masing-masing unit utama di Kemendikbud secara jelas. Termasuk, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), memiliki tugas:

1. Merancang basis data pendidikan relasional sehingga mampu menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan;
2. Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan;
3. Membangun pusat data kementerian untuk menampung

dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data;

4. Membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi, dengan melibatkan satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas dalam menentukan validitas data sebagai validator;
5. Menetapkan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan Dapodik dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut;
6. Memastikan komitmen institusi lain pengguna data, menjaga kerahasiaan data pendidikan; dan
7. Mengoordinasikan seluruh unit kerja yang terlibat dalam Dapodik sehingga kegiatan pengumpulan Dapodik terintegrasi dalam satu sistem pendataan dengan efektivitas dan efisien.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat memiliki tugas:

1. Merancang prosedur pengumpulan data dengan memanfaatkan mekanisme yang berlaku pada masing-masing direktorat jenderal;
2. Melakukan sosialisasi formulir dan prosedur yang dihasilkan untuk satuan pendidikan di bawah pembinaan masing-masing direktorat jenderal;
3. Membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien;
4. Mengkoordinir pengumpulan semua Dapodik dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan masing-masing direktorat jenderal;
5. Menyediakan layanan helpdesk Dapodik; dan

6. Menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya.

Sedangkan unit kerja eselon I lainnya mempunyai tugas:

1. Melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan;
2. Melakukan koordinasi dengan sekretariat eselon I terkait;
3. Mengkontribusikan output sistem transaksional ke dalam Dapodik.

Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga memiliki tugas tersendiri dalam proses satu data pendidikan, yaitu:

1. Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
2. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
3. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
4. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan
5. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik;
6. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan
7. Dinas provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah;
8. Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan



Dengan terintegrasinya seluruh entitas data pendidikan, tidak ada lagi perbedaan dan saling klaim data mana yang paling benar dan akurat

- pemutakhiran data secara berkala; dan
9. Menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di tingkat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Satuan pendidikan, sebagai ujung tombak pendataan memiliki tugas seperti:

1. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik;
2. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester;
3. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan
4. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

Proses input data pendidikan pada satuan pendidikan

dilakukan oleh operator sekolah yang ditunjuk oleh sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Operator Sekolah yang ditunjuk oleh sekolah, setidaknya memiliki keahlian di bidang IT di sekolah—mulai dari penguasaan dasar-dasar komputer, cara memperbaiki komputer/laptop, menguasai sistem online/internet, dan yang paling utama mampu mengurus data-data pendidikan (terutama data sekolah). Operator Sekolah memiliki tugas melakukan pengisian data pendidikan yang ada pada satuan pendidikan tempatnya bertugas.

Beberapa hal yang harus dilakukan seorang operator sekolah adalah: 1) menginstal Aplikasi Dapodik, termasuk melakukan pembaruan Aplikasi; 2) Memasukkan semua data Sekolah mulai dari Data Sekolah, Kondisi Sarana dan



Prasarana, Kepala Sekolah, PTK, Peserta Didik, dll.); 3) Setelah melakukan penginputan data pada Dapodik, tugas selanjutnya untuk melakukan sinkronisasi data dengan data server Dapodik; 4) Mencetak profil sekolah sebagai hasil laporan pengerjaan; 5) Melakukan Koreksi Data Jika Ada Kesalahan/Perbaikan Data Sekolah, kemudian menyinkronkan dengan server.

Hasil pengumpulan data melalui Dapodik diintegrasikan oleh PDSPK, dan menjadi satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas data pendidikan yang didata. PDSPK juga menjadi satu-satunya unit yang menjadi distributor hasil olahan data Dapodik ke unit utama di lingkungan Kemendikbud dan secara berkala melaporkan hasil kerja kepada Menteri.

Pemanfaatan DAPODIK antara lain:

1. Sebagai Basis pencairan dana PIP, siswa yang sudah memiliki KIP belum bisa memanfaatkan dana PIP-nya jika belum dimasukkan ke dalam Dapodik;
2. Baseline BOS, untuk perhitungan jumlah dana BOS tiap sekolah dihitung dari jumlah siswa yang sudah dimasukkan ke dalam Dapodik. Khusus untuk SMA, siswa yang dihitung sebagai dasar pencairan BOS adalah siswa yang sudah memiliki NISN;
3. Data awal peserta UN;
4. Pemberian NISN. NISN adalah hak siswa. Untuk mendapatkan NISN, siswa harus dimasukkan ke dalam Dapodik terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi di PDSPK.

Setiap sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja

dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada Dapodik sebagai referensi secara daring. Setiap pengumpulan data transaksional wajib berkontribusi untuk memperkaya informasi yang terdapat dalam Dapodik, dengan memberikan variabel output sistem transaksional tersebut menjadi bagian dari Dapodik.

Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang tepat. Dengan terintegrasinya seluruh entitas data pendidikan, tidak ada lagi perbedaan dan saling klaim data mana yang paling benar dan akurat. Data pendidikan yang valid, akurat, terkini, dan terpercaya yang berasal hanya dari satu sumber akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pendidikan ke arah yang lebih baik dan terarah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu data. ■

■ Regulasi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Tahun 2016 menjadi tahun yang penuh dengan perbaikan regulasi untuk pendidikan yang lebih baik.

Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi dan perubahan nilai-nilai kehidupan akibat perubahan zaman. Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman telah membawa dampak dan perubahan besar pada lingkup pendidikan, yang kemudian mengubah pandangan dan pola pikir siswa serta pelaku pendidikan.

Isu kesehatan, hak asasi manusia, dan korupsi ditengarai mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, Kemendikbud memandang perlu adanya terobosan regulasi yang relevan dan masuk akal untuk diaplikasikan, demi kemajuan pendidikan Indonesia. Antara akhir 2015-2016, Kemendikbud telah mengeluarkan delapan Permendikbud yang mengatur berbagai kegiatan dan perilaku di lingkungan pendidikan. Hal-hal yang diatur Permendikbud mulai dari kawasan tanpa rokok hingga harga eceran tertinggi buku teks pelajaran pendidikan dasar dan menengah. Berikut kedelapan Permendikbud tersebut:

1. Permendikbud No. 64 tahun 2015

tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah,

2. Permendikbud No.79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
3. Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
4. Permendikbud No.17 Tahun 2016 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan
5. Permendikbud No.18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah
6. Permendikbud No.24 Tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pada Satuan Pendidikan
8. Kepmendikbud No.124/p/2016 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Milik Kemdikbud.

Selain kedelapan peraturan di atas, berbagai peraturan lain juga akan terus dikaji. Hal ini bertujuan mendorong perubahan

perilaku para peserta didik, pelaku pendidikan serta berbagai lapisan masyarakat agar dapat saling berkolaborasi dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Sekolah Aman

Sekolah adalah rumah kedua bagi anak dan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan pola pikir anak. Tak heran, banyak orang tua yang berpikir panjang dalam memilih sekolah yang tepat bagi anak-anaknya. Sekolah yang baik tentu saja sekolah yang menyenangkan dan dapat membuat anak-anak merasa betah belajar hingga tiba waktunya pulang. Untuk itu, lingkungan sekolah harus jauh dari segala tindakan yang mengancam keselamatan anak, seperti tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Di sebagian daerah, kekerasan masih menjadi budaya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak sedikit guru yang beranggapan bahwa menghukum anak dengan kekerasan adalah tindakan yang wajar dengan dalih mendisiplinkan. Namun, seiring perkembangan



Contoh Papan Informasi Sekolah Aman

zaman pola pikir berubah dan yang sering terjadi justru sebaliknya. Tindakan guru menghukum murid dianggap menyalahi aturan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Tak jarang hukuman ringan seperti menasihati atau memberikan tugas tambahan justru diartikan sebagai tindakan hukuman yang tidak pantas dilakukan. Guru kerap menjadi sasaran *bullying* atau kemarahan orang tua.

Guru maupun siswa patut dibela, sebab keduanya merupakan tonggak pembangunan bangsa. Menyikapi hal tersebut, dan dalam upaya melindungi kedua belah pihak, Kemendikbud mengeluarkan **Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan**. Permendikbud ini merumuskan kebijakan bagi pelaku pendidikan, para peserta didik, serta kolaborasi berbagai pihak (orang tua/wali, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat) dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ragam tindak

kekerasan yang diatur mencakup pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan (SARA), serta tindak kekerasan lain. Aturan ini juga memuat sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, serta mengharuskan setiap sekolah memasang Papan Informasi Sekolah Aman di serambi atau halaman depan sekolah sebagai langkah antisipasi serta upaya meminimalisasi tindak kekerasan.

Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi para pelaku dan peserta pendidikan dalam membangun ekosistem sekolah yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik demi mewujudkan generasi-generasi terbaik negeri ini.

Sekolah Bebas Asap Rokok

Data Kemenkes mengungkapkan prevalensi remaja usia 16-19 tahun yang merokok meningkat tiga kali lipat dari 7,1% di tahun 1995 menjadi 20,5% pada tahun 2014. Dan yang

lebih mengejutkan adalah usia mulai merokok semakin muda (dini). Perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat lebih dari 100% dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, yaitu dari 8,9% di tahun 1995 menjadi 18% di tahun 2013. (<http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/https-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html>)

Dengan bertambahnya jumlah perokok, maka semakin banyak pula kawasan-kawasan yang dijadikan tempat untuk merokok termasuk kawasan sekolah. Demi meminimalisasi dampak rokok terhadap anak-anak usia sekolah serta dalam rangka mendukung program Kementerian Kesehatan yang mencanangkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan yang memuat pelarangan rokok di lingkungan sekolah yang tertuang dalam **Permendikbud No. 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah**.

Beberapa poin penting diatur dalam Permendikbud ini, di antaranya berupa imbauan kepada sekolah untuk memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah, melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, atau kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan rokok, memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk iklan lain dari perusahaan atau yayasan rokok di lingkungan sekolah serta melarang penjualan rokok di kantin, warung atau koperasi serta tempat penjualan lain di sekolah. Sekolah juga diimbau untuk memasang tanda kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

Kebijakan ini diharapkan dapat

meminimalisasi dampak maupun pengaruh rokok di kalangan remaja dan usia sekolah. Diharapkan kesadaran bagi gaya hidup yang sehat tanpa rokok di kalangan siswa pelajar di Indonesia. Hidup dalam lingkungan yang sehat adalah hak seluruh anak Indonesia. Sebagai calon penerus bangsa, siswa-siswi Indonesia harus tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif dan dapat membawa serta membangun negeri ini ke arah yang lebih positif.

Perbaikan Tata Kelola Perbukuan

Buku merupakan sarana penting dalam pembelajaran. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, wawasan setiap orang dapat terbangun dan pemahamannya terhadap dunia menjadi lebih luas. Hal tersebut menjadikan literasi sebagai bagian penting pendidikan. Namun nyatanya tidak semua pihak memiliki pemikiran sama.

Beberapa waktu lalu, dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan beberapa kasus buku bacaan yang mengandung konten-konten yang tidak pantas dan tidak sesuai untuk dikonsumsi masyarakat luas, khususnya usia sekolah. Beberapa buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS) serta novel didapati mengandung unsur pornografi dan radikalisme. Hal ini menjadi sorotan sekaligus kekhawatiran masyarakat termasuk orang tua serta para pelaku dan praktisi pendidikan.

Demi meminimalisasi kesalahan dalam pemilihan dan penggunaan buku teks maupun nonteks pelajaran tersebut, Mendikbud memutuskan untuk membuat aturan tentang tata kelola perbukuan yang akan digunakan di sekolah. Aturan perbukuan tersebut kemudian tertuang dalam **Permendikbud**



Contoh tanda Kawasan Tanpa Rokok

No.8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. Permendikbud ini merumuskan kriteria-kriteria terkait pemilihan buku yang aman dan layak digunakan oleh sekolah serta sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta norma positif yang berlaku di masyarakat.

Buku yang nantinya digunakan oleh Satuan Pendidikan wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias *gender*, serta penyimpangan nilai lainnya.

Demi mendorong terwujudnya buku pelajaran yang berkualitas, Kemendikbud berharap masyarakat khususnya orang tua turut aktif dalam memperhatikan buku-buku pelajaran yang digunakan oleh anak, keluarga atau sanak-saudaranya di sekolah. Setiap orang juga diharapkan dapat melaporkan dan memberikan kritik, komentar, serta masukan terhadap buku yang digunakan dengan mengirimkan langsung kepada penulis dan

penerbit atau kepada Kemendikbud melalui laman <http://buku.kemdikbud.go.id> atau melalui email buku@kemdikbud.go.id. Sudah saatnya masyarakat bersikap kritis dan solutif demi kepentingan bersama. Anak-anak kita berhak mendapatkan sumber bacaan yang sehat, berkualitas serta bermanfaat bagi masa depannya.

Pengenalan Lingkungan Sekolah

Dari tahun ke tahun, masa orientasi peserta didik baru kerap diwarnai aksi kekerasan, baik verbal maupun fisik. Tak sedikit sekolah yang masih melaksanakan cara serupa dalam masa orientasinya. Padahal, tak sedikit kasus siswa yang sakit bahkan meninggal dunia akibat orientasi sekolah. Kemendikbud menyadari betul, persoalan kekerasan saat orientasi bukanlah persoalan yang *sepele*, apalagi jika kegiatan tersebut sampai menelan korban.

Merespon hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat terobosan dengan menghapus Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa yang dinilai belum dapat mencegah terjadinya

perpeloncoan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah secara optimal, dan menggantinya dengan kebijakan baru yang tertuang dalam **Permendikbud No.18 Tahun 2016** tentang **Pengenalan Lingkungan Sekolah**. Permendikbud ini menata dan memberikan alternatif baru dalam proses pengenalan lingkungan sekolah yang lebih baik, lebih terarah, dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik.

Kemendikbud mewajibkan Pengenalan Lingkungan Sekolah diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Sekolah juga diminta untuk membuat evaluasi atas pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah yang wajib disampaikan kepada orang tua/wali baik secara tertulis maupun melalui pertemuan paling lama tujuh hari kerja setelah pengenalan lingkungan sekolah berakhir.

Pengenalan lingkungan sekolah wajib memperhatikan beberapa hal, di antaranya perencanaan maupun penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru dan tidak diperbolehkan untuk melibatkan siswa senior. Pengenalan Lingkungan Sekolah sebaiknya dilakukan di lingkungan sekolah (kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai) serta bersifat edukatif. Sekolah juga dilarang membuat kegiatan yang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya. Selain itu, siswa wajib menggunakan seragam dan atribut resmi sekolah dan pihak sekolah tidak diperkenankan memberikan tugas kepada siswa barubaru kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Namun, demi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah

yang lebih edukatif dan berkualitas, sekolah dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tanpa melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun.

Aturan ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada saat orientasi peserta didik baru. Demi mendukung hal tersebut, Mendikbud berharap siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat bersikap lebih peduli dan awas terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekolah serta melaporkan dugaan pelanggaran atas Peraturan Menteri ini kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, telepon ke 02157903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 081976929.

Layanan Pendidikan Kepercayaan

Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun hal tersebut tidak menjadikan Indonesia bersikap eksklusif dalam membuat kebijakan yang berlaku. Mengingat beragamnya suku bangsa maupun adat istiadat di Indonesia, maka bisa dipastikan bahwa sebagian masyarakatnya menganut keyakinan dan kepercayaan yang berbeda pula.

Setiap anak berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama tanpa membedakan ras, suku, maupun agama/kepercayaannya. Anak yang memiliki keyakinan berbeda tidak sepatutnya dimarginalkan dalam kelompok keyakinan yang dominan, serta tidak dipaksakan

untuk mengikuti suatu ajaran agama tertentu. Merujuk pada hal tersebut, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan pendidikan kepercayaan yang berlaku di sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam **Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016** Tentang **Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pada Satuan Pendidikan**.

Yang dimaksud dengan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Permendikbud ini adalah Layanan Pendidikan Kepercayaan yang diberikan kepada Peserta Didik yang menganut keyakinan dan kepercayaan sebagaimana diakui secara resmi di Indonesia. Dalam penyediaan Pendidikan Kepercayaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan Organisasi Keagamaan/Penghayat Kepercayaan yang telah terdaftar di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan. Pendidik juga diimbau untuk memberikan pelajaran Pendidikan Kepercayaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut peserta didik. Harapannya, kebijakan ini dapat menjamin seluruh peserta didik mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan yang berkualitas, sesuai dengan hak-hak peserta didik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pendidikan Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Melalui penyempurnaan dan penyesuaian regulasi dari waktu ke waktu, sistem pendidikan Indonesia diharapkan dapat menyentuh setiap anak Indonesia di mana pun mereka berada. ■

■ Unit Layanan Terpadu: Melayani Sepenuh Hati

Kemendikbud memahami jika saat mengunjungi Unit Layanan Terpadu (ULT) seperti menjadi pilihan yang kurang menyenangkan bagi para pelaku pendidikan.

Mereka membayangkan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh (untuk yang di luar kota, bahkan di luar pulau), lalu mengantri di ruangan yang panas selama berjam-jam, dan belum tentu urusannya akan selesai pada hari itu juga.

Kegalauan itu bertambah dengan adanya kekhawatiran kerumitan birokrasi serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun sejak 1 April 2015, ULT dibawah koordinasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) berbenah diri dan berusaha tampil dengan wajah baru. Pelayanan ULT kini menjadi wajah utama kepedulian

Kemendikbud terhadap kebutuhan para pelaku pendidikan.

ULT adalah pelayanan untuk pelaku pendidikan. Pelayanan diberikan di lantai dasar Gedung C Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Namun, sebenarnya masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Senayan. Layanan ini bisa diakses lewat laman <http://ult.kemdikbud.go.id/>. Para pelaku pendidikan dengan mudah bisa mengutarakan keluhan, saran, atau meminta informasi terkait pendidikan dan kebudayaan secara daring. Masyarakat yang tidak tersentuh internet juga bisa menghubungi ULT lewat telepon, sms, dan fax. Dalam tujuh hari kerja, ULT akan

menyelesaikan permasalahan yang masuk ke dalam sistem.

Saat ini ULT menyediakan 15 jenis layanan, yakni: (1) Layanan aneka tunjangan guru Dikdas, (2) Layanan aneka tunjangan guru Dikmen, (3) (4) Layanan Dapodik Dikdasmen, (5) Layanan Dapodik PAUD Dikmas, (6) Layanan Nomor Unik Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), (7) Layanan Izin Mengajar Tenaga Kerja Asing (IMTA), (8) Layanan penyetaraan ijazah peserta didik asing, (9) Layanan Beasiswa Unggulan, (10) Layanan informasi PAUD Dikmas,



(11) Layanan informasi Dikdasmen, (12) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Layanan Bantuan Pemerintah, (13) Layanan informasi Kebahasaan, (14) Layanan Informasi Kebudayaan, dan (15) Informasi dan Pengaduan.

Berdasarkan data jumlah pengunjung ULT, yang paling banyak mengajukan permohonan informasi dan pengaduan adalah terkait dengan layanan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Tunjangan Profesi Guru (TPG), *inpassing*, dan permasalahan guru lainnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), kecurangan dalam

ujian, kekerasan di sekolah, dan pungutan liar (dapat dilihat pada grafik).

Melihat harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap Kemendikbud untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, BKLM secara terus menerus mengimbau unit-unit kerja di lingkungan Kemendikbud untuk dapat segera menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui ULT.

Saat Ujian Nasional (UN), ULT Kemendikbud juga aktif mengelola pengaduan kecurangan pelaksanaan UN. ULT bahkan membuka posko khusus

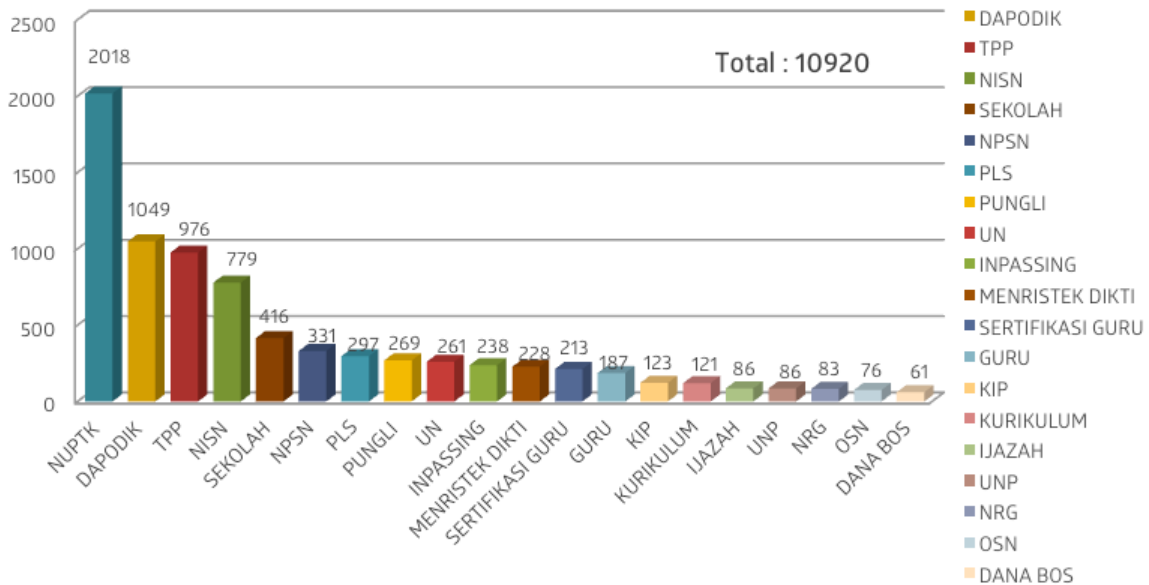
bekerja sama dengan unit kerja di lingkungan Kemendikbud, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk memastikan pengaduan dari seluruh daerah di Indonesia dapat diakomodir dan diselesaikan dengan baik.

Dalam skala nasional, ULT juga memproses dan menyelesaikan laporan dan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

DUA PULUH BESAR KATAGORI GABUNGAN

(Telepon, SMS, Email, HDI-ULT)

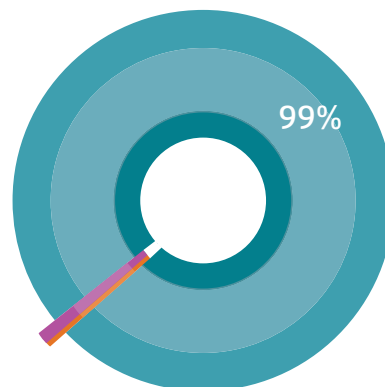
Januari s.d. Agustus 2016



(LAPOR). LAPOR merupakan portal pengaduan berskala nasional dan multisektor yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden. Pengaduan pendidikan yang masuk ke LAPOR juga ditangani oleh ULT. Laporan pendidikan dan kebudayaan yang masuk melalui portal LAPOR sampai dengan Oktober 2016 berjumlah 6.713 dan semuanya berhasil diselesaikan oleh ULT, sebagaimana dapat dilihat dalam grafik. Publik bisa mengakses transparansi data laporan ini di <https://www.lapor.go.id/>

Bagaimana seluruh laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti ULT? Seluruh laporan yang masuk akan diproses oleh personel ULT yang berasal dari perwakilan

JUMLAH LAPORAN
6.713



- Belum ada tindak lanjut
- Dalam proses tindak lanjut
- Tindak lanjut selesai



Dalam melayani pelaku pendidikan yang mengurus berbagai keperluan, petugas ULT memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, sepenuh hati, dan tidak dipungut biaya

seluruh unit kerja di Kemendikbud. Mereka kemudian mengirim laporan tersebut ke unit terkait untuk ditindaklanjuti. Jika laporan tersebut terjadi di daerah tertentu, maka ULT berkoordinasi dengan dinas pendidikan pemda terkait. Tidak perlu menunggu lama tanpa kepastian, para pelapor cukup mengakses portal ULT dan masuk ke dalam sistem untuk mengetahui status terakhir dari laporannya. Informasi laporan yang terdaftar dan semua tindak lanjutnya terdokumentasi dalam jaringan sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Komitmen Kemendikbud dalam meningkatkan pelayanan pengaduan pendidikan terlihat dari ketersediaan pelayanan berbasis teknologi yang semakin memudahkan pelapor. ULT sangat mengharapkan para pelapor untuk tidak datang secara fisik ke pusat. Jika pelaporan dalam jaringan sudah tidak memungkinkan, maka pelapor dapat datang langsung ke Kemendikbud Jakarta. Hal ini semata-mata untuk memudahkan para pelapor, terutama yang berada di luar Jakarta.

Dalam melayani pelaku pendidikan yang mengurus berbagai keperluan, petugas ULT memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, sepenuh hati, dan tidak dipungut biaya. Kehadiran ULT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di Kemendikbud dilakukan secara transparan guna mencegah terjadinya pungutan liar. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan langsung dan prima, silahkan berkunjung ke ULT Kemendikbud. ■

Daftar Akronim

ACDP	: <i>Analytical and Capacity Development Partnership</i>
ADEM	: Afirmasi Pendidikan Menengah
AFI	: Apresiasi Film Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BBM	: Belajar Bersama Maestro
BPI	: Badan Perfilman Indonesia
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNB	: Balai Pelestarian Nilai Budaya
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
Dikdasmen	: Pendidikan dasar dan menengah
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
FFI	: Festival Film Indonesia
FKBM	: Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat
FLS2N	: Festival dan Loma Seni Siswa Nasional
GGD	: Guru Garis Depan
GLS	: Gerakan Literasi Sekolah
GNI	: Galeri Nasional Indonesia
GRNM	: Gerakan Nasional Revolusi Mental
GSMS	: Gerakan Seniman Masuk Sekolah
GTK	: Guru dan Tenaga Kependidikan
Hardiknas	: Hari Pendidikan Nasional
IIUN	: Indeks Integritas Ujian Nasional
INAP	: <i>Indonesia National Assessment Program</i>
Irjen	: Inspektur Jenderal
Itjen	: Inspektorat Jenderal
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KCM	: Kriteria Capaian Minimal
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKP	: Kawah Kepemimpinan Pelajar
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LAPOR	: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Laseda	: Lawatan Sejarah Daerah
LKAS	: Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LSF	: Lembaga Sensor Film
MA	: Madrasah Aliyah

Mendikbud	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
MOPD	: Masa Orientasi Peserta Didik
MOS	: Masa Orientasi Siswa
NGTK	: Neraca Guru dan Tenaga Pendidikan
NPD	: Neraca Pendidikan Daerah
O ₂ SN	: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
OASE KK	: Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja
OSN	: Olimpiade Sains Nasional
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBP	: Penumbuhan Budi Pekerti
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PIP	: Program Indonesia Pintar
PISA	: <i>Programme for International Assessment</i>
PKB	: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PLS	: Pengenalan Lingkungan Sekolah
PMK	: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RDA	: Revitalisasi Desa Adat
RKB	: Ruang Kelas Baru
RNPK	: Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
SBSNP	: Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
Sekjen	: Sekretariat Jenderal
Sesjen	: Sekretaris Jenderal
SGD	: Sekolah Garis Depan
SIMKEU	: Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan
SIMPEG	: Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian
SIMPROKA	: Sistem Pemantauan dan Pengendalian Luaran Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SM ₃ T	: Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
TBM	: Taman Bacaan Masyarakat
TNP ₂ K	: Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP ₂ K)
UBK	: Ujian Berbasis Komputer
UBKP	: Ujian Berbasis Kertas dan Pensil
UKG	: Ujian Kompetensi Guru
ULT	: Unit Layanan Terpadu
UN	: Ujian Nasional
UNESCO	: <i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
USB	: Unit Sekolah Baru
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WCF	: <i>World Culture Forum</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Kredit Foto

Halaman	Nama
Cover	Dokumentasi Kemendikbud
v	Azis Purwanto
x - 1	Azis Purwanto
2	Azis Purwanto
4 - 5	Dokumentasi Kemendikbud
6	Azis Purwanto
10 - 12	Dokumentasi Kemendikbud
15	Mohammad Adhila Nagaputra / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016
19	Dokumentasi Kemendikbud
20 - 25	Azis Purwanto
24 - 27	Dokumentasi Kemendikbud
32 - 33	Ismail Zakaria / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016
35 - 39	Dokumentasi Kemendikbud
40 - 41	Adinda Candra Dewi Louserina / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016
42	Azis Purwanto
43	Dokumentasi Kemendikbud
44 - 49	Azis Purwanto
50 - 52	Dokumentasi Kemendikbud
53	Azis Purwanto
54 - 65	Dokumentasi Kemendikbud

Halaman	Nama
70 – 73	Azis Purwanto
75	Dokumentasi Kemendikbud
77	Azis Purwanto
78	Azis Purwanto
79 – 109	Dokumentasi Kemendikbud
112 – 113	Fiqman Sunandar / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016
114	Azis Purwanto
115 – 117	Dokumentasi Kemendikbud
120 – 121	Azis Purwanto
123 – 150	Dokumentasi Kemendikbud
151	Azis Purwanto
155	Azis Purwanto
160	Dokumentasi Kemendikbud
165	Dokumentasi Kemendikbud
166 – 169	Azis Purwanto
170	Dokumentasi Kemendikbud
172	Dokumentasi Kemendikbud
178 – 179	Dokumentasi Kemendikbud
181	Dokumentasi Kemendikbud
187	Ade Chandra
188 – 189	Azis Purwanto

Terima Kasih



Tentu saja, laporan ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan banyak pihak.

Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada semua unit utama dalam lingkungan Kemendikbud.

Mereka adalah:

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Berkat kerja sama yang baik, kami bisa menulis laporan ini. Juga kepada para staf ahli, staf khusus, tenaga ahli Mendikbud dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN), serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kami.

Terima kasih.

Di Balik Layar

Penulisan buku “Kilasan Kinerja Kemendikbud 2016” ini adalah cermin kecil dari hasil kerja ribuan orang—sebuah *snapshot*, “jepretan” foto sederhana yang mencoba menangkap denyut keseharian sebuah kementerian yang mengemban tugas besar di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Apa yang dituliskan adalah sari dari pekerjaan berat dan besar yang dilakukan banyak pihak di kementerian ini. Tulisan ini hanya mencoba menangkap sekelumit dari kerja keras tersebut. Sebuah kilasan.

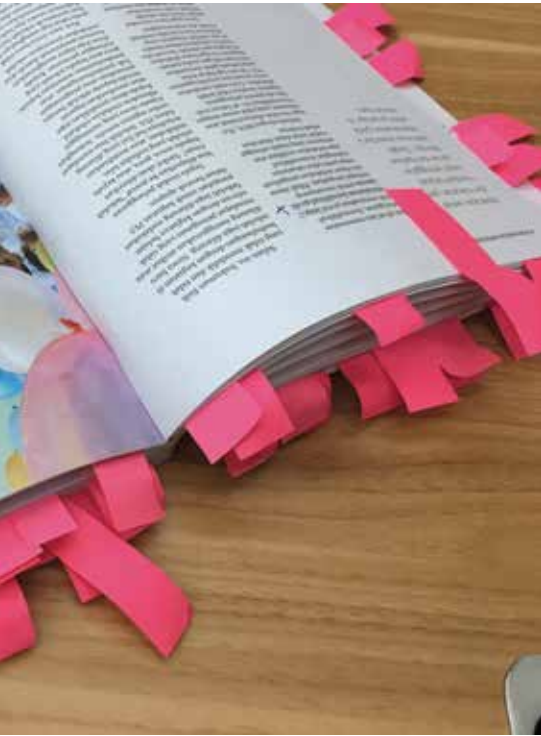
Selama lebih kurang 960 jam pengerjaan, melewati tumpukan data yang harus selalu dicek keakuratannya, berlomba dengan “garis mati” (*deadline*) yang enggan diajak kompromi, buku ini akhirnya rampung dan siap dibaca setiap orang.

Dukungan sangat besar diberikan oleh masing-masing unit utama untuk penyediaan data, informasi awal, dan foto-foto terkait topik penulisan. Maafkanlah, jika waktu yang sempit membuka celah kemungkinan munculnya ketidakakuratan, bahkan bahasa tulis yang mungkin terkesan tidak pas.

Namun demikian, lewat kerja keras semua pihak, sekitar 300 foto berhasil dikumpulkan dan dikurasi secara hati-hati, satu per satu. Tulisan-tulisan juga diulas berkali-kali oleh banyak pihak untuk memastikan kesesuaian dengan tema buku kilasan ini, yakni *Percepatan dan Keberlanjutan*.

Sampai jumpa di Kilasan Kinerja Kemendikbud tahun depan.







KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

